مفاهيم سياسية
لحزب التحرير

مفاهيم سياسية
لحزب التحرير

مــن منشــورات حــزب التحــرير

١٤٢٥ هـ —٢٠٠٥ م

(طبعــة معتمــدة)

Taquyiddin An-Nabhani

KONSEPSI POLITIK HIZBUT TAHRIR

(Edisi Mu'tamadah)

Dikeluarkan oleh:
HIZBUT TAHRIR
1425H - 2005M

HTI-Press
1430H - 2009M

Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hizbut Tahrir
Konsepsi Politik Hizbut Tahrir/Hizbut Tahrir; Penerjemah, M. Shiddiq Al-Jawi; Penyunting, Abu Fadhlan. Jakarta:Hizbut Tahrir Indonesia, 2009.
238 hlm; 20,5 cm

Judul Asli: *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir*
ISBN 979-97293-8-6

Konsepsi Politik Hizbut Tahrir.
I. Politik.II. M. Shiddiq Al-Jawi.III. Abu Fadhlan

Judul Asli : ***Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir***
Pengarang : **Hizbut Tahrir**
Dikeluarkan oleh **Hizbut Tahrir**
Cetakan I : **1969 M/1369 H**
Cetakan IV : **2005 M/1425 H**
Edisi Mu'tamadah

Edisi Bahasa Indonesia
Penerjemah : **M. Shiddiq al-Jawi**
Penyunting : **Abu Fadhlan**
Penata Letak : **Anwar**
Desain Sampul : **Solihan**

Penerbit : **Hizbut Tahrir Indonesia**
Kantor Dakwah Crown Palace A25
Jl. Prof. Soepomo Tebet, Jakarta Selatan
Telp/Fax : (62-21) 83787365

Cetakan 1, Jumadil Akhir 1427 H – Juni 2006 M
Cetakan 2, Rabi'ul Awwal 1428 H – Maret 2007 M
Cetakan 3, Shafar 1430 H – Februari 2009 M

DAFTAR ISI

MUKADIMAH

Politik adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri. Politik dilaksanakan oleh negara dan umat, karena negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi negara dalam pengaturan tersebut.

Pengaturan urusan umat di dalam negeri dilakukan oleh negara dengan menerapkan ideologi *(mabda)* di dalam negeri. Inilah yang dimaksud politik dalam negeri.

Adapun pengaturan urusan umat di luar negeri yang dilakukan negara adalah dengan mengadakan hubungan dengan berbagai negara, bangsa, dan umat lain, serta menyebarkan ideologi ke seluruh dunia. Inilah yang dimaksud politik luar negeri.

Memahami politik luar negeri adalah perkara yang penting untuk menjaga institusi negara dan umat, dan merupakan perkara mendasar agar mampu mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Juga merupakan aktivitas yang harus ada untuk mengatur hubungan umat Islam dengan umat lainnya dengan benar.

Tatkala umat Islam mempunyai tugas mengemban dakwah Islam kepada seluruh umat manusia, mereka harus melakukan kontak dengan dunia, dengan menyadari sepenuhnya keadaan-keadaan mereka, memahami problem-problemnya, mengetahui motif-motif politik berbagai negara dan bangsa, dan mengikuti aktivitas-aktivitas politik yang terjadi di dunia. Umat Islam juga harus memperhatikan *khithah* (rencana strategis) politik berbagai negara, tentang *uslub-uslub* (cara) mereka dalam mengimplementasikan *khithah* tersebut, tata cara mereka melakukan hubungan satu sama lain, dan manuver-manuver politik yang dilakukannya. Karena itu, umat Islam harus memahami hakikat konstelasi politik di Dunia Islam berdasarkan kerangka pemahaman tentang konstelasi internasional *(al-mauqif al-duali)*. Hal ini agar kaum Muslim dapat merumuskan secara teliti tatacara perjuangan *(uslub al-'amal)* untuk menegakkan negara mereka (Khilafah) dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.

Hanya saja, perlu dipahami dengan jelas bahwa konstelasi negara-negara tidaklah berada dalam satu keadaan yang permanen, tetapi berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi internasional.

Sesungguhnya konstelasi setiap negara tidak selamanya tetap dalam suatu keadaan di kancah internasional, tapi kondisinya selalu berubah-ubah; yaitu dari aspek kuat dan tidaknya, dari segi kuat dan lemahnya pengaruh, dan dari segi kualitas hubungan yang ada antar berbagai negara, dan pasang-surut hubungan-hubungan ini. Karena itu, tidak mungkin memberikan garis-garis besar yang permanen untuk konstelasi internasional serta memberikan konsep yang permanen mengenai konstelasi sebuah negara di dunia. Yang mungkin adalah memberikan suatu garis besar dari konstelasi internasional dalam jangka waktu tertentu, dengan memberikan gambaran kemungkinan perubahan konstelasi tersebut. Dimungkinkan pula memberikan konsep tertentu mengenai

konstelasi suatu negara dalam kondisi tertentu, dengan tetap menyadari adanya potensi perubahan pada konstelasi tersebut.

Maka dari itu, seorang politisi harus mengikuti aktivitas-aktivitas politik yang ada di dunia dan mengaitkannya dengan pengetahuannya yang terdahulu tentang politik. Hal ini harus dilakukan supaya dia dapat memahami politik dengan benar, mengetahui apa yang akan terjadi andai kata suatu konstelasi internasional tetap atau berubah, memahami konstelasi tiap negara serta mengetahui apakah konstelasi ini tetap seperti sedia kala atau telah mengalami perubahan.

Perubahan konstelasi internasional terjadi sesuai dengan perubahan konstelasi sebagian negara, dari satu kondisi menuju kondisi lain. Ini bisa terjadi karena kekuatannya, atau kelemahannya, atau karena kekuatan hubungannya dengan negara lain, atau kelemahan hubungannya tersebut. Dalam keadaan inilah dihasilkan perubahan perimbangan internasional, karena telah terjadi perubahan dalam perimbangan kekuatan yang ada di dunia.

Karena itu, memahami konstelasi setiap negara yang berpengaruh terhadap konstelasi internasional adalah hal mendasar untuk memahami konstelasi internasional. Dari sini, perhatian harus difokuskan pada penguasaan informasi-informasi setiap negara. Sebab, informasi-informasi itu merupakan pilar utama bagi pemahaman politik. Pengetahuan tentang konstelasi setiap negara tidak hanya terkait dengan posisi negara tersebut dalam konstelasi internasional, tetapi berhubungan pula dengan segala hal yang terkait dengan politik dalam dan luar negerinya.

Maka menjadi suatu keharusan untuk mengetahui pemikiran yang mendasari politik berbagai negara yang ada di dunia, serta hal-hal yang layak disebut posisi, yang seharusnya diambil oleh umat Islam. Sudah menjadi keharusan untuk mengetahui *khithah* dan *uslub* yang digunakan berbagai negara, serta membandingkan pengetahuan tentang berbagai *khithah* dan *uslub* politik yang ada dengan cara melakukan monitoring secara

terus menerus terhadap *khithah* dan *uslub* tersebut; menyadari motif-motif yang mendorong perubahannya, atau sebab-sebab yang memaksa negara-negara tersebut mengubah *khithah* dan *uslub* politiknya. Semua itu harus disertai pengetahuan yang benar tentang segala sesuatu yang mempengaruhi negara-negara itu, atau yang menyebabkannya mengubah *khithah* dan *uslub* politiknya.

***

POLITIK: FIKRAH DAN THARIQAH

Fikrah (konsep) yang mendasari politik suatu negara adalah pemikiran yang menjadi asas hubungan negara itu dengan berbagai bangsa dan negara lain. Negara-negara yang tidak mempunyai suatu ideologi yang dianut, *fikrah*-nya beragam dan bermacam-macam yang berpotensi untuk berubah. Negara-negara semacam ini lebih cocok dibahas dari segi *khithah* dan *uslub* politik. Tidak cocok dibahas dari segi *fikrah* politik.

Adapun negara-negara yang menganut suatu ideologi, *fikrah*-nya akan tetap dan tidak berubah-ubah, yaitu penyebarluasan ideologi yang dianutnya ke seluruh dunia dengan suatu *thariqah* (metoda) yang tetap, meskipun *uslub*-nya berbeda-beda dan berubah-ubah. Negara semacam ini cocok dibahas dari segi *fikrah* politik.

Berdasarkan hal ini, berbagai negara yang ada di dunia harus dilihat dengan pertimbangan, bahwa setiap negara mempunyai *fikrah asasiyah* (konsep dasar) untuk melakukan hubungan dengan bangsa dan negara lain, baik *fikrah* yang tetap maupun tidak; juga mempunyai *thariqah* tersendiri untuk

menerapkan *fikrah* tersebut, baik *thariqah* yang tetap maupun tidak tetap. Berdasarkan *fikrah* dan *thariqah* inilah, berbagai *khithah* politik itu dirancang, dan dijalankan dengan berbagai *uslub* politik, sedemikian rupa sehingga mendukung tercapainya tujuan. Akan tetapi, negara-negara yang ada di dunia saat ini telah membebaskan dirinya dalam membuat *uslub* politik, sehingga mereka menjalankan *uslub* yang dapat mewujudkan tujuan meskipun menyalahi *thariqah*-nya. Negara-negara tersebut telah mempraktikkan kaidah "tujuan menghalalkan segala cara".

Bagaimana pun juga, seluruh negara telah merancang *khithah* politik (*khiththah siyasiyah*) yang berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, serta menjalankan berbagai *uslub* politik yang berbeda-beda dan beragam sesuai dengan berbagai situasi dan kondisi.

Dalam aktivitas politiknya, negara hanya melakukan pengaturan berbagai kepentingan (*mashalih*) umat serta mengadakan hubungan dengan umat lainnya berdasarkan kepentingan umat tersebut. Namun demikian, negara-negara tersebut berbeda secara mendasar dalam melakukan aktivitas politiknya. Karena, bagi negara yang tidak mengemban ideologi tertentu, ia akan menjadikan kepentingan (*maslahat)*-nya sebagai satu-satunya faktor yang mempengaruhi hubungan internasionalnya. Adapun negara yang menganut sebuah ideologi dan mengemban ideologi tersebut ke seluruh dunia, ia akan menjadikan ideologinya sebagai faktor determinan dalam hubungan internasionalnya.

Karena itu, sebuah negara harus diidentifikasi dari aspek pemikiran yang dianutnya, apakah negara tersebut menganut ideologi atau tidak? Pada saat itulah akan dapat dikenali faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan internasionalnya. Mengingat ideologi adalah aspek yang akan berpengaruh terhadap negara yang menganutnya, dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap hubungan internasional serta posisi internasionalnya. Karena itu, ideologi-ideologi yang memimpin dunia saat ini harus diketahui. Harus diketahui pula kadar pengaruh setiap ideologi terhadap politik

internasional saat ini dan sejauh mana kemungkinan pengaruhnya terhadap politik internasional di masa sekarang dan di masa mendatang. Pada saat itulah hubungan internasional berdasarkan ideologi-ideologi ini akan dapat dipahami , dan sejauh mana pengaruhnya pada saat ini dan masa yang akan datang.

Jika kita perhatikan, dunia saat ini hanya dipimpin oleh tiga ideologi; yaitu Islam, Komunisme, dan Kapitalisme. Masing-masing ideologi ini dianut oleh ratusan juta jiwa manusia. Hanya saja, untuk saat ini Islam tidak mempunyai negara. Maka kita tidak akan menemukan ujud Islam sedikit pun dalam hubungan internasional, dan dalam konstelasi internasional yang memimpin dunia saat ini. Adapun aktivitas-aktivitas yang dilakukan berbagai negara untuk menghalangi kembalinya Daulah Islam dalam realitas kehidupan —setelah geliat umat mulai dirasakan oleh segenap umat Islam— tidak ada hubungannya dengan konstelasi internasional dan tidak berpengaruh pula terhadap hubungan internasional. Sebab, pengaruh terhadap konstelasi dan hubungan internasional menuntut adanya sebuah negara yang mengemban Islam sebagai ideologi yang akan mengendalikan politik dalam dan luar negeri negara tersebut berdasarkan ideologinya.

Mengenai apa yang menarik perhatian, yaitu orientasi politik internasional, khususnya Amerika Serikat, untuk mencoba membentuk kawasan Islam dengan rencana-rencana hegemonik terhadapnya, seperti *Rencana Timur Tengah Raya* pada tahun 2003, maka itu adalah akibat dari kekhawatiran yang terus meningkat di negara-negara kawasan tersebut, karena diprediksi sebuah negara kaum Muslim (Khilafah) akan segera berdiri. Itu bukan berarti Islam berpengaruh terhadap politik internasional dalam pengertian yang telah dikenal sebagaimana ketika Islam mempunyai sebuah negara secara nyata.

Sedangkan dua ideologi lainnya, masing-masing mempunyai sebuah negara atau bahkan banyak negara. Karena itulah, kedua ideologi itu mempunyai pengaruh terhadap hubungan internasional, posisi internasional, dan politik internasional, khususnya ketika Uni

Soviet masih ada, sebelum kejatuhannya. Pengaruh kedua ideologi tersebut, antara lain, adalah terbaginya dunia menjadi dua blok, yaitu Blok Timur dan Barat. Tetapi, setelah runtuhnya Uni Soviet dan terpecah-belahnya Pakta Warsawa, berakhirlah politik bipolar (dwi-kutub) di dunia. Ideologi komunisme tidak lagi diterapkan di sebuah negara walaupun sekadar formalitas, kecuali di Cina dan Korea Utara. Maka, setelah itu berakhirlah konflik yang semula berskala internasional menjadi regional. Sebab, dengan runtuhnya Uni Soviet, konsep sosialisme tidak lagi berpengaruh terhadap politik internasional. Hal itu terpulang pada fakta bahwa konsep yang mendasari politik luar negerinya, yaitu penyebaran komunisme, tidak lagi diterapkan. Adapun negara-negara yang tetap mengemban ideologi komunisme, politik luar negerinya tidaklah didasarkan pada konsep tersebut. Politik Cina tidak didasarkan pada penyebarluasan komunisme ke seluruh dunia. Karena, faktanya bangsa Cina mencukupkan diri dengan pengaruhnya di sekitar Asia saja. Sepanjang sejarah bangsa Cina, mereka tidak pernah berambisi untuk mempunyai pengaruh yang mendunia. Disebabkan oleh kenyataan bangsa Cina ini, Cina tidak pernah berusaha sedikit pun untuk menyiapkan diri dan kekuatannya agar mempunyai kedudukan yang berpengaruh dalam politik internasional. Setiap aktivitas politik Cina tetap terfokus pada perwujudan pengaruh regionalnya di antara negara-negara tetangganya.

Adapun Blok Kapitalis, *fikrah* yang mendasari politiknya adalah penyebaran ideologi kapitalisme; yakni pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme) ke seluruh dunia. Meskipun ada banyak negara yang menganut ideologi kapitalisme dan ada perbedaan di antara mereka, tapi semuanya bermaksud menyebarkan kepemimpinan ideologi kapitalisme di dunia dan menjadikan pandangan hidupnya sebagai pemikiran yang memimpin dunia.

Adapun *thariqah* yang dijalankan oleh Blok Kapitalis untuk mengimplementasikan *fikrah*-nya, adalah dengan penjajahan (imperialisme), yaitu pemaksaan dominasi politik, militer, budaya,

dan ekonomi atas bangsa-bangsa yang dikuasai untuk dieksploitasi. *Thariqah* ini, yaitu penjajahan, bersifat tetap dan tidak berubah-ubah meskipun terjadi perubahan rejim-rejim kekekuasaan dan pergantian undang-undang. Penjajahan itu bukanlah seperti kata Lenin, yakni "tahapan tertinggi di antara tahapan-tahapan kapitalisme", melainkan bagian integral dari pandangan hidup kapitalisme. Penjajahan adalah *thariqah* yang telah menjadikan kapitalisme tersebar luas di berbagai bangsa dan umat. Maka dari itu, politik luar negeri Blok Kapitalis bersifat tetap dalam *fikrah* dan *thariqah*-nya. Tidak berubah mengikuti perubahan negara dan persaingan antar negara. Maka, Inggris sama saja dengan AS, Perancis, Italia, dan negara mana pun dari negara-negara kapitalis. Asas politiknya adalah penyebarluasan ideologi dan pandangan hidupnya dalam kehidupan, dengan jalan penjajahan atas berbagai bangsa dan umat.

Perlu diperhatikan ketika kita memahami *thariqah* Blok Barat, bahwa *thariqah* ini, meskipun bersifat tetap dari segi faktanya (penjajahan), tetapi *uslub-uslub* untuk mewujudkan penjajahan dan pandangan terhadapnya telah mengalami sedikit perkembangan di kalangan Blok Barat. Perkembangan yang dimaksud adalah dari segi keterkaitan penjajahan (sebagai *thariqah*) dengan kapitalisme (sebagai *fikrah*) yang berkembang sesuai zaman. Di antara perkembangannya adalah perubahan *uslub* penjajahan dan perbedaan dalam memandang penjajahan.

Mengenai perubahan *uslub* penjajahan, telah dikenal apa yang dinamakan "penjajahan gaya lama" yang terpusat pada dominasi militer. Kemudian berkembang menjadi apa yang dinamakan "penjajahan gaya baru (neo imperialisme)" yang bertumpu pada hal-hal lain. AS bertumpu pada aspek ekonomi, semisal utang luar negeri dan apa yang dinamakan "rencana pembangunan", para ahli (*expert*), dan lain-lain, di samping tekanan politik dan embargo-embargo. Kemudian, di samping cara-cara tadi, AS kembali pada cara dominasi militer atas berbagai bangsa dan umat untuk menundukkan mereka di bawah

pengaruh dan kehendaknya. AS kembali berambisi membangun pangkalan-pangkalan militer di negara-negara jajahannya untuk menjaga pengaruhnya di negara-negara jajahannya itu. Sementara Inggris bertumpu pada perekrutan orang-orang yang akan menjadi agen-agennya, juga bertumpu pada agen-agen intelijen Inggris, para penguasa negeri-negeri yang menjadi agen-agennya, dan perjanjian-perjanjian dagang yang samar (multi interpretasi). Inggris tidak mampu lagi mengandalkan pemberian utang luar negeri karena kondisi keuangannya yang lemah. Demikian pula Inggris tidak mampu mengandalkan pangkalan-pangkalan militer karena pengaruh internasionalnya yang lemah, meskipun Inggris terus bergantung pada pasukan-pasukan penjaga dan pangkalan-pangkalan militer di negara-negara jajahannya seperti halnya di Siprus atau di dekat negara-negara jajahannya. Dengan demikian, perubahan *uslub* penjajahan adalah karakter yang selalu melekat pada penjajahan.

Adapun perbedaan cara pandang terhadap penjajahan, maka keterkaitan penjajahan (sebagai *thariqah*) dengan kapitalisme (sebagai *fikrah*) berkisar di antara dua fakta berikut. *Pertama*, kuatnya keterkaitan ini, yaitu bahwa penjajahan hanya menjadi *thariqah* untuk menyebarkan kapitalisme, yang berarti bahwa fokus perhatian utama adalah penyebaran kapitalisme. *Kedua,* lemahnya keterkaitan ini, yakni bahwa fokus perhatian utama adalah penjajahan itu sendiri. Sedang fokus perhatian kedua adalah penyebaran kapitalisme. Jadi seakan-akan penjajahan lebih dekat sebagai tujuan daripada sebagai *thariqah*.

Kuat lemahnya keterkaitan ini bergantung pada keadaan negeri-negeri yang hendak didominasi oleh negara-negara kapitalis. Yaitu apakah negeri-negeri itu mempunyai peradaban yang hendak diperangi oleh negara-negara kapitalis dan perlu dimasuki peradaban kapitalisme yang rusak agar mudah didominasi dan dirampok kekayaan alamnya? Ataukah negeri-negeri itu kosong melompong tanpa ada peradaban di dalamnya yang perlu diperangi, sehingga hanya perlu dijajah, dirampas

kekayaannya, dan didominasi? Inilah yang dapat menjelaskan mengapa konflik negara-negara Barat dalam penjajahannya di Afrika mengambil cara eksploitasi dan hampir-hampir penyebaran kapitalisme tidak terlihat wujudnya. Perang saudara di Uganda dan Ruwanda telah berlangsung bertahun-tahun serta telah memakan ratusan ribu korban jiwa. Demikian pula peristiwa-peristiwa di Zaire (Kongo Demokratik) tidak menampakkan apa-apa kecuali kerakusan materi dan konflik perebutan pengaruh antara Eropa dan AS. Inggris dan sekutu-sekutu Eropanya, demikian juga AS, tidak menaruh perhatian pada apa pun di Afrika, kecuali pada keuntungan-keuntungan material. Karena itu, penjajahan di Afrika lebih dekat sebagai tujuan daripada sebagai *thariqah*.

Adapun di Dunia Islam, di Timur Tengah dan Afrika Utara, atau di Asia Tengah dan Asia Tenggara, maka negara-negara penjajah —di bawah pimpinan AS— di samping memaksakan dominasi politik, militer, dan ekonomi di Dunia Islam untuk mengeksploitasi manfaat-manfaat materialnya, juga berupaya untuk menyebarkan kapitalisme pada banyak bidang. Misalnya perhatian negara-negara penjajah terhadap konferensi-konferensi seperti "konferensi emansipasi" dan "kesetaraan gender". Demikian pula adanya rencana AS untuk Timur Tengah, pemaksaan dominasi budaya pada apa yang dikenal dengan "rekonstruksi peradaban", "dialog antar agama", "titik temu peradaban", dan upaya intensif mengubah atau mengganti kurikulum pendidikan untuk memutuskan keterikatan kaum Muslim dengan peradaban dan budaya mereka. Demikianlah, *thariqah* dalam kapitalisme telah berkembang sesuai zaman. Meski demikian, penjajahan adalah hal mendasar dalam kapitalisme, baik sebagai *thariqah* penyebaran kapitalisme maupun sebagai *tahriqah* yang lebih dekat kepada tujuan.

***

KHITHAH DAN USLUB POLITIK

Khithah politik (*al-khiththah al-siyasiyah*) dan *uslub* politik (*al-uslub al-siyasi*) yang digunakan untuk mengimplementasikan *khithah* politik tersebut, dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan kepentingan. Meskipun perubahan *khithah* politik lebih jarang daripada perubahan *uslub* politik. Perbedaan antara *khithah* politik dan *uslub* politik, sebagaimana dapat diperhatikan dalam politik internasional, adalah bahwa *khithah* politik merupakan politik umum yang dirancang guna mewujudkan salah satu tujuan yang dituntut oleh penyebaran ideologi atau oleh *thariqah* penyebaran ideologi. Sedangkan *uslub* politik adalah politik khusus mengenai salah satu bagian langkah yang mendukung perwujudan atau pengokohan *khithah* politik.

Misalnya, *khithah* politik AS terhadap Irak adalah menduduki Irak dengan atau tanpa resolusi internasional, lalu mewujudkan pemerintahan yang melegitimasi pendudukan melalui pengesahan internasional dari PBB, setelah AS mengabaikan PBB pada awal pendudukannya. Pemerintahan itu juga akan memberi legitimasi lain (yang bersifat lokal) melalui

pemilu atau semacam pemilu Irak. Kemudian pemerintahan ini, sebagai wakil rakyat Irak, akan menandatangani cek persetujuan terhadap keberlangsungan kekuatan pendudukan, hingga pendudukan itu menjadi sah karena keberadaannya telah didasarkan pada persetujuan rakyat negeri Irak, tuntutan mereka, dan resolusi internasional.

Hal ini akan menjauhkan negara-negara lain dan Dewan Keamanan PBB untuk mengintervensi masalah Irak, dan menjadikan AS sebagai satu-satunya pengelola segala urusan Irak. Dengan demikian, hal ini akan menyempurnakan legalitas pendudukan. Sebab, yang mengakui keberlangsungan pendudukan dan keberadaan pendudukan adalah pemerintahan resmi Irak (yang dipilih lewat pemilu). Lalu, akan dibuat konstitusi baru untuk Irak di bawah pengawasan pendudukan yang akan melanggengkan perpecahan, memecah belah negara dengan dalih federalisme, dan mengobarkan sentimen kelompok. Kaum Muslim pun akan sibuk sendiri bermusuhan satu sama lain, padahal seharusnya mereka sibuk mengusir pendudukan. Karena itu, AS mengontrol segala macam cara dan sarana yang dimampuinya untuk menduduki Irak, seperti merancang *khithah* politik, kemudian menjadikan pendudukan ini legal dengan pengesahan formal dari undang-undang internasional dan lokal.

Sebaliknya, *khithah* politik Perancis adalah membentuk poros negara-negara adi daya di bawah kepemimpinan Perancis untuk menghadapi dan mengagalkan *khithah* politik AS. Yaitu dengan merekayasa hambatan dari Dewan Keamanan PBB melalui keluarnya resolusi-resolusi yang eksplisit untuk mengagalkan rencana-rencana AS yang berkaitan dengan pemanfaatan Dewan Keamanan PBB untuk memerangi Irak. Dengan demikian, AS benar-benar tidak mampu merekayasa resolusi Dewan Keamanan PBB dan AS benar-benar ditelanjangi secara internasional sebagai negara yang bertindak inkonsitusional. AS terlihat sebagai negara yang menggunakan kekuatan

sewenang-wenang secara inkonstitusional, bukan negara yang terlihat sebagai penjaga Undang-undang Internasional sebagaimana kesan yang nampak terhadap AS sebelumnya. Perancis mampu menggerakkan dan membangkitkan emosi Jerman, dalam kadar yang menggelisahkan AS, atas tindakan-tindakan Jerman. Rusia juga memihak Perancis dalam penentangannya terhadap AS yang hendak memanfaatkan Dewan Keamanan PBB untuk mendukung rencana-rencana AS. Demikianlah, Perancis telah berhasil menjalankan *khithah* politiknya, bukan untuk mencegah serangan AS, melainkan untuk membongkar target-target AS dalam perang ini.

Sedangkan *khithah* politik Inggris, adalah *khithah* politik yang kompleks sekaligus jahat. Inggris mendukung AS secara lahiriah agar dapat bersekutu dengan AS menikmati harta rampasan perang. Inggris menampakkan diri di pihak AS dalam kancah internasional, jika neraca politik AS lebih kuat. Namun Inggris akan mengecam AS secara terbuka jika ada peluang baginya untuk melakukan kecaman. Jadi, Inggris berjalan di pihak AS, karena neraca politik AS lebih kuat dalam konstelasi internasional. Tapi di sisi lain, Inggris mendesak AS untuk meminta keluarnya resolusi PBB sehubungan dengan invasi AS ke Irak. Padahal Inggris sebelumnya sudah mengetahui resolusi itu tidak mungkin keluar akibat posisi Perancis, Rusia, dan Jerman. Dengan demikian, terbongkarlah aib AS bahwa AS hendak menyerang Irak dengan atau tanpa resolusi. Inggris menegaskan sikapnya ini dengan kehadiran Tony Blair dalam pertemuan KTT dengan Jacques Chirac dan Gerhard Schroeder pada 20 September 2003. Inggris menggunakan kecerdikan politiknya untuk menguatkan dan meneguhkan posisi kedua negara terhadap AS. Inggris memprovokasi Perancis dan Jerman dengan mengajukan beberapa opininya, sehingga mendorong Perancis dan Jerman semakin bersikap keras, tapi Inggris tidak menampakkan sikapnya secara terbuka di hadapan AS. Inggris terus menjalankan politiknya itu hingga pasca pendudukan Irak

dan setelah AS mengajukan berbagai rencana untuk mengesahkan pendudukan.

Contoh lain *khithah* politik AS yaitu rencana AS untuk mencegah Uni Eropa menjadi satu kelompok yang membahayakan AS. *Khithah* politik itu didasarkan pada tiga poros langkah berikut :

Pertama, memperluas keanggotaan Uni Eropa dengan negara-negara Eropa Timur. Padahal negara-negara tersebut adalah rekayasa AS dan menjadi ujung tombak AS untuk memasukkan pengaruh AS terhadap Uni Eropa. Ini terbukti ketika negara-negara Eropa Timur itu mendukung AS dalam invasinya ke Irak, suatu hal yang membuat Rumsfled mengolok-olok Eropa dengan sebutan "Eropa Kuno" dan "Eropa Baru". Presiden Perancis, Jacques Chirac, sangat marah melihat tindakan negara-negara tersebut. Perancis diam-diam berupaya mempengaruhi negara-negara tersebut dengan mengatakan bahwa bergabung dengan barisan AS akan mempersulit mereka dalam penerimaan akhir sebagai anggota Uni Eropa. Meski demikian, Perancis mengakui bergabungnya negara-negara itu dalam pertemuan Uni Eropa yang memutuskan penerimaan anggota-anggota baru. Perancis tidak berhasil menggagalkan penggabungan tersebut.

Kedua, meneruskan keberadaan NATO meskipun NATO telah menggantikan posisi Pakta Warsawa yang telah surut, kemudian memperluas strategi NATO untuk terlibat dalam problem-problem internal keamanan Eropa; tidak seperti sebelumnya, yaitu terlibat dalam pertahanan luar negeri sebagaimana tugas dasar NATO sejak kelahirannya. Ketika Eropa merasakan bahaya NATO atas mereka –karena kepemimpinan AS yang nyata atas NATO— maka Perancis, Jerman, Belgia, dan Luxemburg menyerukan pembentukan kekuatan militer khusus Eropa. AS pun menentang rencana itu. AS terus menerus membuat rintangan-rintangan sebelum terwujudnya kekuatan khusus Eropa itu secara nyata.

Ketiga, AS memanfaatkan posisi Inggris. Dengan kecerdikan politiknya yang telah masyhur, Inggris tidak menghendaki Uni Eropa menjadi satu kekuatan yang secara perlahan-lahan justru akan melemahkan Inggris. Inggris juga tidak ingin menjadi negara pinggiran seperti Luxemburg misalnya. Dalam lubuk hatinya, Inggris masih terus memimpikan kebesaran imperiumnya di masa lalu yang matahari tak pernah tenggelam di atas jajahannya. Karenanya, kita melihat Inggris selalu menghalangi pembentukan Uni Eropa. Inggris tidak masuk ke dalam Uni Eropa kecuali setelah Uni Eropa menjadi suatu kenyataan. Inggris lalu masuk ke dalam Uni Eropa justru untuk melemahkannya. Inggris sampai sekarang tetap tidak mau bergabung dalam mata uang bersatu (Euro). Pola pikir sebagai imperium yang dimiliki Inggris membuatnya selalu mencari peran untuk berkiprah di arena internasional dengan jalan apapun yang dapat ditemukannya.

Sebaliknya, *khithah* politik Perancis adalah memperkuat Uni Eropa dan menjadikannya payung yang sepadan untuk menghadapi payung AS. Perancis juga berupaya membentuk kekuatan militer Eropa yang lepas dari NATO. Perancis berhasil mendapat dukungan kuat Jerman untuk tujuan tersebut. Perancis dalam hal ini telah melakukan langkah politik yang sangat cerdas dengan mendapat persetujuan Jerman, sehingga mau tak mau Inggris bergabung dengan keduanya agar Inggris tidak terluput dari bagian rampasan perang jika upaya Perancis dan Jerman sukses. Demikianlah, Perancis belakangan ini bersama Inggris dan Jerman telah berhasil meletakkan dasar-dasar kekuatan militer Eropa. Demikian pula ketiga negara itu telah berhasil merancang strategi jangka panjang Uni Eropa, untuk menjauhkan campur tangan negara-negara kecil atas Uni Eropa dan juga campur tangan negara-negara yang berambisi mempengaruhi Uni Eropa seperti Italia dan Spanyol.

Demikianlah, Perancis telah berhasil menciptakan jalan masuk (ke arena internasional), meskipun pada awalnya dimaksudkan untuk memperkuat Uni Eropa dengan membentuk

cikal bakal kekuatan militer yang independen di Eropa dengan persetujuan Jerman dan Inggris. Andaikata negara-negara kapitalis tidak memeluk kapitalisme yang menjadikan "manfaat individu" sebagai prioritas nilai setiap negara, niscaya mereka akan dapat mewujudkan sebuah Uni Eropa yang kuat di hadapan AS. Meski demikian, keberhasilan Perancis dalam mengajukan *khithah* politiknya kepada dua negara kuat Eropa (Jerman dan Inggris) dapat dianggap tindakan berpengaruh di hadapan AS, yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh AS.

Contoh lain adalah *khithah* politik yang dirancang AS untuk membelenggu Rusia dan menjadikannya sebuah negara yang tidak mempunyai pengaruh walau hanya pengaruh regional. *Khithah* politik itu didasarkan pada upaya menyingkirkan Rusia dari wilayah-wilayah yang dipengaruhinya di Balkan, Eropa Timur, dan Asia Tengah. Juga dilakukan dengan cara menonaktifkan galangan kapal nuklir Rusia yang menjadi salah satu faktor penting kekuatan Rusia. Di samping itu, AS juga menunjukkan keunggulannya atas Rusia dalam Perang Bintang (*Star War*).

AS lalu mengambil beberapa *uslub* politik untuk mewujudkan *khithah* politik tersebut. Antara lain AS memukul pasukan Yugoslavia (Serbia dan Motenegro) yang mempunyai hubungan lama dengan Rusia dan mengobarkan Krisis Kosovo. AS juga mengadakan hubungan ekonomi dan militer dengan negara-negara Eropa Timur untuk dijadikan pintu masuk pengaruh AS. AS juga menggabungkan banyak negara Eropa Timur tersebut ke dalam NATO. Demikian pula AS mengobarkan perang atas terorisme lalu membangun pangkalan militernya di negara-negara Asia Tengah, setelah AS berhasil mengajak penguasa negara-negara Asia Tengah untuk berpihak pada AS dengan cara memberi bantuan-bantuan ekonomi. AS juga menduduki Afghanistan dan mengembangkan sistem pertahanan rudal anti-rudal, untuk menonaktifkan rudal antar benua milik Rusia yang mampu membawa hulu ledak nuklir. AS juga telah mampu mengeskploitasi kemiskinan di Georgia agar para agennya dapat hadir dalam KTT Al-Harm, yaitu suatu tempat yang terletak

di kawasan terpencil antara Rusia dan markas NATO di Turki. AS juga telah meyakinkan Rusia untuk menjatuhkan stasiun ruang angkasanya (Mir) dan bekerjasama di stasiun angkasa luar (ISS) untuk membatasi keunggulan Rusia dalam perlombaan senjata ruang angkasa. Demikianlah, AS terus menjalankan *khithah* politiknya untuk membatasi Rusia agar tetap menjadi negara yang tidak berpengaruh secara regional, setelah sebelumnya dihapuskan pengaruh internasionalnya dengan runtuhnya Uni Soviet.

Demikian pula keadaan Cina. Sebab, AS melihat bahwa Cina harus ditundukkan dan dijadikan negara biasa, terutama karena Cina dulunya tidak mempunyai faktor-faktor pendukung sebuah negara besar. Tetapi pada pertengahan tahun 90-an, Cina menampakkan kekuatan yang dimilikinya sebagai negara besar regional dengan hak veto di Dewan Keamanan, serta mempunyai keinginan dan ambisi regional. Ini tidak disenangi AS. Sebab, dalam pandangan AS, Cina adalah pasar perdagangan besar yang harus dimanfaatkan dengan jumlah populasi manusia yang besar; yang harus dimanfaatkan pula agar tidak menjadi bahaya yang mengancam kepentingan AS di kawasan Asia Timur. Karena itu, AS harus menyusun *khithah* politik pasca Perang Dingin untuk membelenggu Cina dan membatasinya, setidak-tidaknya pada lapangan geraknya yang sempit, jika tidak mampu menghapus lapangan geraknya secara total. Maka dari itu, fokus AS adalah mengesahkan hubungan dengan Vietnam agar Vietnam menjadi batu sandungan di hadapan Cina pada saat hubungan AS dan Vietnam membaik. Demikian pula AS mencoba menjadikan Semenanjung Korea sebagai pusat bahaya terdepan bagi Cina dengan meningkatkan tekanan atas Korea Utara dengan dalih telah menjadi poros kejahatan (*evil axis*). Pada saat yang sama, AS berupaya mempertahankan pangkalan-pangkalan militernya di sana yang berdekatan dengan tapal batas Cina dan berada di depan pintu Cina. AS juga berusaha menjadikan India sebagai sekutu Cina, dan berupaya pula untuk membentuk persekutuan

strategis dan perjanjian militer regional di Asia Tengah dan Timur Tengah. AS juga membangun pangkalan-pangkalan militer di Asia Tengah di tapal batas Cina Barat di sisi lain gunung Himalaya.

Demikianlah, bahwa *khithah* dan *uslub* politik dirancang untuk melakukan aktivitas politik secara langsung. Meskipun demikian, negara masih dapat mengubah *uslub-uslub* yang ada, menukarnya dengan *uslub* lainnya jika terbongkar dan tidak mengantarkan pada target yang dikehendaki. Demikaian pula negara dapat mengubah satu *khithah* politik jika tidak efektif, atau jika keberadaan *khithah* politik itu akan membebani negara dengan berbagai kesulitan yang bukan menjadi kepentingan negara. Tetapi, ketika sebuah negara mengubah *khithah* politiknya, negara menggantikannya dengan *khithah* politik lain, dan ketika negara itu mengubah *uslub* politiknya, ia membuat *uslub* lain sebagai gantinya. Sebuah negara tidak akan berdiam diri dari merancang *khithah* dan *uslub* politik, kecuali jika negara itu telah lemah atau merosot dari kedudukannya dalam konstelasi internasional. Hal ini seperti keadaan beberapa negara yang telah kehilangan efektifitas politiknya sejak beberapa lama, seperti Jepang, Italia, Belanda, Belgia, Spanyol, dan Portugal.

Contoh perubahan *khithah* politik, adalah apa yang diperbuat AS dalam *khithah* politik yang dirancangnya untuk Jerman. Dahulu, *khithah* politik AS adalah membangkitkan militerisme Jerman dan mendirikan Republik Jerman Barat. *Khithah* politik AS itu kemudian berubah, yaitu melemahkan Jerman Barat dan membentuk persatuan Jerman Barat dan Jerman Timur dan membatasi persenjataan Jerman. Kemudian AS melihat pula bahwa penyatuan Jerman Barat dan Timur, tahun 1990, akan dapat mewujudkan sebuah negara Eropa yang kuat yang akan bersaing dengan Perancis dan Inggris dan berlomba dengan keduanya untuk mempimpin Uni Eropa. Dengan demikian, AS telah melemahkan peluang penyatuan Eropa menjadi satu kekuatan yang solid.

Demikian pula *khithah* politik yang dibuat AS untuk Cina. Sebelumnya AS melihat bahwa AS harus mendukung Cina dan menjadikannya satu kutub internasional, memperbaiki hubungannya dengan Cina, dan memperbaiki hubungan Cina dengan Jepang untuk dijadikan salah satu basis tata dunia (*world order*). Ini dilakukan untuk melemahkan posisi internasional Uni Soviet pada saat itu, dan untuk meningkatkan keretakan di antara dua sekutu komunis (Uni Soviet dan Cina) yang menjadi musuh bebuyutan AS. Tapi, setelah berakhirnya masa Perang Dingin, AS mengubah *khithah* politiknya dan melihat bahwa kondisi sekarang menuntut pembuatan *khithah* politik untuk membelenggu Cina dan mengembalikannya di belakang Tembok Besar Cina. AS lalu membuat suatu *khithah* politik agar Cina tidak menjadi bahaya bagi kepentingan-kepentingan AS di Asia Timur, terutama karena Cina memiliki faktor-faktor yang memungkinkannya untuk itu.

Contoh perubahan *uslub* politik, adalah apa yang telah dilakukan AS di negeri-negeri Dunia Islam. Sebelumnya AS bertumpu pada revolusi-revolusi militer untuk mengantar agen-agennya ke tampuk kekuasaan, juga bantuan-bantuan ekonomi, seperti utang luar negeri dan apa yang dinamakan "rencana pembangunan", para ahli, dan sebagainya, juga apa yang dinamakan politik *stick and carrot*. Sekarang, AS bersandar pada solusi-solusi militer dan intimidasi, dan kembali bersandar pada berbagai pakta dan pangkalan militer, setelah sebelumnya tidak menggunakan cara-cara tersebut. Hal ini mengembalikan ingatan kita pada era penjajahan militer dan imperium Barat.

Dulu Inggris telah mengubah *uslub* politiknya sehingga Inggris meninggalkan pakta dan pangkalan militer, lalu bertumpu pada agen-agennya dari kalangan penguasa serta kesepakatan-kesepakatan ekonomi dan persenjataan. Sekarang, Inggris terlihat berjalan bersama rombongan AS dan kembali pada cara pembangunan pangkalan militer sebagai cara baru yang sebenarnya lama.

Inilah penjelasan tentang *khithah* dan *uslub* politik. Atas dasar itu, kaum Muslim wajib mengetahui dengan penuh keyakinan, bahwa Barat tidak akan mengubah *fikrah* dan *thariqah* politiknya, tapi akan mengubah *khithah* dan *uslub* politiknya untuk merancang *khithah* politik lain atau *uslub* politik baru, agar Barat dapat menyebarkan ideologinya. Jika *uslub* politiknya dapat dihancurkan, akan hancur *khithah* politiknya dan akan gagal pula rencana-rencana Barat yang telah disusun atas dasar *khithah* dan *uslub* politiknya itu.

Maka dari itu, perjuangan politik (*al-kifah al-siyasi*) diarahkan untuk *khithah* dan *uslub* politik (dengan membongkar dan melawannya), dan pada saat yang sama diarahkan untuk memerangi *fikrah* dan *thariqah* politiknya. Atas dasar itu, sudah menjadi kepastian bagi kaum Muslim untuk mengetahui *khithah* politik yang telah dirancang bagi politik tiap negara dan mengkaji *uslub- uslub* politiknya dengan seksama.

KONSTELASI INTERNASIONAL

Memahami konstelasi internasional (*al-mauqif al-duali*) berbeda dengan memahami politik setiap negara. Sebab, memahami politik setiap negara yang berpengaruh itu berkaitan dengan pemahaman tentang *fikrah* dan *thariqah* yang menjadi asas politik negara itu, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Konstelasi internasional adalah struktur hubungan-hubungan internasional yang berpengaruh, yaitu keadaan yang melingkupi negara pertama dan negara-negara yang bersaing dengannya. Konstelasi internasional ini, tidak berkaitan dengan *fikrah* dan *thariqah* politik, tapi berkaitan dengan hubungan internasional dan persaingan permanen antar negara untuk meraih kedudukan negara pertama dan untuk mempengaruhi politik internasional. Karena itu, konstelasi internasional harus dipahami dengan baik.

Tapi harus jelas, bahwa konstelasi internasional tidaklah besifat tetap, melainkan berubah dan berganti sesuai dengan berbagai situasi, kondisi, dan peristiwa dunia. Kendati demikiran, dimungkinkan memberi gambaran yang jelas tentangnya,

memberikan garis-garis besarnya, dan memberikan rincian keadaan-keadaannya. Namun, semua itu hanya menunjukkan keadaan konstelasi internasional yang nampak pada saat dideskripsikan, sehingga deskripsi itu cocok dengan fakta yang ada. Ketika konstelasi internasional telah berubah, bukan berarti deskripsi yang diberikan itu tidak benar, melainkan hanya merupakan deskripsi sesuatu yang ada kemudian lenyap, sehingga deksripsi itu menjadi salah satu bagian sejarah dan sudah pasti harus harus diberikan deskripsi atas fakta yang sedang berjalan, yaitu konstelasi internasional yang baru.

Maka dari itu, deskripsi yang hendak kami paparkan dengan melukiskan gambaran konstelasi internasional, atau memberikan garis-garis besarnya, atau menyinggung rincian-rinciannya, hanyalah deskripsi tentang fakta yang telah terjadi sebelumnya, atau yang sedang terjadi saat ini, atau yang diprediksikan akan terjadi di masa datang. Meskipun demikian, penjelasan itu tidak dianggap suatu hal yang tetap. Karenanya, seorang politisi harus mempunyai informasi-informasi terdahulu tentang konstelasi internasional dan politik intenasional, lalu mengaitkannya dengan apa yang dia saksikan, hingga dia memperoleh kejelasan mengenai segala sesuatunya dan dapat memberikan penilaian terhadapnya.

Memahami konstelasi internasional, menuntut kaum Muslim untuk mengetahui kedudukan negara pertama (*al-daulah al-ula*) di dunia dan kedudukan negara-negara lain terhadap negara pertama tadi dan terhadap politik internasional. Juga menuntut kaum Muslim untuk mengetahui kedudukan negara pengikut (*al-daulah al-tabi'ah*), negara satelit (*al-daulah allati fi al-falak*), dan negara independen (*al-daulah al-mustaqillah*).

Negara pengikut adalah negara yang terikat dengan negara lain dalam politik luar negerinya dan sebagian masalah dalam negerinya. Misalnya, Mesir terhadap AS, Kazakhstan (saat ini) terhadap Rusia. Adapun negara satelit adalah negara yang politik luar negerinya terikat dengan negara lain dalam ikatan

kepentingan, bukan ikatan sebagai pengikut. Misalnya Jepang terhadap AS, Australia terhadap AS dan Inggris, Kanada terhadap AS, Inggris, dan Perancis, dan Turki (saat ini) terhadap Inggris dan AS. Sedang negara independen, adalah negara yang mengelola politik dalam dan luar negerinya sesuai kehendaknya sendiri atas dasar kepentingannya sendiri. Misalnya Perancis, Cina, dan Rusia.

Ada beberapa kondisi yang tidak termasuk politik internasional, tapi hanya merupakan peristiwa-peristiwa yang muncul akibat keluarnya negara-negara penjajah dari negeri-negeri jajahannya. Keadaan seperti ini dan yang semisalnya tidak dibahas dalam politik internasional dan tidak pula perlu diberikan garis-garis besarnya. Kondisi ini cukup dikaji faktanya dan diberi penilaian. Misalnya, keadaan Irak setelah keluarnya Inggris dari Irak, terjadinya Revolusi 14 Juli 1958, dan dibatalkannya semua pakta dan komitmen. Irak lalu menjadi negara independen secara internasional, seperti halnya Perancis, Inggris, dan negara independen mana pun. Tapi karena penguasanya saat itu adalah agen AS, maka Irak secara faktual adalah negara pengikut AS meskipun secara internasional merupakan negara independen. Akan tetapi setelah Revolusi 17 Juli 1968 dan penguasanya adalah agen-agen Inggris, Irak menjadi negara pengikut Inggris. Demikianlah.

Jadi, pada saat penguasa negara-negara independen menjadi agen, atau kekuasaannnya dikendalikan oleh seorang agen, negara independen akan menjadi negara pengikut bagi negara tertentu yang penguasanya dianggap menjadi agen negara itu.

Demikianlah kondisi semua negara yang dulunya dijajah. Semuanya mengalami kondisi seperti ini. Negara-negara itu berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan lain sesuai dengan perubahan penguasanya. Negara-negara semacam ini secara internasional adalah negara independen dalam penampilan lahiriahnya. Tapi dari segi realitas hakikinya, adalah negara

pengikut. Namun ini adalah kondisi-kondisi khusus sebagai akibat pembebasan negara-negara terjajah dari penjajahan dan adanya upaya negara-negara penjajah yang ingin kembali ke negeri jajahannya, atau adanya upaya negara-negara penjajah lain untuk menggantikan posisi negara penjajah lama yang telah keluar dari negara jajahannya.

Yang pasti harus diketahui adalah kedudukan negara pertama (nomor satu) di dunia. Sebab, kedudukan itu sangat strategis untuk memahami politik internasional dan konstelasi internasional. Dalam kondisi damai, negara pertama dalam posisi internasional dianggap pembuat kebijakan secara internasional. Selain itu, yang juga pembuat kebijakan setelah negara pertama adalah negara kedua dan negara mana pun yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perpolitikan dunia.

Kemampuan mempengaruhi negara-negara lain hanya dimiliki oleh negara-negara yang mempunyai bobot untuk mempengaruhi negara pertama. Kekuatan pengaruh ini berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan tingkat perbedaan masing-masing negara dalam hal kekuatannya sendiri dan kekuatannya secara internasional. Kadar kekuatan negara, dan sejauh mana bobot internasionalnya, tergantung pada kadar pengaruhnya terhadap negara pertama dan selanjutnya tergantung pada politik dunia dari segi internasional.

Contoh paling jelas mengenai upaya suatu negara untuk mempengaruhi negara pertama, dan selanjutnya politik dunia, adalah upaya Inggris belakangan ini (2004). Pengaruh Inggris dalam politik dunia secara internasional, bersumber dari sebagian pengaruhnya terhadap AS –sebagai negara pertama di dunia— juga dari pengaruhnya yang secara kontinyu masih ada terhadap negara-negara bekas jajahannya. Demikian pula Rusia, Prancis, dan Jerman. Semuanya telah bersama-sama, setelah perang AS terhadap Irak, untuk menciptakan semacam pengaruh terhadap negara pertama dan selanjutnya terhadap politik dunia secara internasional.

Adapun contoh negara yang tidak mampu mempengaruhi negara pertama, yang konsekuensinya juga tidak mampu mempengaruhi politik dunia, misalnya negara pengikut. Sebab, negara pengikut tidak mempunyai pengaruh terhadap negara pertama, kecuali dalam kadar pemanfaatan oleh negara yang diikuti atas negara pengikutnya. Demikian pula negara-negara satelit, sebab kekuatannya bersumber dari negara adidaya yang diedari oleh negara satelit itu dalam orbitnya.

Negara-negara lain yang bukan negara pengikut dan bukan pula negara satelit, yaitu negara independen, seperti Swiss, Spanyol, Belanda, Italia, dan Swedia, mampu mempengaruhi politik dunia secara internasional, jika mereka mengamankan atau mengancam kepentingan negara pertama. Contohnya, Italia dan Spanyol yang mengamankan kepentingan strategis AS dengan jalan mendukung AS dalam pendudukannya di Irak tahun 2003.

Karena itu, wajib atas negara mana pun yang hendak mempengaruhi politik dunia dan menariknya sesuai kepentingannya, agar menempuh salah satu dari dua jalan; yaitu mengancam kepentingan riil negara pertama dalam posisi internasionalnya secara sungguh-sungguh, atau mengamankan kepentingan-kepentingan negara pertama itu dengan jalan melakukan tawar-menawar untuk meraih kepentingannya.

Memberikan ancaman yang berpengaruh dan efektif, adalah jalan yang pasti akan produktif, yang merupakan jalan elegan bagi negara yang benar, yang bertekad agar pengaruhnya terjamin dan suaranya didengar dalam posisi internasional. Sedang jalan kedua yang tujuannya mengamankan kepentingan negara adidaya, adalah jalan yang gelap, tidak aman dari ketergeliciran, yang kadang mengantarkan pada tujuan dan kadang menjerumuskan pada kehancuran. Menempuh jalan itu berarti mempertaruhkan institusi umat dan merupakan spekulasi orang yang bodoh terhadap nasib umat. Sebab, tindakan negara mana pun untuk mengamankan kepentingan negara besar, tidak akan membuat negara besar itu segan melakukan tawar-menawar

kepentingan dengan negara mana pun yang lebih rendah kedudukan atau potensinya.

AS pada tahun 2003 telah melakukan tawar-menawar dengan sekutu-sekutu tradisionalnya dari negara-negara Eropa Barat, setelah AS mencapnya sebagai "Eropa Kuno". AS mulai menengok negara-negara Eropa Timur untuk menggantikan posisi negara-negara Eropa Barat sebagai sekutu AS dalam masalah Irak. AS juga memberi isyarat (sinyal) menentang Inggris ketika Inggris mencoba membatalkan langkahnya untuk menyerang Irak tanpa merujuk kepada PBB guna mendapat pengesahannya. Menteri Luar Negeri AS, Rumsfeld, berkata, "AS mampu pergi sendiri ke Irak tanpa keikutsertaan Inggris."

Untuk bisa mengancam kepentingan dan menciptakan pengaruh yang efektif, suatu negara haruslah memenuhi syarat mempunyai potensi-potensi untuk membela diri dan mempunyai sebab-sebab pengendalian yang sempurna di dalam negeri. Metode yang benar untuk itu adalah menempuh jalan yang semakin meningkat dan menanjak, yaitu negara itu wajib mempunyai sebuah ideologi dan menyerukannya ke seluruh dunia. Ini dimulai pada negara-negara di sekelilingnya hingga negara itu mampu melindungi dirinya sendiri dari serangan intervensi asing di dalam negeri. Negara itu tidak hanya menjaga tapal batasnya, tapi harus terus memperluas ideologi dan pengaruhnya hingga menyaingi negara pertama dalam posisi internasional.

Agar suatu negara mampu menyaingi negara pertama untuk merebut kedudukan nomor satunya, negara itu harus mengubah iklim politik agar bergantung padanya, dan menarik negara-negara lain secara politis agar berada di pihaknya dan mendukung pemikirannya. Itu seperti halnya Jerman sebelum Pertang Dunia II. Jika sebuah negara telah melakukan hal itu dengan baik, posisi internasionalnya akan semakin kuat, hingga salah satu negara akan menerima kedudukannya sebagai negara pertama. Pada umumnya hal itu tidak akan terwujud kecuali jika

terjadi perang yang mengubah posisi internasional —baik perang dunia yang merata maupun perang lokal yang terbatas— atau jika bahaya terjadinya perang terhadap negara pertama lebih besar, dan negara pertama itu dalam perang ini membutuhkan negara pesaing dalam bloknya.

Kedudukan negara pertama di dunia bukanlah hal yang baru. Itu sudah ada sejak lama. Dalam sejarah kuno, Mesir pernah menjadi negara pertama. Sementara Asyiria di Irak menyaingi Mesir untuk kedudukan ini. Dahulu negara Romawi pernah menjadi negara pertama dan negara Persia menyainginya untuk kedudukan ini. Daulah Islamiyah di masa Khulafa Ar-Rasyidin hingga Perang Salib pernah menempati kedudukan negara pertama dan tidak ada satu pesaing pun untuk kedudukannya itu. Prancis pernah pula menjadi negara pertama sedang Inggris menyaingi kedudukannya. Daulah Utsmaniyah, sebagai negara Khilafah Islamiyah, pernah menjadi negara pertama hampir tiga abad lamanya, tanpa satu pesaing pun untuk kedudukannya hingga pertengahan abad ke-18 M. Sebelum Perang Dunia I, Jerman adalah negara pertama di dunia. Sedang Inggris dan Prancis menyaingi Jerman untuk kedudukannya itu. Setelah Perang Dunia I Inggris merupakan negara pertama sedang Prancis menyaingi kedudukannya. Menjelang Perang Dunia II Inggris menjadi negara pertama, sedang Jerman berusaha menyaingi kedudukannya dan hampir menjadi negara pertama. Perang Dunia II meledak dan AS terjun ke dalam perang tersebut. Perang berakhir dan AS menjadi negara pertama dalam merancang politik internasional dan konstelasi internasional, sedemikian sehingga AS menjadi negara yang paling mampu untuk menjadikan politik internasional berada di pihaknya. AS terus mendominasi posisi internasional hingga tidak mungkin ada atau terjadi peristiwa-peristiwa politik kecuali atas kehendak AS. Meski demikian, saat itu Uni Soviet, Inggris, dan Prancis terus berusaha menyaingi AS dan ketiganya secara bersama-sama mempengaruhi politik dunia sampai tingkat tertentu sesuai

kekuatan negara-negara itu. Uni Soviet khususnya mempunyai pengaruh yang kuat, disusul Inggris dengan pengaruh yang lebih lemah.

Uni Soviet telah berhasil mendampingi AS sebagai mitra dan sekutu AS. Sedang Inggris mundur ke belakang dan merosot sampai ke posisinya yang rendah hingga menempati posisinya sekarang ini. Penjelasannya, setelah Perang Dunia II, Inggris mulai bangkit dari pukulan akibat perang, lalu mencoba menyaingi AS untuk merebut kedudukannya sebagai negara pertama. Inggris melakukan aktivitas-aktivitas politik untuk mempengaruhi AS. Inggris tidak ikut serta dalam Perang Korea kecuali secara simbolis saja. Inggris malah membocorkan informasi-informasi perang AS kepada Cina, padahal Cinalah sebenarnya yang terjun dalam Perang Korea. Dengan cara-cara rahasia dan jahat Inggris berhasil mempengaruhi kedudukan negara pertama dalam Perang Korea, sehingga mengguncangkan kedudukan AS sebagai negara pertama. Demikian pula dalam Konferensi Jenewa yang diselenggarakan untuk membahas masalah Indocina, Inggris memihak Blok Timur, sehingga keluarlah keputusan-keputusan yang menguntungkan Blok Timur. Inggris juga membocorkan informasi-informasi intelijen dan militer AS kepada Rusia, di antaranya informasi bocoran tentang pesawat *Yoto* milik Rusia mengenai penyebab kejatuhannya. Juga sikap McMilland dalam Konferensi Prancis yang memihak Kruschev dan menentang Eisenhower dan usaha untuk menghinakan Eisenhower sebagai Presiden AS. Ini menyebabkan konferensi itu gagal dan kedudukan AS menjadi lemah. Demikianlah Inggris melakukan berbagai aktivitas politik untuk memukul AS dalam rangka mempengaruhi kedudukan negara pertama. Tetapi AS dengan cerdas menyadari semua itu. Terjadilah kemudian pertemuan Kruschev dan Kennedy di Wina. Sejak saat itulah Inggris berubah dari posisi penyerang AS menjadi posisi pembela dirinya sendiri, karena Uni Soviet dan AS mulai bersama-sama untuk menghapuskan pengaruh Inggris atas dunia.

Dahulu Uni Soviet juga mengobarkan Perang Dingin dengan sepenuh kekuatan untuk menentang Blok Barat khususnya AS. Uni Soviet berusaha mengambil kendali inisiatif Blok Timur dan berusaha menyaingi AS dalam rangka merebut kedudukan AS sebagai negara pertama, agar Uni Soviet menjadi negara pertama di dunia. Uni Soviet berhasil dalam beberapa usahanya. Soviet berhasil membawa AS keluar dari benteng pelindungnya, yaitu PBB, dalam pemecahan masalah-masalah internasional dengan menyelenggarakan berbagai konferensi di luar PBB. Uni Soviet juga mendorong Inggris untuk menyaingi AS guna melemahkan kedudukan negara pertama dan memperlebar perpecahan untuk memperlemah kedudukan negara pertama, memperlebar keretakan Prancis dan AS, dan memberi banyak pengaruh terhadap aktivitas politik internasional. Selain itu, Uni Soviet mencapai kemajuan dalam Perang Bintang sehingga mendahului AS. Uni Soviet maju dalam senjata nuklir, rudal antar benua, dan membangun berbagai pangkalan mikliternya di Kuba untuk mengancam AS. Uni Soviet juga membongkar banyak strategi politik AS di Kongo, Mesir, Aljazair, dan lain-lain. Meskipun sangat mempengaruhi AS, tapi semua itu tidak dapat menyaingi kedudukan AS sebagai negara pertama. Itu hanya kemenangan parsial pada sebagian masalah politik internasional. Tapi Uni Soviet tidak putus asa untuk menyerang AS dengan berbagai strategi Perang Dingin, hingga terjadilah pertemuan Kruschev dan Kennedy tahun 1961, di mana keduanya bertemu bulan Juni tahun itu di Wina, ibukota Austria. Keduanya sepakat untuk membagi dunia di antara keduanya. Sejak saat itu, jatuhlah pengaruh Inggris dan Prancis dalam politik dunia. Hanya Uni Soviet dan AS saja yang kemudian mengatur politik dunia. Semua upaya Inggris agar ia mempunyai opini dalam politik tidak berhasil. Demikian pula Prancis, bahkan pada masa De Gaulle, tidak berhasil maju selangkah pun dalam menciptakan peluang membahas politik dunia. Keadaannya tetap seperti itu sampai tahun 1989, ketika Tembok Berlin roboh dan

Uni Soviet bubar secara resmi dua tahun setelah itu dan Perang Dingin berakhir. Rusia mewarisi posisi Uni Soviet secara resmi pada awal dekade 90-an pada abad lalu, tetapi ia jatuh dari posisi kedua dalam politik dunia. Muncullah kondisi internasional baru yang untuk pertama kalinya AS tampil tanpa sekutu internasional. Dunia memasuki suatu tahapan internasional yang belum pernah dikenal sebelumnya. Pada akhir masa Bush Senior, AS merancang suatu tatanan politik internasional sendirian dan menyerukan istilah Tata Dunia Baru (*New World Order*). Tetapi, tata dunia ini tidak mencatat kesuksesan dan istilah itu tetap saja kabur, sebagaimana kondisi internasional juga tetap tidak jelas, hingga Clinton meraih tampuk kekuasaan tahun 1992. Clinton lalu mencanangkan tata internasional baru, yang tidak bersandar pada kebijakan individual, tapi bersandar pada keunggulannya atas negara lain. Pemerintahan Clinton mulai membangun dasar tata dunia baru ini yang salah satu dasarnya adalah menempuh politik kerjasama dengan kekuatan negara-negara adidaya lain. Hal ini nampak jelas dalam penyelesaian krisis Balkan di Boznia dan Herzegovina. Nampak jelas juga dalam pelucutan senjata nuklir di negara Ukraina dan Rusia Putih, berdasarkan kesepahaman dengan Rusia. Hal seperti itu juga terjadi dalam penandatanganan memorandum kesepahaman (MoU) antara AS dan negara-negara yang dulunya merupakan bagian Blok Timur. Dalam penandatanganan ini turut serta Inggris dan Jerman. Pada masa ini, berkat strategi kerjasama untuk memperluas NATO, AS berhasil pula menjalin kerjasama dengan negara-negara Eropa Barat yang masing-masingnya memperoleh manfaat dari perluasan negara-negara Uni Eropa. Peluasan dan perluasan ini berlangsung dengan mengorbankan Rusia dan pengaruhnya.

Masa ini ditandai secara khusus dengan meningkatnya kekuatan Jerman, yang disebabkan lemahnya Uni Soviet, runtuhnya tembok Berlin, dan hilangnya dukungan dari Jerman Timur. Ini semua terjadi bersamaan dengan penyatuan Jerman Timur dan Jerman Barat secara cepat. Dengan demikian Jerman

yang bersatu menjadi kekuatan ekonomi terbesar Eropa dan berubah menjadi satu kekuatan politik yang efektif dan berpengaruh yang hampir menyamai AS dan Eropa. Sampai-sampai diskusi masuknya Jerman menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB menjadi bahan persoalan hangat di kalangan AS, Eropa, dan dunia.

Kondisi politik baru ini disertai kondisi ekonomi baru, dalam arti adanya optimalisasi kebijakan pasar bebas secara besar-besaran. Ini nampak dalam strategi globalisasi yang dipaksakan atas dunia. Berbagai perusahaan melakukan merger, menjadi besar dan menonjol sebagai pemain ekonomi utama yang mendiktekan kebijakannya terhadap berbagai rejim pemerintahan. Perusahaan multi nasional *(Multi National Corporation)* lalu menjadi pembicaraan para ahli ekonomi. Terjadi pula perubahan kesepakatan GATT pada tahun 1995 menjadi WTO untuk melindungi kebijakan globalisasi dengan kedok undang-undang. Terjadi pula optimalisasi peran IMF dan Bank Dunia sehingga tiga serangkai ini (WTO, IMF dan Bank Dunia) dimanfaatkan oleh negara-negara adidaya sebagai alat untuk melakukan campur tangan dan menekan kebijakan ekonomi berbagai negara. Menteri Luar Negeri AS (saat itu), Warren Christopher, dan Direktur IMF, Michael Cemdesus, mengakui bahwa keduanya memanfaatkan IMF untuk menjatuhkan pemerintahan Suharto dengan jalan memaksakan kebijakan mata uang mengambang (*floating rate*) dan tidak akan memberi Suharto utang jika tidak mau menerima kebijakan itu. Suharto tunduk kepada tuntutan ini lalu mengambangkan mata uang dan akhirnya dijatuhkan.

Demikian pula optimalisasi telah terjadi dalam peran G-7, yaitu tujuh negara industri, ditambah dengan Rusia. Kedelapan negara ini –yaitu AS, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Kanada, dan Rusia— telah mendominasi kebijakan ekonomi dan moneter dunia. Kalau delapan negara ini kita tambah dengan Cina, yang mempunyai kekuatan ekonomi yang besar, kekuatan

nuklir, populasi penduduk yang besar, keanggotaan tetap dalam Dewan Keamanan PBB, maka dapat kita katakan –dengan sedikit melebih-lebihkan— bahwa negara-negara adidaya di dunia saat ini adalah sembilan negara ini. Tetapi perbedaan kekuatan negara-negara ini membuat kita mengeluarkan dua negara dari kategori negara adidaya, yaitu Italia dan Kanada. Karena keduanya tidak mempunyai kekuatan politik atau geopolitik apa pun yang membuatnya siap untuk memainkan peran dunia. Dengan demikian, negara-negara yang berpengaruh terhadap politik dunia tinggal tujuh negara, yaitu AS, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, dan Jepang. Dengan adanya perbedaan pengaruh internasional di antara negara-negara tersebut, lima negara yang disebut pertama mempunyai pengaruh di berbagai kawasan di dunia, dengan keunggulan AS yang menonjol atas empat negara lainnya. Negara keenam (Cina) memusatkan ambisinya untuk mempengaruhi wilayah regional sekelilingnya. Sedang negara keenam (Jepang) berambisi mempengaruhi berbagai kawasan dunia, tetapi hanya pengaruh dalam bidang ekonomi.

Mantan Menteri Luar Negeri Prancis, Hober Fiderin, dalam bukunya *Taruhan-taruhan Prancis di Era Globalisasi* mengatakan, "Sesungguhnya keberadaan satu-satunya kekuatan ini (AS) yang mendominasi seluruh bidang ekonomi, teknologi, militer, moneter, bahasa, dan budaya, merupakan kondisi yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah." Demikian deskripsi Fiderin. Kemudian Fiderin membuat peringkat khusus untuk negara-negara dari segi kekuatan dan pengaruhnya. Fiderin berkata, "Sesungguhnya AS menduduki peringkat nomor satu di dunia tanpa pesaing. Setelah itu pada peringkat kedua, adalah tujuh negara yang mempunyai pengaruh dunia, yaitu Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, Cina, Jepang, dan India, asalkan mereka mau menetapkan untuk memperluas visinya yang selama ini masih bersifat regional." Fiderin berkata pula, "Sesungguhnya ada banyak tolok ukur untuk menyusun peringkat tersebut, di antaranya adalah pendapatan nasional, taraf kemajuan teknologi,

senjata nuklir, lalu tingkat kuantitas dan kualitas persenjataan, keterikatan dengan organisasi dan lembaga internasional, seperti Dewan Keamanan PBB, Kelompok G-8, atau Uni Eropa, lalu penyebaran bahasa dan pengaruh budaya yang diwarisi dari generasi terdahulu."

Tetapi peringkat yang lebih mendalam dari pendapat Fiderin ini adalah, bahwa setelah AS —negara raksasa yang tidak ada satu negara pun yang menyamainya pada awal abad ke-21 ini— peringkat berikutnya adalah tiga negara adidaya hakiki, yaitu Rusia, Inggris, dan Prancis. Persis setelah tiga negara ini, peringkat berikutnya adalah Jerman. Empat negara ini mempunyai visi internasional dalam berbagai bidang di dunia. Peringkat berikutnya adalah Cina, yang merupakan negara adidaya dalam batas-batas wilayah regionalnya. Kalau saja Cina tidak mempunyai visi internasional yang terbatas, niscaya Cina akan menyaingi empat negara sebelumnya. Sedangkan Jepang, menjadi negara adidaya ekonomi setelah AS. Jadi urutan peringkat negara-negara ini adalah sebagai berikut: AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman, Cina, dan Jepang. Ketujuh negara inilah yang layak disebut negara adidaya. Sedangkan India, Kanada, dan Italia tidak layak disebut negara adidaya. Meski demikian tiga negara ini menduduki peringkat berikutnya setelah tujuh negara sebelumnya, yang keseluruhannya membentuk sepuluh negara utama di dunia.

Dengan berakhirnya abad ke-20 dan diawalinya milenium ke-3, pemerintahan Bush Junior mencoba mengubah dasar-dasar permainan politik internasional. Pemerintahan Bush Junior menghentikan strategi kerjasama yang telah ditempuh Clinton dan mulai memaksakan strateginya kepada kekuatan-kekuatan besar dengan paksaan. Pemerintahahn Bush Junior menarik diri dari berbagai perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto, Mahkamah Kejahatan Internasional, Kesepakatan SALT untuk mengurangi proliferasi (perkembangan) senjata balistik, dan sebagainya. Dan ketegangan antara AS dan negara-negara adidaya lain semakin meningkat dengan terjadinya peristiwa 11

September 2001 dengan meledaknya WTC di New York dan Gedung Pentagon di Washington. Peristiwa ini memberikan satu dorongan kepada AS untuk menjadi kekuatan tunggal. AS menjadikan peledakan WTC itu sebagai justifikasi untuk memerangi apa yang disebutnya "terorisme" sehingga AS akhirnya menduduki Afghanistan dan Irak dengan dalih itu. Arogansi politik pemerintahan AS sangat menonjol sampai-sampai AS mengadopsi kebijakan, "Anda bersama kami atau melawan kami" (*Either you are with us or you are with terrorists*). Kebijakan ini menyulut reaksi kemarahan di kalangan Eropa dan pihak lainnya. Mereka menuduh kebijakan itu sebagai hal yang naif dan bodoh. Mereka menuntut AS untuk kembali kepada startegi perundingan dan kerjasama. Tapi AS menolak kembali pada prinsip perundingan dan kerjasama yang pernah dijalankan Clinton. Orang-orang yang disebut dengan neo konservatif di bawah kepemimpinan Wapres Dick Cheney, Menhan Rumsfled, Wakil Menhan Wolfowitz, Richard Brill Ketua Dewan Politik Pertahanan, Douglas Fich, John Bolton, Condoleeza Rice, dan yang lain-lain, tetap saja mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan Bush. Kaum neo konservatif itu mengerahkan segala kemampuan dan pengaruh mereka serta mengendalikan perusahaan-perusahaan yang mendukung mereka untuk melayani kebiakan-kebijakan ini.

Hal paling menonjol dalam kebijakan AS ini adalah tidak mempedulikan PBB dan legitimasinya dalam membuat kebijakan-kebijakan. Prioritas utamanya adalah kepentingan AS. Jika kepentingan ini bertentangan dengan legitimasi intenasional, AS akan mengabaikan legitimasi ini. Jika tidak bertentangan, legitimasi internasional ini akan diambil. Jika AS berhasil meminta keluarnya resolusi dari Dewan Keamanan PBB, resolusi itulah yang akan dijalankan. Tapi jika tidak berhasil, AS akan mengabaikan dan acuh tak acuh dengan Dewan Keamanan PBB.

Eropa yang termanifestasi pada Inggris mencoba menghalangi pemerintah AS yang mengabaikan legitimasi internasional. Menlu AS Colin Powell pun berpihak pada upaya

Inggris ini, demikian pula Bush pun cenderung pada langkah itu. Tetapi kelompok neo konservatif mengagagalkan upaya ini dan AS tetap tidak mau tahu dengan strategi kerjasama. AS juga juga tak mau tahu untuk memberikan peran efektif bagi lembaga internasional.

Bagaimana pun juga keadaannya, pemerintahan Bush Junior tidak mampu menjatuhkan negara-negara adidaya seperti Inggris, Rusia, Prancis, dan Jerman dari permainan peran dalam panggung politik internasional. Sebaliknya strategi yang dijalankan oleh pemerintahan Bush Junior justru menguatkan posisi negara-negara tersebut dan tidak malah melemahkannya. Sebab, strategi AS itu mendorong negara-negara adidaya tersebut untuk menyatukan barisannya guna membela diri di hadapan serangan AS yang keras atas mereka. Terbentuklah poros Prancis, Jerman, dan Rusia. Poros ini bersama Inggris saling bantu membantu secara rahasia. Negara-negara ini akhirnya mampu –dengan melakukan perlawanan dan langkah persuasif— memantapkan posisinya sebagai negara adidaya yang efekif sampai batas tertentu dalam politik internasional.

***

KONVENSI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG INTERNASIONAL

Persaingan untuk menempati kedudukan sebagai negara pertama pada masa dahulu tidak menampakkan aktivitas politik yang terkait dengan suatu undang-undang internasional, karena undang-undang itu tidak ada. Yang menonjol sejal awal sejarah adalah aktivitas-aktivitas militer dengan jalan perang, pertempuran, dan pengurangan tapal-tapal batas negara. Keadaannya tetap demikian hingga pertengahan abad ke-18 M, tatkala terjadi perluasan undang-undang internasional, atau lebih tepatnya, tatkala terwujud tatanan internasional dalam bentuk undang-undang dan hukum. Sejak saat itu, aktivitas-aktivitas politik menjadi aspek penting dalam hubungan internasional dan pemecahan masalah-masalah internasional. Aktivitas politik kemudian menggantikan posisi aktivitas militer dalam pemecahan masalah, penghentian dominasi negara pertama, dan persaingan untuk merebut kedudukannya. Sejak saat itu banyak terjadi arbitrase (*tahkim*) dengan menggunakan undang-undang internasional dalam hubungan internasional. Banyak pula aktivitas politik diambil sebagai alat untuk memecahkan masalah

internasional, baik aktivitas politik murni, maupun yang disertai berbagai perang dan pertempuran. Hal itu nampak secara jelas setelah tahun 1919 M ketika dibentuk Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Banyak terjadi arbitrase dengan undang-undang internasional dan konvensi internasional. Aktivitas politik yang dilakukan oleh negara-negara pada umumnya, dan khususnya oleh negara-negara yang bersaing untuk mendapat kedudukan negara pertama, serta negara pertama itu sendiri, banyak bersandar pada apa yang dinamakan konvensi internasional dan undang-undang internasional. Maka, harus ada tinjauan singkat terhadap konvensi dan undang-undang internasional ini, untuk memahami fakta aktivitas politik dan tatacara pelaksanaan aktivitas politik secara internasional.

Mengenai konvensi internasional, ia sudah ada sejak lama mendahului adanya negara, wilayah keamiran, atau institusi. Konvensi internasional adalah sekumpulan prinsip yang lahir akibat adanya hubungan antar komunitas manusia dalam perang dan damai. Sejumlah prinsip itu lalu memperoleh kedudukan yang mantap bagi berbagai negara dan mereka lalu merasa dirinya harus terikat dengan sejumlah konvensi itu secara sukarela. Konvensi itu menjadi mirip dengan undang-undang. Keterikatan ini adalah keterikatan moral, bukan keterikatan fisik. Sejumlah komunitas manusia pun lantas mengikutinya secara sukarela. Mereka pun takut terhadap opini umum. Barangsiapa tidak mengikuti konvensi itu ia akan mendapat kecaman opini umum dan celaan atas perbuatannya. Yang dapat dianggap kategori ini, yaitu kategori konvensi internasional, adalah kesepakatan orang Arab sebelum Islam mengenai larangan perang dalam bulan haram. Karena itu, kaum Quraisy mengecam Rasulullah SAW ketika pasukan *sariyah* Abdullah bin Jahsy membunuh Amr bin Al-Hadhrami, menawan dua laki-laki Qurasiy, dan mengambil kafilah dagang. Kaum Quraisy mengecam hal itu dan menyerukan di segala tempat bahwa Muhammad dan para sahabatnya telah menghalalkan pembunuhan di bulan haram serta telah

menumpahkan darah, mengambil harta, dan menawan tawanan di bulan haram. Jadi, kaum Quraisy telah memanfaatkan opini umum untuk melakukan kecaman itu, karena tindakan pasukan tersebut menyalahi konvensi internasional.

Demikianlah, semua komunitas manusia mempunyai berbagai prinsip yang telah diketahui satu sama lain yang mereka ikuti dalam perang dan damai. Di antaranya adalah pengiriman utusan (atau yang dinamakan dengan duta), masalah rampasan perang, dan sebagainya. Tapi, konvensi itu ada yang bersifat umum yang diikuti oleh semua komunitas manusia, seperti pengiriman duta (utusan), dan ada pula yang bersifat khusus untuk komunitas tertentu. Konvensi ini lalu berkembang sesuai kebutuhan berbagai negara, wilayah keamiran, dan institusi. Yaitu berkembang sesuai kebutuhan komunitas-komunitas manusia dalam hubungan mereka satu sama lain sebagai komunitas. Maka, konvensi internasional ini menjadi standar arbitrase antar manusia atas dasar opini umum. Yang menyalahinya akan mendapat celaan. Negara-negara mengikutinya secara sukarela dan atas dasar pilihannya berdasarkan pengaruh moral, bukan berdasar pengaruh lainnya. Tidak ada satu kekuatan fisik pun yang menerapkannya. Berdasarkan konvensi inilah, berbagai komunitas manusia melakukan aktivitas-aktivitas politiknya.

Adapun apa yang dinamakan undang-undang internasional, ia lahir dan terwujud untuk menentang Daulah Islam yang pada saat itu termanifestasikan dalam Daulah Utsmaniyah. Itu disebabkan karena Daulah Islam, dalam sifatnya sebagai Daulah Islam, telah menyerang Eropa, mengumumkan jihad kepada kaum Kristen Eropa, membebaskan negeri-negeri mereka satu demi satu hingga berhasil melumpuhkan apa yang dinamakan Yunani, Rumania, Albania, Yugoslavia, Hungaria, dan Austria hingga terhenti di pintu gerbang kota Wina. Daulah Utsmaniyah telah membangkitkan kengerian di semua orang Kristen Eropa dan terwujud suatu kebiasaan umum di kalangan Kristen bahwa pasukan Islam itu tidak terkalahkan, dan bahwa

kaum Muslim ketika berperang tidak peduli akan kematian karena akidah mereka, bahwa mereka akan mendapat surga jika terbunuh; dan karena akidah mereka mengenai qadar (takdir) dan ajal.

Kaum Kristen telah menyaksikan keberanian kaum Muslim dan hebatnya serangan mereka sehingga mereka lari ketika berhadapan dengan kaum Muslim. Ini memudahkan kaum Muslim mengalahkan dan menundukkan berbagai negeri di bawah kekuasaan Islam. Kaum Kristen Eropa pada masa itu hidup dalam wilayah-wilayah keamiran dan tuan tanah (feodal). Wilayah Eropa merupakan negara-negara yang terpecah-pecah, di mana setiap negara terpecah lagi menjadi wilayah-wilayah keamiran, yang masing-masing dikuasai oleh seorang tuan tanah yang telah dibagi-bagi raja dalam kekuasaannya. Ini membuat raja tidak mampu memaksa wilayah-wilayah keamiran ini untuk berperang. Raja juga tak berkuasa pada segala apa yang dinamakan urusan luar negeri di hadapan para penyerangnya. Hal ini memudahkan kaum Muslim untuk menyerang dan membebaskan mereka.

Keadaan Eropa tetap seperti itu hingga akhir abad pertengahan, yaitu hingga akhir abad ke-16 M. Pada abad ke-16 M, yaitu pada abad pertengahan, negara-negara Eropa berhimpun untuk membentuk satu keluarga Kristen yang mampu menghadang Daulah Islam. Saat itu pihak gerejalah yang mendominasi Eropa dan agama Kristenlah yang menyatukan Eropa. Karena itu, negara-negara Eropa melakukan upaya-upaya untuk membentuk keluarga Kristen dari sekumpulan negara. Mereka pun menentukan bentuk hubungan di antara mereka.

Muncullah dari situ prinsip-prinsip yang mereka sepakati untuk mengatur hubungan sesama mereka. Itulah awal lahirnya apa yang kemudian dinamakan undang-undang internasional. Jadi, asal-usul lahirnya undang-undang internasional adalah bahwa negara-negara Kristen di Eropa berhimbun berdasarkan ikatan Kristen untuk menghentikan Daulah Islam. Inilah yang memunculkan apa yang dinamakan keluarga Kristen internasional

dan mereka pun lalu menyepakati prinsip-prinsip tertentu di antara mereka. Di antaranya bahwa negara-negara itu mempunyai hak yang sama, mempunyai prinsip dan cita-cita yang sama, semua negara menyerahkan kekuasan spiritual tertinggi kepada Paus selaku pemimpin Katolik meski negara-negara itu berbeda-beda alirannya. Prinsip-prinsip ini merupakan cikal bakal undang-undang internasional.

Hanya saja, perkumpulan negara-negara Kristen pada awalnya tidak mempunyai pengaruh. Sebab, prinsip-prinsip yang mereka sepakati tidak mampu menyatukan mereka. Ini disebabkan sistem feodalisme terus menjadi penghalang lahirnya kekuatan negara dan tidak memungkinkan negara untuk menjalankan hubungan luar negerinya. Dominasi gereja atas negara menjadikan negara sebagai salah satu pengikut gereja, serta mencabut kedaulatan dan independensi negara.

Karena itu, terjadilah konflik dalam negara untuk mengalahkan pemimpin-pemimpin feodal (tuan tanah), dan konflik berakhir dengan kemenangan negara dan terhapusnya sistem feodal. Pada waktu yang sama terjadi pula konflik antara negara dan gereja yang menyebabkan hapusnya kekuasaan gereja dalam urusan-urusan dalam dan luar negeri yang dilakukan negara, setelah sebelumnya gereja mengendalikan urusan-urusan tersebut. Namun demikian negara yang ada tetaplah negara Kristen.

Secara garis besar, terdapat pengaturan hubungan antara negara dan gereja sedemikian rupa sehingga dapat memperkuat independensi negara. Hal ini membawa dampak lahirnya negara-negara kuat di Eropa. Tetapi meski demikian, negara-negara itu tetap tidak mampu menghadapi Daulah Islam. Keadaannya tetap seperti itu hingga pertengahan abad ke-17 M, yaitu hingga tahun 1648 M. Pada tahun ini negara-negara Kristen Eropa mengadakan sebuah konferensi, yaitu konferensi Westaphalia. Dalam konferensi ini ditetapkan prinsip-prinsip permanen untuk mengatur hubungan di antara negara-negara Kristen Eropa.

Diatur pula keluarga negara-negara Kristen untuk menghadapi Daulah Islam. Konferensi tersebut telah menetapkan prinsip-prinsip tradisional bagi apa yang dinamakan dengan Undang-undang Internasional.

Tetapi peraturan itu tidak menjadi undang-undang internasional yang berlaku umum, melainkan hanya menjadi undang-undang internasional bagi negara-negara Kristen, bukan yang lain. Undang-undang itu melarang Daulah Islam untuk masuk ke dalam Keluarga Internasional, atau menerapkan undang-undang internasional atas Daulah Islam. Sejak saat itu terwujud apa yang dinamakan Komunitas Internasional. Komunitas ini tersusun dari semua negara Kristen Eropa, tanpa membedakan negara monarki atau negara republik; negara Katolik atau Protestan. Komunitas tersebut pada awalnya terbatas pada negara-negara Eropa Barat. Kemudian ke dalamnya bergabung semua negara Kristen Eropa, lalu mencakup negara-negara Kristen di luar Eropa. Namun, komunitas itu tetap terlarang bagi Daulah Islam sampai paruh kedua abad ke-19 M. Saat itulah Daulah Islam berada dalam keadaan goncang dan diberi sebutan "orang sakit" (*the sick man*). Pada waktu itu Daulah Islam meminta masuk ke dalam Keluarga Internasional tetapi ditolak. Daulah Islam lalu mendesak dengan kuat, lalu diberi syarat-syarat yang keras. Di antaranya adalah tidak berhukum dengan Islam dalam hubungan internasional dan memasukkan sebagian undang-undang Eropa. Daulah Islam menerima dan tunduk dengan syarat-syarat itu. Setelah Daulah Islam menerima syarat-syarat untuk melepaskan diri sebagai Daulah Islam dalam hubungan internasionalnya, barulah permintaan Daulah Islam diterima. Daulah Islam masuk ke dalam Keluarga Internasional pada tahun 1856 M. Kemudian setelah itu masuklah negara-negara non-Kristen ke dalam Keluarga Internasonal seperti Jepang.

Maka dari itu, konferensi Westaphalia yang diselenggarakan tahun 1648 M, dianggap sebagai konferensi yang mengatur

prinsip-prinsip tradisional bagi Undang-undang Internasional. Berdasarkan prinsip-prinsip ini terwujudlah aktivitas-aktivitas politik secara istimewa, dan terwujud pula aktivitas-aktivitas politik internasional.

Di antara prinsip-prinsip yang menonjol adalah dua ide berikut: *Pertama*, ide keseimbangan internasional. *Kedua*, ide konferensi internasional. Ide keseimbangan internasional, adalah ide yang menetapkan bahwa jika salah satu negara mencoba melakukan ekspansi dengan mengorbankan negara lain, maka seluruh negara akan berkumpul untuk menghalangi terjadinya ekspansi itu dan menjaga keseimbangan internasional yang memadai untuk mencegah perang dan menyebarkan perdamaian. Sedang ide konferensi internasional, menyatakan bahwa konferensi akan terbentuk dari berbagai negara Eropa dan diadakan guna membahas problem-problem mereka dan berbagai urusan mereka dalam naungan kepentingan Eropa. Ide ini lalu berkembang menjadi konferensi negara-negara adidaya yang diselenggarakan untuk mempertimbangkan urusan-urusan dunia dalam rangka mewujudkan kepentingan negara-negara adidaya. Dua ide tersebut menjadi biang keladi dari berbagai penderitaan dunia, yaitu problem-problem yang dihadapi dunia untuk melepaskan diri dari kekuasaan negara-negara penjajah dan negara adidaya.

Kedua ide ini diimplementasikan pertama kalinya pada masa Napoleon, pada awal abad ke-19. Ketika terjadi Revolusi Perancis dan tersebar ide yang berpangkal pada kebebasan dan persamaan, pengakuan hak-hak individu dan bangsa, dua ide tersebut mampu mengubah peta politik Eropa, melahirkan negara-negara baru, dan menghapuskan negara-negara lama. Pada saat itu negara-negara Eropa berkelompok dengan dalih keseimbangan internasional. Negera-negara Eropa pun lalu mengeroyok Perancis. Setelah Napoleon dikalahkan, negera-negara Eropa berkumpul dalam Konferensi Wina tahun 1815. Mereka mempertimbangkan untuk mengembalikan

keseimbangan dan menata berbagai urusan keluarga Kristen internasional. Maka, dikembalikanlah kepemilikan Rusia dan Austria, didirikan kesatuan federasi antara Swedia dan Norwegia, Belgia digabungkan dengan Belanda untuk menjadi satu negara guna menghalangi ekspansi Perancis. Sementara itu Swiss diletakkan dalam posisi netral selamanya. Untuk menerapkan keputusan-keputusan ini negara-negara yang berserikat mengadakan konferensi persekutuan di antara mereka. Ini terwujud dalam pakta antara raja-raja Prusia, Rusia, dan Austria, dengan pesetujuan Raja Inggris, kemudian Perancis pun digabungkan ke dalamnya. Artinya ini adalah koalisi atau persekutuan negara-negara adidaya untuk menguasasi negara-negara lain.

Lalu, pada tahun 1818, diadakan perjanjian Aix-la-Chapelle antara Rusia, Inggris, Prusia, Austria, dan Perancis yang menyepakati untuk melakukan intervensi bersenjata guna mencegah revolusi militer mana pun yang mengancam hasil-hasil yang dicapai dalam Konferensi Wina. Demikianlah, lima negara adidaya itu telah menjadikan dirinya sendiri sebagai institusi penjaga bagi keamanan dan tatanan dalam Komunitas Internasional, yaitu dalam keluarga Kristen Internasional. Kemudian, kekuasaannya meluas sehingga mencakup sebagian negeri-negeri Islam setelah lemahnya Daulah Utsmaniyah. Negara-negara adidaya tersebut telah melakukan sejumlah intervensi dengan dalih menjaga perdamaian. Mereka telah mengintervensi Spanyol tahun 1827, Portugal tahun 1826, dan Mesir tahun 1840. Negara-negara adidaya tersebut juga mencoba melakukan intervensi ke AS. Mereka berupaya membantu Spanyol untuk menarik kembali jajahannya di AS. Tapi, AS yang telah menjadi sebuah negara yang kuat yang harus diperhitungkan, menghalangi usaha tersebut. Presiden AS saat itu James Monroe mengeluarkan doktrinnya yang terkenal dan dikenal dengan *Doktrin Monroe* tahun 1823. *Doktrin Monroe* itu menyatakan, "Sesungguhnya AS tidak akan mentolerir negara Eropa mana pun untuk

mengintervensi urusan-urusan Benua Amerika dan untuk menduduki bagian manapun dari benua itu." Maka, negara-negara Eropa tersebut tidak jadi melakukan intervensi.

Itulah asal usul Undang-undang Internasional. Dan itulah pula yang menimbulkan justifikasi-justifikasi untuk melakukan intervensi dan memberikan peluang kepada negara-negara adidaya untuk mendominasi negara-negara lain. Itulah pula yang menjadi sandaran aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan oleh berbagai negara untuk memenuhi kepentingannya, atau untuk menyaingi negara pertama.

Akan tetapi, prinsip-prinsip internasional ini telah mengalami sedikit perubahan, meski perubahan itu tetap demi kepentingan negara-negara adidaya dalam rangka untuk mengatur ambisi-ambisi mereka. Atau dengan kata lain, untuk membagi-bagi keuntungan dunia di antara mereka sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan perang dan konflik bersenjata. Sesungguhnya abad ke-19 adalah abad penjajahan, maka negara-negara adidaya tersebut terdorong untuk terjun ke dunia dan menjajah negeri-negeri yang lemah. Dari penjajahan ini muncul konflik yang tidak sampai pada batas perang besar.

Tetapi, ketika Inggris, Perancis, dan Rusia dengan jelas melihat bahwa Jerman dengan kekuatannya yang besar telah mengancam mereka dan akan mengambil minyak negeri-negeri Islam di Irak, serta mengancam Inggris mengenai minyak Iran dan Jazirah Arab, ketiganya sepakat untuk menentang Jerman dan mengumumkan perang melawan Jerman. Daulah Utsmaniyah masuk dalam peperangan ini di pihak Jerman untuk melawan Sekutu. Kemenangan akhirnya ada di pihak Sekutu. Tetapi Rusia keluar dari persekutuan ini dan yang tetap tinggal adalah Inggris, Perancis, dan AS.

Adapun AS, ia lalu kembali menuju isolasinya sehingga kancah internasional hanya diisi oleh Inggris dan Perancis. Dua negara ini telah mengatur masalah penjajahan di antara mereka berdua. Mereka mencegah adanya pesaing bersenjata dengan

membentuk Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Ini untuk mengatur urusan-urusan berbagai negara dan mencegah perang di antara mereka. Namun demikian, LBB yang lahir dalam iklim paradoks yang aneh itu akhirnya mengalami kegagalan. Sebab, politik negara-negara adidaya tidak berubah. Ambisi masing-masing dalam konferensi damai adalah mewujudkan keseimbangan di antara kekuatan yang berbeda-beda, menjaga kepentingannya, dan membagi-bagi bekas kepemilikan Jerman dan Daulah Utsmaniyah. Jadi, negara-negara penjajah itu tidak menerima gesekan apapun terhadap kedaulatan mereka dan terus menjaga jajahan-jajahannya, serta menambah jenis jajahan baru yang dinamai secara tipu-tipu dengan nama "negara-negara di bawah mandat".

Di antara pengaruh kondisi ini adalah gagalnya LBB dalam upayanya membuat harmoni internasional dan mengembalikan keamanan. LBB telah berupaya mengadakan kesepakatan-kesepakatan internasional untuk menjamin perdamaian, yakni menjamin tidak adanya pesaing terhadap negara-negara adidaya dalam memperebutkan negara jajahan. Maka, dibuatlah di bawah pengawasan LBB itu, Protokolat Jenewa tahun 1924. Tujuannya, untuk meredakan konflik dengan cara-cara damai dan memaksa melakukan arbitrase yang bersifat mengikat. Ditetapkanlah perjanjian Locarno tahun 1925. Kesepakatan ini memutuskan saling memberikan jaminan dan bantuan-bantuan bersama. Ditetapkan pula Piagam Briand-Kelogg, tahun 1928, yang melarang mencari penyelesaian dengan perang, juga Piagam Jenewa tahun 1928, yang bersifat khusus mengenai arbitrase yang mengikat. Tetapi, semua kesepakatan itu tidak mampu mencegah kegagalan LBB dalam misinya. Di hadapan telinga dan mata LBB, berkecamuk beberapa perang. Di antaranya Perang Cina-Jepang (1933), Perang Italia-Ethiopia (1936), invasi Jerman atas Austria (1938), invasi Jerman atas Chekoslovakia (1938), lalu invasi Jerman atas Polandia (1939), hingga meletusnya Perang Dunia II (1939).

Itulah perubahan yang terjadi pada hubungan internasional. Konferensi-konferensi telah berubah menjadi sebuah badan internasional yang berdiri untuk menjaga keamanan internasional. Tapi, perubahan ini tidak mengubah apa-apa. Negara-negara adidaya tetap saling berkompetisi untuk berebut harta rampasan perang hingga terjadinya Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, negara-negara adidaya melihat bahwa pembentukan sebuah badan internasional merupakan cara terbaik untuk mengatur hubungan antara negara. Badan ini pada awalnya didirikan untuk negara-negara yang terlibat dalam perang. Kemudian, negara-negara adidaya itu memperluasnya dan menjadikannya sebagai badan internasional yang memberi kesempatan kepada semua negara di dunia untuk bergabung ke dalamnya. Badan ini lalu menata hubungan internasional dengan piagam badan ini.

Dengan demikian, hubungan internasional telah berubah. Semula bentuknya adalah konferensi negara-negara adidaya untuk menguasai dunia, membagi harta rampasan perang di antara mereka, dan mencegah munculnya sebuah negara adidaya yang lain. Kemudian, berubah menjadi terbentuknya sebuah badan internasional untuk mengatur hubungan di antara mereka, menjamin dominasi negara-negara adidaya, lalu menjadi sebuah badan internasional yang mengatur dan mendominasi urusan-urusan berbagai negara di dunia.

Sesungguhnya posisi internasional setelah Konferensi Wina tahun 1815 termanifestasi dalam empat negara adidaya: Prusia, Rusia, Austria, dan Inggris. Tatkala Perancis berusaha menyaingi negara-negara tersebut dalam kedudukannya, mengubah peta dunia dan posisi internasional serta menjadi negara pertama, negara-negara adidaya lainnya pun mengeroyok Perancis dan menghancurkan ambisi-ambisinya; lalu berserikat dengan Perancis untuk menguasai dunia. Posisi internasional menjadi termanifestasi pada lima negara ini. Sedikit demi sedikit Inggris mulai menonjol dan menjadi negara pertama. Dan ketika Jerman mencoba menyaingi negara pertama dan menguasai minyak negeri-negeri

Islam, maka Inggris, Perancis, dan Prusia pun bersepakat untuk melawan dan memerangi Jerman serta menghancurkan ambisi-ambisinya. Mereka pun lalu menjajah lebih banyak lagi wilayah di belahan dunia ini. Inggris merupakan negara yang paling banyak jajahannya, sedang Perancis hanya sedikit. Inggris memberikan sebagian jajahannya kepada Perancis.

Posisi internasional kemudian terwujud pada Inggris dan Perancis, serta Italia. Tapi Inggris tetap menjadi negara pertama. Lalu terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Tujuan sebenarnya dari pendirian LBB adalah mempertahankan posisi negara pertama dan mencegah negara-negara lain untuk menyainginya dan mencegah negara-negara lain untuk menjadi negara adidaya, meskipun LBB dibentuk dengan dalih menjaga perdamaian dunia. Ketika Jerman sekali lagi mencoba menyaingi negara pertama dan menjadi negara pertama, maka Inggris dan Perancis pada awalnya, lalu berikutnya Inggris, Perancis, Rusia, dan AS, mengobarkan Perang Dunia II terhadap Jerman hingga berhasil menghancurkan Jerman.

Tetapi, hasil perang kali ini ternyata justru mengancam kedudukan Inggris. Dari perang itu keluarlah kekuatan yang dahsyat. Negara yang keluar sebagai pemenang adalah AS. Karena itu kekuatan internasional berpindah dari tangan Inggris ke tangan AS, dan AS pun menjadi negara pertama. Posisi internasional lalu termanifestasi dalam realitas berikut: AS adalah negara pertama, Uni Soviet merupakan negara yang menyaingi AS, kemudian Inggris dan Perancis merupakan negara pada level kedua, yaitu dua negara sekunder (nomor dua) dalam posisi internasional.

Namun kemudian, dalam posisi internasional setelah Perang Dunia II ini muncul faktor baru, yaitu terbaginya dunia secara internasional menjadi dua blok. Ini meningkatkan suhu politik internasional dan memperumit posisi internasional. Posisi internasional ini dalam bentuknya yang kontemporer belum pernah ada sebelumnya. Memang benar posisi internasional

sebelum Perang Dunia II tersusun dari kelompok-kelompok. Tetapi kelompok-kelompok itu bukan merupakan blok-blok. Sebelum Perang Dunia II posisi internasional terbagi menjadi front negara-negara demokratis dan front negara-negara Nazisme dan Fasisme. Kendati pun demikian pembagian tersebut bukanlah pembagian dalam bentuk blok-blok ideologis. Sebab, Nazisme dan Fasisme bukanlah ideologi dan tidak sampai pada level ideologi. Maka dari itu sebelum Perang Dunia II tidak terdapat blok-blok dalam arti ideologis. Adapun setelah Perang Dunia II, dunia terbagi secara internasional menjadi dua blok: Blok Barat dan Blok Timur. AS dianggap sebagai negara pertama dalam Blok Barat, sedang Rusia (Uni Soviet) sebagai negara pertama di Blok Timur.

Meski dua blok berseteru atas dasar ideologi dan bersaing untuk meraih kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan di antara keduanya, tapi kedua blok itu bergerak secara internasional. Sebab, bukan ideologi satu-satunya yang yang menjadi basis pembagian menjadi dua blok, melainkan juga disertai kepentingan-kepentingan internasional. Namun kepentingan-kepentingan ini di Blok Timur berjalan sesuai ideologi komunisme dan sesuai tuntutan-tuntutan yang menjadi keharusan dalam penyebaran komunisme. Sedang di Blok Barat, kepentingan-kepentingan itu berjalan sesuai politik penyebaran ideologi dan sesuai kepentingan nasional dan tanah air, berdasarkan ideologi kapitalisme yang menjadikan asas manfaat (*an-naf'iyah*) sebagai tolok ukur untuk seluruh aktivitas dalam kehidupan.

Karena itu, anda akan melihat di Blok Barat ada negara-negara yang tidak berideologi kapitalisme, tetapi kepentingan negara-negara itu terikat dengan kepentingan Blok Barat. Fakta seperti ini tidak ada dalam Blok Timur. Karenanya, negara-negara Blok Timur semuanya negara komunis, dari Blok Timur itu sendiri. Dalam blok ini tidak ada negara yang non-komunis. Sebab, basisnya adalah ideologi. Sementara Blok Barat mengalami

fragmentasi. Maka, dimungkinkan muncul celah-celah di Blok Barat. Dimungkinkan pula mengeluarkan negara-negara dari Blok Barat untuk masuk Blok Timur dan membentuk blok baru yang berasal dari Blok Barat di luar dua blok yang ada, yang akan berposisi sebagai kesatuan yang mempunyai pengaruh terhadap posisi internasional baik dalam keadaan damai maupun perang.

Mereka yang mencermati Blok Barat akan mendapati bahwa dalam blok tersebut ada fragmentasi internal sebagai akibat naiknya posisi AS pada kedudukan negara pertama. Sebelumnya kedudukan ini adalah milik Inggris, sementara saat itu AS masih berada dalam keadaan terisolasi dari posisi internasional. Fragmentasi ini adalah hal yang jelas, bukan tersembunyi. Inilah yang menunda terjadinya perang dunia.

Negara pertama dalam politik internasional tidaklah menempuh cara sebagai pemimpin blok (*za'imah al-mu'askar*), sebagaimana keadaan Inggris ketika ia menjadi negara pertama, melainkan akan menempuh cara sebagai komandan blok (*qa'idah al-mu'askar*). Komandan blok ini memaksakan kepemimpinannya atas prajuritnya secara paksa. Karena itu, negara-negara blok Barat yang level kekuatannya mendekati negara pertama seperti Inggris, lebih dengki dan membangkang daripada negara-negara yang lemah. Rahasia di balik fakta ini terpulang pada politik AS sendiri. Sebab, setelah meraih kemenangan dalam Perang Dunia II, AS bertekad untuk mencabut kedaulatan dari semua negara, sebagaimana AS juga bertekad untuk memaksakan kedaulatannya atas dunia. AS juga bersikap arogan setelah dia merasakan kekuatan dan besarnya kekayaannya, sehingga AS melihat dirinya harus memimpin seluruh dunia dan bahwa berbagai bangsa dan negara harus meminta bantuan dan restunya. Maka dari itu, AS memerangi Eropa dengan aktivitas politik dan rencana keuangan, kemudian setelah itu menyerang Eropa dengan membuat revolusi-revolusi militer di jajahan-jajahan Eropa, terutama Inggris yang sebelumnya merupakan negara pertama dan negara yang paling

banyak jajahannya. Setelah Inggris, yang paling banyak jajahannya adalah Perancis dan Belanda. Alih-alih menyerang negara-negara jajahan, AS menyerang negara-negara penjajahnya itu sendiri dengan rencana Marshal (*Marshall Plan)* serta dengan bantuan dan utang. Hingga ketika AS sudah merasa mantap posisinya di negara-negara penjajah, AS mengarahkan kebijakannya kepada negara-negara jajahan dan menggabungkanya ke dalam dominasinya sedikit demi sedikit sampai AS berhasil mengambil seluruh jajahan. Namun cara yang ditempuhnya berbeda dengan cara yang digunakan AS untuk menyerang negara-negara Eropa.

Dengan demikian, telah terjadi perselisihan di antara negara-negara Blok Barat. Perselisihan ini bukan hal baru, melainkan sudah lama. Perselisihan di Blok Barat ini mulai terjadi sebelum Perang Dunia II, tetapi itu bukan merupakan perselisihan dalam satu blok, tapi perselisihan dalam urusan ekonomi di antara dua negara, lalu berubah menjadi perselisihan politik dalam satu blok. Perselisihan ini terpulang pada problem-problem ekonomi yang ada, terutama kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi antara Inggris dan AS. Kebutuhan Inggris akan dukungan AS terhadapnya menimbulkan perselisihan di antara dua negara itu, yang selanjutnya memicu perselisihan pula di antara negara-negara Blok Barat. Hal itu karena Inggris setelah mantap kedudukannya dalam posisi internasional sebagai negara pertama, Inggris disaingi oleh Perancis. Persaingan ini nampak nyata. Inggris berusaha untuk melemahkan Perancis dengan cara memperkuat Jerman di satu sisi. Sementara di sisi lain Inggris memprovokasi gerakan-gerakan patriotik dan nasionalis di negara-negara jajahan Perancis. Hal ini menimbulkan problem-problem bagi Perancis dan juga membuatnya sibuk untuk berupaya menghindarkan diri dari bahaya Jerman.

Namun di posisi intenasional pada saat itu tumbuh kekuatan Italia, dan nampak kekuatan Jerman telah mengancam posisi Inggris dan Perancis secara bersamaan. Muncul pula poros Roma-

Berlin. Maka Inggris merasa harus membuat AS keluar dari isolasinya dengan merangsang keserakahan AS terhadap minyak Timur Tengah. Terjadilah kesepakatan-kesepakatan seputar minyak.

Setelah AS mulai meneliti masalah minyak, perusahaan-perusahaan minyak AS mulai menyadari nilai minyak Timur Tengah. Bukan hanya nilai berupa keuntungan ekonomi semata, melainkan juga nilai untuk eksistensi AS itu sendiri. Maka dari itu perusahaan-perushaan AS mulai merebut sumur-sumur dan konsesi-konsesi minyak dari perusahaan-perusahaan Inggris dan mengungguli mereka. Lahirlah persaingan antara perusahaan Inggris dan AS. Dengan keluarnya perusahaan AS ke Timur Tengah, keluar pula AS dari isolasinya. Lalu meletuslah Perang Dunia II dan AS berpindah pada kedudukan negara nomor satu dalam imperialisme. Sementara Inggris, Perancis, dan Belanda jatuh kedudukannya.

Adapun Belanda, karena mengalami kelemahan akhirnya eksistensinya hilang. Sedang Inggris mengalami penurunan sebagian pengaruhnya di Timur Tengah dan di Laut Tengah. Pengaruh Inggris juga melemah di sebagian negara-negara kecil. Ini semua menjadikan posisi Inggris secara internasional merosot menuju posisinya yang terendah. AS terus berusaha menghapuskan pengaruh Inggris di seluruh dunia. Sedang Perancis, setelah jajahan-jajahannya di Timur Jauh dan Afrika lepas, kondisinya menjadi lemah meskipun De Gaulle berupaya untuk membangkitkannya dan mengembalikan pengaruh Perancis di kancah internasional. Tapi itu semua tidak mampu mengembalikan Perancis ke kancah internasional sebagaimana sebelumnya, meski pun Perancis tetap dianggap sebagai negara adidaya.

Dari semua pejelasan di atas jelaslah bahwa terbagi-baginya dan terpecah-pecahnya Blok Barat setelah Perang Dunia II dan sepanjang Perang Dingin, telah melemahkan semua negara dalam blok itu, kecuali AS. Sebab, AS telah melumpuhkan kekuatan

negara-negara tersebut dengan cara mengambil jajahan-jajahannya, selain AS sendiri juga mempunyai kekuatan dan pengaruh. AS tetap menjadi negara pertama dan tetap kuat kedudukannya. Namun, Inggris dalam beberapa waktu melakukan manuver-manuver politik dan aksi-aksi politik untuk mempengaruhi posisi sekutunya, yaitu AS, dan untuk menyainginya dalam posisi AS sebagai negara pertama. Namun kemudian Inggris hanya berupaya untuk menjaga kepentingan-kepentingannya tanpa berusaha mempengaruhi kedudukan sekutunya (AS) setelah Inggris tahu benar kadar kelemahannya dan mengalami penurunan kekuatan. Apalagi untuk menghadapi sebuah negara raksasa dengan kekuatan militer dan ekonominya seperti AS. Maka dari itu, Blok Barat sebagai satu kesatuan, sebenarnya terpecah-pecah dan saling berkompetisi satu sama lain. Ini menyebabkan terjadinya perselisihan, perbedaan pandangan di antara semua negaranya, perlombaan di antara mereka untuk meraih keuntungan, dan saling melakukan tipu daya satu sama lain.

Sedangkan Blok Timur, ia berdiri atas dasar ideologi semata hingga awal tahun 60-an pada abad yang lalu. Blok ini dipimpin oleh Rusia (Uni Soviet) dengan mengemban suatu kepemimpinan ideologis dan militer. Kepemimpinan ini kedudukannya sama dengan seorang guru yang mengampu di satu sisi, dan sebagai seorang penjaga dan komandan di sisi lain. Karenanya di antara negara Blok Timur tidak ada negara yang menyaingi Uni Soviet dalam hal kepemimpinan ideologis dan militernya. Bahkan, tidak ada satu negara pun yang berani melawan politik Soviet. Jika muncul perlawanan maka akan segera dihancurkan oleh kekuatan militer jika diperlukan.

Politik dalam negeri Blok Timur semenjak era Stalin, dilaksanakan untuk memperkuat struktur negara dan menyiapkan kekuatan militer dalam posisi defensif dan ofensif sekaligus. Sedang politik luar negerinya didasarkan pada sikap tidak memberikan peluang bagi hidup berdampingan secara damai antara

kapitalisme dan sosialisme. Maka, Blok Timur senantiasa memandang bahwa kapitalisme harus dijadikan musuh politik, sebab kapitalisme hakikatnya adalah musuh ideologis. Ketika terjadi Perang Dunia II, Uni Soviet bekerja sama dengan Perancis, Inggris, dan AS dalam perang dan hidup berdampingan untuk beberapa waktu. Tapi ini adalah kondisi darurat yang merupakan kondisi perkecualian. Kondisi ini tak berapa lama kemudian berakhir. Ketika perang selesai, kembalilah terjadi Perang Dingin antara Uni Soviet dan negara-negara Barat, meski tetap ada kontak politik di antara mereka. Kontak politik ini terjadi di PBB, di konferensi-konferensi internasional, basa-basi diplomatik, di samping perwakilan diplomatik. Namun ini semua tidak berarti terjadi perubahan pada politik komunisme yang mendasar, melainkan hanya taktik dari sekian taktik-taktik politik.

Sedangkan politik komunisme terhadap Blok Barat pada dasarnya berasal dari ide yang melandasi Uni Soviet itu sendiri. Hal itu karena dalam ideologi komunisme terkandung prinsip bahwa kapitalisme dan sosialisme tidak mungkin hidup berdampingan secara damai, dan bahwa salah satunya pada akhirnya haruslah mengalahkan yang lain. Semua buku-buku komunisme mengatakan adanya kemustahilan untuk menghindarkan diri dari konflik di antara kedua ideologi tersebut. Inilah di antara pendapat yang dipegang Lenin dan Stalin. Keduanya tidak berbeda pandangan dalam masalah ini. Dan semua buku-buku komunisme sepakat atas ide ini. Tidak ada peluang bagi siapapun dari kalangan politisi komunis, baik penguasa maupun bukan, untuk menjalankan politik hidup berdampingan secara damai antara kapitalisme dan sosialisme, sebab ini akan dianggap keluar dari ide komunisme dalam politik luar negeri.

Itulah fakta yang ada pada kedua blok dari segi ideologi, politik, dan internasional. Namun sejak tahun 1961 telah terjadi perubahan pada dua blok secara internasional yang menyebabkan perubahan kedudukan keduanya secara signifikan. Ini

menyebabkan pula terjadinya perubahan posisi internasional. Hal itu karena sejak paruh kedua dekade keenam, yaitu tepatnya sejak 1957, telah mulai terjadi adanya berbagai gerakan dan geliatan di kedua blok yang berkembang sedikit demi sedikit. Ini sampai menyebabkan terjadinya disintegrasi pada dua blok secara total, sehingga dua blok akhirnya menjadi dua negara: AS dan Uni Soviet. Kedua negara ini tidak mempertimbangkan lagi sedikit pun negara-negara lain dalam kedua blok masing-masing.

Dalam blok Komunis, negara komunis tidak berdiri di atas dasar nasionalisme, melainkan atas dasar ideologi. Artinya, negara komunis didirikan atas dasar prinsip untuk menjadi negara komunis di seluruh dunia dan bagi seluruh dunia. Prinsip ini mengharuskan dua hal. *Pertama,* negara komunis harus terus dalam keadaan siap siaga di dalam negeri, melakukan persiapan serius untuk kekuatan ekonomi dan kekuatan militer dalam rangka penyebaran komunisme. Ini menuntut tekanan yang berat secara terus menerus atas bangsa komunis dari segi politik dan segi ekonomi. Maka dari itu, negara komunis akan tetap menjadi mimpi buruk yang berat atas bangsa Rusia. Mereka selalu tidak mendapatkan kebutuhan penyempurna dalam aspek ekonomi, bahkan juga tidak menikmati sebagian kebutuhan primer. Semua itu adalah demi penyebarluasan sosialisme di dunia. *Kedua,* negara komunis harus terus berada dalam kondisi permusuhan yang permanen terhadap semua negara-negara Barat sebagai negara-negara kapitalis liberal, mengobarkan Perang Dingin secara terus menerus terhadap mereka, dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam perang defensif setiap waktu. Inilah yang menyebabkan dunia menjadi dua blok yang saling bermusuhan secara terbuka. Kondisi ini dapat menyeret kedua blok itu dalam perang yang sesungguhnya setiap saat.

Cacat-cacat dalam ideologi komunisme yang bertumpuk-tumpuk ini tidak memungkinkan para penganutnya untuk terus mengembangkan teori-teorinya sampai sempurna. Karena itu, pada akhir tahun 50-an abad yang lalu, muncul aliran baru dalam

pemerintahan yang mengambil interpretasi baru terhadap ideologi komunisme yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan Rusia. Interpretasi itu lebih dekat pada interpretasi nasionalistik daripada interpretasi komunistik. Di bidang politik dalam negeri, mereka membuat keterbukaan bagi rakyat dari segi politik dan ekonomi. Mereka mengurangi tekanan atas rakyat dan memberi toleransi kepada mereka secara bertahap untuk memperoleh barang-barang konsumtif. Dalam politik luar negeri, mereka mencoba melakukan pendekatan dengan AS dan membangun hubungan yang lebih erat dengan AS. Antara Uni Soviet dan AS lalu terjali kontak-kontak rahasia untuk menyepakati pencegahan perang di antara keduanya. Kemudian bidang-bidang kontak ini makin meluas hingga meliputi semua masalah-masalah internasional yang memungkinkan adanya perselisihan di antara keduanya.

Ketika kontak-kontak ini sudah matang, diadakanlah pertemuan penting antara Kruschev dan Kennedy pada Juni 1961. Dalam pertemuan itu tercapai kesepakatan yang menyeluruh atas semua masalah-masalah internasional. Dengan demikian, Uni Soviet telah melepaskan ide penting dalam politik internasional, yaitu ide permusuhan permanen antara komunisme dengan kapitalisme. Uni Soviet telah menganut ide hidup berdampingan secara damai dalam pengertian yang ada menurut ideologi kapitalisme.

Adapun Blok Kapitalis, AS telah memahami bahwa Inggris telah bergerak untuk menentangnya dan mencoba menyainginya untuk mendapatkan rampasan perang. AS juga memandang bahwa kondisi Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat adalah kondisi yang menguras kekuatannya. Kondisi ini bukanlah perang yang mengharuskan prioritas persiapan-persiapan militer daripada pertumbuhan ekonomi. Ia bukan pula kondisi damai sehingga pertumbuhan ekonomi lebih diprioritaskan daripada persiapan militer. Perang Dingin merupakan kondisi antara perang dan damai yang menghabiskan dana yang besar milik negara

dalam rangka persiapan militer untuk sesuatu yang ilusif (tidak jelas), yaitu untuk perang yang tidak diketahui kapan terjadinya. Di samping itu, AS telah menyadari bahwa Inggrislah yang menyulut dan mengobarkan Perang Dingin ini dan bahwa tujuannya adalah agar AS terus berada dalam kondisi yang menguras segala kekayaan dan potensinya. Selanjutnya AS diharapkan akan melemah secara perlahan-lahan dan pada saat itulah akan terjadi gangguan dalam keseimbangan internasional. AS telah menyadari bahwa kepentingannya adalah melakukan pendekatan dengan Uni Soviet (komunis) untuk melawan Inggris (kapitalis). Dan karena cacat-cacat dalam ideologi kapitalisme juga bertumpuk-tumpuk, juga karena pragmatisme merupakan priorotas nilai tertinggi menurut kaum kapitalis, dalam arti tidak ada nilai yang tetap bagi mereka —yang ada hanya keserakahan di balik keuntungan materi— maka ini semua menjadikan AS berusaha mempersempit celah perbedaan antara AS dan Uni Soviet. AS juga berupaya untuk bersama Uni Soviet melakukan berbagai perundingan-perundingan.

Hal ini terjadi sejak paruh kedua dekade ke-6 abad yang lalu. Yaitu semenjak era Eisenhower dan sebelum masa Kennedy. Ketika Kennedy berkuasa, dia segera memulai menyempurnakan langkah pendekatan antara AS dan Uni Soviet. Hanya setahun setelah Kennedy berkuasa dalam pemerintahan, terjadilah pertemuan di Wina pada Juni 1961 antara Kennedy dan Kruschev. Dalam pertemuan itu teradi kesepakatan menyeluruh atas segala masalah-masalah internasional yang berpotensi menimbulkan perselisihan di antara keduanya.

Dengan demikian, AS juga telah melepaskan ide penting yang telah dianutnya selama hampir setengah abad, yaitu ide menghancurkan komunisme dan menghapuskannya dari peta dunia. AS mulai mendekati Uni Soviet dengan konsep yang dinamakan hidup berdampingan secara damai. Hal ini terus berlangsung sampai lebih dari dua dekade hingga Reagan memegang kepemimpinan AS pada tahun 80-an. Saat itu Reagan

menghidupkan kembali program untuk menghancurkan Uni Soviet.

Walhasil, kepentingan dua pemimpin blok tersebut telah menyepakati untuk mempertahankan AS dan Uni Soviet sebagai pengambil inisiatif secara internasional dan mencegah menonjolnya suatu negara selain kedua negara itu. Nampak bahwa kedua negara tersebut telah menyepakati politik pembendungan Cina, mengeluarkan Inggris dari negara-negara jajahannya, mencabut pengaruhnya dari Timur Tengah, dan mencegah Jerman untuk kembali lagi menjadi negara nuklir. Kemudian keduanya sepakat pula untuk hidup berdampingan secara damai, atau apa yang disebut sebagai "detente" (peredaan ketegangan AS-Uni Soviet). AS dan Uni Soviet menyepakati pula untuk tidak menggunakan kekuatan militer dalam pemecahan masalah di antara keduanya, menyepakati pembagian dunia di antara keduanya, membatasi wilayah-wilayah pengaruh keduanya, dan sejauh mana kewajiban saling membantu dalam wilayah pengaruhnya. Dengan kata lain, AS dan Uni Soviet menjadi dua sekutu yang membentuk kekuatan internasional yang satu. Dengan seluruh kesepakatan tersebut berubahlah kondisi dunia dan posisi internasional.

Adapun yang berkaitan dengan posisi internasional, dunia tidak lagi menjadi dua blok yang saling bersiang secara politik dan ekonomi. Tidak lagi pula ada pertukaran hubungan di antara keduanya untuk memecahkan banyak problem sebagaimana sebelum tahun 1961. Dunia hanya menjadi dua blok secara ideologi. Sebab, ideologi komunisme tetap ada pada masa itu yang termanifestasikan pada negara-nehgara komunis. Ideologi kapitalisme termanifestasikan pada negara-negara kapitalis. Dua idelogi ini tidak mungkin dikompromikan di antara keduanya. Jadi, dua negara itu dari segi ini menjadi dua blok tanpa keraguan lagi.

Adapun dari segi internasional, dua blok ini sebenarnya telah hilang. Dunia seluruhnya telah menjadi satu kekuatan yang terwujud dalam negara AS dan Uni Soviet. Hanya dua negara

besar inilah yang mendominasi dunia, meski AS tetap berada di depan dalam posisi negara pertama.

Atas dasar itu, dua blok yaitu Blok Timur dan Blok Barat telah hilang. Tidak ada lagi blok-blok internasional di dunia. Posisi internasional telah berubah secara fundamental dan kembali seperti keadaan sebelum Perang Dunia I. Artinya, dunia telah menjadi negara-negara yang berdiri sendiri-sendiri yang masing-masingnya berusaha mencari rampasan perang dan melemahkan negara lainnya. Gesekan (friksi) yang terjadi adalah antara satu negara dengan negara lain, bukan antara satu blok dengan blok lain.

Perbedaan kondisi pada masa detente setelah pertemuan Wina dengan kondisi sebelum Perang Dunia I, bahwa posisi internasional telah didominasi oleh dua negara besar sedang negara-negara lain berupaya untuk menghindarkan dari dari kejahatan dua negara tersebut. Negara-negara lain itu juga berusaha membentuk suatu perhimpunan yang membentuk satu kekuatan untuk menghadapi dua negara tersebut. Ini berbeda degan kondisi sebelum Perang Dunia I. Waktu itu negara-negara adidaya mempunyai kekuatan yang hampir sama, meskipun negara pertama lebih kuat dibandingkan dengan semua negara lainnya. Kekuatan yang hampir sama inilah yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan kekuatan dan perselisihan yang tajam untuk mendapatkan rampasan perang. Ini menyebabkan meletusnya Perang Dunia I.

Adapun pada masa detente, kekuatan dua negara (AS dan Uni Soviet) secara total lebih unggul secara berlipat ganda dibanding negara manapun di dunia. Bahkan kekuatan keduanya melampaui kekuatan seluruh negara di dunia. Maka, tidak muncul perang dunia yang besar dalam arti yang telah dikenal sebelumnya. Bahkan tidak ada potensi pada gabungan negara-negara lain untuk menimbulkan friksi yang bisa menyulut perang dunia. Seperti itu pula kondisi posisi internasional antara masa detente dan kondisi sebelum Perang Dunia II. Sebelum Perang

Dunia II terdapat negara-negara yang terpisah-pisah, meskipun mereka berbentuk front-front. Tapi bagaimana pun juga berbagai kekuatan yang ada adalah hampir sama pada awalnya. Lalu terjadilah gangguan dalam keseimbangan internasional. Sebab, Jerman, Italia, dan Jepang kekuatannya semakin bertambah. Sementara Perancis dan Inggris tidak menguat. Sedang AS masih berada dalam isolasinya. Gangguan dalam keseimbangan internasional inilah yang menyebabkan bergeraknya Italia, Jerman, dan Jepang. Semua bergerak masing-masing untuk mengambil negeri-negeri dengan jalan perang. Hal itu secara berturut-turut menimbulkan friksi yang kuat, yang akhirnya meletuskan Perang Dunia II. Ini berbeda dengan kondisi pada masa detente. Sebab, posisi internasional terwujud dalam dua negara raksasa dan kesepakatan di antara keduanya. Itu adalah suatu kondisi yang tidak mentolerir munculnya konflik internasional yang akan dapat menimbulkan perang dunia. Yang ditolerir hanyalah konflik sebagian negara dengan kedua negara tersebut (AS dan Uni Soviet), atau konflik sebagian negara dengan sebagian negara lain. Meski konflik yang semacam ini menghasilkan perang regional, namun kekuatan dua negara raksasa sudah cukup untuk memadamkan perang jika keduanya berkehendak.

Tetapi politik detente yang dimulai tahun 1961 antara AS dan Uni soviet bukan berarti akhir dari pertarungan komunisme dengan kapitalisme. Politik detente itu mempunyai berbagai justifikasi dan sebab-sebabnya sendiri. Kedua pihak telah terkuras oleh perang dingin dan persiapan militer untuk sesuatu yang tidak jelas: apakah akan terjadi perang atau tidak. Keduanya lalu beralih pada detente (peredaan ketegangan) di antara keduanya; membagi dunia, agar masing-masing mempunyai kesempatan untuk mengurusi masalah-masalah dalam negerinya. Dengan berakhirnya Perang Vietnam, detente mulai hilang urgensinya. Perancis telah keluar dari negara-negara jajahannya dan kembali ke Eropa untuk memperkuat Eropa. Sedang Inggris telah

merasakan kelemahannya dan mulai berusaha memperkuat Eropa untuk menyelamatkan apa yang masih dapat diselamatkannya. Uni Soviet telah menjadi kekuatan militer strategis yang sangat besar, yang dengan nyata menunjukkan keunggulan dalam Perang Angkasa Luar (*Star Wars*). Uni Soviet pun mampu meluaskan eksistensinya di wilayah-wilayah yang jauh dari wilayah vitalnya sehingga menjadi kekuatan dunia yang berpengaruh.

Mulailah muncul serangan terhadap politik detente dari sebagian besar kelompok politisi dari kelompok kanan dan liberal. AS pun mulai melepaskan diri dari detente. Hal ini terpulang pada sebab bahwa Uni Soviet telah membangun suatu kekuatan dahsyat yang destruktif dan massal di bawah payungnya. Hal ini telah mengusik AS dan menjadi sumber bahaya baginya. Era keamanan AS yang absolut telah berakhir. Keamanan telah menjadi sesuatu hal yang didasarkan pada sikap saling preventif, yakni atas dasar pengaitan nasib satu negara dengan nasib negara lainnya. Di antara efek-efek samping dari hal ini, negara-negara Eropa telah memisahkan diri dari AS, dan mulai melakukan langkah politik yang lepas dari AS dalam interaksinya dengan Uni Soviet. Inilah yang membuat Kissinger menyebut tahun 1973 sebagai "tahun Eropa". Hal itu karena dengan datangnya tahun 1973, yakni tahun ditandatanganinya kesepakatan Paris seputar masalah Vietnam, AS dan Uni Soviet telah mengeluarkan Perancis dari sebagian besar wilayah jajahannya. AS dan Uni Soviet juga telah memaksa Inggris untuk melepaskan pangkalan-pangkalan militernya di seluruh dunia. Keduanya juga telah mengeluarkan Inggris dari banyak wilayah jajahannya, dan juga telah membendung Cina. Dengan demikian, detente telah kehilangan justifikasi-justifikasinya.

Tidak diragukan lagi AS telah keluar dari detente sebagai kekuatan militer besar yang lebih kuat daripada sebelumnya. Demikian pula AS telah mempunyai pengaruh politik yang signifikan disebabkan keluarnya Inggris, Perancis, dan Belanda

dari jajahan-jajahannya dan menggantikan kedudukannya. Karena itu, detente telah mencapai tujuannya bagi AS. Ini tidak berarti detente tidak ada efek-efek negatifnya. Tetapi efek-efek negatifnya tidak dapat dibandingkan dengan efek-efek positifnya bagi AS. Akan tetapi pada tahun 1973 justufikasi-justifikasi detente telah hilang. AS melakukan evaluasi untuk menghentikan efek-efek negatif yang dihasilkan dari politik detente itu. AS lalu menetapkan prioritas-proritiitas kerjanya, yaitu: membatasi perluasan pengaruh Uni Soviet yang telah mencapai wilayah-wilayah yang jauh agar menjadi terbatas pada wilayah-wilayah vitalnya, menguras perekonomian Uni Soviet, dan mengembalikan Eropa agar berada kembali di bawah payung AS.

Mengenai perluasan pengaruh Uni Soviet di luar wilayah vitalnya, sebenarnya itu sangat rapuh disebabkan oleh rapuhnya ekonomi Uni Soviet itu sendiri. Adalah mudah untuk menghentikannya kapan saja. Tetapi, pengaruh itu memberikan kepada Uni Soviet hak bekerjasama dalam masalah-masalah internasional. Ini tidak dilihat oleh AS. AS memandang bahwa dalam politik detente itu terkandung jalan untuk membendung Uni Soviet, bukan jalan untuk menjadikannya sekutu. Karena itu, AS melihat adanya keharusan untuk mengeluarkan Uni Soviet dari wilayah-wilayah pengaruhnya di luar wilayah vitalnya.

Mengenai upaya menguras Uni Soviet secara ekonomi, AS melihat bahwa terjun dalam perlombaan senjata dengan Uni Soviet akan dapat menguras ekonominya dan akan menjerumuskannya ke dalam kehancuran. Ini dimulai pada akhir tahun 70-an pada masa Carter. Tetapi perlombaan senjata semakin gencar dan menjadi peristiwa yang menonjol di era pemerintahan Reagan. Reagan-lah yang mengobarkan perlombaan senjata. Reagan lalu menjalankan program yang telah dibuat pendahulunya (Carter), dan yang terpenting adalah peluru kendali (rudal) MX portabel. Reagan menambah program itu dengan mengadopsi program pertahanan strategis, atau perang bintang. Strategi ini mengharuskan penggunaan teknologi untuk

mewujudkan benteng pelindung dari rudal-rudal musuh. Ini membuat Uni Soviet berilusi bahwa arsenal-arsenal nuklirnya tidak akan bisa efektif bekerja pada saat terjadi perang nuklir. Ini artinya, terjadi ketidakseimbangan kekuatan, yang akan mendorong AS untuk melancarkan perang nuklir. Inilah yang mendorong Uni Soviet untuk mencoba mengembangkan sistem pertahanannya. Hal itu dalam perhitungan pendapatan yang ada, tidak memungkinkan Uni Soviet untuk berlomba dalam bidang persenjatan ofensif (untuk menyerang). Karena itu, terjadi perpindahan perlombaan dari pengembangan senjata-senjata penyerangan menjadi senjata-senjata pertahanan. Strategi Reagan membuat sistem pertahanan, atau perang bintang, meskipun memperoleh sebagian kemajuan pada awalnya, tetapi tidak sampai mencapai teknologi yang mampu membangun benteng rudal tersebut. Telah terbukti secara ilmiah bahwa hampir mustahil untuk mendapatkan pelontar sinar laser yang mampu mengarahkan sinar laser dengan kekuatan yang tepat untuk menghancurkan rudal-rudak antar benua ketika masih ada di angkasa sebelum kembali ke wilayah vitalnya. Tapi Reagan mengumumkan telah mengadopsi program pertahanan ini meskipun teknologinya tidak mencapai tahap-tahap kemajuan dalam perkembangannya. Reagan mampu membingungkan Uni Soviet dan menjerumuskannya dalam perlombaan senjata baru yang sama sekali tidak akan mampu ditanggung oleh perekonomianya yang rapuh. Meskipun strategi perang bintang ini menyalahi perjanjian yang ditandatangani AS dan US tahun 1972 yang berkaitan dengan rudak anti-rudal, tapi Reagan terus bersikeras bahwa programnya tidak bertentangan dengan kesepakatan tersebut, sebagai suatu jalan untuk menjustifikasi posisi tersebut di hadapan Uni Soviet. Dapat dikatakan bahwa Reagan melakukan hal itu untuk mengakhiri rambu-rambu politik detente.

Langkah-langkah Reagan ini membuat Uni Soviet masuk ke dalam perlombaan senjata baru, meskipun kali ini adalah untuk

mengembangkan sistem pertahanan, bukan sistem penyerangan. Itu dimaksudkan untuk menguras ekonomi Uni Soviet dan mendorongnya kembali ke wilayah-wilayah vitalnya yang telah disepakati dalam kesepakatan 1961 di Wina, atau bahkan mendorongnya hingga Uni Soviet runtuh.

Adapun Eropa yang sibuk pada masa detente untuk melepaskan diri dari hegemoni AS, maka para pengamat AS telah memantau langkah-langkah mereka dalam rangka menarik Eropa kembali di bawah payung AS, setelah sebelumnya Eropa hampir saja lepas dari payung ini sejak tahun 1973 yang disebut Kissinger sebagai "tahun Eropa." Pada tahun itu negara-negara Eropa berulang kali menyatakan bahwa kepentingan Eropa bukanlah kepentingan AS. Eropa pun mulai melepaskan dirinya untuk masuk ke dalam perang bersama AS untuk membela kepentingan AS semata. Maka, AS pada tahun 1982 menyebarkan rudal-rudal jarak sedangnya seperti Pershing dan Cruise di Eropa dengan dalih bahwa Uni Soviet telah menyebarkan rudal-rudal jarak menengahnya di Eropa setelah menolak menghancurkannya. Dengan demikian AS telah mengikatkan keamanan negara-negara Eropa dengan keamanan dirinya dengan dalih membela Eropa. AS telah mengikat nasib Eropa dengan nasib AS dalam suatu ikatan yang tidak mampu dilepaskan oleh Eropa.

Dengan kemenangan Reagan untuk masa jabatan keduanya, Gorbachev pada tahun 1985 menjadi pemimpin Uni Soviet. Pada saat Gorbachev memegang kekuasaan, Uni Soviet hanya bisa mengalami kekalahan demi kekalahan dari AS. Dengan demikian, Uni Soviet menjadi sempoyongan menuju jalan kehancuran. Maka dari itu Reagan yakin ketika ditanya —saat meninggalkan Gedung Putih— mengenai apa yang dia yakini sebagai kesuksesannya yang terbesar, "Mereka mengatakan, saya memenangkan perang bintang."

Walhasil, telah terjadi perubahan mendasar terhadap posisi internasional bersama mundurnya Reagan dari Gedung Putih, di mana politik detente telah berakhir total dan Uni Soviet menjadi

terhuyung-huyung karena terjerumus dalam perlombaan senjata dan terkuras ekonominya. Lebih-lebih lagi, telah muncul perlawanan dari pihak-pihak oportunis dan kelompok-kelompok oposisi Soviet. AS melancarkan serangan media internasional dengan memerangi ideologi Soviet yang berarti bahwa bagi AS tidak ada lagi apa yang dinamakan detente. Bahkan AS melancarkan serangan politik, ekonomi, dan ideologi terhadap Uni Soviet yang mengakibatkan turunnya pengaruh Uni Soviet, atau melemahkan upaya Soviet untuk menancapkan pengaruhnya di luar wilayah vitalnya. Serangan itu juga mengakibatkan kemunduran ekonomi Soviet di dalam negeri, di samping munculnya front-front oposisi terhadap politik Soviet di dalam Uni Soviet dan Blok Timur secara umum dan selanjutnya terjadi pula di seluruh dunia. Hal itu terus berlangsung hingga runtuhnya Uni Soviet pada awal tahun 90-an pada abad yang lalu. AS kemudian menjadi negara pertama tanpa pesaing yang menyamainya seperti halnya sebelumnya.

Ringkasnya, kondisi berbagai negara di dunia yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut: Dunia pada masa lampau didominasi oleh Daulah Utsmaniyah, Prusia, Rusia, Austria, Inggris, dan Perancis. Negara-negara inilah yang dahulu mengendalikan berbagai urusan dunia, mengancam perdamaian, dan memutuskan perang. Kemudian lahir AS lalu ia mengisolasi diri dari negara-negara tersebut dan menjadikannya hanya berada di Dunia Lama, sehingga negara-negara lain pun jauh pula dari AS. Austria kemudian tidak dianggap lagi sebagai negara adidaya sehingga negara adidaya di dunia ada lima: Rusia, Jerman, Inggris, Perancis, dan Daulah Utsmaniyah. Lalu Daulah Utsmaniyah runtuh sehingga negara-negara adidaya yang menguasai dunia adalah Rusia, Jerman, Perancis, dan Inggris. Kemudian setelah Perang Dunia I, Rusia mengisolasi diri dengan berdirinya negara komunisme di dalamnya dan berkuasanya partai komunis dalam pemerintahan. Jerman juga jatuh setelah kekalahannya dalam Perang Dunia I. Jadi, negara adidaya lalu menjadi hanya dua,

yaitu Inggris dan Perancis. Inggris-lah yang mengendalikan dunia secara keseluruhan, kecuali AS. Perancis tetap ambisius di belakang Inggris.

Pada awal dekade ke-4, yaitu pada tahun 1933, partai Nazi memegang kekuasaan di Jerman dan berusaha untuk meningkatkan martabat bangsa Jerman hingga kembali menjadi negara adidaya. Beberapa saat sebelum itu, Mussolini juga meraih kekuasaan di Italia dan berupaya untuk meningkatkan martabat Italia hingga kembali menjadi negara adidaya. Muncul pula "bintang" Jepang dan pengaruhnya meluas setelah menjadi negara industri sehingga Jepang dianggap negara adidaya. Sementara itu Uni Soviet semakin kuat dan mempunyai eksistensi internasional dan kembali menjadi negara adidaya. Walhasil negara adidaya ada enam: Uni Soviet, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, dan Jepang. AS masih tetap berada dalam isolasinya.

Setelah Perang Dunia II, Jerman, Italia, dan Jepang dikalahkan dan lemahlah kekuatan tiga negara ini. Di samping itu keluarlah AS dari isolasinya dan segera turut campur dalam urusan-urusan dunia dan mempertahankan Inggris dan Perancis agar tetap dianggap dua negara adidaya. Maka, negara adidaya ada empat, yaitu Uni Soviet, Ingris, Perancis, dan AS. Kemudian setelah kesepakatan Uni Soviet dan AS pada tahun 1961, Inggris dan Perancis tidak dianggap lagi sebagai dua negara adidaya. Dengan demikian, negara adidaya menjadi dua: Uni Soviet dan AS. Dengan kesepakatan keduanya, AS dan Uni Soviet menjadi satu kekuatan dan dunia menjadi satu kekuatan besar yang terbentuk dari dua negara tersebut. Tidak ada negara adidaya yang menguasai dunia selain kedua negara tersebut hingga beberapa saat menjelang runtuhnya Uni Soviet.

Dengan naiknya Gorbachev sebagai pemimpin Uni Soviet tahun 1985, atau menjelang kemenangan Reagan untuk masa jabatan keduanya, Uni Soviet mulai mengalami kekalahan demi kekalahan dari AS. Dengan demikian, Uni Soviet menjadi sempoyongan menuju jalan kehancuran. Maka dari itu, benarlah

Reagan ketika ditanya —pada saat ia meninggalkan Gedung Putih— mengenai apa yang dia yakini sebagai keberhasilan utamanya sebagai presiden, Reagan menjawab, "Mereka katakan, saya telah memenangkan perang bintang." Inilah yang mengembalikan dominasi satu negara adidaya terhadap posisi internasional. Uni Soviet tidak lagi dianggap sebagai negara adidaya. Kemudian Uni Soviet mengalami disintegrasi dan Rusia mewarisi potensi dan kekuatan Uni Soviet sebagai negara adidaya. Hanya saja, Rusia menderita kebangkrutan politik, kehilangan identitas ideologis, di samping mengalami problem-problem internal seperti ekonomi dan politik akibat penerapan komunisme. Inilah yang menyebabkan pudarnya pengaruh Rusia terhadap politik internasional.

Dengan demikian, AS menjadi satu-satunya kekuatan adidaya di dunia, yakni negara pertama yang mampu mengendalikan irama politik internasional tanpa ada pesaing atas kedudukannya ini. Meskipun tiga serangkai negara Eropa (Perancis, Inggris, Jerman) telah dan akan mencoba memasuki medan persaingan, sebagaimana pada saat pendudukan Irak tahun 2003 dan saat pertemuan mereka untuk mewujudkan satu kekuatan militer Eropa yang independen dari NATO pada tahun yang sama, dan perdebatan mereka mengenai rencana AS di Timur Tengah yang disampaikan dalam KTT negara-negara G-8 Juni 2004. Akan tetapi, itu bukanlah upaya yang dapat dianggap sebagai persaingan terhadap kedudukan negara pertama, dalam pengertian yang telah dikenal. Itu hanyalah upaya untuk bekerja sama dengan AS yang hanya dapat mempengaruhi politik internasional dalam kadar tertentu.

Inilah kondisi yang ada hingga saat ini. Hendaklah dipahami bahwa negara yang mengendalikan dunia sepanjang sejarah adalah negara adidaya terutama negara pertama. Negara adidaya kadang bisa melemah dan digantikan posisinya oleh negara-negara lain sehingga mengubah posisi internasional. Perubahan kondisi internasional inilah yang akan mengubah bentuk hubungan antar

negara adidaya dan melahirkan perbedaan dalam kekuatan dan kelemahan antara kondisi negara pertama dengan negara-negara lain yang menyainginya. Ini semua mengakibatkan posisi negara pertama akan dapat melemah sebagaimana terjadi pada Inggris ketika disaingi oleh Jerman; atau dapat pula menguat sebagaimana terjadi pada AS ketika memukul pengaruh Inggris dan Perancis serta mempertahankan pengaruh internasional bagi AS dan Uni Soviet setelah pertemuan Wina; atau dapat pula negara pertama menjadi tanpa pesaing atas kedudukannya seperti yang terjadi setelah runtuhnya Uni Soviet. Maka dari itu, semua ini harus dipahami secara mendalam dan mengikuti perkembangannya hingga dimungkinkan untuk memahami politik internasional dengan baik.

FAKTOR PENDORONG PERSAINGAN ANTAR NEGARA

Konflik internasional sejak awal sejarah hinga Hari Kiamat nanti tidak keluar dari dari dua motif berikut: *Pertama*, cinta kepemimpinan dan kebanggaan. *Kedua*, dorongan di balik manfaat-manfaat material. Cinta kepemimpinan (*hubb al-siyadah*) bisa berupa cinta kepemimpinan terhadap umat dan bangsa seperti halnya Nazisme Jerman dan Fasisme Italia. Bisa jadi berupa cinta kepemimpinan terhadap ideologi dan penyebaran ideologi sebagaimana halnya Daulah Islam selama hampir 1300 tahun. Demikian pula halnya negara komunis selama 30 tahun sebelum keruntuhannya pada awal tahun 90-an abad yang lalu, setelah 70 tahun sejak kelahirannya.

Adapun motif untuk membatasi pertumbuhan kekuatan negara lain, seperti halnya yang terjadi pada berbagai negara melawan Napoleon, Daulah Islam, atau Nazi Jerman, termasuk dalam motif cinta kepemimpinan, sebab hal itu akan mencegah kepemimpinan pihak lain.

Dengan hancurnya Daulah Islam dan Uni Soviet, motif yang mendominasi dunia secara keseluruhan adalah nafsu di balik

keuntungan-keuntungan material. Hal ini akan terus demikian hingga kembalinya Daulah Islam sebagai negara adidaya yang akan mempengaruhi persaingan internasional dan pada saat yang sama akan mengembalikan motif cinta kepemimpinan dan penyebaran ideologi.

Motif paling berbahaya dalam persaingan internasional adalah motif penjajahan (imperialisme) dalam segala bentuknya. Sebab, penjajahan itulah yang menyebabkan meletusnya perang-perang kecil dan juga dua perang dunia. Motif penjajahan pula yang menyebabkan perang-perang di Teluk, Afrika, Afghanistan dan Irak. Motif itu pula yang tak henti-hentinya menyebabkan berbagai keresahan dan krisis dunia.

Persaingan, perselisihan, dan konflik yang ada saat ini, antara AS, Inggris, Perancis dan Rusia, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi seputar masalah Irak, Afghanistan, Timur Tengah, dan masalah-masalah internasional lainnya, tak lain karena penjajahan dan karena dominasi dengan motif meraih manfaat material dan sumber-sumber daya alam. Jadi, sesungguhnya penjajahan itulah yang mendominasi persaingan internasional dewasa ini, termasuk segala hal yang dikandungnya seperti konflik untuk memperebutkan sumber-sumbar daya alam, pengaruh, dan persaingan untuk menguasai pihak lain dalam segala bentuk dan jenisnya.

Pada hakikatnya, nafsu untuk meraih manfaat-manfaat material, khususnya kerakusan untuk menjajah, adalah faktor yang melahirkan persaingan internasional di antara negara-negara adidaya. Hal itu pula yang secara nyata mengobarkan berbagai perang lokal dan perang dunia. Untuk menghindarkan diri dari perang-perang ini, dibuat-buatlah apa yang dinamakan perdamaian dan keselamatan dunia serta dalih menjaga keamanan dan perdamaian.

Dalih menjaga keamanan bukanlah dalih baru di dunia, melainkan dalih kuno yang sudah ada sejak abad ke-19. Sebab, perjanjian yang dinamakan Perjanjian Aix-la-Chapelle yang

ditandatangani pada tahun 1818 oleh lima negara adidaya pada saat itu, tiada lain terwujud dengan dalih menjaga keamanan. Dengan perantaraan perjanjian atau persekutuan ini, kelima negara adidaya itu telah menjadikan dirinya sendiri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban komunitas internasional. Mereka akan melakukan campur tangan di negara-negara lain kapan saja diperlukan sesuai klaim mereka bahwa ada ancaman terhadap perdamaian dan ketertiban internasional.

Dalih ini, yaitu dalih menjaga perdamaian dan ketertiban komunitas internasional, selanjutnya dijadikan jalan bagi negara-negara besar untuk melakukan intervensi, jalan untuk perang, menjadi slogan internasional, dan dijadikan alat untuk melestarikan penjajahan dan menancapkan pengaruh.

Perdamaian ini dapat dijaga –menurut klaim mereka— dengan cara melakukan persekutuan di antara negara-negara adidaya atau dengan cara mengadakan berbagai konferensi internasional. Setelah Perang unia I, perdamaian dijaga melalui badan-badan internasional. Dalam perjanjian damai tahun 1919, ditambahkan pasal untuk membentuk sebuah badan internasional guna menjaga perdamaian, yaitu Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Dan memang badan ini harus didirikan untuk menjaga perdamaian. Tetapi negara-negara yang mendirikannya telah menyimpang dari komitmen-komitmenya dan menyalahi tujuan pendiriannya. Sebab, semestinya negara-negara adidaya ini mundur dari kepemimpinannya (jajahannya), dan badan itu sendiri yang menangani penjagaan perdamaian dan mencegah perang. Namun, negara-negara adidaya tidak mau mundur dari negara-negara jajahannya dan tidak mau mengubah keadaannya. Bahkan mereka lalu berambisi mewujudkan keseimbangan antara kekuatan yang berbeda-beda dan memelihara kepentingannya. Selain itu mereka bermaksud hendak membagi-bagi rampasan perang bekas milik Jerman dan Daulah Islam di antara mereka. Inggris mendapatkan bagian terbesar. Hal itu menyebabkan rusaknya perdamaian yang seharusnya dijaga badan LBB,

meletusnya banyak perang, dan kemudian berakhir dengan Perang Dunia II.

Setelah Perang Dunia II, negara-negara adidaya itu berulang kali berupaya mendirikan sebuah badan internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Negara-negara adidaya, yaitu Inggris, AS, dan Uni Soviet dan kemudian bergabung pula Perancis, melakukan pembahasan mengenai keharusan membentuk dunia pasca perang dalam suatu model yang baru yang dapat menjamin stabilitas perdamaian dan mencegah peperangan. Mereka menambahkan pula tujuan lain yaitu kemudahan kerjasama ekonomi di antara sistem yang bermacam-macam dan berbeda-beda, serta memelihara hak-hak asasi manusia (HAM). Sejak saat itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi penjaga perdamaian dan kata “perdamaian” tetap menjadi slogan internasional yang diulang-ulang oleh semua pihak dan dijadikan dalih bagi negara-negara adidaya untuk menjaga perdamaian, mencegah negara-negara lain dari pembebasan, dan mencegah pembebasan diri dari penjajahan. Demikianlah, ide “menjaga perdamaian” telah berkembang hingga menjadi kokoh sebagaimana halnya saat ini.

Masalah penjagaan perdamaian pada badan internasional telah memunculkan mitos “perlucutan senjata.” LBB berupaya untuk melaksanakan isu perlucutan senjata ini. Inggris menjadikan isu tersebut sebagai sarana untuk melemahkan Perancis. Inggris mendorong Jerman untuk menggiatkan persenjataan dalam rangka membentuk keseimbangan di Eropa antara Jerman dan Perancis. Maka, gagallah isu-isu perlucutan senjata dan meletuslah Perang Dunia II.

Ketika terbentuk PBB, lembaga ini juga menggunakan isu perlucutan senjata. Tetapi sampai sekarang tidak ada satu negara adidaya pun yang mampu menipu negara lain seperti yang dilakukan Inggris terhadap Perancis dalam LBB. Demikian pula PBB tidak mampu memberikan pengaruh. Maka, masyarakat hampir-hampir tidak menyadari keberadaan PBB. PBB pun tetap saja menjadi nama yang tidak ada artinya.

Persaingan antara negara adidaya satu sama lain telah memunculkan apa yang dinamakan konferensi internasional dan pakta-pakta. Mengenai konferensi, yang pertama diadakan adalah Konferensi Wina pada tahun 1815. Kemudian sebelum Perang Dunia I diadakan beberapa konferensi. Di antaranya Konferensi Berlin yang diselenggarakan untuk menyepakati penghentian batas-batas Daulah Islam dan pembagian bekas-bekas miliknya. Setelah Perang Dunia I, juga diselenggarakan beberapa konferensi. Di antaranya Konferensi Berlin, Jenewa, dan Paris. Namun setelah kesepakatan AS dan Uni Soviet, dan membentuk keduanya menjadi satu kekuatan, tidak lagi diadakan konferensi satu pun. Kecuali pada tahun 1969, ketika para utusan negara-negara adidaya, yaitu Perancis, Inggris, Uni Soviet, dan AS mengadakan konferensi dalam kerangka akivitas PBB untuk membicarakan apa yang dinamakan krisis Timur Tengah. Tapi, konferensi yang diselenggarakan oleh para presiden berbagai negara ini tidak dinamakan konferensi, karena dilaksanakan dalam kerangka PBB.

Konferensi-konferensi telah diadakan setelah Perang Dunia II untuk membahas problem-problem yang ada di dua Blok, yakni Blok Timur dan Barat, sebab kedudukan Blok Timur lemah dalam PBB. Karena itu, Uni Soviet mencoba mengambil alih kendali inisiatif dari Blok Barat dan berupaya untuk menyaingi AS dalam kedudukannya sebagai negara pertama. Uni Soviet mencoba menyelesaikan masalah-masalah di luar PBB dan berhasil melakukannya dalam Konferensi Berlin dengan memperluas celah perbedaan antara Inggris-Perancis dengan AS. Uni Soviet juga berhasil mengambil keputusan dengan mengadakan Konferensi Jenewa. Uni Soviet berhasil dalam konferensi itu. Jadi, penyelenggaraan konferensi-konferensi itu telah melemahkan AS dan memperkuat Uni Soviet. Inggris juga mencoba mengadakan berbagai konferensi dengan AS untuk memecahkan berbagai masalah di luar PBB. Diadakanlah Konferensi Bermuda, tetapi Inggris tidak berhasil. Setelah itu, tidak diadakan lagi konferensi apa pun di antara negara-negara Blok Barat dan hanya terbatas

pada pertemuan-pertemuan rutin antara AS dan Inggris. AS telah menyadari bahwa penyelanggaraan konferensi di luar PBB akan melemahkan posisinya dan mengakibatkan lemahnya kedudukan AS secara internasional. Karena itu, AS kemudian tidak menyetujui pelaksanaan konferensi di luar PBB, terutama setelah terjadi detente. Yang disetujui AS adalah persekutuan antara AS dan Uni Soviet setelah pertemuan Wina tahun 1961.

Adapun pakta-pakta (perjanjian), ia merupakan perkara yang sudah lama adanya. Pakta-pakta itu dilakukan oleh berbagai negara untuk memperkuat dirinya di hadapan negara lain atau untuk mencegah dominasi satu negara atas yang lain agar tidak merusak keseimbangan di antara mereka. Perjanjian Aix-la-Chapelle yang diadakan tahun 1818 tiada lain adalah merupakan suatu pakta. Pakta-pakta yang ada antara Inggris, Perancis, Austria, dan Jerman merupakan pakta untuk memperkuat dan menjaga keseimbangan. Kemudian pakta yang dibentuk antara Perancis dan Inggris untuk melawan Jerman pada Perang Duia I, adalah pakta untuk melawan sebuah negara adidaya. NATO yang dibentuk setelah Perang Dunia II adalah untuk melawan Uni Soviet, juga Pakta Warsawa yang dibentuk setelah Perang Dunia II, dugunakan untuk melawan Blok Barat. Semuanya adalah pakta-pakta yang diadakan untuk menentang kekuatan lain. Maka, pakta-pakta ini mirip degan konferensi-konferensi internasional yang menjadi salah satu sarana untuk melawan kekuatan lain, atau untuk menjaga keseimbangan. Inilah pakta-pakta yang dianggap merupakan salah satu alat konflik internasional.

Ada pakta-pakta atau perjanjian-perjanjian yang dilakukan negara-negara adidaya dengan negara-negara kecil, atau yang dilakukan antar negara kecil. Pakta-pakta ini tidaklah dianggap sebagai alat konflik internasional secara langsung, melainkan hanya dianggap sebagai sarana penjajahan, atau sarana untuk memperkuat negara adidaya yang merekayasa perwujudannya. Misalnya, Pakta yang diadakan antara Irak dan Turki, dan kesepakatan sebelum Perang Dunia II, yang dinamakan Pakta

Sa'adabad. Pakta ini diadakan Inggris dalam rangka memantapkan pengaruhnya di negeri-negeri tersebut dan dalam rangka menguatkan bobot internasionalnya di hadapan negara-negara adidaya lainnya seperti Perancis dan Uni Soviet. Perjanjian-perjanjian yang diadakan Inggris dengan Irak, antara Inggris dan Mesir, sebelum Perang Dunia II, adalah alat untuk mengokohkan penjajahan Inggris, bukan untuk kepentingan perang. Pakta-pakta yang juga diadakan Inggris setelah Perang Dunia II seperti Pakta Baghdad, atau yang diadakan AS seperti ASEAN, atau yang dirancang AS agar Kuwait, Pakistan, Mesir, Maroko, Argentina, Korea Selatan, Bahrain, Australia, New Zealand, Philipina, Thailand, ditambah Israel tergabung dalam apa yang dinamakan "sekutu strategis di luar NATO" tiada lain adalah sarana penjajahan dan untuk meneguhkan pengaruh AS. Bukan pakta untuk kepentingan perang. Demikian pula pakta-pakta lain semacam ini tidak dapat dianggap alat konflik internasional yang langsung. Yang menjadi alat konflik internasional yang langsung hanyalah pakta-pakta yang diadakan antara sebuah negara adidaya dengan sesamanya.

Seharusnya peran NATO berakhir begitu Uni Soviet dan Blok Timur runtuh. Tapi AS tetap mempertahankan NATO, bahkan berusaha memperluas NATO. Dan AS memang telah melakukan hal itu. AS telah menggabungkan banyak negara Eropa Timur ke dalam NATO. AS berupaya pula menggabungkan negara-negara lain. Hal itu dilakukan karena terjadi perubahan dalam tujuan NATO. NATO bukan lagi diorientasikan untuk menghadapi Blok Timur, melainkan telah diorientasikan untuk menentang anggota-anggota Blok Barat itu sendiri. Sebab, AS telah melihat gelagat adanya upaya negara-negara Eropa yang ingin meloloskan diri dari cengkeraman AS. Maka, AS mempertahankan NATO agar negara-negara Eropa tetap berada di bawah cengkeramannya —karena AS adalah pihak yang mendominasi NATO— dan agar keamanan dan pertahanan Eropa tetap terikat dengan AS.

Belakangan ini negara-negara yang bersekutu dengan AS pada Perang Teluk dan pendudukan Irak –yang disebut negara-negara koalisi— dapat dianggap sebagai contoh persekutuan yang dimaksudkan untuk memperkuat pengaruh AS di kawasan Timur Tengah dan memperkokoh orientasi politik unilateral pemerintahan AS. Pakta atau persekutuan itu adalah salah satu sarana penjajahan AS yang baru.

Itulah dasar-dasar yang menjadi landasan politik internasional secara umum. Dasar-dasar itu merupakan landasan bagi politik setiap negara yang berpengaruh terhadap politik internasional. Dengan dasar-dasar itu aktivitas-aktivitas politik yang terjadi di dunia akan dapat dipahami, akan dapat ditafsirkan secara tepat atau sesuai dengan faktanya, atau setidaknya hampir tepat dan hampir sesuai dengan faktanya. Aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan oleh berbagai negara, baik negara adidaya mapun negara kecil, tidak mungkin bisa dipahami kecuali dengan memahami dasar-dasar tersebut, atau dengan apa yang tercabang atau berkaitan dengan dasar-dasar tadi. Dengan demikian, akan dapat diketahui aktivitas politik apa itu, kapan terjadinya, apa saja faktor-faktor yang terlibat di dalamnya dan dihubungkan dengan dasar-dasar tersebut. Pada saat itulah akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa pula motif-motifnya sehingga dapat dipahami pula apa akibat-akibatnya.

***

PERMASALAHAN BESAR DUNIA

Sesungguhnya banyak sekali aktivitas-aktivitas politik yang terjadi di dunia yang berkaitan dengan berbagai-bagai masalah. Akan tetapi masalah yang terpenting dapat dibatasi pada enam masalah besar, yaitu: masalah Eropa, masalah Timur Tengah, masalah Asia Tengah, masalah Anak Benua India, masalah Timur Jauh, dan masalah Afrika.

Pembatasan hanya pada enam masalah tersebut didasarkan pada alasan-alasan berikut :

Pertama, sesunguhnya konflik dan persaingan yang terjadi antar negara adidaya tiada lain terjadi pada kawasan-kawasan tersebut. Maka wajar jika masalah-masalah di kawasan tersebut merupakan masalah-masalah internasional.

Kedua, bangsa-bangsa di kawasan tersebut hidup dalam suasana bergolak dan sangat tidak terkendali. Karena itu, harus ada upaya untuk menstabilkan kondisi bangsa-bangsa tersebut. Khususnya karena sebagian besar adalah bangsa-bangsa muslim yang sedang

bergerak dengan penuh semangat untuk melepaskan diri dari penguasanya untuk menegakkan Daulah Islami.

Ketiga, sebagian besar peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di dunia, dari segi fakta kejadiannya, berkisar di kawasan-kawsan ini yang selanjutnya akan menjadi contoh yang baik untuk memahami masalah-masalah politik lainnya.

Keempat, kawasan-kawasan ini sangat melimpah dengan sumber daya alam dan kekayaan. Maka, negara-negara penjajah dan perusahaan-perusahaan monopoli senantiasa memperebutkannya dan berusaha dengan segala kekuatan untuk mendominasi dan menguasai sumber daya alam dan kekayaannya.

Kelima, sesungguhnya kawasan benua Amerika telah berhasil disterilkan dari konflik sejak Doktrin Monroe tahun 1823. Dengan doktrin ini AS mencegah negara-negara adidaya Eropa untuk mengintervensi Benua Amerika dan mengancam kepentingan vital AS di benua itu. Maka, konflik internasional dalam pengertiannya yang sudah dikenal tidaklah terdapat di benua tersebut. Sebab, kepentingan AS di benua itu jauh dari ancaman nyata. Adapun yang terjadi berupa hubungan Uni Soviet dengan Kuba pada akhir tahun 50-an dan awal tahun 60-an di abad lalu kemudian AS mendiamkannya, maka itu dikarenakan AS memang bermaksud melakukan pembiaran sebagai perangkap bagi Uni Soviet untuk memperluas komitmennya di luar wilayah Uni Soviet dan Eropa Timur. Hal ini selanjutnya akan memberatkan Uni Soviet secara politik dan ekonomi dalam arti akan memaksa Uni Soviet untuk melindungi Kuba dari bahaya AS. Memberatkan beban Uni Soviet dalam melindungi Kuba inilah yang menjadikan AS diam mengenai hubungi Soviet dengan Kuba. Karena itu, ketika masalahnya semakin kompleks dan sampai pada batas

pembangunan pangkalan nuklir di Kuba, AS berusaha keras mengeluarkan pangkalan itu dari Kuba.

Ringkasnya benua AS berada di luar konflik internasional dalam pengertiannya yang telah dikenal. Bahkan apa pun yang mungkin terjadi hanyalah krisis-krisis internal yang memang AS sendiri tak terlepas dari masalah internal tersebut.

Atas dasar itu, enam masalah tersebut merupakan masalah-masalah besar dunia. Sebelum kita berbicara tentang hal itu, patut kiranya kita ketahui negara-negara adidaya yang berpengaruh terhadap politik internasional. Hal ini karena penggolongan sebuah masalah termasuk masalah internasional yang besar mengharuskan terlebih dahulu bahwa masalah tersebut merupakan medan bagi aktivitas politik yang berpengaruh. Karena aktivitas-aktivitas politik yang dapat dipertimbangkan hanyalah aktivitas yang dilakukan oleh negara-negara adidaya. Jadi harus diketahui negara-negara adidaya di setiap masa.

Negara adidaya adalah negara yang berpengaruh terhadap politik internasional dan yang melakukan aktivitas politik yang mempengaruhi negara-negara lain. Negara adidaya bukanlah negara yang banyak jumlah penduduknya atau negara yang kaya atau yang semisal itu. Negara adidaya tiada lain adalah negara yang mempunyai eksistensi yang berpengaruh terhadap politik internasional dan terhadap negara-negara lain.

Berdasarkan hal itu, negara adidaya pertama pada saat ini, yakni di abad ke-15 H (ke-21 M) adalah AS. Sebab, AS mempunyai pengaruh paling kuat terhadap politik internasional, bahkan hampir-hampir hanya AS sendiri yang mendominasi posisi internasional. Negara-negara lain tidak ada yang sampai pada taraf menyaingi AS dalam kedudukannya itu, atau dalam dominasinya terhadap posisi internasional. Akan tetapi karena Rusia adalah pewaris Uni Soviet yang dianggap sebagai negara adidaya sebelum keruntuhannya, dan

Rusia bersama Inggris dan Perancis merupakan negara-negara adidaya sebelum Perang Dunia II, maka masing-masing negara tersebut masing mempunyai sisa-sisa eksistensinya dalam politik internasional. Masing-masing negara tersebut, secara sendiri maupun bersama Eropa, melakukan berbagai aktivitas politik yang mempengaruhi politik internasional dan AS, meskipun pengaruh ini lemah dan tidak sampai pada derajat "persaingan" —dalam pengertiannya yang telah dikenal— untuk merebut kedudukan AS dalam politik internasional. Ketiga negara tersebut (Rusia, Inggris, Perancis) dapat diidentifikasi sebagai negara adidaya. Hal itu adalah penyebutan yang longgar, karena mempertimbangkan adanya beberapa aktivitas politik Inggris yang memperoleh eksistensi atau sebagian eksistensi dalam politik internasional. Juga karena Perancis dan Rusia telah melakukan upaya-upaya untuk mengokohkan eksistensinya dalam politik internasional sebagaimana yang terjadi dalam Perang Teluk.

Akan halnya Jerman, dari segi bangsa Jerman dan negara Jerman dalam sejarah, dia dapat dianggap negara adidaya. Tetapi setelah kekalahannya pada Perang Dunia II, Jerman tidak dapat dianggap lagi sebagai negara adidaya, persis seperti kondisi Jerman setelah kekalahannya pada Perang Dunia I. Sebagaimana halnya Jerman kembali dari Perang Dunia I sebagai negara adidaya yang mengecil, maka Jerman dimungkinkan akan kembali menjadi negara adidaya meski perlu waktu lama. Gerakan Jerman bersama Perancis pada beberapa masalah internasional menunjukkan hal itu.

Mengenai Cina, sesungguhnya sulit menganggap Cina sebagai negara adidaya yang berpengaruh terhadap politik interasional dalam arti yang telah dikenal. Baik berpengaruh di dunia maupun di berbagai belahan wilayah dunia. Meskipun jumlah penduduknya 1,2 miliar jiwa, sangat diperhitungkan oleh Rusia, dan dianggap AS sebagai negara yang patut diperhitungkan secara internasional, tapi Cina tidak dapat dianggap sebagai

negara adidaya. Ini karena dua alasan. *Pertama*, Cina tidak pernah menjadi negara adidaya dalam sejarahnya sekejap pun. Cina tidak berpengaruh terhadap politik internasional pada masa lalu kapan pun juga. Lebih dari itu, Cina semenjak menjadi negara komunis sampai sekarang, tidak berminat untuk menyebarkan komunisme secara internasional dan mempengaruhi berbagai kawasan di dunia. Cina hanya membatasi perhatiannya pada wilayahnya saja, khususnya setelah Cina gagal dalam upaya-upaya politik yang dilakukannya di Afrika dan beberapa negara Asia. Aktivitas ini tidak membuahkan hasil apa pun, kemudian Cina pun tidak mampu melanjutkannya lagi sehingga Cina pulang kampung kembali ke wilayah asalnya.

Adapun India, meski penduduknya lebih dari 930 juta jiwa dan mempunyai senjata nuklir, tapi pengaruhnya dalam politik internasional hampir-hampir tidak ada. Karena itu tidak perlu terlintas dalam benak kita bahwa India adalah sebuah negara adidaya. Itu karena tidak ada kemungkinan bahwa India mempunyai pengaruh terhadap politik internasional. Sedangkan Jepang, sebelum Perang Dunia II, pada masa poros dia, memang mempunyai pengaruh terhadap politik internasional. Namun pengaruhnya bersifat temporal (sementara) seperti halnya Italia. Maka, Jepang dan juga Italia tidak lagi termasuk negara adidaya.

Sedangkan umat Islam, dulu dia adalah negara adidaya hingga masa Perang Salib. Kemudian kembali menjadi negara adidaya semenjak umat Islam memenangkan Perang Salib. Umat Islam tetap berpengaruh terhadap politik internasional hingga abad ke-19, kemudian setelah itu pengaruhnya melemah sampai negara umat Islam ini dihancurkan pada awal abad ke-20 setelah Perang Dunia I.

Namun demikian, faktor-faktor pengokoh sebuah negara adidaya tetap ada dalam umat Islam. Telah nampak tanda-tanda vitalitasnya yang menggeliat sejak akhir abad yang lalu. Umat Islam ini hampir muncul kembali dan akan kembali

sekali lagi sebagai negara adidaya bahkan negara pertama, *insya Allah.*

Maka dari itu, haruslah diketahui bangsa-bangsa dan negara-negara ini, sebab semuanya berpengaruh terhadap masalah-masalah besar dunia, yaitu :

Pertama, negara-negara adidaya yang empat, yaitu AS, Inggris, Perancis, dan Rusia.

Kedua, bangsa-bangsa dari negara-negara yang dulunya merupakan negara adidaya dan bersiap-siap untuk kembali menjadi negara adidaya, yaitu umat Islam dan Jerman.

Ketiga, selain bangsa-bangsa tersebut dapat ditambah dengan bangsa Jepang, sebagai satu kekuatan ekonomi yang mempunyai pengaruh ekonomi internasional dalam masalah-masalah besar dunia, meski Jepang bukan negara adidaya dalam pengertian yang telah dimafhumi bersama.

Adapun Cina, walaupun ia merupakan negara adidaya tetapi hanya di dalam wilayah regionalnya. Dengan kata lain, Cina dapat disifati sebagai negara adidaya regional. Karena itu, pengaruh Cina terhadap masalah-masalah internasional dalam berbagai kawasan dunia yang bermacam-macam adalah pengaruh yang lemah, kecuali di wilayah regionalnya. Maka, kita akan tinggalkan pembicaraan tetang Cina di sini dalam pembahasan mengenai negara dan bangsa yang berpengaruh secara internasional. Kita akan membahas Cina ketika kita menyinggung masalah-masalah Samudera Cina regional.

Kita akan mulai membahas tentang negara dan bangsa tersebut sebagai berikut :

1. Umat Islam

Umat ini muncul sejak Allah SWT mengutus rasul-Nya yaitu Muhammad SAW dengan membawa Islam untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Kemudian muncul Daulah Islam, negara umat ini, setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah al-Munawarah.

Daulah Islam ini terus eksis setelah wafatnya Rasulullah SAW, yakni pada masa Khulafa Ar-Rasyidin dan khalifah-khalifah sesudahnya. Daulah Islam melakukan pembebasan-pembebasan dan menyebarkan kebaikan ke seluruh penjuru dunia hingga ia dihancurkan pada awal abad yang lalu. Diprediksi Daulah Islam ini akan muncul kembali beberapa saat lagi, dengan seizin Allah.

Pada awalnya Islam diemban oleh orang Arab. Kemudian Islam tersebar luas ke seluruh dunia. Manusia dalam berbagai macam kebangsaannya lalu masuk ke dalam agama Islam, baik Arab maupun bukan Arab. Mereka dilebur seluruhnya dengan wadah peleburan Islam, tidak ada bedanya antara orang 'ajam (non-Arab) dengan orang Arab kecuali karena takwanya.

Dan karena orang Arab adalah orang pertama yang mengemban Islam, maka haruslah dipahami karakter bangsa Arab secara khusus, kemudian harus diketahui pula karakter umat Islam.

Bagsa Arab dahulu dikenal sebagai bangsa yang senantiasa hidup dalam peperangan, terbiasa dengan perang. Maka, pada diri mereka terdapat apa yang dinamakan "tabiat kemiliteran" dan apa yang dinamakan "tanggung jawab terhadap orang lain". Karena itu, mereka layak untuk mengemban risalah Islam dengan jalan yang telah diturunkan Allah, yaitu dakwah dan jihad, yaitu perang secara fisik untuk menyebarkan kebaikan bukan untuk memperbudak. Orang Arab terjun ke dalam peperangan dengan manusia setelah disampaikan Islam kepada mereka dengan penyampaian yang membangkitkan perhatian, dalam rangka untuk menyebarkan ide Islam yang mereka emban. Bukan untuk menjajah dan memperbudak bangsa-bangsa. Di kalangan mereka terdapat ide bahwa lilin yang terbakar akan dapat menerangi, dan bahwa salah satu karakter mereka yang menonjol adalah bertanggung jawab kepada pihak lain, dan menyamakan kedudukan manusia seperti dirinya sendiri.

Umat Islam setelah mereka memeluk Islam seluruhnya akan menjadi bagaikan bangsa yang satu dan terdapat pada mereka apa yang dinamakan "tabiat kemiliteran untuk berjihad". Sebab,

jihad adalah puncak ajaran Islam. Akan terdapat pula pada mereka apa yang dinamakan ide menyebarkan hidayah kepada seluruh manusia yang dari sana lahir sikap menolong sesama umat manusia. Maka dari itu, meskipun umat Islam mengalami kemerosotan, meskipun telah jauh jarak waktu antara mereka dengan pendahulu mereka yang pertama kali memeluk Islam dan mengemban risalah Islam dengan jalan dakwah dan jihad, mereka seluruhnya tetap saja memiliki "tabiat kemiliteran untuk berjihad", apa yang dinamakan bertanggung jawab kepada orang lain, dan penyebaran hidayah kepada manusia. Keadaan mereka seperti keadaan orang Arab yang pertama kali mengemban risalah Islam tatkala terjadi peleburan bangsa-bangsa yang telah masuk Islam dalam wadah peleburan Islam, meskipun mereka berasal dari berbagai bangsa.

2. Bangsa Jerman

Bangsa Jerman adalah bangsa yang sudah lama dari segi eksistensinya dan dari segi asal usulnya. Mereka sangat kuat, mempunyai kesadaran akan harga diri yang tinggi, teguh, berani, keras kepala, tetapi mempunyai kepercayaan diri yang berlebihan. Mereka sangat keterlaluan dalam klaimnya sebagai yang berhak memimpin bangsa lain. Aspek kemiliteran dan perang merupakan salah satu karakternya, seakan-akan itu adalah fitrah mereka, atau salah satu sifat alamiah yang mereka bawa sejak lahir. Kemiliteran Jerman inilah yang membangkitkan rasa takut tetangga-tetangganya, khususnya negara-negara adidaya, seperti Inggris, Perancis, dan Rusia. Bangsa Jerman telah menghabiskan waktu yang panjang dalam berbagai perang dan pertempuran internal. Telah berlalu banyak generasi yang terjun dalam perang-perang melawan negara-negara tetangganya seperti Perancis.

Kehidupan bangsa Jerman adalah dalam dunia industri, khususnya industri alat-alat perang yang terus berkembang. Karena itu, meskipun Jerman dilarang mempunyai senjata nuklir, Jerman tetap menakutkan negara-negara tetangganya serta

membangkitkan rasa ngeri di kalangan pesaing dan musuhnya. Maka, kekuatan-kekuatan anti Jerman selalu melakukan konspirasi untuk menghalangi kebangkitan Jerman agar Jerman tidak masuk dalam kategori negara-negara adidaya. Meski demikian bangsa Jerman adalah bangsa yang hidup (dinamis) yang mempunyai peluang untuk kembali menjadi sebuah negara adidaya. Sebab, pertumbuhan makhluk hidup pada umumnya akan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Jerman adalah sama dengan bangsa-bangsa Barat lainnya. Tatakala Jerman memeluk kapitalisme, nilai kemanfaatan menjadi bagian gaya hidupnya. Jadi, Jerman yang menjadi tempat tinggal bangsa Jerman, haruslah dianggap negara penjajah. Dahulu bangsa Jerman mempunyai negara-negara jajahan sebelum Perang Dunia I. Ketika Jerman terjun dalam Perang Dunia II, di antara niatnya adalah mengembalikan negara-negara jajahannya yang hilang dan merebut jajahan-jajahan dari negara-negara lain serta mencari jajahan-jajahan baru baginya. Jadi, penjajahan itu adalah politik Jerman, bukan seperti yang diduga bahwa penjajahan hanya politik Hitler saja. Sekarang Jerman pun tidak jauh dari aktivitas penjajahan. Sebab, kendatipun Jerman tidak melakukan penjajahan langsung, tetapi sekarang termasuk negara garis depan dalam penjajahan ekonomi. Jerman terus melakukan perluasan ekonomi, khususnya pada kawasan-kawasan negara Eropa Timur dalam suatu hegemoni ekonomi yang luar biasa.

Adapun sistem pemerintahan Jerman, tetap menampakkan sifat totaliter secara jelas, walaupun Jerman mengklaim sebagai pemerintahan demokratis. Sistem totaliter itu nampak dalam perilaku setiap penguasa Jerman baik dulu mapun sekarang.

Setelah Perang Dunia I, Jerman dipaksa tunduk dalam kondisi-kondisi yang keras. Meski demikian, Jerman tetap mampu untuk menghadapi kondisi-kondisi ini dan kembali menjadi negara adidaya. Hal itu didukung oleh dua faktor. *Pertama,* adanya *al-ihsas al-fikri* (proses berpikir yang bertolak dari penginderaan) yang nampak pada rakyat mereka. Sehingga hal ini mempercepat

gerak mereka untuk mengembalikan Jerman sebagai negara adidaya. *Kedua*, bahwa Inggris berkehendak merusak keseimbangan internasional antara Inggris dan Perancis. Maka, Inggris lalu memprovokasi Jerman secara diam-diam untuk kembali menyaingi Perancis dan menjadi sekutu bagi Inggris. Hal ini memungkinkan Jerman untuk kembali menjadi negara adidaya.

Adapun setelah Perang Dunia II, Jerman tidak mempunyai faktor apa pun yang mendukungnya kembali menjadi negara adidaya. Sebab, negara-negara Sekutu seluruhnya tanpa kecuali telah meletakkan batas-batas yang menghalangi kembalinya Jerman sebagai negara adidaya. Faktor terpenting yang menghalangi kembalinya Jerman menjadi negara adidaya hingga sekarang adalah sebagai berikut. *Pertama*, kesibukan rakyat Jerman di bidang ekonomi seraya berpaling dari industri perang, yang selanjutnya akan memalingkan mereka dari pengaruh terhadap politik internasional. Orientasi ambisi mereka dalam aspek ekonomi itulah yang telah memalingkan perasaan mereka dan mengalihkan kegiatan-kegiatan mereka dari industri perang yang akan menjadikannya sebuah negara adidaya yang berpengaruh yang berpotensi melakukan aktivitas politik secara efektif. *Kedua,* adalah kewaspadaan Uni Soviet yang terus-menerus terhadap bahaya Jerman atas Uni Soviet. Uni Soviet tak pernah lengah dari bahaya Jerman sedetik pun. Terhadap Jerman, Uni Soviet mengambil sikap yang tegas tanpa belas kasihan sedikit pun serta tanpa memperhatikan nilai apa pun juga. Tidak ada yang mendominasi politik Uni Soviet terhadap Jerman kecuali satu saja, yaitu menghancurkan Jerman untuk selama-lamanya. Maka dari itu, gagallah segala upaya yang dilakukan Jerman untuk bangkit bergerak. Karena itu pula AS tidak berhasil ketika mengadopsi rencana menghidupkan militerisme Jerman setelah tahun 1955. Tidak berhasil pula upaya Inggris menyatukan kembali Jerman. Perancis pun tidak berhasil, tatkala De Gaulle berusaha menyatukan Eropa dan menjadikan penyatuan ini untuk membantu Jerman kembali mempersenjatai diri dan

mengembalikan kesatuannya. Tidak berhasil pula upaya apa pun untuk menghalangi Uni Soviet secara teguh.

Adapun penyatuan Jerman yang telah terjadi, bukanlah hasil dari aktivitas politik, atau upaya, atau garis politik para politisi Jerman. Unifikasi itu tiada lain terjadi sebagai akibat dari kekalahan demi kelalahan yang diderita Uni Soviet di hadapan AS pada saat runtuhnya Uni Soviet. Karena AS memandang ia harus memukul Uni Eropa dengan penyatuan Jerman, dalam rangka untuk menghambat Uni Eropa atau menunda perwujudannya. Cara AS adalah dengan merekayasa problem-problem ekonomi dalam federasi Jerman, yang merupakan pemberi dana terbesar bagi kesatuan Eropa, dengan menyatukan Jerman Timur yang lemah secara ekonomi dengan federasi Jerman. Akan tetapi Jerman berhasil melampaui kesulitan ini dan mulai berusaha melepaskan diri dari tekanan AS, untuk menuju ke Eropa khususnya Perancis, untuk memberikan kesan bahwa Jerman berusaha untuk mempengaruhi Perancis.

Jerman mempunyai peran berpengaruh dalam pasar bersama Eropa yang kemudian telah menyusul Uni Soviet. Tapi Jerman selalu berusaha melakukan itu dengan cara-cara ekonomi yang berarti Jerman akan mempunyai pengaruh atas negara-negara Eropa, khususnya Eropa Timur, dengan jalan memberikan bantuan ekonomi. Tapi ini tak berarti bahwa Jerman akan mempunyai peran dalam politik internasional. Sebab, memberi pengaruh terhadap politik internasional haruslah bertolak dari kekuatan militer dan aktivitas politik yang akan mengakibatkan dilaksanakannnya dan diwujudkannya suatu garis politik. Inilah hal yang tidak dimiliki oleh Jerman, meski Jerman telah mulai mecoba melakukannya dengan berkoordinasi dengan Perancis. Namun berbagai upaya atau aktivitas itu tak lebih hanya sekadar reaksi belaka. Reaksi-reaksi ini semakin meningkat sampai derajat mempengaruhi AS sebagaimana dalam peristiwa invasi AS atas Irak. Demikian pula upaya Jerman bersama Perancis, kemudian terlibatnya Inggris dalam isu kekuatan pertahanan Eropa bersama

yang terpisah dari NATO. Ini telah mencemaskan AS, walau pun hanya sebatas usul pendiriannya.

Semua ini menunjukkan bahwa Jerman telah mulai mencari peran dalam politik internasional. Maka, meskipun perlu waktu lama, kembalinya Jerman sebagai negara adidaya sekali lagi adalah perkara yang dapat diprediksikan. Sebab, kekuatan-kekuatan artifisial bagaimana pun juga keberhasilannya menghalangi tumbuhnya bangsa yang hidup, keberhasilannya hanya bersifat sementara sampai waktu tertentu. Pada akhirnya, sebuah institusi yang hidup akan mengalahkan setiap penghambat yang menghalangi pertumbuhannya.

Kesimpulan politik Jerman saat ini secara garis besar adalah sebagai berikut. Sesungguhnya politik Jerman dibangun atas dasar karakter Eropa yang pragmatis. Sebab, dari segi kerjasamanya dengan Perancis, Jerman telah membentuk poros Perancis-Jerman sebagai batu pijakan untuk politik Eropa bersatu di masa datang. Hal itu di sisi lain akan menjaga kepentingan AS di Eropa dan memelihara perlindungan AS yang strategis bagi keamanan Jerman setelah Perang Dunia II; tidak mengorbankan kepentingan AS, melainkan selalu meletakkannya pada prioritas utamanya. Pada sisi lain, politik Jerman memberi perhatian penuh khususnya dalam bidang ekonomi. Politik ini nampak dengan upaya Jerman untuk mendominasi dan menikmati sendiri ekonomi Eropa Timur tanpa keikutsertaan sekutu-sekutu Eropanya.

Akhir-akhir ini nampak bahwa politik Jerman mulai memberi perhatian yang semakin meningkat dalam aspek-aspek militer dan politik dengan dimensi internasional. Contohnya adalah peran serta Jerman yang semakin bertambah dalam kegiatan-kegiatan NATO di Afghanistan, Bosnia, Kosovo, dan keikutsertaan Menteri Luar Negeri Jerman dalam kegiatan-kegiatan politik bersama koleganya dari Perancis dan Inggris; seperti yang terjadi dalam kunjungan tiga menteri tersebut kepada tiga menteri di Iran dan menekan mereka agar bersedia menandatangani protokol tambahan, guna memeriksa target-

target atas fasilitas-fasilitas nuklirnya. Di antaranya juga aktivitas Jerman untuk memainkan peran dalam arbitrase yang berhasil dalam masalah pertukaran tawanan antara negara Yahudi dan Hizbullah.

Walhasil, sesungguhnya kita melihat perkembangan dalam politik Jerman, yang nampak pada keluarnya Jerman dari peran isolasi sebelumnya, yang membuat Jerman hanya mencukupkan diri pada aspek ekonomi semata. Ini berarti pengamat akan dapat mencermati peran politik Jerman yang semakin besar yang telah nampak dan seolah-olah setara atau sama dengan peran Perancis dan Inggris.

Jika Jerman ingin cepat kembali menjadi negara adidaya, dia wajib segara membangun indutsri perang dan menjadikan hal itu sebagai masalah utamanya. Demikian pula Jerman harus mempunyai kesadaran politik dalam pergaulannya dengan Perancis dan Inggris. Sebab, sudah diketahui bahwa Perancis dan Inggris berusaha untuk menundukkan Uni Eropa demi memperkuat pengaruh internasionalnya, dan bahwa Perancis telah menjadi kuat berkat Jerman demi menonjolkan dirinya di Eropa. Sudah diketahui pula bahwa Inggris senantiasa menggunakan kecerdikan politiknya dalam pergaulannya dengan Perancis dan Jerman demi mewujudkan kepentingannya sendiri.

Maka meski terus berkoordinasi dengan Perancis secara khusus dan dengan negara-negara Eropa secara umum, Jerman haruslah memperhatikan dirinya sendiri agar menjadi kekuatan militer yang mempunyai bobot militer dalam Uni Eropa. Ini agar Jerman tidak hanya ditundukkan demi kepentingan pihak lain. Jerman harus pula mencermati posisi internasional menurut perspektif Jerman, bukan perspektif Eropa, serta agar menarik pelajaran dari sejarah Eropa.

3. Bangsa Jepang

Bangsa Jepang lahir sebagai bangsa yang mahir dalam perdagangan dan pelayaran. Mereka hidup di negeri-negeri yang

sempit. Anda akan melihat tabiat menonjol mereka adalah keberanian dan salah satu sifat mereka adalah selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Maka, bangsa Jepang dengan cepat melakukan industrialisasi —dengan hanya revolusi industri— dan menjadi salah satu negara adidaya meskipun negeri mereka kecil. Mereka tak peduli apapun untuk terjun dalam perang melawan Cina, untuk mencaplok satu wilayah milik Cina. Mereka pun tidak pernah ragu-ragu menyerang AS, sebab Jepang melihat AS adalah bahaya bagi Jepang.

Karena itu, di antara strategi penting AS —untuk memaksakan dominasinya atas Jepang— adalah menjadikan industrialisasi Jepang bukan berdasarkan prinsip industri perang, melainkan berdasarkan prinsip perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Semua itu adalah untuk mencegah Jepang agar tidak berkecimpung dalam kancah internasional. Jepang saat ini merupakan kekuatan ekonomi yang sangat diperhitungkan.

4. Bangsa Amerika

Bangsa Amerika adalah bangsa yang kaya. Di negeri mereka terdapat kekayaan alam yang besar. Bangsa ini terlibat konflik yang terus menerus dengan negara-negara Eropa yang dulu pernah menjajahnya, khususnya dengan Inggris. Mereka meraih kemerdekaan dengan kekuatan senjata berdasarkan kesadaran dan pemahaman. Hal ini telah memunculkan beberapa karakter khusus di kalangan orang Amerika. Yang terpenting adalah apa yang dikenal dengan *Pragmatisme*. Pada bangsa ini didapati juga dampak perlawanannya terhadap imperialisme Eropa, yakni kecenderungan dan penghormatan akan nilai-nilai luhur. Namun bangsa Amerika telah memeluk ideologi Kapitalisme sebagaimana negara-negara Kristen lainnya, sehingga ada dua faktor yang tarik menarik, yakni: (1) Faktor sikap menerima dan menjaga diri, dan (2) Faktor asas manfaat dan semangat menjajah. Dahulu, Inggris mengeksploitasi faktor pertama dan menundukkannya agar Amerika menjadi kekuatan Inggris dalam peperangan dan

perekonomian. Ini terjadi pada saat faktor pertama mendominasi bangsa Amerika.

Namun ketika terjadi Perang Dunia II dan bangsa Amerika merasakan "nikmatnya" imperialisme pada minyak Teluk, faktor kedua lalu mendominasi mereka, yaitu penggunaan standar manfaat dan penjajahan. Bangsa Amerika pun lalu dikendalikan oleh ideologi Kapitalisme dan mereka pun lalu keluar dari isolasinya untuk menjajah berbagai bangsa dan menundukkan dunia bagi dominasi dan pengaruhnya. Bangsa Amerika tidak akan kembali sekali lagi kepada isolasinya, kecuali dengan kekuatan. Sebab, ideologi Kapitalisme telah mendominasi mereka sehingga ideologi itu mengendalikan kehidupan mereka dan standar manfaat satu-satunya yang mendominasi segala perilaku mereka; selain sikap arogan dan suka menipu yang juga dominan dalam hidup mereka.

Dulu Amerika menjadi jajahan negara-negara Eropa, terutama Inggris, dan terbagi-bagi menjadi banyak negara. Maka, pada awalnya Amerika mencoba untuk mengurangi tekanan penjajahan Inggris. Kemudian bersama dengan itu Amerika memasuki perang kemerdekaan yang kuat yang menyebabkan terusirnya Inggris dari negeri-negeri Amerika. Negara-negara ini bersepakat untuk mendirikan federasi di antara mereka dan membentuk sebuah negara darinya. Hal ini kemudian berlangsung dengan baik. Kemudian negara-negara lainnya bergabung dengan satu negara itu, kadang-kadang secara sukarela dan kadang-kadang dengan kekuatan militer. Negara-negara itu kemudian menjadi bagian dari negara Amerika hingga pembentukannya menjadi sempurna seperti yang ada sekarang hingga berjumlah 51 negara bagian. Amerika tumbuh sebagai negara yang kuat dan terjun dalam politik internasional sebagai negara yang kuat pula. Amerika mampu melindungi dua benua Amerika dari cengkeraman negara-negara Eropa dan menjadi dunia lain yang dikenal dengan istilah Dunia

Baru. Amerika mempunyai rakyat yang giat bekerja dengan kekayaan alam yang melimpah-ruah.

Amerika Serikat (AS) telah mendirikan sebuah sistem pemerintahan. Meskipun sistem itu masih sistem demokrasi, tetapi ia dirancang dengan pemikiran mendalam, dan berdasarkan kesadaran yang praktis terhadap arti kekuasaan. Yaitu bahwa pemerintahan adalah untuk manusia yang dikendalikan oleh manusia. Jadi, mereka tidak menggambarkan suatu pemerintahan ideal dengan berdasarkan logika, melainkan memahami pemerintahan secara faktual dan aplikatif. Hal itu dapat dicermati dengan seksama dalam tata cara pengangkatan presiden, otoritas-otoritas luas yang diberikan kepadanya, perannya dalam negara, pembatasan otoritas aparatur-aparatur negara lainnya, dan dalam hal kesatuan kekuatan yang direpresentasikan oleh negara. AS bertumpu pada hal-hal tersebut, meskipun ia adalah sistem federal. Kepahaman AS terhadap pemerintahan juga dapat dilihat dalam kesempatan luas yang diberikan kepada rakyat untuk memilih presiden dan memilih aparatur-aparaturnya. Hal ini memiliki pengaruh yang besar dalam hal kekuatan negara dan tumbuhnya kekuatan ini dengan kecepatan yang luar biasa.

Sebelum Perang Dunia II, AS telah keluar dari isolasinya dan ikut berserikat dalam mengendalikan dunia. Bahkan AS mencoba untuk mengendalikan dunia sendirian. Namun kemudian musuhnya (Uni Soviet) berserikat dengan AS sejak tahun 1961-1979 dalam mengatur dunia dan berhasil membatasi ambisi negara-negara besar lainnya. Ketika negara-negara Eropa melihat bahwa AS dapat mencapai target-targetnya dari politik detente (peredaan ketegangan AS-Uni Soviet), dari persekutuannya dengan Uni Soviet, dan persekutuan ini ternyata membawa beberapa dampak negatif, maka negara-negara Eropa berusaha melepaskan diri dari AS dan menjalin hubungan dengan Uni Soviet. Uni Soviet pun mencoba melakukan upaya-upaya yang berani –meski tidak berhasil- untuk terjun dalam persaingan

politik internasional. Hal itu dimaksudkan agar Uni Soviet menjadi satu kutub internasional yang independen dan lepas dari politik AS. Tatkala AS menyadari hal itu, AS memutuskan untuk kembali berkonsentrasi menghadapi Uni Soviet dan terjun dalam perlombaan senjata yang baru. Hal ini telah menyulut perang dingin yang baru. Dengan demikian AS telah berhadapan dengan Uni Soviet dan Blok Timur dalam sebuah perang peradaban, ideologi, dan ekonomi. AS berhasil menarik Uni Soviet dan membelenggu Uni Soviet dengan berbagai macam perjanjian. Inilah yang menyebabkan runtuhnya Uni Soviet di akhir konflik dan menyebabkan AS menjadi negara nomor satu dan kutub yang paling besar pengaruhnya terhadap politik internasional.

Di AS ada dua partai utama, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Orang hampir-hampir tidak dapat mengetahui perbedaan yang besar di antara program-program dua partai tersebut, bahkan juga pada kebijakan politik yang diambil. Dua partai itu hampir-hampir menempuh satu metode yang sama, dan hampir-hampir tidak ada perbedaan apapun dalam pergantian kekuasaan di antara dua partai tersebut, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Kalaupun terjadi perubahan-perubahan, itu hanya perubahan yang ditutut oleh situasi dan kondisi, bukan tuntutan yang muncul dari perbedaan program kedua partai tersebut.

Partai Demokrat adalah partai yang lama. Ia adalah partai rakyat dan memiliki suara mayoritas yang menentukan di tengah-tengah rakyat. Karena itu pada umumnya mayoritas Kongres tetap berada di pihaknya. Adapun Partai Republik adalah partai yang lebih baru kemunculannya dibanding dengan Partai Demokrat. Partai Republik merupakan partai orang-orang kaya dan para kapitalis raksasa. Mayoritas anggotanya adalah pemilik modal yang besar dan pemilik perusahaan-perusahaan monopoli. Dalam partai itu terdapat sejumlah besar kaum terpelajar. Partai Republik ini tidak begitu menaruh perhatian untuk meraih dukungan mayoritas rakyat dan juga dalam merebut umumnya masyarakat

untuk berada di pihaknya. Andaikata sistem pemilihan presiden tidak mendukungnya, niscaya Partai Republik tidak akan berhasil merebut kepemimpinan sama sekali, sebab ia adalah partai minoritas bukan partai mayoritas.

AS, sebagaimana halnya negara-negara kapitalis, dikuasai oleh para pemilik perusahaan monopoli dan para pengusaha. Mereka itulah yang memiliki pengaruh terhadap politik AS. Akan tetapi karena setiap individu rakyat benar-benar menikmati haknya sebagai warga negara dan mampu mempengaruhi jalannya pemerintahan –baik dalam pemilu maupun dalam pengawasan- maka pemerintahan AS lebih nampak sebagai pemerintahan seluruh rakyat dibandingkan negara-negara kapitalis lainnya.

Dan karena kekayaan AS merupakan penolong yang tidak kunjung habis, juga karena tercukupinya jumlah kaum terpelajar dan pemikir, serta adanya suasana kebebasan dan kesungguhan yang menguasai AS, maka kekuatan AS adalah kekuatan yang nyata, bukan kekuatan yang hanya nampak secara lahiriah. Meskipun AS bukan bangsa yang asal-usulnya sudah ada sejak dulu, yang sebenarnya hanya merupakan kumpulan individu atau komunitas dari berbagai macam negeri, tetapi kewarganegaraan atau kebangsaan telah menghimpun mereka dalam suatu ikatan yang kuat. Bahkan orang asing yang hidup beberapa tahun di AS, kemudian mengambil kewarganegaraan AS dan memiliki hak kewarganegaraan, akan menjadi orang yang lebih mendukung negara, rakyat, dan kepentingan AS daripada negara asalnya. Hal ini dihasilkan dari kekuatan yang dinikmati oleh para individunya dan dalam interaksi antara manusia.

Adapun politik luar negeri AS adalah politik orang kaya dan para pemilik perusahaan monopoli. Artinya, politik AS adalah politik imperialisme murni, yang tidak mengenal nilai-nilai luhur. Meskipun kadang-kadang politisi AS nampak lugu dan hampir-hampir dungu, namun mereka berpikir secara mendalam yang mengunggulli kebanyakan politisi di dunia. Mereka memiliki kemampuan yang tinggi untuk berubah dengan cepat, kemudian

membuat beraneka ragam strategi dan memecahkan masalah. Barangkali ambisi untuk menjajah, di samping pendidikan yang tinggi, berpengaruh terhadap aktivitas politik mereka. Para politisi AS menganggap seluruh dunia adalah ladang bercocok tanam milik mereka. Mereka memandang negara-negara besar lainnya tidak layak untuk mempunyai pengaruh, dan bahwa sekarang negara-negara besar itu harus mundur, keluar, dan rela terhadap keadaan dunia yang ada, yaitu adanya ketundukan terhadap dominasi pihak-pihak yang kuat.

Saat ini AS mempunyai galangan kapal nuklir yang terbesar, mengungguli apa yang dimiliki negara-negara nuklir lainnya dengan berlipat ganda. Jika anggaran militer AS dibandingkan dengan negara-negara adidaya lainnya, akan nampak keunggulan AS atas negara-negara itu. Pada tahun 2002 anggaran militer negara-negara adidaya Barat adalah sebagai berikut:

Inggris	= 35 miliar USD
Perancis	= 32 Miliar USD
Jerman	= 23 Miliar USD +
Jumlah Total	= 90 Miliar USD

Adapun anggaran militer AS sendiri besarnya 350 Miliar USD. Apalagi terdapat perbedaan jenis persenjataan dan juga pendapat sebagian pengamat bahwa AS mendahului Eropa puluhan tahun dari segi kemajuan teknologi. AS juga menguasai PBB dan juga segenap badan-badan dunia bentukan PBB. AS juga memiliki dana terbesar di Bank Dunia dan IMF, yang selanjutnya memiliki pengaruh politik yang luas yang menjadi bidang pekerjaan Bank Dunia dan IMF. Demikian pula AS berusaha memperkuat perdagangan dunia melalui politik globalisasi yang menjadi senjata WTO. AS berupaya menjadikan WTO sebagai salah satu sarananya untuk mengintervensi pasar-pasar lokal dengan dalih tarif bea masuk bersama. Dengan demikian AS berupaya untuk melakukan liberalisasi perdagangan. Dan karena AS mempunyai kekuatan ekonomi yang besar,

mempunyai perusahaan multinasional dan transnasional yang paling banyak, AS pun memanfaatkan kedok peraturan yang dikeluarkan oleh WTO untuk kepentingan AS dalam rangka membuka pasar-pasar yang nyaris tertutup, atau sulit diintegrasikan dalam perekonomian global terbuka seperti yang dikehendaki AS.

Kemampuan-kemampuan militer, politik, dan ekonomi yang besar bagi AS ini, membuat AS mengintervensi seluruh negara yang ada di dunia ini. Hal itu juga membuat AS menjadi bagian politik lokal di setiap negara di dunia. Jadi, AS mencoba untuk mengelola politik hegemoni atas politik seluruh dunia tanpa kecuali. Tidak ada bedanya antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, meskipun beberapa kali hegemoni itu telah gagal. Namun AS terus mencoba untuk melakukan hegemoni.

Maka dari itu, AS semakin berpengaruh pada setiap masalah yang ada di dunia. AS-lah yang menyulut krisis di wilayah-wilayah yang berkobar. AS membuat klasifikasi-klasifikasi baru untuk berbagai negara, misalnya negara-negara poros kejahatan (*evil axis*), negara-negara pendukung terorisme, dan lain-lain. Tidak ada yang selamat dari bahaya istilah-istilah itu, bahkan negara sekutu atau pengikutnya pun juga tidak selamat. Bahkan AS mewajibkan dunia untuk berpihak kepadanya atau berpihak kepada teroris. Kalau memilih tidak bersama AS dan juga tidak bersama teroris, tidak dibolehkan. Padahal AS-lah yang menciptakan krisis-krisis, menimbulkan masalah-masalah, dan menciptakan ketegangan-ketegangan. Kemudian setelah itu, AS pula yang mengendalikan krisi-krisi tersebut, mencari solusi-solusinya. AS melakukan hal itu semua sebagai bagian integral dari strateginya untuk melakukan hegemoni atas dunia.

Walhasil, AS telah memanfaatkan kekuatan militer dan ekonominya dalam aktivitas-aktivitas politiknya secara sangat buruk. Artinya, pengaruh AS tidak terbatas pada aspek ekonomi dan perdagangan semata, sebagaimana halnya negara-negara

kapitalis tradisional pada umumnya, melainkan meluas sampai seluruh aspek kehidupan sipil. Dengan demikian pengaruh AS nampak di bidang pendidikan, media masa, sosial, pemikiran, ideologi, dan keamanan.

Di bidang pendidikan, peran AS tampak jelas dalam perubahan kurikulum yang sedemikian rupa agar sesuai dengan perspektif ideologinya. Maka, kita lihat negara-negara Arab, seperti Arab Saudi, Kuwait, Yordania, Mesir, dan yang lainnya telah sibuk mengevaluasi kurikulumnya dengan dalih perkembangan dan penyesuaian dengan jaman. Arab Saudi telah mengubah salah satu materi agama terpenting di antara bab buku-buku sekolahnya, yaitu materi *al-wala' wal bara'*. Yordania, Mesir, Kuwait, dan negara lainnya juga mengubah materi yang berkaitan dengan jihad dan perang melawan kaum kafir agresor, seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Negara-negara tersebut juga mengubah ide-ide Islam yang dibenci AS.

Di bidang media massa, AS telah mengeluarkan dana ratusan juta dolar AS untuk mempengaruhi media masa mayoritas di negeri-negeri kaum Muslim. AS mendirikan radio VOA dan stasiun televisi *al-Harrah*. Itu semua untuk menyebarkan racun-racun AS di setiap rumah di negeri-negeri Arab.

Di bidang sosial, AS memfokuskan diri pada isu perempuan untuk menjauhkan perempuan dari nilai-nilai Islam. AS mengeluarkan dana dan menekan berbagai pemerintahan untuk mengadakan konferensi-konferensi tentang perempuan. AS juga menekan untuk memasukkan isu perempuan dalam bidang pemerintahan dan perlemen. AS menyebarkan pemikiran feminisme dalam bentuk-bentuk dan istilah-istilah baru.

Di bidang pemikiran dan ideologi, AS mempersenjatai diri dengan pusat-pusat kajian untuk pemikiran, demokrasi dan pluralisme. AS juga mendirikan organisasi-organisasi HAM untuk mempropagandakan ide-ide kebebasan menurut konsep Barat dan metode AS. Berbagai organisasi dan pusat-pusat studi ini juga dibekali dengan film-film Hollywood dan produk saisn dan

teknologi mutakhir yang menguasai penyebaran sebagian besar saluran-saluran televisi Aran dan non-Arab.

Adapun di bidang keamanan, AS berupaya untuk menjalin hubungan dengan dinas-dinas intelijen di negara-negara arab dengan dinas intelijennya, khususnya dengan CIA dan FBI. Akhirnya, kita bisa melihat mobilitas agen-agen intelijen AS di kota-kota di negeri-negeri Islam dengan bebas dan dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana halnya di Sudan, Yaman, Kenya, Tanzania, Libya, Pakistan, dan negara-negara lain. Hubungan intelijen ini mencakup penyerahan orang-orang yang dicari kepada AS dan adanya toleransi kepada kekuatan-kekuatan AS khususnya untuk melakukan aktivitas militer tertentu untuk melawan orang yang disebut-sebut AS sebagai "teroris".

Demikianlah, tangan-tangan AS telah sedemikian menggurita dalam sendi-sendi kehidupan sehari-hari di masyarakat negeri Islam maupun juga negeri non-Islam. AS telah menyebarkan kerusakan di negeri-negeri tersebut di mana pun dia berada, seperti yang diperbuat AS di Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, bahkan di Amerika Latin ketika AS menjatuhkan presiden Haiti terpilih, yaitu Aristide dan membuangnya ke luar negeri. Saat ini AS berusaha menjatuhkan Hugo Chavez, presiden Venezuela, dari kursi kekuasaan. Dengan demikian, AS mampu menaklukkan hampir seluruh negeri-negeri yang lemah disebabkan ketundukan dan kepasrahan penguasanya kepada AS.

Tetapi hegemoni AS ini tidak akan berlangsung lama. Hegemoni AS sedang menuju jurang kehancuran. Sebab, meski eksistensi AS dapat dilihat di setiap sudut permukaan bumi dan para penguasa bekerja sama dengan eksistensi AS ini, tetapi kebencian berbagai bangsa dunia khususnya umat Islam semakin besar terhadap AS. Kebencian sebagian besar mereka kepada AS semakin bertambah disebabkan kekurangajaran dan kesombongan AS dan keberpihakan AS kepada Yahudi. Hal itu

juga disebabkan penjajahan dan perbudakan AS terhadap negara lain.

Kami menyatakan semakin besarnya kebencian terhadap AS ini akan menimbulkan perlawanan dan penentangan terhadap eksistensi AS di setiap tempat, baik di benua AS maupun di luar benua AS. Di samping itu, negara-negara adidaya lainnya juga mengalami kesulitan dan pukulan atas kepentingan-kepentingannya akibat kesombongan AS dan penguasaan tunggal AS terhadap kekayaan dunia, serta aksi AS untuk melangsungkan hegemoni yang terus menerus. Hal itu disebabkan oleh upaya AS untuk memonopoli pengaturan urusan internasional.

Sesungguhnya keberadaan sebuah negara yang mengadopsi ideologi kapitalisme, yang melakukan penjajahan dan penghisapan negara lain, serta posisi negara ini sebagai pemimpin dunia tanpa kekuatan yang menyainginya dalam kepemimpinan dunia, akan menjadikan dunia berada dalam penderitaan terus-menerus, mengalami masalah-masalah yang beruntun dan mengalami krisis yang susul-menyusul. Apa yang dapat disaksikan dan dirasakan, seperti kerusakan dan pengrusakan dunia oleh AS, juga rekayasa AS yang susul menyusul, telah menguatkan hal tersebut.

Penderitaan dan kesengsaraan dunia yang dihasilkan dari negara-negara kapitalis, khususnya AS, tidak akan lenyap kecuali dengan tegaknya negara Khilafah yang akan menerapkan ideologi yang haq, yaitu Islam yang agung yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *rahmatan lil alamin*. Pada saat itu, keadilan Islam akan dapat menyingkapkan ketamakan kapitalisme, dalam pemikirannya yang materialistik dan metode imperialisme mereka. Demikian pula kekuatan Islam yang baik akan menghancurkan kesombongan dan arogansi AS, serta akan memaksa AS untuk kembali ke isolasinya dan Dunia Barunya, andaikata Dunia Baru itu masih ada. Kemudian kebaikan akan dapat tersebar luas ke seluruh

penjuru dunia dan dunia pun akan dapat bernafas lega setelah lama menderita dan sengsara.

5. Bangsa Inggris

Sesungguhnya industri perikanan dan kapal telah mendominasi bangsa Inggrris sejak kelahirannya, yang kemudian mewujudkan kebiasaan pelayaran dan perdagangan pada bangsa itu. Tradisi itu lalu membentuk tabiat untuk berburu kekayaan dan mengeksploitasi, di samping tabiat mereka sebagai pedagang. Dan karena wilayah negerinya yang kecil, Inggris harus meminta tolong pihak lain, sebagaimana kebiasaan para nelayan yang senantiasa meminta pertolongan sesama mereka di lautan. Jarang sekali mereka keluar sendirian.

Lalu datanglah ideologi Kapitalisme kepada bangsa Inggris, dan mereka pun kemudian menganut ideologi tersebut dan berakarlah pada mereka asas manfaat. Maka, anda akan melihat kehidupan Inggris di bidang politik sejak kelahirannya hingga sekarang, selalu tegak berdasarkan sikap meminta tolong pihak lain dan melakukan persiapan makanan setiap kali mereka berburu sesuatu. Baik sesuatu itu adalah negeri yang dijajah Inggris maupun negara yang dimintai tolong oleh Inggris.

Inggris melaksanakan seluruh politiknya atas dasar pakta-pakta, persekutuan-persekutuan, dan kerjasama dalam melakukan penjajahan. Karena itu, pada abad ke-19 Inggris bekerjasama dengan negara-negara lain dalam melakukan penjajahan dan menjajah sesuka hati sebagian negeri-negeri agar negeri-negeri itu berada di pihak Inggris dan membela kepentingan-kepentingan Inggris. Inggris berupaya untuk memasukkan Perancis di Timur Tengah setelah Perang Dunia I dengan tujuan agar Perancis berada di pihak Inggris jika muncul bahaya atas kawasan Timur Tengah. Itu juga dilakukkannya untuk meletakkan Perancis di garda depan guna menghadapi bahaya. Bahkan sampai-sampai dikatakan bahwa Inggris baru

akan berperang hingga tentara Perancis yang terakhir terbunuh.

Demikianlah, sesungguhnya tabiat seorang nelayan ikan telah melahirkan tradisi meminta tolong kepada pihak lain pada jiwa orang Inggris untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya.

Kemudian, ada kebiasaan lain yang sudah masyhur dimiliki oleh Inggris yang merupakan satu kebiasaan utamanya, yaitu berpegang teguh dengan nilai-nilai lama dan tidak melampaui batas dengan mengubah atau mengembangkannya, kecuali secara perlahan-lahan. Mereka juga tidak mengubah atau mengembangkannya kecuali perubahan memang harus dilakukan. Jadi bangsa Inggris adalah bangsa yang konservatif dalam pengertian harfiahnya. Sejak dahulu sampai sekarang bangsa Inggris dikuasai oleh keluarga-keluarga lama (bangsawan), orang-orang kaya dan para pemilik modal raksasa. Meskipun Inggris mengklaim bahwa ia menjalankan demokrasi, bahwa ia bangsa demokratis, tetapi kalau dikaji mendalam akan terbukti bahwa faktanya tidaklah demikian. Rakyat Inggris tidak memiliki pengaruh apa pun dalam pembentukan kekuasaan. Sebaliknya, yang mengangkat para penguasa adalah keluarga-keluarga aristokrat dan para pemodal, bukan rakyat. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara jaman dahulu dengan jaman sekarang. Sebab, bangsa Inggris sampai sekarang —sebagaimana sejak dahulu— nasibnya senantiasa ditentukan oleh kaum bangsawan dan kaum kapitalis.

Sejak duhulu mereka memberantas dan menumpas setiap gerakan rakyat yang lahir di Inggris dengan kejam. Revolusi Cromwell yang dibanggakan Inggris sebenarnya bukan revolusi rakyat, melainkan revolusi kaum bangsawan melawan rakyat. Pada saat itu muncul revolusi rakyat yang berkehendak untuk menghapuskan kekuasaan kaum bangsawan dan kaum kapitalis. Revolusi ini hampir saja berhasil dan kaum aristrokrat hampir mendukungnya. Tapi, Cromwell kemudian mengirim utusan untuk

melakukan revolusi yang menuntut sebagian hak. Cromwell lalu mendapatkan dukungan dan berhasil mewujudkan tuntutannya, kemudian Cromwell berhasil menghancurkan tuntutan rakyat itu dan menumpasnya sejak dini.

Sejak puluhan tahun yang lalu yang menguasai Inggris adalah Partai Konservatif. Partai Buruh hanyalah sekadar alat yang hanya digunakan ketika Inggris membutuhkannya, atau ketika ada masalah-masalah yang tidak mampu diatasi Partai Konservatif. Pada saat itulah Partai Buruh didatangkan untuk kemudian didikte dalam penyelesaian masalah tersebut.

Nampak bahwa para pemimpin Partai Buruh akhir-akhir ini telah menyadari hakikat ini lalu mencoba untuk mengadaptasikan diri sesuai dengan hakikat tersebut. Hal ini mengakibatkan pergiliran dua partai itu dalam kekuasaan lebih dekat pada pergantian peran antara Partai Konservatif dan Partai Buruh daripada posisi Partai Buruh sebagai alat kaum konservatif.

Maka, bisa kita lihat bahwa Tony Blair, pemimpin Partai Buruh sekarang dan Perdana Menteri Inggris, telah mengubah karakter partainya dan menjadi sangat dekat dengan garis politik Partai Konservatif. Hal itu nampak dalam program politik Partai Buruh yang tidak berbeda dengan progam politik Partai Konservatif. Bahkan Tony Blair menjadikan Margaret Tatcher, pemimpin Partai Konservatif terdahulu, sebagai suri teladan baginya dalam politik. Demikian pula Partai Buruh tidak banyak berbeda dengan Partai Konservatif. Kedua partai di Inggris ini menjadi mirip Partai Republik dan Partai Demokrat di AS.

Dalam Partai Buruh sendiri, jika didapati ada orang-orang yang menyadari keadaan Inggris yang didominasi oleh kaum bangsawan dan kapitalis, maka orang-orang itu akan diletakkan dalam posisi sulit untuk menjauhkan pengaruhnya pada partai dan politik. Anggota Partai Buruh Ernest Bevin pada tahun 30-an hingga 60-an, dan George Brown pada tahun 60-an, adalah contoh terbaik untuk menunjukkan dominasi Partai Konservatif atas Partai Buruh. Dua orang itu juga merupakan contoh terbaik

orang-orang yang dijauhkan karena menghendaki pembatasan dominasi kekuatan yang berkuasa di pemerintahan.

Partai Konservatif sendiri tidak memilih pemimpinnya, melainkan sudah ditentukan oleh ketua partai politik sebelumnya, sebagaimana McMillan ketika mengangkat Lord Home, atau Margaret Tatcher ketika mengangkat John Major. Meskipun Heath dan Major telah dipilih tetapi itu pemilihan formalitas belaka, karena mereka berdua telah ditentukan lebih dahulu dan baru kemudian dilakukan pemilihan secara formalitas. Dari sini, meskipun sistem pemerintahan di Inggris dinamakan demokrasi, tetapi hakikatnya adalah pengangkatan oleh lapisan tertentu. Yang mengangkat adalah keluarga bangsawan, kaum kapitalis, dan para pemodal.

Mengingat Inggris adalah sebuah pulau di tengah lautan dan pulau tersebut tidak mencukupi penghidupan penduduknya, maka keluarnya penduduk Inggris dari pulau itu –untuk memenuhi tuntutan penghidupan— adalah hal yang tidak dapat dielakkan. Tetapi, meski mereka keluar untuk berdagang, sebenarnya mereka keluar sebagai penjajah bukan sebagai pedagang. Mereka keluar untuk menghisap darah bangsa lain dan merampas kekayaan mereka, bukan untuk menukarkan kekayaan mereka. Sebab, bangsa Inggris pada awalnya memang tidak punya kekayaan yang dapat dipertukarkan. Maka, mereka keluar justru untuk mencari kekayaan.

Itulah keadaan mereka sejak keluar dari pulau. Tatkala mereka memeluk ideologi kapitalisme —dan asas manfaat adalah bagian integral darinya— maka ideologi ini menjadi cocok dengan tabiat mereka. Karakter penjajah itu lalu menjadi kuat dalam bangsa Inggris dan mereka pun menjadi negara penjajah nomor satu.

Kemudian, karena jumlah populasi mereka sedikit dan tidak mampu menghadapi kekuatan yang lebih hebat dari mereka, maka bangsa Inggris pun lalu menundukkan bangsa dan negara lain untuk membantu mereka. Mereka meletakkan bantuan ini

dengan berbagai bentuk persekutuan, sepeti pakta-pakta, konferensi-konferensi, dan kesepakatan-kesepakatan. Maka, karakter gemar bersekutu (*takattuliyah*) ini menjadi bagian tak terpisahkan dari politik bangsa Inggris. Meskipun kecerdasan mereka biasa-biasa sebagaimana halnya bangsa lain, tapi mereka menggunakan kecerdasannya sampai batas akhir.

Dengan demikian, bangsa Inggris nampak menonjol dalam kepahaman akan aktivitas, kepahaman akan politik, dan kepahaman akan penyelesaian masalah. Bangsa Inggris pun secara menonjol mempunyai daya pikir untuk menyelesaikan masalah. Dan karena kebutuhan mereka yang mendesak untuk melakukan ekspansi, mereka pun mendirikan industrinya atas dasar industri peperangan. Hal ini menjadikan bangsa Inggris sebagai negara yang –secara harfiyah— mempunyai kekuatan perang, alat perang, dan kekuatan industri. Di samping kepahaman mereka yang sudah mengakar mengenai politik dan pemerintahan, bangsa Inggris mempunyai kecerdasan, yang dalam banyak hal disertai keculasan.

Politik luar negeri Inggris didasarkan pada penjajahan. Dalam penjajahan ini, Inggris menonjol dalam dua hal berikut. *Pertama*, menjaga keseimbangan internasional. *Kedua*, menjaga eksistensi Inggris dalam politik internasional, berapapun harga yang harus dibayar untuk itu.

Karena itu, Inggris pernah terjun dalam Perang Salib secara menonjol. Dalam Aliansi Suci, Inggris pun berada di barisan depan negara-negara adidaya. Pada saat Napoleon melakukan ekspansinya, Inggris menjadi pemimpin kekuatan untuk menghancurkan ekspansi itu dan mengembalikan Perancis pada keadaannya semula. Jerman di masa Bismarck pernah bersekutu dengan Inggris di Konferensi Berlin, yang di antara targetnya adalah membatasi kekuatan Jerman. Ketika Inggris merasakan perkembangan kekuatan Jerman yang tidak wajar, Inggris lalu mengumumkan perang terhadap Jerman dan memerangi Jerman dalam dua perang dunia.

Inggris mencoba menarik dunia seluruhnya terjun dalam perang dunia untuk mengubah peta dunia dan untuk melemahkan dua negara adidaya yang mendominasi dunia pada saat itu, pada era detente. Ketika Inggris dijauhkan dari politik internasional setelah adanya kesepakatan dua negara adidaya, maka Inggris seperti orang yang kehilangan eksistensinya. Inggris lalu bersikap *nervous* (gugup) dan berusaha mati-matian untuk mengembalikan eksistensi internasionalnya dan ikut serta dalam politik internasional.

Politik internasional Inggris bersandar pada perjanjian-perjanjian dan upaya menarik para tokoh politisi serta mempengaruhi mereka. Inggris tidak peduli untuk memberi satu suapan besar makanan kepada saingannya agar Inggris dapat mempunyai posisi tawar terhadapnya. Dalam politik, Inggris tidak mengenal kawan atau lawan. Yang dikenalnya hanyalah kepentingan. Inggris tidak mengenal apapun selain kepentingan.

Apa yang disebut dengan moralitas internasional dianggap Inggris hanya sebagai alat untuk menipu dan tidak diakui keberadaannya. Meskipun Inggris berusaha tidak menampakkan kebohongan demi mencari kepercayaan pihak lain terhadap Inggris, tetapi Inggris telah menjadikan kebohongan itu sebagai senjata efektif dalam politiknya. PM Churchill dalam pertemuannya dengan Roosevelt dan Stalin untuk membahas masalah perang dan masa depan Jerman, pernah mengatakan terus terang, "Sesungguhnya fakta dalam peperangan sangatlah berharga, sampai-sampai itu harus dijaga dengan sempurna dengan melakukan kebohongan-kebohongan." Ini menunjukkan sampai batas berapa jauh kebohongan dianggap sebagai hal esensial dalam politik Inggris.

Itulah fakta Inggris dan fakta politiknya. Berinteraksi dengan Inggris haruslah didasarkan pada pandangan bahwa Inggris adalah negara penjajah dan bahwa Inggris hidup dengan mengeksploitasi bangsanya. Berbagai masa dan peristiwa tidak mampu mengubah metode Inggris ini. Inggris telah memperdaya

berbagai revolusi rakyat yang terjadi hingga tidak membiarkan satu revolusi yang berhasil.

Maka, melawan penjajahan Inggris tidak akan pernah berhasil, kecuali dengan memahami sarana-sarananya, dan dengan konfrontasi menantang, yang disertai dengan kecerdikan yang tampil dengan lugu, dengan taktik-taktik yang tersembunyi. Kekuatan Inggris di negerinya tersembunyi dalam pernyataan penyair, "Dia mengobatiku dengan sesuatu yang berupa penyakit." Kekuatan Inggris di luar negeri terletak pada penundukannya atas pihak lain untuk kepentingan Inggris, bahkan termasuk pihak yang melawan Inggris.

Tidak ada jalan untuk mengalahkan Inggris kecuali dengan melepaskan Inggris dari senjata politik tradisionalnya dan dengan menghadapinya dalam kondisi ketika Inggris sendirian tanpa penolong dan sekutu.

6. Bangsa Perancis

Bangsa Perancis adalah bangsa yang telah membentuk negara yang lama berakar di jantung Eropa. Perancis membanggakan diri pada negara-negara Eropa lainnya bahwa mereka adalah bangsa yang mencetuskan ide-ide yang luhur seperti kebebasan, keadilan, dan persamaan. Bangsa Perancis dikenal telah melahirkan tokoh-tokoh hebat dalam politik dan pemikiran. Tapi bagaimanapun Perancis adalah negara penjajah yang berbeda dengan negara lainnya dengan pengaruh kebebasan padanya sebagai karakter individu bangsa ini. Karakter ini telah berubah menjadi suatu tradisi di kalangan orang Perancis bahkan menjadi satu tabiat mereka.

Sejak menganut ide kebebasan, bangsa Perancis mempunyai sifat dasar terfragmentasi (individualis). Bangsa Perancis lebih mirip kumpulan individu daripada suatu umat, bangsa, atau komunitas. Maka, jarang sekali di Perancis ada satu pemerintahan atau kekuasaan yang kuat. Karena itulah, Inggris dengan mudah dapat memanfaatkan Perancis beberapa kali

secara berulang-ulang. Walhasil, sejak turunnya Napoleon sampai era De Gaulle, Perancis selalu berjalan seiring dengan Inggris.

Hal itu dikarenakan berakarnya ide kebebasan di Perancis. Bahkan ketika Perancis keluar untuk menjajah di Amerika, Asia, dan Afrika, itu pun karena diajak keluar oleh Inggris dalam rangka untuk memperkuat Inggris, meski yang nampak di permukaan adalah persaingan antar dua negara dalam sejarah penjajahan bagi dua negara.

Atas dasar itu, seseorang tidak akan bisa menilai bangsa Perancis dengan satu karakter istimewa yang melebihi karakter kebebasan itu. Kebebasan pemikiran telah melahirkan para filosof, penyair, pemikir, dan lain-lain. Kebebasan politik telah melahirkan sifat kehormatan, kemuliaan, dan rasa percaya diri, yang pada gilirannya telah melahirkan sejumlah besar tokoh-tokoh hebat. Kebebasan individu telah menjadikan Paris sebagai tempat prostitusi yang amoral dan tempat memuaskan dorongan nafsu syahwat. Kebebasan inilah yang telah menyebabkan adanya celah di Perancis yang dapat disusupi oleh pihak-pihak asing, terutama Inggris. Maka, kebebasan dalam pengertiannya yang absolut dapat dianggap sebagai biang keladi masalah di Perancis.

Seseorang tidak akan dapat mengatakan bahwa di Perancis ada partai-partai anu, atau bahwa partai anu sifatnya begini. Sulit dan bahkan nyaris mustahil atas suatu bangsa yang keadaannya seperti Perancis, untuk terbentuk partai-partai dalam arti yang sebenarnya. Yang ada hanyalah kumpulan individu-individu, lalu menyebut dirinya sebagai partai. Karena itu, di Perancis sulit terwujud suatu pemerintahan yang kuat atau stabil. Sebab, setiap orang Perancis adalah penguasa bagi dirinya sendiri dan setiap orang Perancis berambisi menjadi penguasa.

Maka dari itu, seseorang tidak akan dapat mengatakan bahwa politik dalam negeri Perancis adalah begini dan politik luar negerinya adalah begitu. Politik dalam negeri Perancis didasarkan pada watak para penguasa dan pada pemahaman mereka tentang

kebebasan. Sedang politik luar negeri Perancis didasarkan pada kadar kemampuan Perancis untuk mengalahkan pihak lain dalam rangka untuk menjajahnya dan sejauh mana pengaruhnya pada mereka.

Perancis terhitung sebagai negara penjajah. Sebab, ia telah menganut ideologi kapitalis. Asas manfaat telah menjadi bagian esesnsial dalam kehidupan Perancis. Maka, Perancis sangat berambisi untuk melakukan penjajahan dan mempertahankan negeri-negeri jajahannya.

Kalaupun harus memberikan gambaran politik luar negeri Perancis, yang perlu diperhatikan adalah bahwa politik Perancis didasarkan pada upaya untuk mewujudkan pengaruhnya di luar negeri, baik pengaruh di negara-negara jajahan, maupun pengaruh budaya, politik, dan ekonomi. Kegiatan politiknya melawan negara-negara adidaya hanya menonjolkan upaya kepribadiannya dan berserikat dalam kebesaran dan dominasi. Perancis tidak begitu baik dalam melakukan manuver-manuver politik, bahkan lebih sering memicu konfrontasi. Maka, cukup mudah mengungkap adanya konflik antara Perancis dengan AS belakangan ini. Sementara itu sulit mengungkap adanya konflik dengan negara lainnya terutama Inggris.

Metode yang ditempuh untuk menghadapi kegiatan-kegiatan politik Perancis adalah tidak menyinggung kehormatan dirinya, tidak memberinya peluang untuk mengambil inisiatif, dan tidak menganggapnya sebagai negara adidaya, kecuali dalam kadar yang dapat diterima oleh negara-negara adidaya dalam politik internasional.

7. Bangsa Rusia

Bangsa Rusia adalah bangsa yang rajin bekerja, mempunyai vitalitas dan kekuatan, tetapi lugu dan sederhana. Meskipun pada awalnya menganut kapitalisme, kemudian menganut komunisme, lalu kembali menganut kapitalisme, tetapi Rusia tetap terbelakang di banding Eropa. Rusia belum

mencapai level bangsa-bangsa Eropa. Ini menimbulkan problem inferioritas di kalangan orang Rusia terhadap bangsa Eropa, yang menimbulkan pengaruh negatif dalam perilaku mereka.

Bangsa Rusia adalah bangsa yang mahir berperang dan pemberani di negeri mereka. Tapi, jika mereka ke luar negeri, mereka kehilangan karakter mereka itu. Karena itu, Rusia sejak lama sudah diramalkan akan kehilangan dominasinya atas negara-negara Eropa Timur. Dan Rusia benar-benar kehilangan dominasinya itu setelah hancurnya Uni Soviet. Fakta-fakta sejarah mendukung bahwa bangsa Rusia tidak pernah meraih kemenangan di luar negeri dalam setiap peristiwa sejarah. Dilema yang dihadapi Rusia di Chechnya, sebuah negeri kecil, memperkuat hal tersebut. Sementara itu, Rusia meraih kemenangan atas musuh-musuhnya ketika Rusia diserang di negeri mereka sendiri. Kemenangannya yang termasyhur adalah ketika Rusia diserang di dalam negerinya sendiri, sebagaimana yang terjadi dengan invasi Napoleon dan Hitler.

Sistem pemerintahan di Rusia pada masa kekaisaran berbeda dengan masa komunisme dan berbeda pula dengan masa sekarang. Namun, dalam semua keadaan itu sistemnya bersifat diktator. Dahulu kaisar secara khusus mendasarkan sistemnya pada golongan feodal. Saat itu tuan-tuan tanah besar mengadakan kesepakatan dengan orang-orang kaya untuk menguasai negeri dengan penguasaan seperti yang dilakukan para tuan tanah. Pada saat itu mereka mendukung politik kaisar, baik dalam negeri maupun luar negeri secara mutlak. Mereka semua telah mengeksploitasi rakyat secara serakah sehingga mengakibatkan kemerosotan dan keterbelakangan bangsa Rusia.

Sebelum Perang Dunia I, Rusia adalah negara terbelakang bila dibandingkan Eropa, dan dieksploitasi oleh bagian negara Eropa. Industri-industri strategis di Rusia saat itu berada di tangan Perancis, Inggris, dan Belgia. Industri tambang yang terpenting ada di tangan orang-orang Perancis. Industri batubara di galangan

Dunitz ada di tangan orang-orang asing. Hampir setengah sumur-sumur minyak Rusia ada di tangan orang-orang Inggris dan Perancis. Bagian yang besar dari keuntungan industri Rusia mengalir ke bank-bank asing, khususnya bank-bank Inggris dan Perancis. Negeri Rusia hingga tahun 1914 merupakan negeri terbelakang dalam hal sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Meskipun demikian, Rusia adalah negara adidaya dan secara internasional dianggap negara adidaya dan berpengaruh terhadap politik internasional.

Ketika Partai Komunis merebut kekuasaan, keadaan pemerintahan tidak berubah, kecuali dari segi cara (*style*) orang-orang komunis yang memerintah negeri Rusia dengan tangan besi, banyak melakukan pembunuhan, penumpahan darah, penyiksaan dan teror. Mereka bermaksud menstabilkan pemerintahannya atas ketidakpuasan rakyat.

Rusia mampu memaksa negara nomor satu (AS) untuk membuang ide memerangi Rusia. Rusia pun melakukan kesepakatan dengan negara nomor satu tersebut, sehingga menjadi negara sekutu atau seperti sekutu baginya. Dengan demikian, Rusia telah menjadi negara sekutu utama untuk mengatur dunia. Bahkan dunia seluruhnya ada di bawah dominasi dua negara raksasa, yaitu negara Uni Soviet dan AS.

Adapun politik Rusia di era komunisme didasarkan pada suatu *fikrah* (ide) tertentu. Ide tersebut adalah menyebarkan komunisme, sedangkan *thariqah* (metode) yang ditempuh adalah melakukan penghancuran dan menyulut kontradiksi. Setiap kali ada kesempatan, Rusia berusaha memasukkan ide komunisme ke sebagian negeri, sebagaimana Rusia juga selalu berupaya untuk mendominasi berbagai negara yang menjadikan sistem pemerintahannya sebagai sistem komunis.

Adapun setelah runtuhnya komunisme, bangsa Rusia dan para pemimpinnya membutuhkan jati diri baru yang berbeda dengan Rusia era kekaisaran dan era komunisme. Mereka

kemudian menuju kapitalisme. Bangsa Rusia pun bagaikan orang yang menyegarkan diri dari panas terik dengan api. Merekapun bertambah miskin di atas miskin. Goncanglah Rusia serta posisinya di dunia.

Sistem pemerintahan di Rusia telah menjadi sistem kapitalis dan mirip dengan sistem kekaisaran. Namun ada sebagian dari era komunisme yang dipertahankan. Lapisan kapitalis dan para pemodal besar kembali eksis dan mempunyai pengaruh yang total terhadap pemerintahan, sebagaimana pada masa kekaisaran. Namun kali ini berbeda dengan masa kekaisaran. Sebab, Rusia sekarang dipimpin oleh bekas tokoh intelijen Rusia (KGB) dan bekas politisi komunis. Mereka telah mengganti kulit mereka dengan kulit kapitalis dalam penampilan yang baru.

Adapun politik luar negeri Rusia, fokusnya adalah upaya agar Rusia mempunyai peran dan kedudukan, namun tanpa disertai pandangan global terhadap politik luar negeri. Maka, eksistensi Rusia di percaturan internasional terus merosot, sehingga target mereka hanyalah agar punya peran dan tidak terpinggirkan dari politik internasional.

Kondisi hilangnya jatidiri ideologis pada bangsa Rusia dan kebangkrutan politik di kalangan pemimpin bangsa Rusia memberikan peluang bagi pihak lain untuk menghambat politik-politik Rusia dengan mengadakan hubungan perdagangan dengan Rusia. Kaum Muslim akan dimungkinkan untuk memasuki Rusia dan Rusia pun dimungkinkan untuk melihat Islam hidup dalam interaksi antar manusia. Kondisi itu juga memberi kesempatan untuk melawan upaya-upaya Rusia guna mempengaruhi politik internasional dengan jalan tidak memberikan kesempatan kepada Rusia untuk memberikan pengaruhnya, dan membatasi hubungan Rusia hanya pada aspek perdagangan saja. Kondisi tersebut juga memberikan kesempatan untuk melawan Rusia pada bidang-bidang yang lain sebagaimana negara-negara kapitalis lainnya. Sebab, politik luar negeri Rusia dilakukan atas dasar eksploitasi

dan penjajahan, meski hal ini tidak nampak kecuali di negara-negara tetangga Rusia.

Sesungguhnya empat bangsa yang terakhir dibahas; yaitu bangsa Amerika, Inggris, Perancis, dan Rusia adalah bangsa-bangsa dari negara yang saat ini dianggap negara adidaya yang mempunyai dominasi utama dalam politik internasional di berbagai kawasan dunia. Bangsa-bangsa itu juga melakukan persaingan sesama mereka dengan kekuatan dan kelemahan yang berbeda kadarnya di antara mereka. Dengan mempelajari pengaruh mereka terhadap politik internasional pada abad ke-21 saat ini, dapat dibuat garis-garis besar politik bagi empat negara tersebut sebagai berikut.

Amerika. Amerika kekuatannya semakin besar dengan cepat setelah runtuhnya Uni Soviet yang tiba-tiba. AS telah menjadi negara raksasa yang kuat pengaruhnya terhadap dunia. Khususnya setelah ada kevakuman yang ditinggalkan Uni Soviet yang tidak dapat diisi oleh nagara adidaya manapun, sehingga AS menjadi negara raksasa tanpa pesaing. Hingga saat ini tidak ada satu pun negara adidaya yang dapat menjangkau kedudukan negara nomor dua yang dulu diperankan oleh Uni Soviet.

Keadaan yang janggal dalam percaturan internasional ini –yang membuat AS superior atas negara lainnya— menjadikan para politisi AS cenderung untuk sombong dan arogan ketika berinteraksi dengan negara lain. Menteri Luar Negeri AS di masa Clinton, Medelein Albright telah menyatakan keadaan tersebut dengan berkata, "Sesungguhnya AS adalah satu bangsa yang telah dipastikan menjadi penanggungjawab dunia. AS siap untuk melakukan apa saja kapanpun dia kehendaki. Hendaklah semua pihak mengetahui bahwa kami melakukan apa yang kami inginkan dan mengubah apa yang kami kehendaki. Tidak ada hambatan-hambatan yang menghadang jalan kami, karena dunia adalah milik kami, dunia adalah milik orang-orang Amerika."

Kecongkakan dan kesombongan dalam politik AS ini telah mendorong sekutu AS —bahkan negara-negara Eropa— untuk tidak setuju dengan arogansi AS atas dunia. Juga tidak setuju dengan komentar Albright, yang semakin menegaskan kesombongan AS. Maka, mereka menolaknya melalui koran-koran yang mengungkapkan kegusarannya atas arogansi AS. Koran Perancis *Le Monde Diplomatique* menolak komentar Albright dengan menyatakan, "Sesungguhnya hegemoni AS tidak pantas untuk menjadi sesuatu yang pasti. AS sejak sekarang dan selanjutnya harus memahami bahwa ia tidak akan pernah mampu memaksakan aturan-aturannya atas benua yang lima sesuai dengan kepentingannya sendiri. Demikian pula AS tidak akan bisa menjadi polisi dunia di wilayah-wilayah konflik dan krisis selama-lamanya."

Karena itu, dalam politiknya AS bertolak dari pandangannya bahwa AS adalah pemilik dunia dan yang paling layak menguasai dunia dan segenap penghuninya. AS telah secara terang-terangan mengumumkan bahwa ia adalah pemimpin dunia seperti kata George W. Bush saat safari kampanyenya di AS. AS juga mengumumkan tentang rancangan-rancangannya untuk dunia, seperti rancangan Dunia Baru, Timur Tengah Baru, Timur Tengah Raya, dan seterusnya.

Akan tetapi ketakaburan dan kesombongan AS ini hasilnya akan menjadi bencana bagi AS sendiri. Tanda-tanda ke arah itu telah nampak. Lihatlah, AS telah terperosok di kubangan lumpur Afghanistan dan Irak. Kehebatan AS telah dihinakan dan dilecehkan, meski AS dengan sombong telah melakukan kejahatan pemboman secara membabi-buta atas orang sipil dan aksi kebrutalan yang keji di penjara-penjara. Akhirnya AS harus mengirimkan mayat tentara-tentaranya ke tanah air mereka setelah terbunuh di Afghanistan dan Irak. Jadi, bangsa-bangsa di kawasan itu telah sangat marah kepada AS karena kejahatannya yang sangat kejam yang menimpa manusia, pohon, dan batu, bahkan menimpa kurikulum pendidikan, media masa, pemikiran, dan seterusnya.

Demikian pula Eropa, Asia, dan Afrika telah menderita akibat perilaku AS yang melampaui batas, seperti perampokan atas kekayaan alam mereka, kezaliman yang terus-menerus atas negara dan rakyat mereka, dan upaya mewujudkan hegemoni tunggal bagi AS di seluruh kawasan dunia.

Jelaslah terdapat aspek istimewa pada politik AS. Di satu sisi terdapat kesombongan dan arogansi, bermacam-macam kejahatan, dan pandangannya bahwa dunia adalah sawah tempat bercocok tanam milik mereka. Sementara di sisi lain terdapat kebencian yang mendalam dan kegeraman yang luar biasa terhadap AS dari seluruh bangsa di dunia, baik itu musuh AS maupun negara sahabat AS. Semua ini mengisyaratkan titik akhir yang menyakitkan bagi AS dan kejatuhannya yang tragis sebagaimana jatuhnya semua diktator dunia.

Adapun Inggris, maka ia meletakkan satu kaki di Eropa dan satu kaki di AS. Ini menunjukkan adanya paradox antara orientasi dan kecenderungan kepada Eropa di satu sisi dan orientasi kepada Anglo-Saxon di sisi lain. Inggris ingin mempertahankan keseimbangan di antara dua orientasi ini.

Keseimbangan ini telah menjadi dasar hubungan Inggris, baik dengan AS maupun dengan Eropa. Inggris bermain pada dua tali ini dan memanfaatkan kedua belah pihak. Inggris ingin memperkuat diri dengan Eropa dan pada waktu yang sama ingin memperkuat diri dengan AS. Sebab, Inggris tidak mampu meninggalkan AS sebagaimana ia juga tidak mampu untuk memisahkan diri dengan Eropa. Akan tetapi, kepentingan Inggris lebih cenderung mengarah ke Eropa. Karenanya kita akan melihat Inggris semakin hari semakin mendekat ke Eropa. Masuknya Inggris ke Uni Eropa adalah bukti untuk itu.

Akhir-akhir ini Inggris telah memberi kontribusi dalam pembentukan militer Eropa yang independen dari NATO. Inggris bekerja sama dengan Perancis untuk tujuan itu, meskipun AS menolak langkah ini dengan tegas. Inilah politik Inggris terhadap

Eropa. Dan ini pula perspektif yang menjadi titik tolak kegiatan-kegiatan politiknya di Eropa.

Adapun Perancis, ia berbeda dengan Inggris. Sebab, Perancis melaksanakan politiknya atas dasar kepentingan Eropa semata. Perancis tidak peduli kepada AS. Perancis berupaya memperkuat Uni Eropa dan berupaya pula untuk mendominasinya agar menjadi kekuatan politik Eropa bersama —yang terpisah total dari AS— dan menjadi pesaing yang seimbang terhadap kekuatan AS di segala bidang, baik politik, ekonomi, militer, maupun budaya. Bukan hanya terbatas pada bidang ekonomi atau kerja sama politik secara formal. Perancis menjadikan kedekatannya dengan Jerman sebagai batu loncatan untuk mewujudkan politik ini. Hal itu terjadi sedemikian rupa, sehingga poros Perancis-Jerman telah dianggap sebagai dasar politik Eropa bersama.

Inilah politik Perancis terhadap Eropa. Ini adalah politik yang mandiri dan independen, yang menghendaki persatuan dengan jelas. Hal ini menjadikan Perancis dan Jerman sebagai jatung kekuatan Eropa sekaligus dinamo penggerak Eropa.

Adapun Rusia, politiknya saat ini terhadap Eropa terwujud dalam dua hal:

Pertama, memasuki kancah negara-negara Eropa dan bersekutu dengan mereka dalam membahas persoalan-persoalan Eropa atas dasar prinsip persamaan. Rusia secara parsial telah berhasil dalam langkahnya ini. Dalam arti, Rusia telah dapat masuk ke Majelis Eropa dan kelompok G-7. Tetapi, Rusia tidak berhasil masuk ke Uni Eropa bahkan tidak berhasil menjadi calon anggota untuk memasuki Uni Eropa.

Kedua, mencoba mempertahankan hubungn istimewa dengan negara-negara bekas Uni Soviet dan negara-negara yang dulu menjadi satelit Uni Soviet. Rusia bermaksud agar ada hubungan perwalian (*guardianship*) yang permanen. Namun, Rusia gagal total mewujudkan hal ini. Sebab, Rusia telah benar-benar kehilangan dominasinya atas setiap negara Eropa Timur,

yaitu Bulgaria, Rumania, Checa, Slovakia, Polandia, Hungaria, dan negara-negara pecahan Yugoslavia. Rusia pun mulai kehilangan sebagian dominasinya terhadap Georgia, Azerbaijan, Armenia, Ukraina, Bela Rusia, Maldova, dan republik-republik Asia Tengah yang muslim. Dominasi penuh hanya dimiliki Rusia atas Kazakhstan saja. Rusia pun sebelumnya telah kehilangan dominasinya secara cepat atas tiga negara Baltik, yaitu Lithuania, Estonia, dan Latvia.

Politik Rusia terhadap Eropa secara ringkas adalah bahwa Rusia belum mampu beradaptasi dengan Eropa sesuai level yang dirancang dan diusahakan oleh Rusia. Barangkali faktor yang belum memungkinkan untuk itu adalah karakter Rusia sebagai negara Euro-Asia, yakni negara separo Eropa separo Asia, sehingga Rusia tidak dapat mengklaim bahwa dirinya adalah Eropa tulen. Rusia selanjutnya tidak mampu pula untuk pura-pura tidak mengetahui wilayahnya yang luas di Asia. Rusia tidak dapat pula melepaskan hubungan dan kepentingannya yang besar dengan negara-negara non-Eropa. Akibatnya, Rusia tersibukkan oleh batas-batas vitalnya yang luas. Dengan demikian politik Rusia menjadi terpecah dan ia tidak mampu mengkonsentrasikan diri pada aspek Eropa saja.

Dari uraian di atas kita telah mengetahui bangsa-bangsa dari negara adidaya, yaitu AS, Inggis, Perancis, dan Rusia. Demikian pula kita telah mengetahui bahwa umat Islam akan segera kembali menjadi negara adidaya, yaitu dalam Khilafah Rasyidah. Selain itu, kita juga telah membahas bangsa Jerman yang diramalkan akan menjadi negara adidaya, walau perlu waktu yang lama. Kitapun juga telah mengetahui bangsa Jepang karena mempunyai pengaruh yang besar di bidang ekonomi.

Keterpengaruhan dan pengaruh bangsa-bangsa ini dalam politik internasional akan segera nampak dari paparan pemasalahan besar dunia berikut.

1. Masalah Eropa

Masalah Eropa adalah masalah nomor satu dunia sejak berabad-abad lamanya. Masalah Eropa berkaitan dengan negara-negara adidaya, perimbangan kekuatan antara negara-negara adidaya ini, dan dominasi global penjajahan di bidan militer, ekonomi, politik, dan budaya. Masalah Eropa adalah masalah paling utama dan paling membahayakan terhadap apa yang dinamakan “perdamaian dunia”.

Dikatakan sebagai masalah yang paling utama, karena masalah Eropa telah melahirkan di dunia apa yang dinamakan keluarga internasional atau komunitas internasional, yang karenanya terwujud apa yang dinamakan undang-undang internasional. Dalam upaya Eropa menghadang Islam, lahirlah keluarga internasional dari negara-negara Eropa yang Kristen. Untuk memukul Napoleon dan mencegah ekspansi Perancis, lahirlah apa yang disebut Aliansi Suci. Kemudian, dalam rangka mencegah Jerman mengambil minyak Timur Tengah dan membatasi kekuatan Jerman, meletuslah Perang Dunia I. Lalu untuk melawan Jerman dan mencegahnya agar tidak merusak perimbangan kekauatan di Eropa, empat negara adidaya —yaitu Inggris, Perancis, AS, dan Uni Soviet— sepakat menghancurkan Jerman dan mencegahnya untuk kembali menjadi sebuah negara adidaya yang kedua kalinya. Dan untuk mencegah bersatunya Eropa, terjadilah berbagai manuver politik yang menghambat terbentuknya Uni Eropa beberapa tahun. Adapula manuver politik serupa untuk menghalang-halangi bersatunya Jerman selama puluhan tahun. Ada langkah-langkah politik dari dua negara raksasa untuk mewujudkan target tersebut sebelum dan sesudah era detente. Pada awalnya Perancis mempunyai peran dalam masalah itu. Namun kemudian Perancis mundur dari masalah itu dan berusaha untuk memperkuat Eropa bersama Jerman. Inggris pun mempunyai peran mewujudkan target tersebut, walaupun Inggris menampakkan dirinya berupaya untuk

menyatukan Eropa. Maka, jelaslah bahwa masalah Eropa dan kaitan-kaiatannya merupakan masalah yang paling utama.

Bahwa masalah Eropa adalah masalah yang paling membahayakan terhadap apa yang dinamakan "perdamaian dunia", hal itu nampak dalam perilaku dan tindakan Perancis, Inggris, dan Jerman. Juga nampak dalam tindakan-tindakan Uni Soviet dan AS sebelum adanya kesepakatan di antara mereka, dan tindakan-tindakan blok Uni Soviet dan AS setelah adanya kesepakatan di antara mereka. Juga nampak setelah berakhirnya masa detente antara Uni Soviet dan AS. Bahkan nampak pula setelah runtuhnya Uni Soviet dan Blok Timur dan setelah hancurnya Pakta Warsawa.

Adapun Perancis, Inggris, dan AS sebelum adanya kesepakatan dua negara raksasa, adalah representasi Blok Barat. Masalah Eropa saat itu memainkan peran dalam penghentian Perang Dunia II. Masalah Eropa juga terepresentasi antara dua blok dalam membahas masa depan Eropa Barat dan Jerman. Jadi, Blok Barat memandang bahwa penyatuan Eropa akan dapat menghadang Uni Soviet dan AS menaruh perhatian khusus untuk membangkitkan blok Jerman, mewujudkan militer Jerman yang kuat untuk menghadang Uni Soviet, dan untuk untuk mewujudkan perimbangan baru antara Jerman, Perancis, dan Inggris.

Adapun Uni Soviet, ia merepresentasikan Blok Timur. Uni Soviet memandang bahaya yang pasti datang adalah dari Eropa dan secara khusus dari Jerman. Maka, Uni Soviet berusaha menghalangi penyatuan Jerman, penyatuan Eropa, serta menentang militer Eropa dan menentang penyenjataan kembali Jerman. Dengan melangsungkan Perang Dingin, aktivitas-aktivitas politik, dan aktivitas diplomasi, Uni Soviet telah berhasil dan mampu menghalangi Eropa selama puluhan tahun untuk maju satu langkah dalam menyelesaikan masalah Eropa.

Namun, setelah terwujudnya dua negara raksasa dan adanya kesepakatan antara Kruschev dan Kennedy, keadaannya

menjadi berubah. Sebab, telah terwujud kesamaan pendapat antara AS dan Uni Soviet dalam menghadapi masalah Jerman. Kedua negara tersebut juga satu pendapat dalam menghadapi masalah Eropa. Hal itu nampak dengan adanya pertemuan di antara keduanya secara cepat. Presiden AS saat itu, John F. Kennedy, telah memberikan pernyataan, "Sesungguhnya kekhawatiran Uni Soviet bahwa Eropa akan melakukan serangan militer ke Uni Soviet, ada landasan pembenarannya. Rusia pernah dipukul dua kali oleh Eropa dalam sejarah. Yang pertama, Rusia diserang Perancis pada masa Napoleon. Yang kedua, diserang Jerman pada masa Hitler. Maka, harus ada sesuatu yang menjamin tidak adanya bahaya atas Rusia dari Eropa, seperti perlucutan senjata Eropa Tengah, misalnya." Pernyataan ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa pendapat Uni Soviet dan AS dalam menghadapi masalah Eropa –khususnya masalah Jerman— telah menjadi satu pendapat. Pada saat era detente berakhir, pandangan AS terhadap Eropa tidaklah berubah dalam hal keharusan untuk menekan dan memukul benih-benih pandangan Eropa untuk menjadi independen dan pandangan Eropa untuk turut serta dalam merancang politik internasional. Pandangan AS juga tidak berubah untuk terus mencegah kembalinya Eropa ke bekas kawasan-kawasan pengaruhnya, menghilangkan pengaruh Eropa di Asia Tenggara dan Teluk, menundukkan Eropa agar tetap dalam payung AS dalam NATO, dan menentang setiap upaya Eropa membentuk kekuatan militer khusus Eropa.

Hal itu terjadi karena setelah Eropa tidak khawatir lagi akan terjadinya perang sejak adanya detente, dan setelah kembali sehat dan menguat ekonominya, Eropa mulai bersiap-siap untuk bekerja sama dengan dua negara raksasa dalam merancang politik internasional. Juga bekrerja sama untuk membangun politiknya terhadap AS atas dasar kerjasama dan persamaan, bukan atas dasar sebagai pengikut. Eropa (khususnya Inggris dan Perancis) juga mulai berupaya kembali ke kawasan-kawasan jajahannya

dahulu. Hal ini mendorong AS untuk mengamati gerak-gerik Eropa secara teliti. Demikian pula, setelah runtuhnya Uni Soviet dan bubarnya Pakta Warsawa, AS segera mengisi kevakuman yang muncul di negara-negara Eropa Timur dengan menjalin hubungan dengan negara-negara tersebut. Hal itu dilakukan untuk memutus jalan terbentuknya Uni Eropa, khususnya Jerman, agar pengaruhnya tidak meluas ke arah Timur. AS juga terus mempertahankan NATO dan selalu menentang pembentukan kekuatan militer Eropa yang terpisah dari NATO.

Adapun Rusia yang mewarisi Uni Soviet, dia tidak menyembunyikan kekhawatirannya terhadap perluasan Uni Eropa ke Timur. Rusia berupaya untuk memperoleh jaminan-jaminan. Akan tetapi mengingat posisi internasional telah berubah akibat runtuhnya Uni Soviet dan Blok Timur, dan Rusia menyadari kelemahannya menghadapi AS, maka Rusia tidak dapat mengelak untuk berkoordinasi dengan Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan berkaitan dengan dokumen Eropa Timur. Rusia juga berupaya untuk berkoordinasi dengan sebagian negara Uni Eropa untuk mempengaruhi politik internasional. Inilah yang mendorong Rusia untuk mengambil sikap lebih lunak terhadap negara-negara Uni Eropa. Ini berbeda dengan keadaan menjelang Perang Dunia II, juga pada era detente, dan beberapa saat setelah berakhirnya era tersebut.

Adapun Perancis, setelah De Gaulle tampil dalam kekuasaan hingga kunjungan De Gaulle ke AS melakukan pertemuan dengan Nixon pada Maret 1969, Perancis berusaha menyatukan Eropa dan menjadikan Eropa kekuatan ketiga yang akan menghadang dua blok. Karena itu, AS berupaya untuk memperkuat Jerman sampai pada batas tidak menjadi bahaya terhadap Perancis, dan mewujudkan kesatuan konfederasi di antara negara-negara Eropa. Hal itu disertai jaminan kedaulatan bagi Perancis, dan Perancis pun berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan Inggris dari Eropa. Karena Perancis meyakini bahwa politik tradisional Inggris sejak awal sejarah adalah

menghalagi penyatuan Eropa dengan segala cara. Tetapi setelah mundurnya De Gaulle tahun 1969 dan kematiannya setahun kemudian, bertemulah presiden Perancis, Georges Pompidou, dengan Perdana Menteri Inggris, Edward Heath, tahun 1971, dalam perundingan yang panjang dan berat. Dalam perundingan itu akhirnya Georges Pompidou menyepakati keanggotaan Inggris.

Perancis dan Jerman secara khusus selalu mencoba mengembangkan politik Eropa di luar negeri secara bersama. Terutama bahwa Jerman menyadari sejauh mana perlawanan terhadap kemunculannya sebagai kekuatan Jerman. Jerman berusaha berkoordinasi dengan Perancis untuk tampil sebagai satu kekuatan dalam kerangka Uni Eropa. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan taget Jerman, seperti perluasan ke Timur. Kedua negara tersebut telah berhasil menjelang perang atas Irak tahun 2003 untuk tampil dengan satu sikap menentang perang. Hal ini telah menyiapkan suatu kondisi untuk menjadikan Perancis dan Jerman sebagai poros politik Eropa di luar negeri secara bersama. Upaya kedua negara tersebut untuk mewujudkan rencana konstitusi Eropa baru dan organisasi militer bersama yang terpisah dari NATO tiada lain dimaksudkan untuk menjadikan Eropa sebagai kekuatan global yang berpengaruh terhadap politik internasional.

Adapun Inggris, pada era detente ia telah mencoba memperkokoh hubungannya dengan Jerman dan juga berupaya memantau konferensi-konferensi antara AS dengan Uni Soviet yang menentang perkembangan dan penguatan Jerman. Setelah itu, Inggris memutuskan untuk bergabung dalam Pasar Eropa Bersama menyusul pertemuan yang panjang dan melelahkan antara Georges Pompidou dan Heath, tahun 1971. Keputusan itu tetap dilaksanakan meski terdapat pertentangan sengit di dalam negeri Inggris. Inggris mencoba memperkuat Eropa dalam upayanya menghadapi dua negara raksasa, baik sebelum maupun sesudah runtuhnya Uni Soviet. Namun, Inggris tidak mengambil

sikap sebagai musuh yang sengit melawan AS. Hal itu terpulang pada keharusan untuk melakukan langkah-langkah bertahap. Sebab, dulu Eropa selalu menjadi kekuatan global pada awalnya. Jalan untuk menjadi kekuatan global itupun penuh dengan berbagai bahaya, yang kadang-kadang tidak menghasilkan tujuan yang diharapkan. Lebih-lebih AS sudah menyadari tujuan-tujuan Perancis dan Jerman itu. AS –sebagai pihak paling kuat dalam percaturan internasional- selalu berupaya untuk menggagalkan rencana-rencana Perancis dan Jerman. AS pun memiliki potensi-potensi yang diperlukan untuk itu kapan saja ada kesempatan. Padahal politik Inggris saat ini dijalankan atas prinsip meletakkan satu kaki di Eropa dan satu kaki lainnya di AS dalam rangka mencari berbagai keuntungan di mana saja ia dapatkan, di tempat manapun yang memungkinkan. Fakta masing-masing bangsa dari negara-negara Eropa ini, khususnya negara-negara adidayanya, telah menjadi hambatan untuk menjadi Eropa bersatu yang kuat, yang berpengaruh secara bersamaan terhadap politik internsional. Hal ini diperkuat oleh informasi yang kami peroleh ketika menyusun buku ini (Agustus 2004), bahwa Uni Eropa yang terdiri dari 15 negara telah selesai menyenggarakan pertemuan di Dublin tanggal 18 Juni 2004. Mereka tidak menyepakati untuk memilih ketua Uni Eropa dan menundanya sampai pada pertemuan berikutnya.

Walhasil, meskipun ada faktor egoisme kebangsaan dan asas manfaat dari ideologi kapitalisme yang dianut Uni Eropa – dua faktor ini telah menghalangi kesatuan Eropa yang hakiki– namun Uni Eropa telah menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat yang akan menyaingi kekuatan ekonomi AS. Mata uang Euro pun telah menyaingi dolar AS pada gelanggang perdagangan internasional. Demikian pula dari segi pengaruh politik internasional, meski ada perbedaan kepentingan dan upaya AS untuk melemahkan Uni Eropa dengan jalan menjalin hubungan yang kuat dengan sebagian negaranya –khususnya negara-negara Eropa Timur yang bergabung pada 1 Mei 2004 – namun Uni

Eropa telah menimbulkan gangguan yang meresahkan terhadap strategi-strategi AS sampai pada batas tertentu.

Ringkasnya dapat kami katakan, andaikata Uni Eropa kompak, niscaya akan dapat menyaingi AS dalam percaturan internasional di bidang ekonomi dan politik serta di bidang militer sampai batas tertentu. Tetapi, Uni Eropa adalah persatuan yang tidak solid dengan banyak hal yang melemahkan kekuatannya. Inilah tabiat dari suatu uni (federasi), uni apapun juga. Sebab, sebuah uni membutuhkan kekuatan yang dapat mempersatukan.

Uni Eropa adalah raksasa ekonomi yang ditakuti oleh AS. Masing-masing selalu berusaha untuk mengkerdilkan lawannya. Sebab, Uni Eropa adalah saingan hakiki AS di bidang Ekonomi. Kantor berita AFP pada 19 April 2003 menyatakan, "Sesungguhnya AS benar-benar sangat mengandalkan investasi-investasi Uni Eropa untuk menggantikan defisitnya yang besar dalam neraca berjalan yang lebih dari 500 miliar dolar AS pada tahun 2000 sesuai dengan penjelasan Fred Bergenstein, direktur lembaga ekonomi dunia, salah satu pusat studi khusus di Washington." Sementara itu, telah terjadi penandatanganan oleh 10 kepala negara di Athena, pada 16 Maret 2003, untuk bergabung dengan 15 negara Uni Eropa sebelumnya, setelah kurang lebih satu tahun pada April 2004. Hal ini menjadikan Uni Eropa menjadi kawasan perdagangan terbesar yang berpenduduk 400 juta jiwa.

Adapun di bidang politik dan militer Uni Eropa lemah bila dibandingkan AS. AS berhasil melemahkan Uni Eropa karena faktor-faktor berikut ini:

a. AS mempertahankan NATO yang semestinya harus berakhir sejak berakhirnya Pakta Warsawa di bawah kepemimpinan Uni Soviet yang telah tecerai-berai. Tetapi, AS berusaha terus mempertahankan NATO dengan dalih menjaga negara-negara Eropa dari Rusia dan negara lain jika diperlukan. Dengan demikian hegemoni militer AS tetap ada di Eropa. Romano Brundi, kepala komisariat Eropa, pada 19 April

2003 (AFP) mengatakan, "Sesungguhnya Uni Eropa wajib berusaha agar suaranya di dengar oleh NATO. Pada saat itulah kita akan mempunyai pakta pertahanan yang mempunyai dua basis, yaitu Eropa dan AS." Brundi menambahkan pula, "Itu akan menjadi NATO yang sebenarnya untuk menggantikan NATO yang ada sekarang, yang hanya mengikuti seruan AS saja." Brundi mengatakan, "Kita tidak bisa meletakkan tanggung jawab Eropa di satu lemari, dan menyerahkan tas keamanan untuk AS."

b. Sebagai hasil politik Inggris yang tidak menginginkan dirinya surut di Eropa –sehingga akan menjadi negara simbolis seperti Luxemburg– maka Inggris meletakkan satu kakinya di Uni Eropa dan satu kakinya lagi di AS. Kepentingan Inggris bertemu dengan kepentingan AS pada satu titik, yaitu ingin melemahkan Uni Eropa: Inggris ingin tetap dapat mengendalikan Eropa, dan AS tidak ingin mendapatkan saingan dari Uni Eropa, ketika menjadi satu kekuatan.

c. Sepuluh negara yang menandatangani, pada 16 April 2003, untuk bergabung dengan Eropa, pada awal Juni 2004 sebagian besarnya merupakan kawasan pengaruh AS. Atau seperti yang dikatakan Brundi pada 19 April 2004, "Sebagian negara-negara Uni Eropa yang baru mempunyai hubungan yang erat dengan AS pada bidang-bidang yang terkait dengan masalah keamanan."

d. Menguatnya hegemoni AS atas sumur-sumur minyak membuat AS bertambah kuat hegemoninya atas negara-negara yang membutuhkan minyak. Demikian pula menguatnya hegemoni AS atas pemimpin Dunia Ketiga menjadikan AS dapat melakukan kontrak-kontrak perdagangan yang menguntungkan dan merampas kekayaan dunia ini. Pencaharian ini tidak dapat dilakukan oleh negara-negara Eropa. Karena itu, kami dapat mengatakan bahwa perimbangan kekuatan Eropa tidaklah

stabil, dan hampir-hampir di sana tidak satu kekuatan yang tunggal. Yang ada hanyalah negara-negara kuat di Eropa di bawah pimpinan Perancis yang bekerja untuk mewujudkan satu kelompok yang terdiri dari negara-negara Eropa lainnya bersama Perancis untuk membentuk satu kekuatan Eropa. Di sisi lain Inggris tidak berkepentingan untuk mewujudkan sebuah kelompok Eropa yang kuat. Inggris hanya berkepentingan menjadi pihak yang berpengaruh kuat di Eropa.

Jelaslah bahwa gabungan faktor-faktor yang ada, yaitu masalah Eropa, hubungan internasional di antara sesama negara Eropa, dan hubungannya dengan AS atau kaitan masalah Eropa dengan masalah-masalah genting lainnya, akan terus menjadikan masalah Eropa sebagai prioritas internasional. Perbedaan perimbangan kekuatan di antara negara Eropa dan benturan kepentingan dan hubungan yang ada, menjadikan masalah Eropa sebagai masalah yang berbahaya terhadap apa yang dinamakan “perdamaian dunia”, baik dari segi kestabilan maupun kegoncangannya.

Atas dasar itu maka pengaruh masalah Eropa terhadap lima masalah lainnya, dan saling berkaitannya antara satu dengan yang lain, serta saling berpengaruh di antaranya, tidaklah mungkin diabaikan. Karena tu, masalah Eropa harus dipandang dengan suatu pandangan yang sesuai dengan fakta dan bahayanya, sejak ketika Eropa masih berupa negara-negara yang saling berkonflik hingga menjadi pasar ekonomi bersama, lalu berikutnya menjadi Uni Eropa yang mencoba mewujudkan bobot tersendiri baginya di dunia. Hal itu akan lebih jelas pada paparan masalah-masalah lainnya dan hubungannya dengan Eropa.

2. Masalah Timur Tengah

Masalah Timur Tengah merupakan masalah yang terkait dengan Islam dan bahayanya bagi Barat. Terkait dengan letaknya

yang strategis dan dominasinya terhadap transportasi Eropa, Afrika, dan Asia. Terkait dengan negara Yahudi yang menjadi garis pertahanan terdepan dari pertahanan Barat. Dan terkait pula dengan penjajahan serta hasil-hasil penjajahan, terutama minyak. Jadi, masalah Timur Tengah adalah masalah yang terkait dengan Islam, letak strategis, negara Yahudi, penjajahan, dan minyak. Tidak diragukan lagi masalah ini adalah sangat penting, tidak hanya untuk penduduk kawasan Timur Tengah dan kaum Muslim saja, melainkan juga untuk seluruh dunia.

Adapun Islam, ia telah dan senantiasa menjadi bahaya besar atas AS dan Barat. Kawasan Timur Tengah dapat dianggap tempat titik tolak yang alamiah untuk dakwah Islam ke seluruh Dunia. Karena itu, tidak aneh AS menjadikan Islam sebagai musuh utama satu-satunya bagi AS setelah runtuhnya sosialisme. AS menggunakan slogan-slogan terorisme, ekstremitas agama, dan fundamentalisme agama sebagai kedok untuk menyerang Islam dan kaum Muslim di kawasan ini. AS berusaha dengan segala kekuatan yang dimilikinya untuk menjauhkan gerakan-gerakan Islam politis dari kekuasaan. Hal itu dilakukan melalui cara kekerasan, kebrutalan, penyiksaan, dan pembendungan yang dijalankan oleh rezim-rezim pemerintahan yang menjadi pengikut AS di kawasan ini. George W. Bush telah mendeklarasikan Perang Salib Baru untuk menentang kaum Muslim secara terang-terangan. John Aschroft, Jaksa Agung AS, mengatakan dengan terus terang, "Sesungguhnya terorisme terdapat dalam Islam itu sendiri, bukan hanya pada orang-orang yang memeluk Islam." Ia mengatakan pula bahwa Allah telah mendorong terorisme dalam al-Quran. Ini klaim dia.

Adapun letak strategis Timur Tengah dan dominasinya terhadap transportasi, urgensinya dapat dilihat dari eksistensi Timur Tengah di kawasan titik temu tiga benua lama, yaitu Afrika, Eropa, dan Asia, serta penguasaannya terhadap selat Gibraltar, Bosforus, Aden, Hurmuz, Terusan Suez, Laut Tengah (Mediterania), Laut Hitam, Laut Merah, dan Teluk Persia.

Ditambah lagi Timur Tengah merupakan titik temu jalur bahan mentah dan komoditas di antara tiga benua tersebut. Kepentingan strategis Timur Tengah dahulu telah menimbulkan satu kesulitan antara blok Barat dan Soviet sebelum era detente. Hal itu dikarenakan Timur Tengah membentuk sabuk barat dalam wilayah blok yang terletak di kawasan yang mengancam Uni Soviet. Sabuk ini merupakan garis pertahanan Barat dalam menghadapi Uni Soviet dari Timur Tengah dan Afrika. Karena itu, di Timur Tengah, Barat membangun pangkalan-pangkalan militer yang di antaranya adalah pangkalan nuklir. Beberapa kali Barat berupaya mengikat dalam pakta-pakta militer. Barat di Timur Tengah membangun banyak bandara dan jalan-jalan besar yang dinamakan *otostradat*. Dengan demikian Timur Tengah memiliki urgensi yang strategis.

Adapun setelah adanya kesepakatan dua negara adidaya tahun 1961, urgensi militer Timur Tengah tidak ada lagi. Karenanya Barat mengabaikan urusan pakta militer dan menghilangkan pangkalan-pangkalan nuklirnya. Dua negara adidaya itu juga melangkah untuk menghapuskan pengkalan-pangkalan Inggris. Keduanya berhasil menghapuskan pangkalan Aden, Libia, dan Swis Timur. Keduanya berupaya pula untuk menghapuskan pangkalan-pangkalannya di Siprus. Dengan demikian, Timur Tengah tidak lagi memiliki urgensi strategis pada saat itu.

Akan tetapi setelah selesainya Perang Dingin dan hancurnya Uni Soviet, Timur Tengah kembali mempunyai urgensi strategis, terutama bagi AS dalam rangka menghadapi Rusia dan Eropa. Karenanya, AS kembali membangun pangkalan-pangkalan militernya di Teluk, menduduki Afghanistan dan Irak, dan mengumumkan bahwa Pakistan dan Kuwait –di samping Bahrain– sebagai sekutu-sekutu strategis AS.

Kemudian, belakangan ini AS menganggap Timur Tengah sebagai garis depan bagi pertahanan AS. AS menyiapkan sebuah rancangan untuk Timur Tengah yang dinamakan *Rancangan Timur*

Tengah Raya yang kemudian direvisi menjadi *Rancangan Timur Tengah dan Afrika Utara*. AS mengajukan rancangan itu pada KTT G-8 pada bulan Juni 2004 di kawasan Sea Island.

Bagaimanapun juga keadaannya, dapat dikatakan bahwa letak strategis Timur Tengah yang memanjang dari Maroko hingga Samudra Atlantik di sebelah barat, hingga Iran dan Irak di Teluk sebelah timur; dari Turki di sebelah utara hingga Padang Sahara Afrika di sebelah selatan –yakni Timur Tengah meliputi seluruh negara Arab ditambah Turki dan Iran— telah menjadikan Timur Tengah sebagai kiblat para penjajah dan sasaran utama orang-orang yang serakah. Hal itu karena Timur Tengah mempunyai urgensi yang luar biasa dalam hal transportasi dan komunikasi, bukan hanya di masa sekarang, melainkan sejak Perang Salib sampai sekarang.

Sedangkan kaitan Timur Tengah dengan institusi Yahudi yang ditanam di Palestina, maka negara itu telah menjadi poros masalah Timur Tengah dan menjadi penyebab ketidakstabilan. Tidak hanya di Timur Tengah melainkan juga di seluruh dunia. Hal itu karena orang Barat sendiri mengakui bahwa 90 % masalah dunia yang menyusahkan Barat disebabkan adanya negara Yahudi di Palestina yang merupakan jantung Dunia Islam.

Adapun kaitan Timur Tengah dengan penjajahan, jelas bahwa penjajahan telah menimbulkan penderitaan bagi Timur Tengah, telah menghilangkan sifatnya sebagai negara adidaya dan kekuatan global, dan telah mengubahnya menjadi negara-negara jajahan Barat tempat negara-negara Barat bersaing untuk menjajah dan memperluas pengaruhnya. Di Timur Tengah terdapat minyak yang jumlahnya lebih dari setengah minyak dunia. Terdapat pula bahan-bahan mentah di Yordania, Irak, Suriah, Turki, Iran, dan negara lainnnya, yang merupakan kekayaan alam yang luar biasa. Jumlahnya setara dengan 10 kali lipat kekayaan alam gabungan AS dan Eropa. Maka, negara-negara Barat berlomba-lomba dan bertarung untuk menjajah Timur Tengah. Invasi-invasi AS untuk menguasai Teluk adalah bukti yang sangat nyata.

Berkumpulnya empat faktor ini dalam satu masalah –yaitu Islam, minyak, tempat strategis, dan Israel— cukup menjadikan masalah Timur Tengah menjadi masalah yang paling berbahaya dan paling kompleks; pada level bahwa masalah Timur Tengah ini telah menjadi jalan penyelesaian masalah-masalah lainnya. Masalah Timur Tengah adalah masalah yang teramat rumit untuk dapat diselesaikan dan masalah yang teramat besar untuk dapat diselesaikan oleh sebuah negara besar. Jadi masalah ini adalah masalah yang rumit lagipula sangat kompleks. Tidak ada negara-negara adidaya yang mampu mengatasinya. Masalah Timur Tengah ini tidak akan pernah dapat diselesaikan kecuali dengan berdirinya negara Khilafah Islam.

Timur Tengah dulu berada di bawah pengaruh pemerintahan dan Daulah Islam hingga pertengahan abad ke-18. Semenjak Konferensi Berlin, yakni sejak akhir abad ke-18, negara-negara Eropa mulai mencoba menginvasi Timur Tengah. Prancis, Inggris, dan Italia telah menyerang Timur Tengah. Perang-perang itu terus berlangsung susul menyusul hingga runtuhnya Daulah Islam dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Maka, Timur Tengah mulai berada di bawah cengkeraman penjajah Inggris dan dominasi Prancis. Pengaruh penjajahan ini meluas meliputi semua negara-negara, hingga sampai ke negara yang bukan jajahan seperti Turki dan Afghanistan. Tapi, pengaruh Prancis di Timur Tengah hanya sedikit, yaitu terbatas pada bagian utara negeri Syam yang disebut Suriah, termasuk pantainya sebelah barat daya yang disebut Lebanon. Keadaan ini terus berlangsung sampai akhir Perang Dunia II, ketika Prancis terusir dari kawasan tersebut. Penjajah Inggris pun mengubah cengkeramannya di kawasan itu dengan cara baru, yakni dengan membagi-baginya, dan memberi sebutan "negara" untuk setiap bagian. Maka dari itu, pada saat Perang Dunia II berakhir, seluruh kawasan Timur Tengah telah menjadi kawasan jajahan Barat, atau tepatnya jajahan Inggris. Kawasan ini dianggap bagian dari dunia bebas

dan bagian dari Blok Barat. Di kawasan ini tidak ada sedikiti pun eksistensi Blok Timur.

Ada dua faktor yang membuat Inggris menjadi satu-satunya penjajah di Timur Tengah. *Pertama*, lemahnya Prancis secara politik, ekonomi, dan internasional sehingga Prancis tidak mampu menyamai dan menyaingi Inggris dalam menjajah Timur Tengah. *Kedua*, tetap bertahannya AS untuk menjalankan politik isolasionisme pasca Perang Dunia I. Karena itu, hanya Inggris-lah yang menjajah Timur Tengah sepanjang abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20.

Tetapi setelah tahun 1950, keadaan berubah secara mendasar. Saat itu terjadi konflik imperialistik antara Inggris dan AS sehingga memunculkan berbagai perang, revolusi, manuver, dan konspirasi. Persaingan itu kadang memanas di satu masa dan kadang mereda di masa lainnya, hingga akhirnya AS dapat merebut tongkat pengendalian di Timur Tengah. Inggris menjadi lemah hingga tidak mampu lagi menghadapi AS secara terbuka. Tetapi Inggris tetap berupaya untuk menempel ketat pada AS agar Inggris mampu memelihara jajahan-jajahannya. Inggris juga berambisi untuk mempunyai eksistensi di kawasan Timur Tengah walaupun hanya eksistensi parsial. Caranya dengan menyertai AS dalam segala rencananya, sebagaimana yang telah terjadi dalam pendudukan Irak.

Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa konflik Timur Tengah pasca Perang Dunia II terfokus pada faktor AS dan Inggris sebagai berikut :

Politik AS dan Inggris di Timur Tengah pasca Perang Dunia II terus berlangsung dengan pola kerjasama. Kedua negara tersebut sering kali bertemu dan bertukar pikiran untuk membahas strategi-strategi politik mereka dan mengkoordinasikan berbagai strategi dan taktik di antara keduanya. Inggris memberi toleransi kepada AS untuk menikmati sebagian kekayaan Timur Tengah, khususnya minyak di Jazirah Arab. Dalam banyak hal Inggris terus

mendampingi AS, namun terkadang berupaya menghambat AS jika AS dianggap membahayakan kepentingan Inggris.

Ketika muncul masalah Yahudi di Palestina, AS berpendirian untuk mendirikan sebuah negara di Palestina. Hal itu dimaksudkan untuk menjadikan Israel sebagai alat untuk menjajah kawasan Timur Tengah. Saat itu Inggris tidak bersikap tegas dalam masalah pendirian sebuah negara Yahudi. Inggris ragu-ragu apakah Palestina akan dijadikan sebuah negara yang diperintah Yahudi atau menjadi sebuah negara Yahudi. Saat itu Inggris berkeinginan untuk mengkoordinasikan masalah negara Yahudi itu dengan jajahannya di negeri-negeri Arab lainnya. Maka, tidak ada kepastian dalam masalah ini, sehingga diambil alih oleh PBB. Pada saat PBB --yang dipengaruhi oleh AS-- mengeluarkan resolusi untuk membentuk negara Yahudi, Inggris diam saja dan berpendirian bahwa waktulah nanti yang akan menentukan. Yaitu apakah kawasan ini akan mampu menerima keberadaan negara Yahudi di antara kaum Muslim ataukah negeri Islam ini akan menolaknya. Jadi, politik Inggris terhadap negara Yahudi didasarkan pada sikap menunggu apa yang akan diputuskan oleh waktu.

Sedangkan AS, ia terus melangkah untuk memperkokoh Israel dan menghilangkan apa saja yang menghambat pengokohan Israel. Inggris bersikap sebaliknya dalam masalah ini, namun tidak secara terang-terangan. Lahirlah kemudian konflik yang tajam antara Inggris dan AS seputar keberadaan negara Yahudi.

Di samping itu, AS mencoba memanjangkan garis saluran minyak sepanjang Yordania, Suriah, dan Libanon untuk Laut Tengah (Mediterania). Inggris berusaha menghambat langkah AS. Sebab, Inggris merasa mempunyai akar keberadaan yang lama di kawasan Timur Tengah yang mampu mempengaruhi seluruh penguasanya, mengingat semua penguasa Timur Tengah adalah agen Inggris. Maka, AS menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengubah kondisi kawasan Timur Tengah adalah menerapkan politik seperti yang pernah diterapkannya di AS Selatan, yaitu

dengan mewujudkan penguasa-penguasa militer dan meletuskan revolusi-revolusi. Terjadilah revolusi militer yang pertama yang dilaksanakan oleh Jendral Husni Zaim, pemimpin di Suriah. AS kemudian memberikan kondisi kepadanya untuk memperpanjang saluran minyak, dan rencana ini pun benar-benar terwujud. AS berhasil mengatasi problem ini. Akan tetapi Inggris menyadari pula bahwa AS ingin menjajah kawasan Timur Tengah dan mengambil kawasan ini dari cengkeraman Inggris. Inggris pun melawan AS dengan sengit. Hanya saja caranya melalui langkah-langkah politik dan melakukan manuver-manuver serta memanfaatkan penduduk negeri-negeri Timur Tengah.

Setelah terjadinya revolusi Jendral Husni Zaim dan semakin kerasnya perlawanan Inggris terhadap rencana AS, konflik tersembunyi antara dua negara itu berubah menjadi konflik setengah terbuka. Para diplomat AS di Timur Tengah melihat ada sesuatu yang mengancam kepentingan militer dan ekonomi AS di kawasan ini. Mereka memandang bahwa kelestarian politik AS yang dilaksanakan berdampingan dengan politik Inggris, maknanya adalah kelestarian AS itu sendiri. Hal ini sebagaimana keadaan sebelum Perang Dunia II ketika AS menjadi alat penakluk bagi Inggris. AS cukup diberi bagian yang sedikit untuk menghentikannya di kawasan Timur Tengah, membela Inggris dan sekaligus menghalanginya memperoleh kekayaan Timur Tengah. Seluruh kawasan Timur Tengah akhirnya tetap di bawah dominasi Inggris saja.

Para diplomat AS yang bertanggung jawab untuk negara-negara Arab telah mengambil pendapat itu. Maka mereka berkeyakinan harus ada koreksi mendasar terhadap arah politik Washington dan ada evaluasi baru. Koreksi yang dimaksud adalah melakukan kerjasama dengan penduduk Timur Tengah sebagai landasan untuk mengembangkan dan menyempurnakan politik Washington. Namun pada saat yang sama, para diplomat itu menyadari ada sejumlah problem di samping berdirinya Israel, dan juga kebencian yang terpendam di kalangan kaum Muslim

terhadap Israel. Karenanya mereka berpendapat masalah ini harus diselesaikan sebelum ada pemikiran yang serius dan upaya awal untuk mengubah kawasan Timur Tengah dari pengaruh Inggris menuju pengaruh AS. Maka, mereka mengadakan konferensi untuk membahas topik konferensi ini.

Pada bulan Nopember 1950 para diplomat AS menyelenggarakan konferensi di Istambul yang dipimpin oleh George McGee wakil Departemen Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Tengah dan Afrika Utara. Konferensi ini berlangsung selama lima hari berturut-turut. Dalam konferensi rahasia ini dibahas kondisi-kondisi yang menonjol dalam bidang politik, strategi, dan ekonomi bagi kawasan Timur Tengah. Mereka menyimpulkan bahwa tidak ada jalan untuk mempertahankan politik AS yang terkait dengan politik Inggris, jika AS benar-benar ingin mengubah Timur Tengah -menjadi kawasan pengaruh AS- dan bekerjasama dengan penduduk negeri Timur Tengah sebagai satu cara untuk mengubah kawasan tersebut. Para peserta konferensi berargumen dengan peristiwa di Suriah yaitu ketidakmauan Syukri Quetli (presiden Republik Suriah) untuk memberikan konsesi saluran minyak. Konsesi itu kemudian diambil dengan jalan revolusi yang dicetuskan oleh Husni Zaim. Peristiwa ini dijadikan dalil yang pasti untuk menjustifikasi pendapat mereka. Lebih-lebih Inggris kembali lagi pada tahun yang sama (1949) dan melancarkan revolusi yang dipimpin oleh Brigjen Sami Hanawi untuk menggeser Husni Zaim. Suriah pun kembali ke pangkuan Inggris. Peristiwa ini juga digunakan untuk mendukung pendapat peserta konferensi, bahwa politik AS harus dipisahkan dari politik Inggris, jika AS hendak bekerja di kawasan Timur Tengah.

Konferensi ini dianggap satu sarana terpenting untuk mengarahkan diplomasi AS di negara-negara Arab. Konferensi kemudian mengeluarkan rekomendasi untuk Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan Angkatan

Laut. Rekomendasi ini dirumuskan dalam ringkasan umum yang intinya sebagai berikut. Pengalaman-pengaman Perang Dunia II telah membuktikan bahwa kawasan Timur Tengah adalah basis utama yang menghimpun seluruh unsur-unsur penting untuk terjun dalam perang melawan Uni Soviet. Perang tersebut juga membuktikan bahwa pikiran-pikiran untuk menyerang sumur-sumur minyak Rusia di Kaukasus dan menghalangi sarana perang Uni Soviet, utamanya minyak, tidak akan memperoleh keberhasilan, jika ditempuh dengan kerjasama militer dengan Turki saja. Melainkan harus dengan membangun bandara-bandara yang terorganisir di Suriah, Libanon, dan Palestina. Dengan catatan Irak dan Mesir harus diubah menjadi gudang besar yang menjamin persediaan dukungan SDM, senjata, dan dana. Dengan kata lain, harus ada perubahan menuju suatu rancana ofensif yang bertujuan untuk menghambat dan melumpuhkan wilayah minyak Soviet di Bako dan Kaukasus secara umum.

Demikian pula serangan-serangan AS terhadap Yunani, Sicilia dan Italia sepanjang tahun 1941-1944, telah membuktikan dengan jelas tanpa keraguan lagi urgensi Timur Tengah dalam persiapan dan dukungan terhadap operasi-operasi perang yang menentukan, yang menjamin kemenangan perang melawan kekuatan Sekutu dan menjamin pembatasan pasukan agresor di kawasan Eropa.

Ringkasan rekomendasi ini diakhiri dengan usulan-usulan yang disepakati peserta konferensi dalam bentuk empat rekomendasi:

(1) Memisahkan diri politik Inggris dalam segala urusan yang menyangkut AS dan dunia Arab.

(2) Memberikan dukungan terhadap tuntutan-tuntutan Arab nasionalis sebagai landasan politik AS di Timur Tengah.

(3) Mendukung tuntutan Mesir untuk lepas dari Inggris dan mendorong gerakan seperti ini di Irak.

(4) Menghentikan dukungan diplomasi dan politik yang terus-menerus bagi Israel, dan mendorong PBB untuk mengimplementasikan rancangan membagi Palestina menjadi dua, yaitu negara Arab dan negara Yahudi, menerapkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB tentang segala hal yang menyangkut kompromi dalam masalah pengungsi di Arab, yang asasnya adalah memulangkan pengungsi ke tempat mereka dan memberikan ganti rugi kepada pengungsi yang tidak ingin kembali.

Dikatakan bahwa peserta konferensi memberikan rekomendasi khusus mengenai Mesir. Itu disebabkan karena mereka memberi rekomendasi tentang pentingnya AS mengambil Mesir dari Inggris, dan mengeluarkan Inggris dari Mesir dan membentuk pemerintahan yang kuat untuk memegang pemerintahan yang kuat di Timur Tengah. Sebab, telah terbukti dalam sejarah bahwa Mesir merupakan pintu gerbang di kawasan Timur Tengah.

Usulan-usulan ini telah diajukan ke pemerintah AS. Ketika itu Partai Demokrat-lah yang sedang berkuasa di AS. Padahal Partai Demokrat sebagaimana biasa cenderung bermanis muka kepada Inggris. Truman yang saat itu menjadi presiden AS, dapat meraih kekuasaan dengan dorongan dua faktor; *pertama,* pengaruh Yahudi, *kedua*; pengaruh Inggris di sebagian kalangan AS. Truman pun telah memberikan beberapa komitmen kepada Inggris dan Yahudi. Karena itu, keputusan-keputusan konferensi tidak dianggap penting, padahal para diplomat AS mengharapkan pemerintah AS memperhatikannya. Rekomendasi-rekomendasi itu mendapat perhatian pada masa Eisenhower.

Tapi bagaimanapun juga, politik AS semakin aktif di Timur Tengah setelah konferensi diplomatik tersebut. AS telah melakukan beberapa upaya berani untuk mewujudkan perdamaian di antara negara-negara Arab dengan Israel serta mengeluarkan Inggris dari Yordania. Para diplomat AS juga menjalin hubungan dengan Raja Abdullah dan berunding

dengannya untuk mengadakan kesepakatan baru dengan AS. Intinya, Raja Abdullah akan meninggalkan Inggris dan berjalan bersama AS. AS juga akan berusaha menggabungkan Irak dan Hijaz ke pihak AS. AS pun membentuk negara Yordania, Irak, dan Hijaz; kemudian menggabungkan Suriah dan Lebanon ke dalamnya. Ini sebagai kompensasi diadakannya perdamaian dengan Israel. AS pun berjanji untuk memberikan bantuan dan dukungan yang lazim untuk menghidupkan negara baru ini secara ekonomi.

Raja Abdullah menyetujui usulan itu, kemudian segera berupaya untuk mewujudkan rancangan ini. Raja Abdullah kemudian pergi ke Irak dan bertemu dengan Abdul Ilah dan Nuri As-Said. Raja Abdullah mulai membuka percakapan tentang topik ini. Raja Abdullah meminta mereka untuk menjalankan rancangan tersebut. Abdul Ilah dan Nuri As-Said tidak bertindak apapun kecuali menghubungi duta besar Inggris di Baghdad dan membeberkan rencana Raja Abdullah kepadanya. Inggris pun mencegah mereka untuk mengikuti Raja Abdullah. Karena itu, Abdul Ilah dan Nuri as-Said tidak menerima dan juga tidak menolak rancangan Raja Abdullah. Mereka membiarkan masalah ini mengambang. Raja Abdullah pun kembali ke Yordania dan mengirim utusan kepada Riyadh Ash-Shuluh agar dia mengikutinya dan membantu melaksanakan rencananya. Riyadh Ash-Shuluh menerima rancangan itu. Kenyataannya memang Riyadh Ash-Shuluh telah berpihak kepada AS. Inggris pun segera membunuh Riyadh Ash-Shuluh di Amman ketika dia sedang dalam perjalanan menuju bandara untuk pulang ke Beirut. Satu minggu setelah itu, Raja Abdullah terbunuh di Yerussalem di Masjidil Aqsha.

Ini adalah hasil konspiransi terbuka yang diatur oleh Kalub untuk membunuh Raja Abdullah. AS sebenarnya sudah memperingatkan Raja Abdullah untuk tidak melakukan perjalanan sehari sebelum terbunuh. Dengan demikian rencana ini gagal total.

Pada tahun yang sama (1952), berlangsung pemilu di AS yang dimenangkan oleh Partai Republik, yang mendudukkan Eisenhower sebagai presiden. Eisenhower memegang kekuasaan pada awal 1953. Dengan demikian konflik antara Inggris dan AS semakin sengit, karena sudah terkenal bahwa Eisenhower lebih mengutamakan kepentingan AS –khususnya kepentingan militer— daripada tekanan Yahudi dan Inggris.

Maka, konflik antara dua negara –AS dan Inggris— menjadi tajam. Salah satu gejalanya adalah AS mengambil Mesir dari Inggris kemudian mengusir Inggris dari Mesir. Sebelum itu AS telah melancarkan revolusi di Suriah yang dijalankan oleh agennya, yaitu Adib Asy-Syisyakli. Dengan demikian, Mesir dan Suriah akhirnya ada di bawah pengaruh AS.

Sejak saat itu negeri-negri Arab menjadi lapangan yang luas untuk konflik Inggris-AS. Berbagai aksi politik yang terjadi membuat Timur Tengah menjadi seperti bola yang berpindah dari kaki AS ke kaki Inggris, dan dari kaki Inggris ke kaki AS. Begitulah terjadi berulang-ulang. Hal itu nampak pada berbagai aktivitas yang mencakup Mesir, Suriah, Yordania, Irak, Arab Saudi, dan Yaman. Kebanyakan aktivitas politik itu terjadi di Suriah sebagai perantara bagi masalah-masalah lainnya, yang berpengaruh terhadap seluruh negeri-negeri Arab secara umum.

Maka dari itu di Suriah terjadi berbagai aksi politik yang kebanyakan adalah revolusi-revolusi. Pembunuhan Husni Az-Zaim benar-benar menunjukkan kebencian Inggris terhadapnya dan berakhirlah kekuasaan Husni Az-Zaim. Hingga Inggris segera berupaya untuk memperkuat pemerintahan demokratis di Suriah. Inggris berusaha menggabungkan Suriah dengan Irak sebagai langkah untuk membentuk *al-Hilal Al-Khashib*. Pemilu benar-benar terlaksana di Suriah. Konstitusi pun disusun untuk negeri Suriah dan Partai Rakyat (*hizb asy-sya'b*) dan Partai Tanah Air (*al-hizb al-wathani*) menguasai pemerintahan dan mengumumkan programnya untuk menyatukan diri dengan Irak.

AS mencoba menghalangi usaha Inggris itu, tapi tidak

berhasil memperoleh momentum, hingga datangnya Adib Asy-Syisyakli ke tampuk kekuasaan. Pada awalnya Adib mendominasi pemerintahan secara diam-diam, lalu berikutnya secara terang-terangan, dan mengangkat dirinya sebagai presiden. Berpindahlah Suriah ke tangan AS hingga bulan Pebruari 1954, ketika agen-agen Inggris dengan dukungan Irak menggulingkan Adib. Suriah pun kembali ke tangan Inggris dan sistem pemerintahannya kembali menjadi sistem pemerintahan perwakilan. Pada saat itulah Inggris mulai memunculkan Pakta Baghdad.

Ketika masuk tahun 1955, kawasan Timur Tengah memasuki tahapan konflik yang sangat tajam antara Inggris dan AS. AS memulainya dengan memainkan slogan kemerdekaan, persatuan, dan sosialisme di Mesir. Gamal Abdul Nasser mulai berkonflik dengan sengit melawan Inggris demi AS. Atas dasar rekomendasi AS, Nasser membeli sejumlah besar persenjataan dari Blok Timur dan menggembar-gemborkan kepada rakyatnya, bahwa itu akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan Israel. Nasser pun sangat dielu-elukan oleh seluruh bangsa Arab. Nasser kemudian mengadopsi nasionalisme Arab, mendeklarasikan bahwa Mesir adalah Arab –ini kemudian dicantumkan dalam UUD Mesir— serta menyerukan keadilan sosial dan persatuan.

Dengan aksi-aksinya ini bangsa-bangsa Arab mendukungnya dan jadilah Nasser salah seorang tokoh sentral negeri-negeri Arab. Hal ini didukung pula oleh cara yang diambil AS untuk memukul Inggris dan menimbulkan kekacauan diantara rakyat. Yakni meskipun saat itu ada permusuhan yang sengit antara AS dengan Uni Soviet, tetapi AS menempuh cara-cara tertentu untuk memperdaya Uni Soviet di Timur Tengah. Oleh AS hal itu dijadikan langkah internasional di kawasan Timur Tengah untuk melawan Inggris. Demikian pula meskipun AS memerangi komunisme, AS meyakinkan Nasser untuk mengadopsi dan mempropagandakan sosialisme. Jadi pembelian senjata Blok Timur oleh Mesir menjadi satu faktor yang

memasukkan Uni Soviet ke kancah Timur Tengah. Propaganda Nasser terhadap nasionalisme juga menjadi faktor politis dalam upaya menghidupkan nasionalisme Arab setelah sebelumnya nyaris mati. Pengadopsian sosialisme yang berkembang dari keadailan sosial menjadi faktor yang berpengaruh dalam penyebaran paham kiri dan menjadikan paham tersebut dominan dalam opini umum Timur Tengah. Dan karena Mesir juga mengambil sikap menyerang pakta-pakta militer asing –terutama Pakta Baghdad— hal ini sangat berpengaruh untuk menghilangkan prasangka bahwa Nasser adalah agen AS. Apalagi Nasser senantiasa melawan imperialisme AS. Sebab itu, tidak ada keraguan sedikitpun bagi seluruh bangsa Arab bahwa Nasser adalah pahlawan agung yang diutus oleh Allah untuk umat ini guna menyelamatkan umat dari penjajahan. Semua orang lalu manggantungkan nasib padanya, kecuali satu kelompok. Kelompok itu senantiasa berusaha membongkar dan menyerang Nasser, namun hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Opini umum tersebut telah mendominasi secara total.

Dengan adanya dominasi pendapat ini agen-agen Inggris di Yordania dan Irak –yang menjadi penguasa— menjadi goncang kedudukannya. Demikian pula agen-agen Inggris di Suriah dan Libanon kondisinya di hadapan rakyat menjadi buruk. Karena itulah terwujud kesempatan emas bagi AS untuk menghapuskan Inggris tanpa disadari bangsa-bangsa di Timur Tengah bahwa yang dilakukan oleh AS adalah menanamkan perngaruh AS di sana untuk menggantikan posisi Inggris. Padahal seharusnya kaum Muslim Timur Tengah menyadari bahwa yang wajib adalah menghapuskan imperialisme dua negara –yaitu AS dan Inggris— bukan menggantikan salah satunya dengan yang lain.

Pada waktu yang sama di Suriah terjadi perkembangan-perkembangan politik internal. Hal itu sebagai dampak adanya dukungan bangsa-bangsa Arab terhadap Nasser yang mendorong terjadinya perkembangan-perkembangan tersebut. Partai Baats bersatu dengan Partai Arab Sosialis. Persatuan ini menghasilkan

eksistensi Partai Baats di kalangan militer. Dua partai tersebut juga menggembar-gemborkan slogan persatuan, kebebasan, dan sosialisme sehingga kedua partai tersebut mempunyai pengaruh terhadap pemerintahan. Kedua partai tersebut benar-benar bekerja sama dan menemukan sebuah momentum –dengan adanya fenomena Nasser dan seruan-seruannya— untuk memperoleh dukungan rakyat; dan untuk melaksanakan slogan persatuan dan sosialisme yang mereka inginkan dalam langkah-langkah yang signifikan.

Dengan demikian, Suriah dikuasai oleh pemerintahan yang didominasi partai Baats untuk menghindarkan diri dari kejahatan partai Baats dan juga karena ada kekhawatiran semu akan adanya dukungan rakyat atas partai Baats. Maka dari itu sebenarnya Suriah berada di pihak Inggris, namun Suriah didominasi oleh dua ide, yaitu persatuan dan sosialisme yang berpengaruh terhadap opini umum.

Kemudian Nasser melakukan nasionalisasi Terusan Suez dan terjadilah permusuhan tiga negara atas Mesir. Nasser mendapat dukungan rakyat yang luar biasa. Maka dari itu agen-agen Inggris tidak berani muncul pada panggung politik dan suara mereka pun sangat lirih dan hampir tidak terdengar oleh seorang pun.

Pada bulan Agustus 1957 sejumlah perwira berkumpul dan bertukar pikiran mengenai pemerintahan Suriah yang berjalan bersama Barat dan merasuknya pengaruh Barat dalam pemerintahan. Mereka memutuskan untuk mengambil alih kekuasaan agar pemerintahan –yaitu presiden dan para menteri-tetap berada di tangan mereka. Para perwira militer pun kemudian mengurusi beberapa hal dan mengurusi urusan-urusan pemerintahan. Para perwira itu benar-benar telah memisahkan Suriah dari penjajahan Barat.

Sebelum pemisahan Suriah dari penjajahan Barat, sebenarnya Suriah dikendalikan Inggris. Tetapi yang nampak secara lahiriah adalah Suriah terkait dengan AS. Sebab ide-ide

yang dominan adalah ide-ide yang diserukan oleh Nasser, yaitu kebebasan, sosialisme, dan persatuan. Selain itu, Partai Baats yang mengendalikan opini umum menampilkan diri seakan-akan partai Baats adalah kawan atau sekutu Nasser. Karena itu, pemisahan Suriah dari Barat dianggap sebagai penentangan melawan AS. Padahal sebenarnya hal itu lebih tepat dikatakan menentang Inggris daripada menentang AS.

Kendatipun demikian, Inggris menghadapi pemisahan ini dengan sikap diam dan tidak mengambil tindakan apa-apa. Sedangkan AS menjadi kebakaran jenggot dan segera berupaya dengan sangat emosional untuk memukul para perwira dan mengembalikan Suriah ke pangkuan Barat. Demi tujuan itu telah berlangsung beberapa upaya, namun semuanya gagal.

Setelah AS tidak mampu mengatasi masalah itu, Nasser mencoba mengatasinya dengan mengutus Mahmud Riyad. Ia berupaya untuk mewujudkan persatuan Mesir dan Suriah, di mana Mesir memegang kendali pemerintahan di Suriah. Dengan demikian AS dapat memegang kendali. AS pun berupaya untuk mengusir Inggris dari Irak dan Lebanon. Pada tahun 1958, meletuslah revolusi Lebanon, kemudian revolusi Irak, sehingga Suriah, Irak, Lebanon, dan Mesir ada di tangan AS. Yang di tangan Inggris hanya Yordania. Nasser pun segera melakukan upaya di Yordania dan dengan cepat berusaha menghapus pengaruh Inggris dari seluruh kawasan Timur Tengah. Tetapi Inggris tidak berputus asa dan segera beraksi dari basisnya, yaitu Yordania. Pada tahun 1961, Inggris mempunyai kekuatan untuk bergerak di Suriah. Semua kekuatan politik, Partai Rakyat (*hizb asy- sya'ab*), Partai Tanah Air (*al-hizbu al-wathani*) —atau partai *Baats al-Araby al-Isytiraki*— bersepakat seluruhnya untuk menentang Nasser dan persatuan Suriah dengan Mesir. Maka Suriah terpisah dari Mesir dan agen-agen Inggris kembali menguasai pemerintahan Suriah.

AS kemudian menggulingkan Abdul Karim Qasim dari pemerintahan di Irak setelah ia tidak mau lagi menjadi agen AS dan bekerjasama dengan kaum komunis. Maka, di Irak terwujud

sebuah pemerintahan pro AS yang dipegang oleh partai Baats. Pemerintahan ini lalu berusaha mengubah keadaan di Suriah dan Yordania untuk digabungkan di Irak. Inggris merasa khawatir terhadap hal itu, maka agen-agen di Damaskus melancarkan revolusi buatan dan menjadikan partai Baats sebagai kedok bagi pemerintahan Suriah. Namun pada tahun 1971 setelah Hafez Asad pergi ke Mesir dan bergabung dengan Konfederasi Empat Negara, dia pulang ke Suriah dari Mesir dengan membawa pendapat berbeda dengan saat ia berangkat. Di Mesir, Hafez Asad telah diyakinkan bahwa dia dapat menjadi presiden Suriah, meskipun dia adalah seorang golongan 'Allawiyyin-Nashiriyyin. Pada saat itu, nampak bahwa AS ada di balik peristiwa tersebut dan AS akan mempercayai Hafez Asad selama ia mau bekerjasama dengan AS. Demikian pula Mesir akan menjadikan komunitasnya di Suriah untuk mendukung Hafez Asad. Dan bahwa Mesir – dibelakangnya adalah AS— akan bekerja untuk menghilangkan hambatan pengangkatan Asad sebagai presiden, karena ia golongan 'Alawiyyin. Padahal masyarakat di Suriah tidak mau menerima seorang 'Alawiyyin, karena mereka menginginkan muslim. Demikianlah, AS telah menyiapkan segala sesuatunya untuk Hafez Asad dan menghilangkan segala hambatan yang menghadangnya, setelah Hafez Asad setuju bekerja sama dengan AS.

Upaya tersebut kemudian mulai dijalankan. Hafez Asad secara bertahap melakukan langkah-langkah agar dia menjadi presiden. Dia melakukan kunjungan ke Suriah Utara dan menjalin kontak-kontak untuk mendapatkan dukungan rakyat. Ketika Hafez Asad melihat bahwa rakyat senantiasa mendukung penguasa, dan bahwa tidak ada pertentangan yang nyata terhadapnya, maka Hafez Asad segera mengambil langkah nyata untuk mencapai tujuannya. Hafez Asad pun kemudian mencalonkan diri sebagai presiden Suriah. Tanggal 12 Maret 1971, ditetapkan sebagai waktu pelaksanaan referendum. Jadilah Hafez Asad sebagai presiden Suriah dan jatuhlah Suriah sekali lagi di

bawah cengkeraman AS. Keadaan ini terus berlanjut sampai sekarang.

Inilah contoh-contoh konflik AS–Inggris di Suriah. Ini adalah fenomena yang paling menonjol. Sedangkan di negara-negara Arab lainnya, Yordania tetap di bawah dominasi Inggris. Sebab, rakyat Yordania 2/3 adalah orang-orang Palestina yang mayoritasnya hidup dengan kartu identitas dari PBB dan mengandalkan pencaharian anak-anak mereka yang bekerja di luar Yordania. Sedang 1/3 rakyat Yordania adalah golongan Baduwi Yordania Timur yang mayoritasnya hidup mengandalkan pencaharian anak-anak mereka di militer. Maka, AS tidak menemukan di kalangan rakyat Yordania suatu lahan subur seperti yang ia dapatkan di Suriah. Di Yordania tidak terjadi satupun kegiatan politik yang menjadi fenomena konflik internasional. Kecuali beberapa demonstrasi yang terjadi untuk menentang Pakta Baghdad dan upaya revolusi buatan dari Raja Hussein, tahun 1957, yang direkayasanya untuk mengusir agen-agen Gamal Abdul Nasser dari Yordania. Karena itu, dapat dikatakan di Yordania tidak terjadi kegiatan-kegiatan politik penting yang berkaitan dengan konflik internsional, meskipun Yordania merupakan satu kawasan terbesar tempat di mana berlangsung konflik AS dan Inggris, mengingat di sana ada kekayaan alam yang luar biasa dalam bumi dan lautan Yordania.

Adapun Irak, meskipun Abdus Salam Arif yang menggantikan Baats di kekuasaan bekerja sama dengan Nasser, tetapi agen-agen Inggris dari kalangan politisi dan juga para perwira militer mendapatkan kesempatan emas untuk bergerak. Dengan sedikit kerja keras, agen-agen Inggris berhasil menguasai militer dan pejabat-pejabat ekonomi yang berpengaruh. Maka, Irak pun kembali ke tangan Inggris. Meskipun AS kembali ke Irak pada masa Abdur Rahman Arif, tetapi orang-orang Inggris dari Partai Baats dan yang lainnya berhasil menguasai pemerintahan tahun 1968 dan melestarikan pengaruh Inggris di Irak hingga 9

Maret 2003. Pada saat itulah Baghdad runtuh, demikian pula rezim Saddam Husein dan kekuasaan Baats di Irak ketika Irak jatuh di bawah pendudukan AS.

Adapun Mesir, sejak Nasser berkuasa, telah menjadi basis AS yang besar. Dan ini terus berlangsung sampai sekarang. Di Mesir tidak terjadi satupun aktivitas penting yang termasuk dalam konflik internasional, kecuali peristiwa yang terjadi tak lama pasca meninggalnya Nasser. Hal itu karena terdapat tiga faktor yang dapat mengembalikan Mesir ke tangan Inggris, yaitu:

(1) Di Mesir terdapat pemerintahan yang lemah yang tidak mampu menjaga dirinya sendiri, apalagi mengisi kevakuman yang ditinggalkan oleh Nasser.

(2) Di Mesir terdapat gerakan-gerakan di kalangan militer dan rakyat yang menyerukan perang dan mengusir Rusia (kaum komunis) dan kemerdekaan total.

(3) Telah terjadi kontak-kontak antara Inggris dan Mesir yang bermula dari kunjungan Douglas Home, Menlu Inggris, ke Mesir dengan dalih menghadiri pemakaman Nasser. Setelah itu terjadi beberapa kunjungan dari Inggris –dengan perantaraan Libya- kemudian menjadi kunjungan resmi. Kunjungan ini bukan sekadar kunjungan terhadap Hasanain Haekal saja, melainkan menggunakan surat-surat resmi dan permintaan secara terang-terangan kepada Mesir untuk memperkuat hubungannya dengan Inggris. Maka, kembalinya Mesir ke tangan Inggris adalah masalah waktu saja, bukan masalah upaya. Hal itu karena posisi Anwar Sadat mengalami kegoncangan di awal pemerintahannya. Tetapi AS berhasil menstabilkan posisi Sadat meskipun terjadi kegoncangan. AS pun merekayasa perang tahun 1973 sebagai persiapan perdamaian dengan Israel. Maka, AS telah menjadikan Sadat sebagai pahlawan dan menjadikannya sebagai pengendali segala urusan. Dengan demikian konflik internasional di dalam negeri Mesir menjadi tidak nampak

dan Mesir terus menjadi basis AS yang besar dan penting hingga saat ini.

Adapun negara-negara Afrika Utara, Maroko telah berada di bawah dominasi AS sejak kemerdekaannya pada masa Raja Mohammad V. Adapun Aljazair telah berada di tangan AS berkat Ahmad Benbella. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Sebab, ketika Mohammad V wafat, yang memegang kekuasaan adalah anaknya Al-Hasan yang bekerjasama dengan Inggris. Inggris telah menyulut revolusi menentang Benbella melalui raja Al-Hasan dan Mohammad Khidr. Mereka juga menarik Tohir Zubair dan Aba Madin. Kedua orang ini lalu melancarkan revolusi untuk menggulingkan Ahmad Benbella dan mengusir AS dari Aljazair. Dengan demikian Inggris-lah yang berpengaruh di sana.

Sedangkan Libya dan Tunisia, AS tidak mampu masuk ke sana. AS juga tidak mampu mengadakan satupun kegiatan politik di sana. Pengaruh Inggris terus bertahan di kedua negara tersebut. Maka, Libya dan Tunisia tidak turut serta dalam konflik AS dan Inggris.

Sedangkan Yaman dan negara-negara Teluk, maka semuanya –kecuali Saudi- tunduk di bawah pengaruh Inggris. Di negara-negara tersebut tidak ada konflik dalam pengertian yang telah dikenal, kecuali di Yaman. Di Yaman pengaruh Inggris mengalami hambatan dari AS. Konflik itu berlangsung keras dan tajam.

Adapun Arab Saudi, AS telah berhasil menarik sebagian anggota kerajaan ke pihaknya. Dan juga sisa-sisa orang-orang Inggris di keluarga kerajaan. Konflik AS-Inggris di Saudi berlangsung melalui individu-individu kerajaan. Dengan berkuasanya Fahd bin Abdul Aziz, misalnya, Arab Saudi berada di bawah kendali politik AS. Kalau keadaan ini berubah, yaitu salah seorang agen Inggris, misalnya Abdullah, putra mahkota saat ini berkuasa, niscaya Hijaz dan Nejed akan kembali di bawah pengaruh Inggris. Demikianlah terjadi berulang-ulang.

Setelah terjadi pengeboman WTC 2001, AS mencoba menanamkan pengaruhnya di Saudi tanpa khawatir akan ketidakjelasan sikap dari individu keluarga kerajaan. Caranya adalah dengan mengubah sistem pemerintahan yang dijalankan di Saudi. Perubahan ini sedang dikaji oleh para pembuat kebijakan di Washington, sebagaimana diberitakan di media massa.

Perseteruan AS dan Inggris ini terus berlangsung sengit di negeri-negeri Arab sepanjang tahun 50-an dan tahun 60-an pada abad yang lalu. Dan masalah Palestina tetap menjadi jantung konflik tersebut. Hal itu karena Inggris pada tahun 1964 telah mencapai pendapat final berkaitan dengan masalah Timur Tengah, bahwa di sana tidak ada potensi untuk menerima sebuah negara asing dalam Timur Tengah, bahwa pengalaman mendirikan negara Yahudi di Palestina adalah pengalaman yang gagal, dan bahwa yang lebih tepat adalah mendirikan sebuah negara sekular dengan pola negara Lebanon. Kesimpulan itu merujuk pada upaya menghidupkan rencana Buku Putih yang disusun oleh Inggris tahun 1939. Rancangan itu oleh Inggris dijadikan landasan untuk menyelesaikan masalah Palestina. Para pemimpin Yahudi bertukar pikiran dan akhirnya puas dengan pemikiran ini. Habib Borgouiba, penguasa Tunisia, melakukan kunjungan ke Mesir, Yordania, Lebanon, Kuwait, dan Arab Saudi untuk menawarkan rancangan Inggris tersebut kepada pimimpin-pemimpin Arab dan sebagian tokoh Palestina. Habib memperoleh persetujuan umum terhadap rencana tersebut. Inggris pun mulai berupaya untuk melaksanakannya. Akan tetapi AS –melalui agannya Gamal Abdul Nasser- mampu menggagalkan rencana ini dengan penentangan yang sangat keras.

Dari semua uraian ini, jelaslah bahwa masalah Timur Tengah secara internasional seharusnya merupakan masalah konflik antara penduduk kawasan Timur Tengah dan negara-negara penjajah. Hal itu sebagaimana yang terjadi di AS sendiri

ketika ia mengusir penjajah dan membentuk sebuah negara serikat (federal). Begitu juga seperti yang terjadi di Cina pasca Perang Dunia II, ketika Cina mengusir penjajah Jepang dan pengaruh asing, lalu mendirikan sebuah negara komunis ynag mempunyai posisi di dunia. Demikian pula adalah wajar bagi negeri yang tengah dijajah, yakni tatkala ada peluang secara internasional dan lokal, untuk membebaskan diri dari pengaruh asing dan kemudia membentuk sendiri sebuah negara yang mempunyai posisi internasional.

Tetapi sangat disayangkan, hal itu tidak terjadi pada masalah Timur Tengah. Sebaliknya, yang terjadi justru konflik yang tajam antara AS dan Inggris untuk menjajah dan mengeksploitasi kawasan Timur Tengah. Juga untuk membentuk benteng-benteng baru yang kuat yang menghalangi penduduk Timur Tengah untuk sekadar berpikir mengenai pembebasan dan kemerdekaan. Konflik AS dan Inggris pun terus berlangsung, tetapi lebih lunak pada tahun 70-an dan 80-an di abad yang lalu.

Seiring runtuhnya Uni Soviet pada awal tahun 1990-an di abad yang lalu, dan kemenangan AS dalam perang di Irak, serta dominasinya atas Kuwait dan kawasan Teluk; berubahlah perimbangan kekuatan di dunia. AS mulai menyusun peta baru bagi Timur Tengah. Berdasarkan rancangan itu, Inggris hanya akan menjadi pemain cadangan yang tidak kuat lagi menyaingi AS, sehingga posisi dan kedudukan Inggris menjadi merosot. Inggris terpaksa melakukan intrik-intrik dan manuver-manuver yang lemah. Inggris pun terpaksa mengandalkan Uni Eropa untuk melaksanakan strategi-strateginya, yang pada dasarnya adalah strategi-strategi yang ala kadarnya. Misalnya kesepakatan Oslo, yang dengan itu Inggris mencoba untuk melibatkan AS. Tetapi, AS mampu mengubah kesepakatan Oslo ke arah lain yang dapat melayani kepentingan AS. Kemudian, Inggris dipaksa untuk mengakui kegagalan rencananya mengenai negara sekuler dan mengumumkan bahwa rencana itu tidak dilanjutkan lagi. Inggris pun menerima rencana AS yang memutuskan untuk mendirikan sebuah negara Arab

Palestina di samping negara Yahudi. Yasser Arafat sebagai ketua PLO secara resmi meninggalkan konsep negara sekular pada konferensi nasional Palestina yang diselenggarakan di Aljazair tahun 1988. Yasser Arafat secara resmi mengumumkan penerimaannya terhadap konsep dua negara dalam semua perundingan-perundingan internasional sejak itu. Raja Hussein pun dengan terpaksa mengumumkan pemisahan secara undang-undang dan administratif antara Tepi Barat dan Tepi Timur sungai Yordan dan mengakui keharusan mendirikan negara Palestina.

Dengan demikian, buyarlah rencana mendirikan negara sekular, baik secara praktis maupun secara resmi. Yang ada hanyalah rencana AS, yaitu mendirikan negara Palestina di samping negara Israel. Rancangan ini kemudian menjadi tuntutan internasional yang diadopsi oleh PBB, Uni Eropa, Rusia, di samping AS. Telah dibentuk pula kerjasama empat negara tersebut untuk mendukung konsep pendirian negara Palestina di samping negara Israel melalui proposal visi George W. Bush yang dinamakan *Road Map*. Saat ini AS tidak serius menerapkan *Road Map*, karena tahun 2004 adalah tahun pemilu AS. Dengan rencana itu AS hanya ingin menyibukkan kawasan Timur Tengah, karena AS sudah terbiasa menyibukkan Timur Tengah dengan rancangan demi rancangan hingga tiba waktu yang untuk mewujudkan rencana AS sendiri. Pada saat itu Yahudi akan tunduk pada perintah AS, jika AS memintanya dengan serius untuk melaksanakan rencana-rencana AS. Yahudi tidak akan bisa menolak perintah AS jika diminta dengan sungguh-sungguh, karena Yahudi menyadari bahwa AS –yang berusaha mewujudkan kepentingannya melalui rancangannya untuk Timur Tengah— pada waktu yang sama juga memelihara kepentingan negara Yahudi.

Di samping terpaksa mengikuti AS dalam konsep negara Palestina, Inggris juga terpaksa mengikuti AS dalam perang Irak dan penggulingan agennya, yaitu Saddam Husein, dalam rangka untuk mempertahankan sebagian keuntungan yang dapat

melanggengkan posisinya sebagai negara adidaya, tetapi di bawah bayang-bayang AS.

Demikian pula AS mampu menanamkan pengaruhnya dengan kuat –di samping pengaruh Inggris- pada semua negara Teluk, Yaman, dan Yordania. AS juga mampu bersaing dengan pengaruh Inggris dan Perancis di negara-negara Afrika dan Turki.

Dengan demikian, AS adalah hegemoni yang sesungguhnya atas negara-negara kawasan Timur Tengah yang terdiri dari lebih 24 negara. Sementara Inggris terpaksa merangkak di belakang AS untuk memperoleh sebagian remah-remah keuntungan, dan menentang AS secara diam-diam dari balik layar tanpa berani –seperti sebelumnya- untuk mengajukan rancangannya sendiri secara terang-terangan untuk menyaingi rancangan AS di kawasan Timur Tengah.

Walhasil, dapat dikatakan bahwa konflik terbuka antara dua negara ini telah berakhir pada akhir abad yang lalu hingga saat ini. Konflik itu telah berubah menjadi pola kerjasama dan kesepakatan dengan menobatkan AS sebagai pemimpin nomor satu di kawasan Timur Tengah dan pemutus kesepakatan-kesepakatan besar. Sementara Inggris menjalankan peran sebagai pelayan agar dia tetap eksis.

Jadi kemampuan Inggris saat ini, bahkan kemampuan seluruh Uni Eropa sangatlah lemah dalam hal rancangan penyelesaian masalah Timur Tengah. Karena itu, kita melihat Inggris dan negara-negara Uni Eropa menjalankan rencana AS dan bergerak atas dasar rencana itu. Inggris dan Uni Eropa tidak mampu mengimplementasikan rencana sesuatu tanpa pengaruh dari AS.

Walaupun demikian, tidak dapat dikatakan peran Inggris telah berakhir di kawasan Timur Tengah. Perasaan Inggris tentang keagungan (*glory*) dan sebagai negara besar masih terus ada. Kecerdikan politik Inggris pun belum padam. Demikian pula agen-agen Inggris tetap eksis. Dengan kata lain kekuatan Inggris masih ada secara potensial yang dapat bangkit dari waktu ke waktu.

Adapun Perancis, ia terus berjuang agar mempunyai sedikit pengaruh di Aljazair, Tunisia, dan Lebanon, mengingat adanya sejumlah kaum yang terdidik dengan budaya Perancis di negeri-negeri tersebut setelah pengaruhnya habis sama sekali di Maroko dan Mauritania.

Sedangkan Israel, ia telah mengkoordinasikan politiknya dengan kepentingan AS, dan mengintegrasikan diri secara total dengan kepentingan tersebut, khususnya pada era neo-konservatif dalam pemerintahan George W. Bush. Israel juga mempertahankan kepentingan AS dengan tegas dan cepat. Maka, AS pun menjaga posisi Israel sebagai negara regional yang besar di kawasan Timur Tengah. AS menganggap bahwa membela eksistensi Israel hakikatnya adalah membela AS itu sendiri. Israel tetap menjadi anak manja yang orang tuanya tidak ingin membuatnya marah.

Adapun penguasa negeri-negeri Arab, mereka terus saja melayani AS sampai-sampai rela menjadi budaknya. Dengan demikian, mereka kehilangan kredibilitasnya di mata rakyatnya. Majikan-majikan mereka pun memandang rendah kepada mereka dan terus-menerus menghinakan mereka dan meminta mereka untuk semakin memasrahkan diri kepada AS. Dengan begitu, para penguasa negeri Arab itu telah menjadi alat-alat yang mudah diganti oleh tangan musuh-musuh mereka, sebagaimana terjadi pada Saddam Husein dan pada agen lainnya.

Walhasil, para penguasa negeri-negeri Arab itu tidak lagi mendapatkan dukungan rakyatnya dan hanya dapat terus berkuasa berkat dukungan majikan-majikan mereka dan belas kasihan majikan-majikan itu. Keadaan mereka menjadi lebih sulit daripada sebelumnya. Sebab, mereka kini telah berada di antara dua ancaman, yaitu ancaman rakyatnya dan ancaman majikan mereka. Mereka hidup di antara kemarahan rakyatnya dan belas kasihan majikan mereka.

Karena itu, kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang dapat meledak setiap saat. Di kawasan itu terdapat potensi yang

sangat besar untuk lahirnya sebuah negara Islam yang sesungguhnya, yakni Khilafah Islamiyyah. Tanda-tanda kelahirannya sudah nampak dengan jelas.

3. Masalah Timur Jauh

Masalah Timur Jauh berbeda dengan masalah Timur Tengah, sebab meski masalah Timur Jauh adalah masalah startegis dan terkait penjajahan, tapi kondisinya sangatlah berbeda. Jika kita anggap masalah Anak Benua India hanya menjadi satu masalah saja pada masa sekarang ini, maka di Timur Jauh telah ada lima bangsa, yaitu Cina, Jepang, Korea, Indocina, dan Indonesia. Dan setiap bangsa mempunyai masalahnya sendiri-sendiri.

Sebelum membicarakan masalah Timur Jauh secara terperinci satu demi satu, kami akan merangkum masalahnya secara garis besar. Dari tinjauan strategis, kawasan Timur Jauh dipandang penting bagi AS dan Rusia. Dari arah Samudera Pasifik, kawasan Timur Jauh menjadi penting karena berkaitan dengan batas-batas AS. Selain itu, di Samudera Pasifik terdapat dua kekuatan besar yang dapat menjadi bahaya terhadap AS. Dua kekuatan itu adalah Jepang dan Cina. Demikian pula keduanya dapat membahayakan Rusia. Dari segi inilah masalah Timur Jauh dianggap masalah yang strategis.

Karena itu, AS sangat berambisi untuk mempunyai kekuatan di Timur Jauh dan tetap mempunyai kekuatan di sana. Bahkan sebelum dan sesudah serangan ke Pearl Halbour oleh Jepang, pada Perang Dunia II, Timur Jauh telah menjadi hegemoni AS dari segi strategis, karena kawasan ini tetap menjadi benteng-benteng laut dan udara bagi AS secara permanen siang dan malam. Filipina dapat dianggap sebagai basis AS sebelum Perang Dunia II sampai saat ini. AS sangat memperhatikan kawasan ini untuk menjaga dirinya sendiri dari bahaya di kawasan ini.

Sedang Rusia, karena pertimbangan bahwa wilayahnya berbatasan dengan kawasan ini, tanpa dipisahkan oleh samudera

–seperti halnya AS—, Rusia tidak mengambil sikap siaga militer terhadap Timur Jauh, meski Rusia menjadikan samudera-samudera itu benteng terhadap Cina. Rusia senantiasa berusaha menjalin hubungan persahabatan dengan Jepang.

Dari segi penjajahan, meskipun dulu hanya terbatas pada Inggris, Prancis, Belanda, dan Portugis –sebab meski menguasai Filipina, sehingga Filipina menjadi jajahan atau semacam jajahan AS— tapi AS tidak turut serta menjajah di luar Dunia Baru pada saat era puncak imperialisme di abad ke-19. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Inggris, Prancis, dan Belanda pada level pertama adalah negara-negara yang memulai penjajahan di Timur Jauh. Portugis turut menjajah pada sebagian kecil kawasan saja.

Inggris menjajah pulau Hongkong di tepi Cina sebelah tenggara. Inggris juga menjajah Melayu, Singapura, dan bagian utara pulau Borneo (Kalimantan). Inggris juga menjajah Birma, Srilangka, di samping India. Politik Inggris seluruhnya didasarkan pada prinsip menjaga jajahan-jajahan ini. Pada saat Blok Barat menjadi satu kesatuan sebelum kesepakatan dua negara raksasa (AS-Soviet), politik Inggris tidak sejalan dengan politik AS di Timur Jauh. Meskipun Inggris sangat membutuhkan AS untuk membantunya mempertahankan jajahan-jajahannya, tapi Inggris selalu memandang Cina sebagai pasar perdagangannya. Maka, keberadaan Cina bersama Blok Timur dianggap tidak membahayakan eksistensi Inggris di Timur Jauh. Dari sini, Inggris tidak mendapat justifikasi untuk menyerang dan berselisih dengan Cina di kawasan Timur Jauh ini. Inggris berusaha agar kawasan ini tetap tenang dan stabil. Sebab, gerakan apa pun yang terjadi di kawasan ini akan menyebabkan kegoncangan bagi Inggris atas jajahan-jajahannya.

Maka dari itu, terjadilah gerakan-gerakan di Indonesia dalam perjuangannya untuk mengusir Belanda. Inggris membujuk Cina Komunis untuk mengakui Indonesia dan membuka pintu perdagangan dengannya. Saat itu Cina Komunis menentang AS dalam politik Timur Jauh. Semua ini adalah langkah untuk

mempertahankan jajahan-jajahan Inggris. Sebab, jajahan-jajahan itu tidak hanya menjadi pasar bagi perdagangan Inggris, melainkan juga merupakan negeri-negeri yang kaya dengan bahan-bahan mentah yang dapat dieksploitir oleh Inggris. Inggris berusaha memperkuat posisinya di sana dan mengeksploitasinya sejak lama. Karena itu sikap Inggris terhadap Timur Jauh berkisar antara sikap mempertahankan negeri-negeri jajahannya -dengan salah satu bentuk penjajahan— dan mempertahankan pengaruhnya di kawasan ini.

Adapun Prancis, maka setelah Perang Dunia II ia kembali ke Indocina, yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja. Jajahan ini merupakan jajahan Perancis yang paling berharga dan paling besar karena terdapat sumber terbesar bagi kekayaan Perancis, mengingat melimpahnya bahan-bahan mentah di negeri-negeri tersebut. Namun Perancis tidak mampu mempertahankan jajahannya ini. Sebab, Perancis didesak oleh Cina di satu sisi dan AS di sisi lain sehingga Perancis terpaksa meninggalkannya dan keluar dari seluruh jajahannya itu.

Sedangkan Cina, ia telah membentuk dan mendukung gerakan kemerdekaan di Vietnam, yaitu dengan gerakan Viet-Minh. Revolusi ini mampu mengalahkan Perancis hingga Perancis terpaksa mundur dari sebagian besar wilayah Vietnam dan mengalami kekalahan militer dan politis. Akhirnya Perancis mundur total dari jajahannya ini.

Adapun AS, ia berkehendak mengambil jajahan Indocina dari tangan Perancis. AS berpura-pura membantu Perancis, namun pada waktu yang sama AS mendorong revolusi untuk melawan Perancis secara rahasia. Hal ini membuat Perancis terombang-ambing antara berharap mempertahankan bantuan Blok Barat terutama AS dan kehilangan harapan untuk mengatasi revolusi. Akhirnya Perancis mengadakan Konferensi Jenewa dan mempertimbangkan masalah Indocina. Diantara hasilnya adalah Perancis harus keluar dari Indocina dan AS akan menggantikan kedudukan Perancis di Laos, Vietnam Selatan, dan Kamboja,

sedang Cina akan menggantikan posisi Perancis di Vietnam Utara. Artinya, Cina akan berada di balik negara Vietnam Utara yang terpisah dari bagian negeri Vietnam lainnya. Namun kemudian Vietnam Utara digabungkan dengan Vietnam Selatan. Dengan demikian, eksistensi Perancis di kawasan Timur Jauh telah berakhir secara total.

Akan halnya Belanda, maka AS telah mendorong Indonesia untuk melakukan revolusi melawan Belanda. Maka, Indonesia melancarkan revolusi yang sengit dengan dukungan Uni Soviet dan AS, meski kedua negara besar ini saling bertentangan. Inggris memihak kepada Belanda untuk menentang Indonesia. Pada akhirnya Indonesia berhasil mengalahkan Belanda secara militer dan mengajukan permasalahan ini ke PBB. Indonesia lalu mendapat dukungan dari AS, dan PBB pun kemudian memutuskan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian Belanda keluar dari Indonesia dan tidak memiliki jajahan lagi, kecuali Irian Barat. Namun Indonesia segera saja berupaya merebut Irian Barat dengan dukungan AS. Dan AS terus berada di balik Indonesia hingga Indonesia berhasil mengusir Belanda dari Irian Barat. Dengan demikian, Belanda keluar dari seluruh kawasan Indonesia dan tidak memiliki lagi eksistensi penjajahan sedikitpun.

Sedangkan Portugis, ia telah menjajah Goa di India. Ketika India melihat bahwa Belanda telah diusir dari Indonesia, India pun terdorong untuk mengusir Portugis. India pun kemudian menduduki Goa dan mengusir Portugis dari sana dengan dorongan Inggris dan AS. Goa kemudian jadi bagian India.

Dengan demikian, di kawasan Timur Jauh tidak ada lagi negara-negara penjajah, kecuali Inggris dan AS. Posisi Inggris cukup kokoh untuk bertahan di sana sebelum adanya kesepakatan dua negara adidaya (AS-Uni Soviet). Adapun setelah kesepakatan itu terwujud dan terjadi perubahan posisi internasional, Inggris mengalami kegoncangan atas jajahan-jajahannya, dan bahaya pun mulai mengancam Inggris. Itu disebabkan karena AS mencoba mengeluarkan Inggris dari kawasan tersebut untuk menggantikan

posisi Inggris dengan penjajahan cara baru; yaitu menggunakan slogan menghapuskan penjajahan dan memberikan kemerdekaan kepada berbagai bangsa. Pemikiran ini pun kemudian diadopsi oleh PBB sehingga PBB kemudian menghambat dan menekan Inggris untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa yang dijajahnya. Namun, Inggris berusaha bertahan dengan membentuk federasi antara pulau Borneo Utara, Sarawak, Sabah dengan Melayu dan Singapura. Dengan itu, Inggris berhasil mendirikan sebuah negara federasi yang dinamakannya Malaysia. Dengan demikian Inggris telah mengubah caranya dalam melakukan penjajahan dan terus menjajah berbagai negeri.

AS segera saja menyulut Indonesia agar merebut pulau Borneo Utara. Indonesia pun menyerang Borneo, Melayu, dan Singapura dengan serangan-serangan dari kaum revolusioner. Indonesia juga memprovokasi rakyatnya untuk melakukan revolusi menentang Inggris. Dengan demikian terjadilah kondisi semi perang antara Indonesia dan Malaysia yang dinamakan "politik konfrontasi".

Hal itu berlangsung beberapa tahun. Tatkala terjadi kesepakatan dua negara adidaya (AS-Soviet), yang di antara isi kesepakatannya adalah menyingkirkan pangkalan-pangkalan militer dari dunia dan menghapuskan eksistensi Inggris di Timur Jauh; bertambahlah tekanan terhadap Inggris di Timur Jauh. Akibatnya, Inggris memutuskan untuk meninggalkan pangkalan Singapura dan menarik kekuatan militernya dari Swiss Timur dan Timur Jauh. Melalui agen-agennya di Indonesia, Inggris melakukan perlawanan terhadap Soekarno yang mengobarkan politik konfrontasi.

Pada saat itulah AS berkeinginan mengosongkan panggung politik Indonesia dari Soekarno dan menggantinya dengan agen-agennya dari kalangan militer, yang dipimpin Suharto. Setelah keluarnya Inggris dari pangkalan Singapura, terpisahlah Singapura dari Malaysia. Sedang Malaysia tetap terbentuk dari Borneo Utara, Sarawak, Sabah, dan Melayu.

Setelah aksi-aksi ini, kawasan Timur Jauh menjadi agak stabil dan aksi-aksi lainnya hanya terbatas pada upaya untuk persiapan memukul Cina. Nampak bahwa di antara strategi dua negara adidaya (AS-Soviet) di Timur Jauh adalah menyingkirkan Inggris secara total dari kawasan Timur Jauh ini serta tidak membolehkan lagi keberadaan Inggris di sana. Diprediksi bahwa dua negara besar itu akan menghapuskan eksistensi Inggris di sana setelah selesainya pembahasan rancangan terhadap Cina. Tapi berbagai kejadian berlangsung dengan cepat. Suhu politik AS-Uni Soviet memanas tak lama setelah berakhirnya Perang Viatnam. Cina tunduk pada tuntutan-tuntutan dua negara adidaya. AS menduga ia akan memasuki Malaysia dengan rencana-rencana ekonomi dan organisasi-organisasi regional. Semua peristiwa ini secara potensial memungkinkan AS untuk menggantikan posisi Inggris di Malaysia. Namun faktanya hal itu tidak terjadi sampai sekarang.

Adapun AS, ia telah mengikatkan dirinya dengan Filipina dengan perjanjian-perjanjian imperialistik yang sangat mirip dengan perjanjian-perjanjian imperialistik yang digunakan AS untuk mengikat Mesir, Yordania, Irak, dan negara lainnya dengan Inggris. Jadi Filipina meskipun secara teoretis tidak dijajah AS, tetapi pada praktiknya adalah jajahan AS.

Setelah AS berhasil mengusir Belanda dari Indonsia, AS berupaya menggantikan posisi Belanda. Tetapi orang-orang Indonesia melawan AS selama bertahun-tahun lamanya. Mereka tidak mau ada satu penjajah pergi lalu digantikan oleh penjajah yang lain. AS pun segera membuat rekayasa untuk mempersulit Indonesia dan menyulut revolusi-revolusi untuk menentang Indonesia. AS juga mendiamkan usaha-usaha Inggris untuk menyusup ke Indonesia melalui agen-agennya. AS juga mendorong terjadinya migrasi orang-orang Cina ke Indonesia, sebagaimana AS juga telah mendorong masuknya komunisme ke Indonesia. Akibat rekayasa-rekayasa yang menyulitkan ini akhirnya penguasa Indonesia tunduk di bawah tekanan AS.

Indonesia lalu menerima bantuan-bantuan ekonomi dan militer dari AS. Maka jatuhlah Indonesia di bawah pengaruh AS dan menjadi salah satu pengikut AS sejak masa Soekarno.

Setelah terjadinya kesepatan dua negara adidaya (AS-Uni Soviet), kedudukan AS di Indonesia semakin kuat, sehingga hanya AS saja yang dominan di Indonesia, terutama dominasi di bidang militer dan ekonomi. Dan hal itu terus berlangsung hingga hari ini.

Di samping Indonesia, AS juga telah menguasai Indocina setelah terusirnya Perancis dari sana. AS juga menguasai Korea Selatan setelah Perang Korea, dan terus mencoba untuk mengantikan posisi Inggris di jajahan-jajahan Inggris di Timur jauh, setelah AS mengusir Inggris dari Timur Jauh. Dan jika AS berhasil dalam hal itu, berarti masalah Timur Jauh akan segera berubah dari masalah internasional menjadi ladang jajahan AS.

Inilah keadaan Timur Jauh secara umum. Adapun bangsa-bangsa di Timur Jauh, dari segi taraf berpikirnya masih di bawah bangsa-bangsa Timur Tengah. Namun ide kemerdekaan dari penjajahan yang tersebar di dunia –menjelang dan pada saat Perang Dunia II, dan semakin tersebar setelah perang Dunia II— berpengaruh lebih kuat pada bangsa-bangsa di kawasan Timur Jauh dibandingkan dengan bangsa-bangsa di Timur Tengah. Hal ini dikarenakan pemikiran itu dicetuskan oleh kaum komunis sebagai satu bagian dari konfrontasi komunisme melawan kapitalisme. Pemikiran ini masuk dari Uni Soviet melalui Cina ke bangsa-bangsa Timur Jauh secara kuat, sehingga membangkitkan bangsa-bangsa ini.

Karena itulah kita akan melihat bangsa Indocina melancarkan revolusi melawan Perancis sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Bangsa Indonesia juga melancarkan revolusinya melawan Belanda sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Sementara bangsa Korea telah menganut pemikiran komunisme sehingga jelas mempengaruhi Korea. Bahkan bangsa di Melayu, Borneo Utara, dan Singapura melancarkan revolusi melawan Inggris.

Akibat adanya revolusi-revolusi tersebut, Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaannya dan berhasil mengusir Belanda. Vietnam Utara kemudian menjadi sebuah negara yang kuat. Inggris pun kemudian terpaksa membentuk negara Federasi Malaysia. Semua ini adalah berkat pemikiran kemerdekaan dari penjajahan yang mendominasi kawasan Timur Jauh. AS dan Inggris telah memahami dengan baik kenyataan ini. Maka, keduanya berusaha keras untuk tidak menampakkan pengaruhnya di kawasan ini dalam bentuk penjajahan gaya lama. Mereka menggunakan cara hubungan-hubungan ekonomi, politik, dan budaya serta kesepakatan-kesepakatan, yang secara lahiriah seakan-akan hanya hubungan-hubungan internasional, dan bukannya dikte-dikte imperialistik.

Di sini tetap perlu diperhatikan dua hal dalam masalah Timur jauh, yaitu:

(1) provokasi yang dilakukan AS seputar Korea Selatan dan perlucutan senjata nuklirnya. (2) perkembangan Islam yang semakin pesat di kawasan ini, khususnya di Indonesia dan Malaysia.

Mengenai Korea Utara, AS telah memprovokasinya agar ia menjadi problem yang membara di perbatasan Cina. Jadi, politik AS yang permanen bagi kawasan ini adalah membatasi Cina dengan negara-negara yang kuat atau merekayasa masalah-masalah yang bergolak, yang menyibukkan Cina itu sendiri. Dengan demikian Cina tidak akan dapat melebarkan pengaruhnya ke luar Cina.

AS melakukan itu karena takut menghadapi persaingan Cina yang dapat mempengaruhi kepentingan-kepentingan AS. Andaikata AS mampu menyatukan kembali Korea, sebagaimana Vietnam, maka akan terwujud negara-negara kuat di sekitar Cina. Namun AS belum berhasil mewujudkannya seperti yang dia lakukan pada India dalam rangka menghadapi Cina.

Maka, dapat diprediksi bahwa AS akan terus memunculkan masalah tanpa ada kestabilan. Namun dengan syarat bahwa

masalah itu akan menyibukkan Cina dan bukan menjadi kesulitan bagi AS. Karenanya AS sangat berambisi untuk melibatkan berbagai negara di kawasan Timur Jauh ini dalam masalah Korea. Telah diadakan berbagai pertemuan bagi enam negara, yakni AS, Korea Utara, Cina, Rusia, Jepang, dan Korea Selatan.

Merekayasa problem-problem yang bergolak di dalam negeri Cina atau di perbatasannya, adalah strategi permanen bagi politik AS. AS akan memilih waktu yang cocok untuk mengobarkan problem-problem itu. Kadang-kadang melalui India, atau dengan rekayasa internal yang mengatasnamakan HAM, atau memanaskan suasana dengan Korea di perbatasan Cina, dan sebagainya.

AS memanfaatkan segala momentum yang sesuai untuk arah kebijakan ini. Momentum yang sesuai ini telah tiba bagi AS dari segi waktunya. Sebab, AS sebelumnya telah merancang untuk menyerang Irak dan ingin melaksanakannya setelah menyerang Afghanistan. Dalih AS menentang Irak adalah senjata pemusnah massal. Pihak tertuduh dalam hal ini adalah Irak dan Iran, dua negeri Muslim. Namun agar tidak terlihat bahwa AS menentang senjata pemusnah massal kalau dimiliki kaum Muslim dan AS akan diam kalau dimiliki non-muslim, maka George W. Bush memperoleh momentumnya yang cocok saat mencetuskan persoalan senjata Korea Utara. AS memposisikan Korea Utara beserta Iran dan Irak dalam poros kejahatan (*evil axis*), sebagaimana komentar George W. Bush pada Pebruari 2002. Itu dilakukan AS untuk menjauhkan tuduhan bahwa AS menyerang Irak karena Irak adalah negeri muslim yang memiliki senjata pemusnah massal, sesuai tuduhan AS. Sebaliknya, AS menempatkan negara-negara lain yang komunis dalam poros kejahatan beserta Iran dan Irak. Padahal yang dimaksudkan AS adalah menyerang Irak. Ini sebagaimana pernyataan Collin Powel di Kongres dua minggu setelah pernyataan George W. Bush tentang poros kejahatan. Berkaitan dengan Iran dan Korea Utara, Collin Powel mengatakan, "Tidak ada rencana untuk memulai

perang melawan negara-negara ini...dan kami tidak memiliki rencana untuk memerangi Korea Utara atau terlibat dalam konflik dengan Iran."

Maka dari itu, tidak dapat diprediksi bahwa AS sengaja meningkatkan suhu politik internasional agar bisa melakukan aksi-aksi bersenjata untuk mengatasi masalah senjata pemusnah massal di Korea Utara.

Adapun perkembangan Islam yang terus bertambah, ia telah menjadi kekhawatiran bagi negara-negara adidaya, khususnya bagi AS dan bagi Barat pada umumnya. Kekawatiran ini terus membuat Barat merasakan adanya bahaya yang terdapat pada Islam dan kebangkitan Islam, apalagi kita ketahui bahwa lebih dari 250 juta orang muslim berdomisili di kawasan Timur Jauh ini. Indonesia adalah negeri muslim terbesar dan negeri nomor empat di dunia dari segi jumlah penduduk. Artinya Indonesia adalah nomor empat setelah Cina, India, dan AS secara langsung.

Maka Indonesia dan Malaysia dapat menjadi kekuatan yang menentukan di kawasan Timur Jauh yang tidak kalah dari kekuatan besar yang berpengaruh di kawasan ini. Itu dapat terwujud jika Indonesia dan Malaysia mengambil Islam sebagai ideologi dan sistem kehidupan. Demikian pula terdapat potensi yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia dengan Dunia Islam lainnya karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi.

Hal ini memperkuat alasan-alasan yang menjadikan masalah Timur Jauh sebagai masalah internasional.

4. Masalah Asia Tengah

Masalah Asia Tengah berbeda dengan masalah Timur Jauh maupun Timur Tengah, Sebab, meskipun Asia Tengah bersambung secara geografis dengan Timur Tengah dan tidak mungkin dipisahkan dari Timur Jauh, tetapi ia berbeda dari segi penjajahan dan pengaruh-pengaruh di dalamnya. Begitu juga ia berbeda dari segi konflik maupun target-targetnya.

Kawasan Asia Tengah dulu termasuk bagian Uni Soviet, bahkan sampai saat kehancuran Uni Soviet. Konflik di Asia Tengah dan Kaukasus dimulai sejak hancurnya Uni Soviet. Karena itu, pihak-pihak yang terlibat konflik berbeda dengan kawasan Timur Tengah dan Timur Jauh. Adapun perbedaan dalam target pergolakan adalah karena AS menghendaki keluarnya Rusia dari daerah pengaruhnya dan mengurangi wilayah-wilayah vitalnya. Hal itu dilakukan dengan mengusir Uni Soviet dari daerah Kaukasus dan Asia Tengah.

Masalah Asia Tengah ini muncul sesudah tahun 1991, ketika Uni Soviet bubar dan terbentuk 15 negara republik yang baru di atas puing-puingnya. Di antaranya ada 5 negara republik yang berada di Asia Tengah yang mayoritas penduduknya muslim. Kelima negara ini adalah Uzbekistan (yang terbesar dan terpenting), Kazakhstan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Tajikistan. Keempat negara yang pertama berbicara dengan bahasa yang mendekati bahasa Turki. Sedangkan yang kelima (Tajikistan) berbicara dengan bahasa Persia.

Lima negara republik ini memiliki keterkaitan geografis dan demografis. Kelima wilayah ini semuanya berbatasan dengan Cina bagian barat yang mayoritas penduduknya muslim dan berdekatan pula dengan Turkistan (Turkistan bagian timur adalah wilayah Cina dan Turkistan bagian barat adalah wilayah Asia Tengah). Kelima negara ini berada pada sisi timur dan utara Laut Qazwin (Ghazvin). Pada bagian timur berbatasan dengan Cina yang menguasai wilayah Turkistan timur. Bagian utara berbatasan dengan Rusia. Bagian baratnya adalah Laut Qazwin dan Rusia. Sementara bagian selatan adalah Afghanistan dan Iran.

Sebelum membahas lebih jauh tentang rincian konflik-konflik di kawasan ini, kita harus melihat urgensi strategis Asia Tengah dan Kaukasus. Dilihat dari sisi strategis, kawasan ini adalah perpanjangan dari Rusia pada wilayah bagian dalam Benua Asia sampai Timur Tengah dan batasan-batasan alamnya tidaklah terpisah dari Rusia. Tidak ada laut ataupun samudera. Sementara

bagi Cina, wilayah ini dianggap sebagai gapura belakang untuk masuk ke Cina. Melihat mayoritas penduduknya adalah muslim, maka Cina khawatir akan pengaruh mereka terhadap kaum Muslim Cina di wilayah Turkistan Timur. Karena urgensi strategis inilah, sesudah runtuhnya Uni Soviet, AS membuat rencana-rencana untuk mengusir Rusia dari satu sisi, dan di sisi lain memblokade Cina dan mencegah pengaruhnya terhadap wilayah ini.

AS berhasil mewujudkan sebagian target-targetnya. Dia berhasil mendirikan pangkalan-pangkalan militer di Uzbekistan sesudah pemimpin negara itu —yaitu Karimov yang hina dan pengkhianat— tunduk patuh kepada AS. Atas nama perang melawan terorisme, AS berhasil membentuk koordinasi militer dengan Tajikistan, menjalin kerjasama ekonomi dan budaya dengan Kirgistan, dan berusaha meluaskannya ke Kazakhstan. AS tak henti-hentinya berusaha menerobos negara-negara di kawasan ini dan mengambilnya dari Rusia. Sementara di wilayah Kaukasus, AS berhasil menjatuhkan Shevardnatzhe dan membentuk pemerintahan mandat di Tiblisi. Ini merupakan pukulan yang kuat dan menjadi ancaman bagi Rusia karena telah hilang pemisah antara pangkalan-pangkalan NATO di Turki dan tapal batas Rusia dengan adanya pemerintahan mandat di Georgia.

Adapun dari segi imperialisme, Asia Tengah khususnya wilayah Laut Qazwin adalah kawasan yang kaya minyak dan juga kaya akan sumber-sumber alam yang berharga, seperti emas. Wilayah ini sebagaimana Timur Tengah, dianggap kawasan yang paling kaya sumber-sumber alam di dunia. Inilah yang meneteskan air liur kapitalis AS dan mendorong mereka untuk mencurahkan segenap kemampuan untuk memasukkan perusahaan-perusahaan raksasanya atas nama investasi ke kawasan ini. Sebagaimana kondisi yang ada di Timur Tengah, imperialisme dianggap sebagai sebab terpenting terjadinya bencana di kawasan ini dan merupakan sebab mendasar munculnya konflik.

Adapun penjajahan di Asia Tengah dan Kaukasus, hal ini sudah dimulai sejak abad ke-18, pada masa imperialisme Eropa yang terburuk. Waktu itu Rusia memotong-motong wilayah yang luas di Asia Tengah dan Kaukasus dari Daulah Utsmaniyah dan Shafawiyah, serta menggabungkannya secara paksa ke dalam kekaisaran Rusia. Sesudah Revolusi Bolshevik, Rusia tetap memegang Asia Tengah dan Kaukasus dengan tangan besi dan tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada negara-negara lain untuk masuk ke dalamnya. Akan tetapi dengan runtuhnya Uni Soviet dan lemahnya Rusia, AS bersemangat kembali untuk memasuki kawasan ini, bahkan melakukan upaya terus-menerus untuk mengusir pengaruh Rusia. Ini karena AS menganggap bahwa dirinya adalah pewaris tunggal dunia sesudah runtuhnya Uni Soviet dan hilangnya Blok Timur. Sebagaimana AS juga menganggap dirinya sebagai pewaris imperialisme Barat sesudah Perang Dunia II, baik ketika Uni Soviet masih ada, maupun sesudah Uni Soviet runtuh. AS dikuasai oleh kecongkakan dan kesombongan. AS menganggap dirinya paling berhak atas dunia ini dan berupaya dengan sungguh-sungguh menundukkan semua negara-negara di dunia di bawah pengaruhnya dengan mengeluarkan negara-negara adidaya dari wilayah jajahan dan pengaruhnya, termasuk dalam hal ini adalah Rusia.

Rusia juga berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai pewaris Uni Soviet di Asia Tengah dan Kaukasus. Untuk ini Rusia segera berusaha mengembalikan negara-negara Republik Uni Soviet sesudah kehancurannya dengan membentuk Persemakmuran Negara-negara Merdeka atau Ikatan Negara-negara Merdeka. Rusia menghimpun ke dalamnya negara-negara bekas Uni Soviet dan berusaha mempertahankan bentuk negara federal bagi Rusia untuk melanggengkan bagian-bagian yang luas dari wilayah Kaukasus di bawah dominasinya seperti Chechnya, Angosia, Dagestan dan sebagainya.

Memang upaya-upaya AS berhasil dengan gemilang di Uzbekistan dan Georgia. Demikian pula AS berhasil menduduki

Afghanistan yang bertetangga langsung dengan Asia Tengah. AS pun telah mengumumkan posisi strategis dari mitra-mitra strategisnya di Asia sehingga AS mengumumkan Pakistan sebagai mitra strategisnya dan menjanjikan bantuannya agar Pakistan mendukung posisi AS di Asia Tengah setelah pendudukan Irak. Perusahaan-perusahaan AS juga telah beroperasi untuk mengeksplorasi minyak dan tambang-tambang di Asia Tengah dan Kaukasus. Namun demikian, konflik politik untuk menguasai Asia Tengah ini baru tahap awalnya saja. Keputusan final bahwa konflik ini telah dimenangkan oleh kepentingan AS, masih harus menunggu beberapa waktu.

Hal itu karena meskipun kawasan ini merupakan kawasan vital AS, namun kawasan itu juga merupakan paru-paru yang digunakan Rusia untuk bernapas. Kawasan itu adalah pintu-pintu gerbang Rusia menuju kawasan-kawasan lainnya di dunia. Maka, bukan hal yang mudah membuat Rusia mundur dari kawasan itu. Karena itu, tidak dapat diprediksi Rusia akan melepaskan semua kawasan ini dalam jangka waktu dekat ini.

Untuk memahami strategi AS di Asia Tengah, kita harus mempelajari pernyataan-pernyataan pejabat AS dan agen-agennya di kawasan ini dan sekitarnya. Pada awal tahun 2004, PM Musharraf (waktu itu) mengajukan gagasan agar Pakistan menjadi lalu lintas perdagangan dan pipa energi bagi tiga kawasan, Asia Tengah, Asia Selatan (India), dan Asia Barat (Timur Tengah); dengan alasan kawasannya terletak di titik tengah kawasan-kawasan tersebut... Islamabad juga telah membangun deretan saluran besar di laut Arab, terhubung dengan jaringan moderen dari jalan-jalan cepat mengikuti model Amerika yang memanjang hingga perbatasan Afghanistan.

Collin Powel telah memberikan sebuah keterangan mengenai rencana tersebut dalam penjelasannya di hadapan Komisi Khusus Anggaran Militer yang dibentuk oleh Senat AS pada 27 Maret 2004, “Sesungguhnya kawasan Kaukasus, Asia Tengah, Asia Barat, dan Asia Selatan, akan mengalami kemajuan

besar jika telah terhubung dengan jaringan perdagangan dan transportasi. Tapi ini hanya menjadi mungkin jika kita dapat memantapkan keamanan dan perdamaian." Powel menambahkan, "Sesungguhnya Pakistan melihat hal ini. Pakistan telah membangun kembali infrastrukturnya dan jalur-jalurnya... Dan kita akan terus membangun jaringan jalan di Afghanistan dengan bantuan mitra-mitra kita dari Saudi dan Jepang."

Dinamika aktivitas-aktivitas diplomasi AS yang terjadi menunjukkan adanya upaya AS untuk meyakinkan kawasan tersebut guna membentuk berbagai perjanjian (militer, politik, dan ekonomi) dimulai dari tapal batas Pakistan-Afghanistan, melintasi Teheran, dan Kabul. Aktivitas diplomasi itu adalah sebagai persiapan awal untuk membuka jalan ke arah pembentukan kembali perjanjian-perjanjian strategis di pusatnya. Sumber-sumber politik di Islamabad mengetengahkan prediksi-prediksi yang intinya menerangkan kemungkinan masuknya badan-badan militer dari Washington dan Islamabad dalam perjanjian baru yang lebih dari sekadar perang melawan terorisme. Pembicaraan yang ada berkisar mengenai konsep-konsep AS untuk mendirikan pakta "NATO Asia" yang dipimpin oleh AS yang mengikuti model NATO Eropa. "NATO Asia" itu akan meliputi sekutu-sekutu tradisional Washington di kawasan ini, di samping sekutu-sekutu baru Washington, yaitu Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Azerbaijan. Pembentukan "NATO Asia" itu bertujuan untuk membentuk sistem regional yang menjamin penjagaan keamanan dan militer bagi jaringan pipa penyalur energi. Dari sanalah AS akan mencegah munculnya hegemoni Cina atau Jepang.

Nampak pula adanya benturan sikap Washington dengan Moskow berkenaan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan republik-republik bekas Soviet. Hal itu muncul di permukaan pada saat kunjungan Menlu AS Collin Powel (saat itu) ke Moskow pada 26 Januari 2004. Beberapa saat menjelang kunjungan itu Dubes AS di Moskow menjelaskan bahwa Powel berniat mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan

republik-republik bekas Soviet dengan pihak Rusia. Ini mengisyaratkan bahwa salah satu target terpenting kunjungan tersebut ialah mencari "titik temu" antara pihak Rusia dan AS mengenai kawasan udara bekas Soviet. Duber AS tersebut mengakui adanya "problem-problem tertentu" yang menghadang keseimbangan hubungan antara dua pihak itu di kawasan ini.

Sementera itu Moskow menolak adanya "kesepakatan" antara dua pihak untuk membagi pengaruh di kawasan ini. Sumber-sumber AS mengisyaratkan adanya "masalah-masalah" yang dihadapi dalam hubungan antar dua negara dalam menyikapi rancangan tersebut. Perdebatan mengenai isu itu semakin meningkat seiring dengan bocornya informasi dari media AS mengenai apa yang disebut rencana-rencana untuk mengadakan "kesepakatan" antara Rusia-AS yang bertujuan untuk membagi pengaruh di kawasan bekas Soviet. Para analis Rusia menganggap pernyataan Dubes AS di Moskow sebagai indikasi adanya kesepakatan antara dua pihak.

Sudah diketahui bahwa Moskow menjadi gelisah akibat semakin meningkatnya pengaruh AS di sejumlah negara persemakmuran eks Soviet. Khususnya dalam hal yang berkaitan dengan eksistensi militer AS di republik-republik Asia Tengah dan Georgia, di samping apa yang disebut sebagai intervensi langsung AS terhadap stabilitas dalam negeri pada beberapa negara seperti Georgia.

Pada saat kunjungan Powel, para politisi Rusia meminta untuk mendiskusikan rancangan ini dengan Dubes AS. Ketua Komisi Urusan Luar Negeri di Parlemen Rusia, Constantin Kotschayov, meminta untuk menambahkan rancangan eksistensi militer AS di kawasan tersebut dalam agenda kunjungan.

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa AS baru memulai langkah awalnya di Asia Tengah dan Kaukasus dan bahwa langkah-langkah AS masih berada pada langkah pertamanya. Hal ini karena konflik yang ada masih baru di

kawasan ini, mengingat kawasan ini untuk beberapa waktu yang lalu masih merupakan monopoli Uni Soviet. Namun konflik untuk menguasai kawasan ini dalam berbagai dimensinya telah membawa ancaman bagi kepentingan vital Rusia dan juga ancaman bagi wilayah regional Cina. Selain itu, langkah AS yang baru pada tahap awal juga dikarenakan konflik di kawasan ini telah menonjolkan kepentingan strategis AS untuk mewujudkan rencana-rencananya dengan jalan mempertahankan AS sebagai kekuatan besar tunggal di dunia. Hal ini akan menuntut pengusiran Rusia dari tempat-tempat pengaruhnya dan juga pengurangan pengaruh Cina. Semua ini menjadikan masalah ini sebagai salah satu masalah internasional yang penting, yang konfliknya tidak lagi sekadar masalah tapal batas regional.

Selanjutnya, ada faktor lain yang membuat kawasan ini menjadi pusat perhatian bagi negara-negara yang berpengaruh baik regional maupun internasional. Hal ini menjadikan masalah kawasan Asia Tengah sebagai masalah internasional. Faktor itu adalah kembalinya kawasan ini kepada Islam, setelah pembungkaman yang keras sepanjang era komunisme selama 70 tahun. Orang-orang segera kembali kepada keislaman mereka dengan penuh kekuatan yang menarik perhatian. Ini bukan hanya dalam urusan ibadah, bahkan mereka telah menuntut pemerintahan Islam (Khilafah) dalam derajat yang luar biasa. **Hizbut Tahrir** yang menyerukan **Khilafah** pun berhasil menghimpun sebagian mereka sejumlah ribuan orang baik laki-laki maupun perempuan dalam beberapa tahun saja. Keimanan mereka sangat menakjubkan. Mereka mengatasi berbagai kesulitan dan tidak takut –karena Allah— terhadap celaan para pencela.

Akan tetapi, para penguasa mereka yang bergabung dengan era sebelumnya (komunisme), merasa tidak senang dengan kembalinya mereka dengan kuat pada akar mereka (Islam). Para penguasa itu lalu melakukan kebrutalan dan penyiksaan melawan rakyatnya. Para penguasa itu pun meminta

bantuan orang-orang AS, Inggris, dan bahkan Yahudi, untuk menghalangi kembalinya Islam politik ke tampuk kekuasaan.

Aparat intelijen lokal kemudian bergerak dan bekerjasama dengan intelijen Rusia, AS, dan Inggris, untuk menghentikan pertumbuhan Islam yang spektakuler ini di negeri-negeri tersebut. Mereka menggunakan cara-cara represif dan kekerasan. Mereka juga menggunakan berbagai cara untuk meragukan dan merancukan pemikiran Islam, di samping menggunakan cara memuji-muji dan memalsukan pemikiran sekuler.

Namun Islam yang ada dalam jiwa kaum Muslim di kawasan ini telah tertancap mantap. Keteguhan mereka bertambah hari demi hari. Segala cara gaya syaitan tersebut tidak dapat menyimpangkan kaum Muslim dari keislaman dan keimanan mereka. Barat telah memahami fakta mantapnya Islam dalam jiwa bangsa-bangsa ini dan bahwa keislaman mereka telah berubah menjadi bara api yang bergejolak. Robert D. Caplan, pakar AS tentang Dunia Ketiga, mengatakan, "Di Asia Tengah, di bagian bumi ini, Islam akan menjadi daya tarik yang terbesar, karena dukungan mutlak dari orang-orang yang tertindas dan dizalimi. Agama yang banyak tersebar luas di level dunia ini adalah satu-satunya agama yang siap bertempur dan berjuang."

Sungguh, kawasan Asia Tengah ini telah menjadi salah satu benteng penting dari sekian benteng Islam. Kawasan ini telah menjadi salah satu kawasan dari sekian kawasan harapan Islam yang memanjang dari Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara, hingga menjangkau kawasan Timur Tengah. Demikian pula kawasan Asia Tengah ini dapat terhubungkan dengan Pakistan dan Iran secara geografis, yang akan mengirimkan peringatan bahaya kepada orang-orang Rusia dan AS bahwa sebuah Daulah Islam yang besar dan memiliki nuklir akan dapat berdiri di kawasan yang luas dan berbatasan dengan banyak negara.

Maka dari itu, salah satu sebab pendudukan Afghanistan oleh AS adalah untuk mengawasi kawasan ini, apalagi para

penguasanya tidak sejenis dengan umat. Sungguh, nasib akhir para penguasa itu adalah kehancuran.

Bahaya yang lahir akibat berkembangnya arus Islam di negeri-negeri ini telah menjadi sebab diadakannya beberapa konferensi periodik bagi Rusia dan Cina untuk menolak bahaya-bahaya yang muncul dari kawasan tersebut. Konferensi terpenting adalah konferensi Shanghai yang menetapkan bahwa bahaya paling utama adalah apa yang mereka sebut "fundamentalisme Islam" dan "gerakan-gerakan Islam".

Walhasil, kekayaan alam yang melimpah di kawasan Asia Tengah, posisinya yang strategis bagi Rusia dan Cina, ketamakan AS, di samping kebangkitan Islam yang semakin berkembang di sana, semuanya merupakan faktor-faktor yang saling berkelindan yang menjadikan Asia Tengah sebagai masalah internasioal yang penting.

5. Masalah Anak Benua India

Masalah anak benua India adalah masalah lama, namun belum menonjol di masa lalu sebagaimana sekarang. Bahkan ia belum menjadi salah satu masalah dari masalah-masalah utama dunia. Adapun yang membuat masalah ini menjadi hal yang baru dan besar adalah tiga hal. *Pertama*, meluasnya Islam yang dimunculkan oleh permasalahan Kashmir. *Kedua*, semakin membesarnya kekuatan Cina di kawasan ini. *Ketiga*, bergabungnya India dan Pakistan ke dalam klub negara-negara nuklir.

Adapun tentang meluasnya Islam, maka pengendaliannya tidak lagi dianggap hal yang remeh. Karena, salah satu sebab perang Afghanistan yang dilakukan AS adalah serangan tentara salib untuk memukul gerakan-gerakan Islam yang membela muslim Kashmir. Khususnya, setelah kekuatan kaum Muslim tampak nyata tahun 1999 ketika muncul milisi-milisi Islam yang mendapat bantuan dari Pakistan. Mereka menyerang dataran tinggi Kirgil yang berada di perbatasan Pakistan-India di dataran

tinggi Kashmir. Kelompok ini hampir mengalahkan pasukan India dan membebaskan Kashmir, andaikata tidak ada pengkhianatan Nawaz Sharif, PM Pakistan, dan Pervez Musharraf, kepala stafnya pada waktu. Keduanya menarik mundur pasukan Islam karena mengikuti perintah AS.

Peristiwa ini sendiri telah menjadi lonceng bahaya bagi AS. Inilah peristiwa yang membuat AS berpikir seribu kali terhadap membesarnya kekuatan kaum Muslim di kawasan ini. Untuk itu, AS mendesak agennya, Pervez Musharraf, Presiden Pakistan sekarang, agar menghancurkan dan membubarkan milisi-milisi Islam di Pakistan dengan alasan orang-orang yang memerangi India di Kashmir telah keluar dari Pakistan dan mereka dianggap teroris.

AS juga mendesak Musharraf untuk yang kedua kalinya agar membatalkan penyerahan masalah Kashmir kepada orang Islam Kashmir. Musharraf menerima tuntutan ini dan kemudian mengumumkan pembatalan pemberian hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Kashmir. Dimulailah negosiasi di Islamabad antara India dan Pakistan untuk menyelesaikan masalah Kashmir dengan asas kesepakatan dua pihak (bilateral). Negosiasi itu dimulai dengan pengakuan pemerintah Pakistan akan adanya hak bagi orang-orang India di Kashmir. Pemerintah Pakistan berunding untuk menyepakati agar hak itu menjadi sah, bukan untuk mengusir pendudukan orang-orang Hindu di Kashmir.

Maksud AS dengan mendesak Musharraf khususnya masalah Kashmir tidak hanya untuk memukul kekuatan Islam yang menjadi semakin besar di Pakistan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas kawasan itu. Dengan demikian tidak terjadi pergolakan antara India dan Pakistan, sehingga Cina akan menjadi kekuatan tunggal di kawasan ini. Bahkan AS berkehendak untuk meredakan masalah India dan Pakistan supaya India dapat menghadapi Cina dalam keadaan aman pada perbatasan barat India dengan Pakistan. Maka sempurnalah gabungan India-Pakistan dalam organisasi SARK bagi negara-negara Asia Selatan. Dengan

demikian terwujudlah kekuatan besar yang mampu menghadapi Cina dengan segenap kemampuan.

Sebaliknya, andaikata pergolakan India dan Pakistan berlangsung terus, India tentu tidak akan mampu menghadapi atau mengimbangi Cina. Khususnya karena Cina telah menjadi kekuatan ekonomi yang semakin besar dan kekuatan demografi yang utama di dunia ini. Cina juga mempunyai posisi tetap di Dewan Keamanan PBB serta merupakan negara nuklir yang maju. Dengan kata lain, dengan pertimbangan apapun, Cina telah dianggap sebagai kekuatan yang terus meningkat. Cina pun juga tidak jatuh dalam kesalahan sebagaimana yang terjadi pada Rusia. Maksudnya, Cina mampu menjaga stabilitas dalam negerinya. Deng Xiao Ping — pemimpin kuat yang melakukan pembaharuan Cina sesudah Mao Tse Tung— mengatakan, "Kesalahan terbesar yang dilakukan Gorbachev adalah memberikan kebebasan politik sebelum memperbarui perekonomian."

Demikianlah, AS telah mempertimbangkan sungguh-sungguh kekuatan Cina yang semakin besar dan berusaha menyibukkan Cina di kawasan ini dengan membentuk satu kekuatan yang mampu menghadapinya. Selanjutnya AS berkepentingan untuk menghentikan perseteruan India dan Pakistan sehingga keduanya mencurahkan tenaganya untuk menghadapi Cina. Inilah yang menyebabkan AS berdiam diri dan membiarkan kepemilikan India dan Pakistan akan senjata nuklir. Bahkan AS membantu India secara khusus untuk memiliki persenjataan modern dan memudahkan India mendapatkannya karena lemahnya teknologi persenjataan di India. Bukti akan hal ini adalah AS mencegah Israel untuk menjual pesawat-pesawat Falcon yang canggih ke Cina, sementara AS mentolerir Israel untuk menjualnya kepada India. Lebih dari itu, AS melibatkan dirinya bersama India ke dalam kesepakatan-kesepakatan strategis. Dengan kata lain, AS telah memperlakukan India sebagaimana AS memperlakukan Israel, meskipun India bukan termasuk negara Barat dan bukan pula negara Anglo-Saxon.

Inilah masalah yang paling tampak, yaitu meluasnya Islam, Cina, dan nuklir. Karena itu, AS merancang strateginya di kawasan ini dengan prinsip dasar membatasi perkembangan Islam dan Cina, mengimbangi kekuatan Cina dengan meredakan kawasan ini, serta menghilangkan sebab-sebab pergolakan di kawasan anak benua India ini sehingga terbentuk satu kekuatan besar yang terorganisir yang menyamai dan mengimbangi kekuatan Cina.

6. Masalah Afrika

Masalah Afrika adalah masalah yang baru dan belum muncul di percaturan internasional kecuali sesudah tahun 1960. Masalah Afrika adalah masalah imperialisme semata-mata, bukan yang lain. Sebab Afrika adalah negara yang terbelakang secara intelektual yang memiliki sumber bahan mentah yang sangat besar serta kekayaan flora dan fauna yang fantastis. Ketika negara-negara imperialis pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19 melancarkan penjajahan, Afrika menjadi salah satu daerah jajahan. Setiap negara berusaha menjajah negara-negara Afrika yang mampu mereka kuasai.

Saat itu tidak terjadi friksi yang tajam di antara negara-negara imperialis atas jajahannya. Maka, di Afrika bercokol mayoritas negara-negara imperialis dan benua Afrika pun seluruhnya menjadi jajahan Eropa. Di Afrika terdapat jajahan Inggris, Perancis, Spanyol, Belanda, Jerman, Italia, Portugal dan Belgia. Inggris adalah pemilik jajahan terbesar di Afrika, disusul Perancis, Belgia dan Portugal. Kedelapan negara penjajah ini tetap menguasai wilayah Afrika sampai akhir Perang Dunia II.

Pada saat Piagam PBB disusun, di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan penghentian penjajahan. Akan tetapi pasal-pasal ini dibuat sedemikian rupa sehingga penghentian penjajahan ini berlangsung secara bertahap. Maka, negara-negara adidaya tidak membicarakan penghentian penjajahan di Afrika

kecuali setelah tahun 1960. Sedang sebelum itu pada sebagian negara-negara jajahan dibentuk pemerintahan perwalian/mandat, seperti jajahan-jajahan Italia sebagai pendahuluan untuk penghentian penjajahan di sana. Terdapat pula aktivitas-aktivitas politik untuk mengakhiri penjajahan.

Aktivitas politik yang terpenting waktu itu tercermin pada gagasan Netralitas Positif, Konferensi Netralitas Positif, dan Non Blok. Gagasan Netralitas Positif ini pada mulanya adalah gagasan Inggris yang diberikan oleh PM Churchil kepada salah satu agen Inggris, yaitu Nehru. Churchil meminta Nehru agar mengumumkan ide itu sebagai politik India dan menjalankannya di negara-negara di kawasan Asia.

Rahasia di balik pemberian ide ini kepada Nehru adalah Inggris melihat bahwa jajahannya di kawasan Timur Jauh dan Asia seluruhnya sedang berada dalam ancaman bahaya dari AS dan Rusia (Uni Soviet). Inggris berada dalam ancaman bahaya dari Rusia (Uni Soviet) dengan adanya provokasi Rusia terhadap penduduk negeri-negeri jajahan untuk memerdekakan diri dari penjajahan, terlebih lagi sesudah Inggris melihat apa yang terjadi di Indonesia. Inggris pun berada dalam ancaman bahaya AS yang mendesaknya untuk memberikan kemerdekaan kepada negara-negara jajahannya, yang selanjutnya akan ditarik ke pihak AS demi kepentingan AS dengan cara memberikan utang luar negeri dan mengirimkan para tenaga ahli.

Mengenai ide kemerdekaan, Inggris telah sejak lama menjadikannya sebagai sarana untuk mengubah cara penjajahannya. Inggris telah memberikan kemerdekaan kepada sebagian jajahannya dan menjadikannya negara-negara merdeka. Sebagiannya dibentuk Inggris menjadi apa yang disebut Negara Persemakmuran Inggris. Karena itu, Inggris tidak banyak mempedulikan ide kemerdekaan, tetapi dia mendukungnya dan mengikuti alurnya karena Inggris tahu bagaimana memanfaatkan ide ini untuk tetap mengokohkan penjajahannya. Namun Inggris khawatir terhadap dominasi AS atas negara-negara merdeka

tersebut melalui cara memberikan utang luar negeri, mengirim tenaga ahli, memberi bantuan, dan sebagainya.

Inilah asal usul mengapa Inggris memunculkan gagasan Netralitas Positif dan memberikannya pada Nehru agar Nehru menjalankannya sebagai upaya menghambat AS dan Rusia (Uni Soviet). Nehru kemudian benar-benar menyebarkan gagasan ini dengan penuh semangat.

Rusia (Uni Soviet) memahami maksud sebenarnya gagasan ini. Karenanya Rusia mendukungnya dan berusaha memanfaatkannya, karena sikap netral negara-negara merdeka berarti ada harapan untuk memisahkannya dari Barat.

Sedangkan AS, para politisinya berbeda pendapat mengenai gagasan tersebut. Sebagian mendukung gagasan itu karena akan memungkinkan AS untuk menarik negara-negara non-blok tersebut ke pihaknya dengan memberikan berbagai pinjaman maupun hibah. Sementara sebagian menentangnya karena akan memungkinkan komunisme masuk ke negara-negara non-blok ini.

Namun demikian, Nehru tetap menyebarkan gagasan ini dan berusaha mewujudkan gagasannya menjadi aksi yang konkret. Nehru kemudian menjalin kontak dengan Cina dan mengajaknya untuk mengadakan konferensi negara-negara non-blok. Cina dengan serta-merta menerimanya lalu dibentuklah panitia persiapan konferensi. Panitia ini lalu mengadakan kontak dengan negara-negara terjajah yang sudah merdeka dan mengajaknya untuk mengadakan konferensi non-blok.

Indonesia termasuk ke dalam panitia ini. Pada waktu itu Indonesia belum cenderung memihak kepada AS. Indonesia juga khawatir jikalau nanti konferensi itu akan berpihak pada komunis. Nampak saat itu Indonesia berusaha untuk meminta pendapat AS dan AS pun kemudian mendukung Indonesia. Waktu itu presiden Eisenhower juga menyetujui gagasan non-blok ini. Karena itulah, Indonesia menerima baik gagasan ini dan mengusulkan supaya konferensi itu diadakan di Indonesia

tepatnya di Bandung. Usulan ini diterima oleh panitia dan diadakanlah konferensi ini di Bandung pada tahun 1955.

Rusia (Uni Soviet), Cina, Inggris, dan AS masing-masing berusaha memanfaatkan konferensi itu. Tetapi konferensi ini kemudian menghasilkan kesimpulan yang memuaskan Rusia (Uni Soviet), Cina dan AS, karena konferensi mengeluarkan deklarasi-deklarasi yang menyerukan kemerdekaan. Sementara Inggris tidak puas karena dia ingin menguasai sendiri ataupun mendominasi gagasan non-blok ini.

AS kemudian benar-benar memanfaatkan konferensi ini. Waktu itu Tito, Soekarno, dan Abdul Nasser mengadopsi dengan kuat gagasan dan konferensi non-blok ini. Mereka kemudian bergabung dengan Nehru —si agen Inggris— pemilik asli gagasan itu dan menjadikan konferensi tersebut sebagai sarana untuk menyerukan kemerdekaan dari penjajahan dan untuk menyerang negara-negara imperialis. Mereka memprioritaskan usahanya di Afrika. Pada tahun tahun 1960 gagasan non-blok tersebut telah memainkan perannya di Afrika.

AS sendiri saat itu telah memiliki agen-agennya di Afrika. Sejak saat itu berpindahlah pergolakan dunia ke Afrika. AS berusaha dengan sungguh-sungguh mengusir negara-negara imperialis dari Afrika dan menggantikan posisinya. Karena itu, AS berusaha mendesak negara-negara ini untuk memberikan kemerdekaan bagi negara-negara jajahannya.

Sementara itu sebelum tahun 1954 AS telah menyulut revolusi di Aljazair dan merekrut agen-agennya di sana. AS juga meminta Mesir dan negara-negara Arab membantu revolusi tersebut. Revolusi ini memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap negara-negara imperialis untuk melepaskan daerah jajahannya.

Adapun Inggris, dia paham betul apa makna memberikan kemerdekaan itu. Karenanya Inggris dalam waktu singkat memberikan kemerdekaan kepada sejumlah negara jajahannya sehingga muncullah negara Zanzibar, Tanjanika, Nigeria, Uganda,

Uni Rodhesia Utara, Rodhesia Selatan, Niasaland, dan lain sebagainya.

Adapun Perancis, sungguh ia terlambat. Akan tetapi setelah De Gaulle melihat kondisi politik dunia yang berubah begitu cepat, Perancis segera mengikuti langkah yang ditempuh Inggris. Perancis memberikan kemerdekaan kepada sejumlah negara sehingga terbentuklah negara Maroko, Tunisia, Aljazair, Senegal, Gabon dan lain sebagainya.

Sedang Belgia, waktu itu dia menjajah Kongo yang merupakan gudang harta Afrika. Di situ terdapat deposit terbesar uranium, yaitu materi yang sangat penting untuk pembuatan bom nuklir. Karena itu, bukan hal yang mudah untuk memberikan kemerdekaan pada Kongo. Terlebih lagi Inggris telah menguasai perusahaan-perusahaan yang menghasilkan sumber-sumber alam di Katungga, salah satu wilayah Kongo. Karena itu, memberikan kemerdekaan pada Kongo akan mendatangkan masalah besar.

Namun AS terus mendesak Belgia untuk memberikan kemerdekaan pada Kongo sehingga akhirnya Kongo menjadi negara merdeka. Hal ini menjadikan Inggris frustasi dan menguasakan agennya Moes Chumbey mengumukan kemerdekaan Katungga. AS kemudian mengajukan permasalahan ini ke PBB. PBB kemudian mengirimkan satu kekuatan internasional untuk mengembalikan Katungga dan pergilah waktu itu sekjennya Hammarskjlod. Namun Inggris merencanakan sebuah makar dan membunuh Hammarskjlod.

Perseteruan Inggris dan AS semakin kuat dan berlangsung terus beberapa tahun sampai AS berhasil menguasai Katungga. AS kemudian mendirikan pemerintahan yang mengikuti AS dan mengusir Chumbey dari sana. Dengan demikian redalah krisis Kongo ini meskipun untuk sementara waktu.

Sementara di sela-sela itu, Inggris khawatir akan federasi antara Uni Rodhesia Selatan, Rodhesia Utara, dan Niasaland. Inggris kemudian memecah federasi ini dan memberikan kemerdekaan pada Niasaland yang kemudian disebut Malawi.

Inggris juga memberikan kemerdekaan pada Rodhesia Utara yang kemudian disebut Zambia. Inggris berusaha meletakkan Rodhesia Selatan pada posisi yang bisa mengamankan kelanggengan penjajahannya. Namun karena AS terus menerus mencampuri urusannya, Inggris kemudian memberikan kemerdekaan juga pada Rodhesia Selatan yang kemudian dikenal dengan Zimbabwe.

AS telah berhasil merebut negara-negara tanduk Afrika dan negara-negara pantai besar, yaitu Uganda, Ruwanda, dan Burundi dari Perancis. Tetapi AS gagal merebut Chad dari Perancis pada akhir tahun 90-an. Kekuatan militer agen Perancis Idris Deby akhirnya berhasil mempertahankan Chad sesudah Idris dapat mengalahkan kekuatan militer Husein Habri yang loyalitasnya labil kepada Perancis. Sebelumnya Habri loyal kepada Perancis tapi kemudian condong kepada AS. Inilah yang membuat Perancis mendukung agennya Idris Deby dan menempatkannya untuk menguasai pemerintahan.

Kolonel Idris Deby pada mulanya adalah orang dan sekutu kuat Habri. Idris menempati jabatan sebagai Panglima Umum Angkatan Bersenjata Chad sampai bulan April 1989. Idrislah yang memimpin kekuatan militer Habri di pertempuran Piyalarju tahun 1983 dan berhasil mengusir tentara Libya dari Chad. Tetapi persengketaan antar suku membuat Idris Deby bersekutu dengan sekutunya Hasan Jamus dalam upaya revolusi yang gagal, sesudah dia dicopot dari jabatannya April 1989. Kemudian Idris Deby melarikan diri ke Sudan dan membentuk Gerakan Pembebasan Patriotik (*Patriotic Salvation Movement*) yang terdiri dari dua suku yang menentang pemerintahan Presiden Habri. Kedua suku itu adalah Zaghawa dan Hijara. Mereka tinggal di daerah perbatasan Chad dan Sudan. Kolonel Deby sendiri memiliki hubungan yang kuat dengan Perancis, karena dia adalah didikan militer Perancis dan telah mengikuti pendidikan militer di Paris tahun 1958. Karena itu, kemenangan Deby dan kekalahan Habri adalah pukulan bagi kekuatan AS dan pengokohan pengaruh Perancis. Sebab dengan itu, Perancis dapat memegang

kembali inisiatif untuk memutus pengaruh AS yang terus berkembang

Dengan duduknya kaum neo-konservatif dalam pemerintahan AS, AS mulai mengambil cara-cara baru untuk memerangi benua Afrika. AS tidak lagi merasa cukup dengan menyulut perang saudara, memunculkan krisis-krisis, dan membantu gerakan-gerakan pemberontak supaya AS bisa mengusir agen-agen negara-negara Eropa dan mendatangkan agen-agen AS ke dalam pemerintahan di negara-negara Afrika. Lebih dari itu, AS menambahkan cara —sebagaimana garis politik Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri AS— yaitu melakukan intervensi militer secara langsung.

Maka, AS segera berupaya membentuk hubungan-hubungan dan kesepakatan-kesepakatan militer dengan sejumlah negara di Afrika Selatan, Afrika Barat, dan Afrika Tengah atas nama perang melawan terorisme. Ini mengisyaratkan bahwa intervensi militer AS secara langsung akan memainkan peranan penting dalam pergolakan Afrika pada fase berikutnya, di samping cara-cara yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan pada masa mendatang akan terjadi pergolakan dan tekanan yang lebih kuat di Afrika.

AS telah membangun dan terus mencoba membangun pangkalan-pangkalan militernya di Afrika Selatan, Afrika Barat, dan Afrika Timur. Tujuannya agar AS dapat menyokong gerakan-gerakan pemberontak dan menjadikannya sarana untuk menekan pemerintahan-pemerintahan regional sebagai jalan mengusir negara-negara Eropa, terutama Inggris, dari sisa-sisa jajahannya.

Akan tetapi karena centang perenangnya kepentingan-kepentingan Eropa di Afrika, maka di masa yang akan datang Afrika akan dicirikan dengan konflik berdarah dan kekerasan. Apalagi tidak ada pertimbangan apapun di Afrika kecuali pertimbangan ekonomi dan perampokan sumberdaya alam. Dengan demikian sesungguhnya pergolakan di Afrika adalah pergolakan antar negara-negara imperialis, sehingga masalah Afrika ini telah menjadi masalah internasional.

Walhasil, pergolakan antar negara-negara adidaya dalam memperebutkan benua Afrika telah menguat sejak tahun 60-an pada abad ke-20. Di benua ini terdapat pengaruh AS dan Rusia (Uni Soviet) di samping pengaruh negara-negara imperialis Eropa. Namun karena lemahnya Rusia (Uni Soviet) dan tidak adanya peninggalan imperialisme masa lalu bagi Rusia di benua ini, maka Rusia terusir dari benua ini yang ditandai dengan keluarnya Rusia dari Angola pada tahun 80-an.

Begitu pula negara-negara imperialis kecil Eropa lainnya juga keluar dari Afrika dan akhirnya di benua ini hanya tersisa Inggris dan Perancis. Kedua negara ini melanggengkan pengaruhnya di bawah bingkai Organisasi Persemakmuran Inggris dan Organisasi Francophone Perancis. AS dengan segenap kemampuannya terjun dalam kompetisisi yang panas dengan Inggris dan Perancis untuk menguasai Afrika. Inilah yang mendorong Inggris dan Perancis mempertahankan kepentingan-kepentingan Eropa di benua ini dengan cara melakukan koordinasi di antara keduanya dan mengatur jadwal kunjungan bersama dua menteri luar negeri dari kedua negara ini ke negara-negara benua Afrika yang berbeda-beda.

Pergolakan di Afrika ini terus berlangsung di antara tiga negara ini. Pergolakan itu terus menerus tampil dalam bentuk peperangan saudara yang jumlahnya lebih dari 20 peperangan. Di antara pergolakan yang paling menonjol dan berlangsung sampai sekarang adalah pergolakan di Sierra Leon, Liberia, Pantai 'Aj, Somalia, Uganda, Kongo, Ruwanda, Burundi, dan Sudan.

Benua hitam ini sungguh mendapatkan cobaan berat disebabkan pergolakan imperialisme yang memunculkan konflik-konflik bersenjata terus-menerus. Jumlahnya mencapai lebih dari 26 konflik pada tahun-tahun terakhir ini yang melibatkan lebih dari 30 negara. Konflik-konflik yang direkayasa ini turut berperan dalam menciptakan hutang atas benua ini yang mencapai lebih dari 370 miliar dolar AS, yang merupakan 65% produksi nasional bruto benua ini. Karena berbagai konflik itu pula, telah ditanam

lebih dari 30 juta ranjau di 18 negara. Suatu jumlah yang mencapai lebih dari ¼ ranjau darat yang ditanam di seluruh dunia.

Perlu diingat bahwa pergolakan negara-negara imperialis Barat di Afrika ini terkadang berubah menjadi persetujuan dan kesepakatan di antara negara adidaya. Misalnya, kesepakatan AS dan Inggris untuk memisahkan Sudan Selatan dan Sudan Utara. Begitu pula kesepakatan AS dan Perancis tentang kawasan Pantai 'Aj. Akan tetapi kompetisi ekonomi dan politik antara negara-negara ini tetap menjadi sifat paling menonjol dalam pergolakan ini.

Walhasil, pergolakan internasional untuk melakukan penjajahan telah berpindah ke Afrika sehingga masalah Afrika telah menjadi masalah internasional. Masalah Afrika akan tetap menjadi masalah internasional, karena meskipun Inggris, AS, dan Perancis telah sepakat menjadikan Afrika berada di bawah satu ikatan yang disebut sebagai Organisasi Konferensi Afrika, kemudian Uni Afrika, akan tetapi pergolakan yang terjadi di dalam maupun di luar konferensi dan uni itu tetap terjadi di antara negara-negara tersebut, terutama antara AS dan Inggris. Dengan adanya pembagian dunia menjadi dua blok yaitu Blok Timur dan Blok Barat, AS berusaha mengusir negara-negara Eropa –terutama Inggris— dari daerah-daerah jajahannya yang terakhir, khususnya di Afrika.

Hal yang tampak adalah AS melakukan campur tangan di negara-negara Afrika atas nama perang melawan terorisme untuk menjalin kontak dengan tentara-tentara di berbagai negara Afrika. AS telah dan terus membangun pangkalan-pangkalan militernya di Afrika Utara, Afrika Barat, dan Afrika Timur dengan maksud agar AS menyokong gerakan-gerakan pemberontak sekaligus sebagai sarana untuk menekan pemerintahan-pemerintahan regional. Ini semua dilakukan AS untuk mengusir negara-negara Eropa terutama Inggris dari sisa-sisa jajahannya.

Akan tetapi karena carut marutnya kepentingan Eropa di Afrika, maka di masa yang akan datang Afrika akan dicirikan dengan konflik berdarah dan kekerasan. Apalagi tidak ada

pertimbangan apapun di Afrika kecuali pertimbangan materi dan kekayaan alam. Jelaslah, bahwa masalah Afrika adalah masalah Internasional.

Inilah permasalahan besar yang menjadi kancah aktivitas-aktivitas politik. Tapi ini tidak berarti bahwa aktivitas-aktivitas politik hanya terjadi pada enam masalah besar ini. Artinya adalah, konflik antar negara tampak paling menonjol pada enam masalah ini.

***

MEMAHAMI AKTIVITAS POLITIK

Konflik antar negara dalam keadaan aman hanya berupa aktivitas-aktivitas politik saja. Kadang-kadang disertai dengan operasi militer seperti yang terjadi di Vietnam dan di Timur Tengah baru-baru ini (Kuwait, Irak, dan Afghanistan). Kadang-kadang tidak disertai dengan operasi militer, sebagaimana yang terjadi di Afrika dahulu, yaitu di Rhodesia dan Afrika Selatan, dan di Tunisia dan Libya baru-baru ini.

Mengingat konflik antar negara terjadi karena adanya berbagai masalah dan krisis, sedangkan enam masalah yang telah kita bahas di atas adalah yang paling banyak menimbulkan friksi antar negara, maka kami paparkan enam masalah tersebut sebagai contoh aktivitas politik. Sebab aktivitas politik dapat saja terjadi di luar enam masalah di atas, bahkan dapat saja aktivitas politik terjadi tanpa adanya konflik.

Namun selama negara-negara adidaya masih terus berkompetisi dan melakukan tipu daya satu sama lain, pasti akan terjadi aktivitas politik dari sebagian kepada sebagian yang lain. Adakalanya dengan memasang perangkap internasional supaya

negara lain terjerumus ke dalamnya. Adakalanya dengan melemahkan negara lain dan menguatkan dirinya sendiri, atau dengan cara-cara lainnya. Contoh-contoh aktivitas politik ini sangat banyak dan tidak terhitung.

Salah satu contohnya adalah ide perlucutan senjata. Ketika ide ini dilontarkan dalam forum Liga Bangsa-Bangsa, Inggris langsung mengadopsinya sebagai cara untuk melemahkan Perancis. Inggris segera mendesak Perancis supaya melaksanakan ide ini. Inggris sendiri berpura-pura melucuti persenjataannya sehingga Perancis pun percaya bahwa Inggris telah melucuti persenjataannya. Perancis pun kemudian benar-benar melucuti persenjataannya dan membatasi kegiatan persenjataannya. Padahal ini hanya tipudaya Inggris untuk melemahkan Perancis di hadapan Inggris dan Jerman. Akibatnya Perancis tidak mampu menghadapi Jerman pada Perang Dunia II sehingga Perancis mengalami kekalahan telak dengan cepat. Tindakan Perancis mengadopsi ide perlucutan senjata ini ternyata berpengaruh besar dalam kekalahannya ini.

Contoh yang lain, ketika terjadi Perang Dunia II, Rusia (Uni Soviet) melancarkan aktivitasnya di Cina. Rusia membentuk partai Komunis untuk mengambil alih pemerintahan di Cina. Sementara AS mendukung pemerintahan yang ada di sana dan kemudian mendukung Chiang Kai-shek. Pada mulanya AS merekayasa agar Chiang Kai-shek bersekutu dengan kaum komunis sehingga terbentuk kekuatan yang dipertimbangkan. Kemudian kaum komunis memisahkan diri dari Chiang Kai-shek dan memeranginya. AS memberikan dukungan kepada Chiang Kai-shek secara terang-terangan berupa harta dan persenjataan, tapi diberikan secara terbatas. Sementara di sisi lain AS juga memprovokasi partai komunis secara sembunyi-sembunyi dan membatasi aktivitas Chiang Kai-shek.

AS terus melakukan langkah-langkahnya secara tersembunyi. Akan tetapi langkah-langkah AS akhirnya membawa pada kemenangan bagi orang-orang komunis, berhasilnya komunis

mengambil kekuasaan di Cina seluruhnya, serta pengusiran Chiang Kai-shek dan pengucilannya di pulau Formosa (sekarang Taiwan). Chiang Kai-shek sendiri terus memikirkan hal itu dan merasa heran. Chiang Kai-shek tidak membayangkan bahwa AS berusaha membentuk negara komunis di Cina. Dia hanya memahami bahwa kemenangan komunis adalah karena kebodohan AS dan bahwa AS tidak mengerti situasi politik yang terjadi.

Namun terbukti sesudah itu bahwa AS benar-benar telah menyusun rencana menjadikan Cina sebagai negara komunis untuk menghadapi Rusia (Uni Soviet) dan memecah-belah blok Komunis. AS telah sukses menjalankan rencananya ini meskipun baru berhasil setelah 20 tahun.

Ini adalah aktivitas politik yang dilakukan AS dan dapat dianggap sebagai salah satu perangkap internasional yang hebat.

Contoh yang lain, sesudah Perang Dunia II Eropa berada dalam keadaan tercerai-berai, miskin, dan terancam oleh Rusia (Uni Soviet). Eropa kemudian menjatuhkan dirinya ke pelukan AS dan minta bantuan kepadanya. AS dengan serta merta membantunya, lalu dibuatlah Rencana Marshal (*Marshall Plan)*. Sejak saat itu bantuan AS mengalir deras ke Eropa berupa bantuan ekonomi, persenjataan dan tenaga ahli. Melalui bantuan-bantuan itu, AS dapat masuk sebagai partner dalam perusahaan-perusahaan Eropa. AS lalu mendorong para tenaga ahli Eropa untuk bermigrasi ke AS dan kemudian mengikat perekonomian Eropa dengan perekomian AS.

Hal ini berlangsung belasan tahun hingga Eropa akhirnya menjadi pengikut AS dan berada di bawah sayapnya. Perekonomian Eropa secara umum akhirnya menjadi milik perusahaan-perusahaan AS. Jadi bantuan-bantuan AS tersebut tiada lain adalah sebuah tipu daya untuk mengikat Eropa, mengambil para tenaga ahlinya, dan upaya untuk turut memiliki perekonomiannya.

Contoh yang lain, Jerman keluar dari Perang Dunia II dalam keadaan penuh luka dan hancur lebur industrinya. AS segera

membantu Jerman. AS telah memahami satu poin penting dalam pembangunan industri di berbagai negara, yakni sebuah negara tidak akan menjadi negara industri secara internasional, kecuali jika negara itu mendasarkan industrinya pada industri perang (militer) dan membangun semua perindustriannya dengan asas industri perang. Jika industri Jerman dikembalikan dengan asas ini, maka dengan cepat Jerman akan kembali menjadi negara adidaya untuk kedua kalinya. Untuk itulah, AS membantu Jerman dan mengadopsi suatu program tertentu bagi perindustriannya. AS membangun perindustrian di Jerman dengan asas perekonomian, bukan dengan asas perang; dengan asas pembangunan bukan dengan asas industri perang.

Dalam rangka itulah perusahaan-perusahaan AS masuk ke Jerman dan membangun perindustrian Jerman dengan investasi-investasi AS. Dengan demikian AS telah memukul eksistensi Jerman sebagai sebuah negara militer. Sejak saat itu di Jerman banyak pabrik-pabrik raksasa dan perekonomian Jerman membaik karena majunya bidang perindustrian. Dari sisi ekonomi Jerman menjadi lebih kaya dibanding dengan Jerman sebelum Perang Dunia II. Dunia pun melihat bagaimana Jerman dapat mengembalikan industrinya dengan sangat cepat.

Tapi hakikatnya dengan perindustrian yang seperti ini berarti Jerman telah melakukan bunuh diri. Jerman tidak akan dapat bangkit kembali kecuali jika dia mengevaluasi kembali perindustriannya, memeriksanya kembali dari dasarnya, dan membangun perindustriannya atas dasar industri militer. Jerman tidak akan maju perekonomiannya kecuali jika dia mengusir semua perusahaan dan modal AS dari Jerman. Jadi, bantuan AS kepada Jerman dengan cara seperti ini adalah sebuah aktivitas politik yang termasuk perangkap internasional. AS telah berhasil memukul Jerman, bukan menolong Jerman.

Contoh yang lain, ketika Fidel Castro (pemimpin Kuba) mengadakan kontak dengan Blok Komunis dan meminta bantuan Rusia (Uni Soviet), AS tidak merasa gelisah. Padahal

Doktrin Monroe tidak membolehkan negara mana pun berpikir untuk menyerang AS. Ketika Rusia membantu Castro dengan senjata, AS diam saja. Padahal bantuan senjata itu dalam konvensi internasional merupakan intervensi langsung di bidang persenjataan terhadap AS. Diamnya AS ini bukan karena AS takut, bukan pula karena AS tidak tahu, sebab Kuba hanya beberapa langkah saja dari AS. Diamnya AS tiada lain sebagai tipu daya untuk menarik Rusia (Uni Soviet) ke Dunia Baru dalam rangka memperluas jangkauan Rusia yang justru akan melemahkan Rusia untuk menjaganya, melemahkan posisinya, dan memperkuat posisi AS terhadap Rusia.

Maka dari itu, banyak kalangan pengamat bahkan orang-orang Rusia sendiri yang menganggap tindakan Rusia di Kuba itu adalah sebuah kebodohan. Andaikata tidak ada kesepakatan yang terjadi antara dua negara adidaya di Wina, niscaya perluasan Rusia di AS akan berbalik menjadi bencana bagi Rusia sendiri.

Tidak tepat jika dikatakan bahwa sebenarnya AS gelisah akan hal itu dan hampir saja berkecamuk perang andaikata Rusia (Uni Soviet) tidak menarik misil-misil nuklir yang ditempatkannya di Kuba. Tidak tepat dikatakan demikian, karena apa yang dilakukan Kennedy dengan mengancam Rusia (Uni Soviet) karena adanya misil-misil Soviet di Kuba dan ditariknya misil-misil itu oleh Kruschev, adalah aktivitas yang direkayasa oleh kedua pihak. Hal itu karena sebagian hasil kesepakatan antara Kruschev dan Kennedy adalah menghapuskan pangkalan nuklir AS di Turki dan pangkalan nuklir Uni Soviet di Kuba. AS mampu menghapuskan pangkalan nuklirnya di Turki tanpa keributan, karena Turki tidak terpengaruh oleh penghapusan itu dan tidak akan menyebabkan kesalahpahaman antara Turki dan AS.

Akan tetapi menghapuskan pangkalan nuklir di Kuba dengan inisiatif dari Rusia (Uni Soviet), artinya adalah Uni Soviet tidak mau lagi membela pertahanan Kuba. Ini akan berpengaruh terhadap negara-negara komunis seluruhnya dan terhadap Kuba sendiri, serta akan memunculkan kesalahpahaman antara Rusia

(Uni Soviet) dan Kuba. Karena itu, harus ada cara tertentu untuk menghapuskan pangkalan ini sedemikian sehingga tidak membangkitkan reaksi terhadap Rusia (Uni Soviet) dari negara-negara komunis. Maka , Kennedy dan Kruschev bersepakat agar AS merekayasa suatu sebab yang dapat menimbulkan ketegangan internasional yang pada gilirannya akan membawa penghapusan pangkalan nuklir di Kuba.

Kennedy akhirnya menemukan waktu yang tepat untuk melaksanakan cara tersebut dan memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan AS. Kennedy melihat bahwa Inggris telah memobilisasi kekuatan militernya di Aden dan Bihan untuk menginvasi Yaman guna melawan dan mengusir pasukan Mesir agar keluar dari Yaman. Kennedy melihat pula bahwa Inggris benar-benar sedang memprovokasi pasukan Mesir dan mencoba memeranginya di Bihan. Ketika melihat hal ini, Kennedy mengutarakan masalah misil-misil nuklir di Kuba dan memunculkan ketegangan internasional sehingga Inggris dan Perancis takut akan berkobarnya sebuah perang dunia. Inggris saat itu kemudian mundur dari Bihan di Yaman. Kruschev pun berpura-pura mundur dan menampilkan diri sekan-akan siap untuk menarik misil-misil nuklirnya di Kuba jika AS juga menarik misil nuklirnya di Turki. Kennedy berpura-pura akan mempertimbangkan hal itu dan kemudian menghapuskan pangkalan nuklir AS di Turki.

Itulah fakta masalah yang sebenarnya. Jadi itu semua adalah aksi yang direkayasa untuk menjustifikasi penghapusan pangkalan nuklir Uni Soviet di Kuba, di samping menjadi sarana untuk menakut-nakuti Inggris.

Bukti bahwa diamnya AS terhadap pembangunan pangkalan nuklir di Kuba oleh Uni Soviet adalah tipu daya dan perangkap internasional, dapat dilihat dari apa yang terjadi di Yunani setelah Perang Dunia II. Saat itu sedang berkecamuk revolusi komunis di Yunani, sebab Tito mengusulkan kepada Stalin untuk masuk ke Yugoslavia guna melawan Yunani, mendirikan

sebuah negara komunis di Yunani, dan menggabungkannya ke Blok Komunis. Tapi Stalin menyadari bahwa usulan ini mengandung bahaya. Stalin berkata kepada Tito dengan terus terang, "Apakah anda menginginkan kita untuk membangun sebuah pangkalan di Laut Mediterrania untuk melawan negara paling kuat dan paling kaya di dunia? Apakah kita akan mampu menjaga pangkalan itu? Apa yang dapat kita lakukan, hanyalah membingungkan AS. Tapi kalau kita harus mengambil Yunani dari tangan AS, maka kita tidak akan mampu dan kita tidak akan berpikir seperti itu."

Contoh lain, ketika terjadi Perang Dunia II Hitler khawatir kalau Turki akan terjun ke dalam peperangan di pihak Inggris, yakni di pihak Sekutu. Hitler tahu bahwa kelompok yang berkuasa di Turki adalah kelompok Mustofa Kamal yang disebut Partai Rakyat Republik, yaitu kelompok yang sejalan dengan Inggris dan memprioritaskan Inggris. Karena itu, sangat mudah bagi Inggris untuk menarik Turki ke pihaknya. Hitler menyadari hal ini, dan dia khawatir akan masuknya Turki ke dalam perang melawan Jerman. Maka Hitler berusaha untuk menjadikan Turki sebagai negara netral, karena dia tahu bahwa masuknya Turki ke dalam perang melawan Jerman akan membahayakan Jerman dari tiga arah. *Pertama*, bangsa Turki adalah bangsa pemberani, bahkan lebih berani daripada Inggris, Perancis, dan Rusia, sehingga masuknya Turki ke dalam negara-negara Sekutu akan memberikan kekuatan bagi Sekutu yang harus dipertimbangkan dalam peperangan. *Kedua*, bangsa Turki adalah bangsa muslim sehingga terjunnya Turki ke dalam perang akan membangkitkan simpati kaum Muslim baik Arab maupun non-Arab. Ini akan dapat membangkitkan propaganda internasional. *Ketiga*, lokasi Turki adalah lokasi yang strategis dan istimewa, sebab dalam keadaan netral Turki akan menjadi benteng pada front utara dan barat. Maka Hitler berupaya agar Sekutu tidak memasuki Eropa. Dengan demikian Turki akan menjadi penghalang yang akan

menjaganya dari serangan belakang. Karena itulah Hitler berusaha keras menjaga kenetralan Turki.

Hitler mengirim tokohnya yang paling cerdik yaitu von Baben sebagai utusan Jerman ke Turki dengan tujuan menjadikan Turki bersikap netral dan mencegahnya terjun ke dalam perang di pihak Sekutu. Sebab masuknya Turki melawan Sekutu tidaklah mungkin dan tidak bisa diharapkan. Maka dari itu ambisi Hitler adalah agar Turki tidak terjun ke dalam perang di pihak Sekutu melawan Jerman. Karena itulah Hitler mengutus orangnya yang paling cerdik untuk kepentingan ini.

Tetapi agar maksud yang sebenarnya ini tidak terbongkar, von Baben menutupi misinya dengan menyatakan bahwa dia mencoba menarik Turki ke pihak Jerman dan mencoba meyakinkan Turki agar terjun ke dalam perang di pihak Jerman untuk melawan Sekutu. Karena itu pihak Sekutu sangat menginginkan kenetralan Turki. Para dubes Sekutu berusaha keras untuk mewujudkan tujuan ini. Sementara itu von Baben berpura-pura menjadikan Turki berpihak pada Jerman. Ini membuat Sekutu sangat menginginkan untuk mempertahankan netralitas Turki.

Dengan permainan politik dan kecerdikan von baben, Hitler akhirnya berhasil mempertahankan kenetralan Turki selama masa peperangan, meskipun sebenarnya mudah bagi Sekutu untuk memerangi Jerman dari arah Turki dengan memasukkan Turki ke pihak Sekutu. Akan tetapi Sekutu tidak melakukan hal itu, karena takut akan terbukanya front itu dan berusaha tetap menjaga kenetralan Turki. Aktivitas politik semacam ini dianggap sebagai aktivitas yang berpengaruh dalam peperangan.

Inilah contoh-contoh aktivitas politik internasional yang dilakukan oleh berbagai negara yang saling menentang satu sama lain dalam konflik dan kehidupan internasional. Adakalanya dengan memasang perangkap internasional, atau dengan melemahkan negara-negara yang lain, atau dengan manuver-manuver politik, atau dengan cara-cara lainnya. Aktivitas-aktitivas

ini sebagaimana terjadi dalam kehidupan internasional secara umum, terjadi juga dalam konflik-konflik pada enam masalah yang telah diterangkan sebelumnya. Akan tetapi terjadinya konflik itu hanya terbatas pada satu wilayah saja atau antara dua negara atau beberapa negara yang berkonflik. Namun, terjadinya konflik-konflik itu secara umum memberikan pengaruh internasional yang lebih luas.

Dari sini wajib bagi seorang politisi untuk tidak membatasi pikirannya hanya pada masalah-masalah yang penting dan aktivitas-aktivitas politik yang terjadi di dalamnya. Sebaliknya seorang politisi wajib mempunyai pandangan yang luas yang menjangkau semua aktivitas politik di negara adidaya manapun.

Di antara kewajiban seorang politisi pada saat dia memperhatikan suatu aktivitas politik, adalah tidak melepaskan suatu aktivitas politik dari konteks situasi dan kondisinya serta tidak menggenelralisir suatu peristiwa politik. Seorang politisi hendaknya mengaitkan setiap aktivitas politik dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Dia tidak boleh melepaskan aktivitas politik itu dari kondisi yang melingkupinya. Dia juga tidak boleh menggeneralisir suatu permasalahan dan tidak boleh juga menganalogikan suatu aktivitas politik dengan aktivitas politik lainnya. Tidak boleh pula dia memikirkan kronologi aktivitas-aktivitas politik itu dengan suatu mekanisme logika untuk sampai pada kesimpulan secara logika.

Sebaliknya wajib bagi seorang politisi menjauhi sikap-sikap seperti itu, sebab tidak ada yang lebih berbahaya bagi pemahaman politik daripada penggunaan logika dan analogi. Ini karena aktivitas-aktivitas dalam kehidupan itu berlain-lainan dan berbeda-beda serta tidak serupa satu sama lainnya. Bahkan setiap aktivitas memiliki situasi dan kondisi sendiri-sendiri.

Karena itu, wajib bagi seorang politisi untuk mengaitkan aktivitas politik tersebut dengan informasi-informasi politik yang berkaitan dengannya, serta memahami aktivitas politik itu dalam situasi dan kondisi yang melingkupinya. Pada saat itulah, dia akan

memahami aktivitas politik itu dengan pemahaman yang mendekati kebenaran.

Contoh-contoh akan hal itu banyak sekali tak terhitung jumlahnya. Kejadian-kejadian sehari-hari yang terjadi dalam kehidupan internasional dan aktivitas-aktivitas politik negara-negara adidaya amat kaya dengan contoh-contoh.

Perlu ditambahkan, bahwa setiap aktivitas politik selalu berkaitan dengan prinsip dasarnya yang berkaitan dengan garis politik suatu negara, atau konstelasi internasional, atau kondisi negara-negara. Selain itu setiap aktivitas politik memiliki situasi dan kondisi yang khusus serta mempunyai lingkungan yang tidak sama dengan yang lain.

Contohnya, pada bulan April 1969 Korea Utara menembak jatuh pesawat mata-mata AS di Timur Jauh. AS jadi geger dan kemudian Dewan Keamanan Nasional mengadakan pertemuan. Presiden Nixon lalu mengeluarkan kebijakan bahwa AS tidak berniat melakukan balasan atas serangan pesawat ini. Kebijakan itu intinya bahwa pesawat dan kapal mata-mata haruslah menjaga diri dari segala serangan.

Sementara pada tahun 1968, Korea Utara telah menawan kapal mata-mata AS. AS juga geger dan Dewan Keamanan Nasional pun segera mengadakan pertemuan. Presiden Johnson segera mengeluarkan ancaman kepada Korea Utara dan menggerakkan Armada VII di Lautan Pasifik ke arah Korea. Ketika AS melihat bahwa ancaman dan perang urat syaraf yang dilancarkannya tidak mempan, AS menggunakan cara-cara perundingan dan bersikap lunak hingga Korea Utara akhirnya membebaskan para awak kapal AS.

Dua peristiwa ini adalah satu jenis, yaitu penentangan suatu negara kecil seperti Korea Utara terhadap negara adidaya seperti AS, dengan menembak pesawat AS, membunuh pilotnya, serta menawan kapal AS dan awak kapalnya. Mengapa AS mengambil sikap yang berbeda pada dua peristiwa tersebut? Apakah itu karena perbedaan pengambil kebijakan? Bisa jadi. Apakah itu

karena ancaman yang diberikan tidak membuahkan hasil? Bisa jadi.

Tapi yang jelas, situasi peristiwa penawanan kapal (1968) adalah peristiwa biasa atau nyaris biasa-biasa saja. Waktu itu Cina sedang sibuk melakukan Revolusi Kebudayaan. Karena itu ancaman yang dilancarkan tidak akan menimbulkan bahaya yang mungkin ada. Sedang peristiwa penembakan pesawat (1969), adalah peristiwa yang luar biasa. Sebab Rusia sedang memobilisasi kekuatan darat dan udaranya yang besar di tengah-tengah Eropa. Rusia juga sedang memobilisasi kekuatan lautnya di Laut Mediterrania. Sementara Cina dalam kondisi ingin menampilkan dirinya di kancah dunia setelah isolasi era Revolusi Kebudayaan, yaitu sedang berkonflik dengan Rusia untuk menonjolkan dirinya. Kalau saja Nixon melancarkan ancaman kepada Korea Utara, maka kemungkinan Cina akan melayani ancaman AS. Ini akan membawa pada friksi dan ketegangan yang dapat dimanfaatkan Inggris sebagai sarana memprovokasi Blok Komunis. Karena itu tidak tepat jika AS melancarkan ancaman ataupun perang urat syaraf. Karenanya Nixon hanya diam.

Jadi situasi dan kondisi dua peristiwa tersebut berlainan, sehingga harus pula ada sikap yang berbeda.

Contoh lain, adalah apa yang dilakukan Nixon setelah menjabat presiden AS, yaitu melakukan kunjungan ke Eropa dan mengklaim bahwa dia hendak kembali ke sekutu-sekutunya guna meminta pendapat mereka sebelum mengadakan kontak dengan Rusia dalam rangka memecahkan krisis Timur Tengah. Perkataan Nixon ini bisa saja benar andaikata tidak terdapat situasi dan kondisi lain yang lebih tepat menjadi sebab kunjungan Nixon.

Jika didalami, ternyata Inggris saat itu sedang menjalin kontak dengan negara-negara Eropa dengan maksud agar Eropa mendukung Inggris dalam krisis Timur Tengah. Inggris ingin meyakinkan Eropa agar berada di pihaknya guna menentang Rusia, walau pun ini akan membawa pada perang dunia melawan Blok Komunis. Ini adalah kondisi yang genting. Inilah yang

menyebabkan Nixon melakukan kunjungan ke Eropa segera setelah dia dilantik menjadi presiden sebelum dia menjalankan tugas apa pun. Kunjungannya ke Eropa ini adalah untuk memisahkan Eropa dari Inggris.

Contoh lainnya, pada akhir 1968 Rusia telah memerangi Chekoslovakia. Rusia disertai Pakta Warsawa dan seluruh anggotanya ikut serta dalam perang itu kecuali Rumania. Pasukan Warsawa memasuki Chekoslovakia dengan dalih menjaga komunisme, negara komunis, dan partai komunis, dari serangan Barat yang mungkin terjadi. Tapi sebenarnya mungkin saja ada faktor lain di luar alasan itu.

Situasi yang ada saat terjadinya peristiwa itu, sebenarnya lebih berbahaya daripada sekedar menjaga partai koimunis dan komunisme. Terlebih lagi sebenarnya yang ada hanyalah interpretasi para pemimpin partai komunis terhadap apa itu komunisme.

Dengan melakukan pendalaman, jelaslah bahwa Armada Rusia yang ada di pantai Mesir telah terancam oleh Inggris. Sebab Inggris telah memobilisasi kekuatan militernya di Laut Mediterrania. Israel juga telah menyerang Mesir sehingga memaksa Rusia untuk melakukan campur tangan dengan dalih menjaga komunisme. Pada saat itu dimungkinkan bagi Inggris berperang untuk memukul Rusia. Maka, Rusia mau tidak mau harus mempersiapkan perang dan memperisiapkan segala perlengkapan peperangan.

Tibanya berbagai perlengkapan perang Rusia melalui Gibraltar pada saat perang tidaklah mudah, apalagi jaraknya jauh. Maka, harus dibuat suatu jalan ke arah Laut Mediterrania yang dekat dengan Mesir. Untuk itu Rusia memobilisasi 2 juta personel tentara, 3000 pesawat tempur, dan persenjataan nuklir di Eropa Tengah. Rusia juga mempersiapkan Pakta Warsawa untuk turut serta dalam peperangan. Maka, Pakta Warsawa kemudian memasuki Chekoslovakia secara terbuka untuk menakut-nakuti Inggris dengan memobilisasi kekuataan Pakta

Warsawa itu di tengah-tengah Eropa, sebagai persiapan untuk menerobos Yugoslavia dan Albania untuk bisa mencapai Laut Mediterrania jika meletus perang antara Rusia dengan Inggris.

Jadi, masuknya mereka ke Cekoslovakia dengan alasan menjaga negara komunis maksud sebenarnya adalah mengancam Inggris dan mempersiapkan perang, serta meletakkan Pakta Warsawa pada kondisi yang siap untuk memasuki peperangan.

Demikianlah caranya mengaitkan aktivitas-aktivitas politik dengan prinsip dasarnya, meletakkan aktivitas politik itu pada situasi dan kondisi yang melingkupinya, dan memahami suatu aktivitas politik pada hari terjadinya aktivitas itu, bukan pada hari sebelumnya. Hal itu dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi pada hari yang sama, bahkan pada jam yang sama. Tidak boleh seseorang tetap berdiri di masa yang telah lalu walaupun hanya satu jam atau beberapa menit. Sebaliknya dia harus berpindah dinamis sesuai bergulirnya waktu. Dia harus memahami berbagai hal dan aktivitas politik sesuai dengan perkembangan pada detik terakhir, dengan memperhatikan berbagai hal dan peristiwa lain pada saat terakhir itu.

Demikianlah pembahasan masalah-masalah besar yang ada di dunia dan juga pembahasan negara-negara adidaya yang berpengaruh terhadap politik internasional. Demikian pula telah dibahas bagaimana menghubungkan suatu aktivitas politik dengan prinsip dasarnya, meletakkan aktivitas politik pada situasi dan kondisi yang melingkupinya, serta memahami aktivitas politik pada hari terjadinya aktivitas itu, bahkan pada jam terjadinya aktivitas itu. Sebab, perubahan dan dinamika berbagai peristiwa politik terjadi dengan sangat cepat.

***

SEBAB-SEBAB PENDERITAAN DUNIA

Tidak diragukan lagi dunia telah menderita karena negara-negara adidaya. Yaitu sejak mereka mencengkeram dunia dalam kedudukannya sebagai negara adidaya. Dunia juga menderita disebabkan apa yang mereka munculkan berupa konsep Keluarga Internasional atau Komunitas Internasional. Dunia juga menderita karena penjajahan yang muncul sejak adanya ideologi kapitalisme, yakni sejak munculnya imperialisme.

Dunia akan terus menderita selama "mitos" Komunitas Internasional atau Keluarga Internasional masih ada, selama negara-negara adidaya masih terus berkompetisi dan mencengkeram dunia, dan selama imperialisme masih ada, meskipun bentuk dan caranya berubah-ubah. Karena itu, membebaskan dunia dari penderitaan yang menimpanya dan menempatkannya pada jalan kebahagiaan tidak akan mungkin dicapai, kecuali jika tiga perkara ini telah diselesaikan. Dengan kata lain, semua itu tidak akan terwujud kecuali jika telah dihilangkan tiga faktor tersebut, yaitu: (1) Khurafat Keluarga Internasional, (2) Cengkeraman dan dominasi negara-negara adidaya, serta (3) Imperialisme dan monopoli.

Tentang **Keluarga Internasional**, sesungguhnya asas lahirnya ide ini sejak kemunculannya adalah batil. Pada mulanya komunitas negara-negara Kristen di Eropa Barat muncul untuk membentuk sebuah organisasi yang mampu menghadapi Daulah Islam. Kemudian bergabunglah bersamanya negara-negara Kristen di Eropa Timur sehingga terbentuklah komunitas negara-negara Kristen Eropa. Ini berlangsung sejak abad ke-16 –yakni sejak Daulah Islam memiliki kekuatan yang dapat melumpuhkan Eropa— sampai paruh kedua abad ke-19 (tahun 1856), ketika Daulah Islam telah melemah sehingga disebut "The Sick Man". Saat itu muncul konspirasi untuk membagi-bagi peninggalan "orang sakit" itu, yaitu membagi-bagi kekuasaan Daulah Islam. Selama jangka waktu kira-kira hampir 3 abad tesebut, Keluarga Internasional diartikan sebagai komunitas Kristen dan musuh Daulah Islam.

Meskipun komunitas ini hanya terbatas pada negara-negara Kristen saja bahkan negara-negara Kristen di Eropa saja, dan mereka pun tidak membolehkan negara-negara non-Kristen masuk ke dalamnya, tetapi mereka menyebutnya sebagai Keluarga Internasional dan Komunitas Internasional. Yaitu mereka melekatkan sifat internasional pada komunitas tersebut. Mereka pun membatasi pembahasan urusan-urusan internasional hanya pada komunitas tersebut, bukan pada komunitas lainnya. Sebenarnya, urusannya lebih ringan kalau saja komunitas Kristen ini membatasi diri sebagai masyarakat Kristen saja dan menjadikannya sebagai masyarakat Kristen untuk menghadapi Islam. Namun kenyataannya komunitas ini telah diberi sifat internasional. Mereka pun berusaha melestarikan sifat internasional ini.

Konsep Keluarga Internasional pada asalnya dibatasi dan didirikan hanya di kalangan negara-negara Kristen. Maka, yang disebut urusan internasional, adalah urusan internasional yang dimaksud oleh komunitas Kristen tersebut. Demikian pula yang disebut masalah internasional, adalah masalah internasional yang

dimaksud komunitas Kristen tersebut. Untuk mengatur dan melestarikan komunitas ini, disusunlah prinsip-prinsip tradisional yang kemudian disebut Undang-undang Internasional. Mereka memperhatikan kesepakatan-kesepakatan internasional yang berlaku di antara negara-negara Kristen dan juga konvensi-konvensi (kebiasaan) yang menjadi acuan di antara masyarakat Kristen. Dari itu semua mereka lalu membuat prinsip-prinsip yang mereka jadikan prinsip internasional, atau apa yang disebut Undang-undang Internasional.

Walhasil, Keluarga Internasional pada asalnya dibangun atas dasar kekeluargaan di antara negara-negara Kristen Eropa. Undang-undang Internasional pun pada mulanya juga berupa perjanjian-perjanjian yang berlaku di antara negara-negara Kristen. Demikian pula halnya dengan konvensi yang menjadi acuan di tengah-tengah masyarakat Kristen Eropa.

Maka dari itu, penggunaan istilah Keluarga Internasional hanya untuk negara-negara Kristen Eropa dapat dianggap suatu kebohongan dan penyesatan. Sebab, dunia ini bukan hanya komunitas negara-negara Kristen Eropa. Begitu juga penggunaan istilah Undang-undang Internasional hanya untuk berbagai perjanjian dan konvensi negara-negara Kristen saja dapat pula dianggap suatu kebohongan dan kedustaan. Sebab, pemikiran yang layak dijadikan Undang-undang Internasional bukanlah perjanjian dan konvensi di kalangan negara Kristen saja, melainkan kumpulan seluruh konvensi, kesepakatan, dan perjanjian dari seluruh masyarakat yang ada di dunia secara keseluruhan.

Karena itu, konsep Komunitas Internasional dilihat dari asasnya adalah salah. Begitu pula Undang-undang Internasional dilihat dari asasnya adalah juga salah. Tapi sebenarnya masih dimungkinkan memperbaiki masalah ini kalau saja negara-negara Kristen itu mau mengakui negara-negara yang lain di dunia ini. Namun kenyataannya mereka sama sekali tidak pernah mau mengakui negara-negara yang lain. Bahkan negara-negara Kristen itu tidak mau menerima penggabungan negara-negara lain ke

dalam komunitas mereka, kecuali negara Kristen. Barulah pada paruh kedua abad ke-19, mereka menerima keanggotaan sebagian negara–negara non-Kristen sebagai bagian Komunitas Internasional. Namun, mereka pun tetap tidak menerima selain prinsip-prinsip tradisional yang telah ditetapkan sebagai asas bahwa mereka adalah negara-negara Kristen Eropa.

Karena itulah, mereka menuntut Daulah Utsmaniyah untuk meninggalkan hukum Islam dalam urusan internasional dan mensyaratkan hal itu bagi Daulah Utsmaniyah. Negara-negara Kristen itu tidak mau menyetujui masuknya Daulah Islam kecuali setelah Daulah Utsmaniyah menerima persyaratan itu. Daulah Islam kemudian tunduk pada prinsip-prinsip tradisional yang berlaku di negara-negara Kristen Eropa.

Hal itu berarti komunitas ini memberikan toleransi bagi negara-negara lain untuk bergabung ke dalam komunitasnya. Namun mereka tidak mentolerir sama sekali adanya pengaruh dari prinsip-prinsip dan konvensi-konvensi lainnya terhadap hubungan internasional. Kondisinya tetap demikian hingga akhir Perang Dunia I dan hancurnya Daulah Islam

Kondisi ini sebenarnya masih dapat diperbaiki pasca Perang Dunia I, selama musuh —yang melandasi keberadaan Keluarga Internasional dan prinsip-prinsip internasional untuk melawan musuh itu— telah lenyap. Namun ternyata faktanya tidaklah demikian.

Negara-negara Kristen ini tetap berpegang teguh dengan asas yang mendasari keberadaan Komunitas Internasional dan prinsip-prinsip internasional. Karena itu, mereka sepakat untuk membuat suatu organisasi internasional yang akan menjelmakan Komunitas Internasional itu. Namun awalnya mereka belum menjadikan organisasi itu bersifat umum bagi seluruh negara, tetapi masih terbatas bagi negara-negara tertentu saja. Karenanya mereka menerima sebagian negara-negara non-Kristen dan non-Eropa tapi tidak menerima selain prinsip-prinsip tradisional bagi negara-negara Kristen Eropa. Mereka tidak mempedulikan konvensi dan pemikiran negara-negara lain di dunia ini.

Namun perlu dipahami, Komunitas Internasional itu sendiri arti sebenarnya adalah negara-negara Kristen Eropa, dan masuknya negara-negara ke dalam Liga Bangsa-Bangsa artinya adalah mereka telah diterima dalam komunitas Kristen Internasional.

Kemudian setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ada keinginan untuk membatasi keanggotaannya hanya pada negara-negara yang terjun dalam peperangan melawan Jerman, yaitu negara-negara Kristen dan negara-negara lain yang mengikutinya. Akan tetapi, karena AS ingin memperluas pengaruhnya di dunia dan memasukkan negara-negara di dunia di bawah naungannya, AS memperluas keanggotaan PBB dan membolehkan negara-negara di dunia untuk masuk ke dalamnya. Namun demikian, AS dan negara-negara Kristen lainnya, tetap tidak mentolerir prinsip mana pun untuk masuk ke dalam Undang-Undang Internasional dan peraturan PBB itu. Sebaliknya, prinsip-prinsip negara Kristenlah yang tetap menjadi asas Undang-Undang Internasional –bahkan menjadi Undang-Undang Internasional itu sendiri— dan asas peraturan PBB. Bahkan Blok Timur di bawah kepemimpinan Rusia meskipun mereka meyakini idelogi Komunisme –yang bertentangan dengan peraturan Kapitalis dan prinsip-prinsip negara Kristen— tetap saja tidak mampu sedikit pun mengubah asas peraturan internasional itu. Blok Timur juga tidak mampu menjadikan sebagian pemikirannya masuk ke dalam peraturan ini.

Maka dari itu, prinsip-prinsip tradisional negara-negara Kristen —atau negara-negara Kapitalis— inilah yang kini mencengkeram komunitas manusia di seluruh dunia. Mereka mengabaikan sama sekali berbagai konvensi dan pemikiran negara-negara lain. Pada saat yang sama, komunitas internasional ini pada faktanya adalah komunitas negara-negara Kristen, atau dengan istilah lain, negara-negara Kapitalis, meskipun komunitas ini menerima masuknya banyak negara lain ke dalamnya. Karena itu, harus dievaluasi kembali konsep Komunitas Internasional dan

Keluarga Internasional. Begitu juga harus dievaluasi kembali makna Undang-Undang Internasional.

Yang menambah ruwet permasalahan adalah, negara-negara Kristen Eropa atau negara-negara kapitalis ini tidak menyerahkan urusan penerapan prinsip-prinsip tradisional tersebut —yang kemudian menjadi Undang-Undang Internasional— kepada sanksi moral, sebagaimana halnya konvensi internasional. Penerapan prinsip-prinsip tradisional itu juga tidak hanya diserahkan kepada pihak yang terikat dengan prinsip itu. Sebaliknya, negara-negara kapitalis itu memaksakan penerapan prinsip-prinsip ini dengan kekuatan senjata, dan memberlakukannya ke seluruh negara di dunia, baik kepada negara yang memegang prinsip itu maupun yang tidak.

Negara-negara adidaya ini pada masa lampau telah menjadikan diri mereka sebagai badan yang menjaga keamanan dan peraturan di masyarakat internasional dan melakukan intervensi atas negara-negara yang lain ketika tampak ada ancaman bagi keamanan atau pelanggaran peraturan. Tidak ada yang dapat mencegah intervensi ini –yakni mencegah penerapan prinsip-prinsip yang mereka sepakati— kecuali kekuatan yang dimiliki oleh negara-negara yang mengintervensi itu sendiri, dan ketidakmampuannya untuk menghadapi negara yang hendak diintervensi.

Sebelum Perang Dunia I, negara-negara Kristen Eropa, baik secara bersamaan atau sendiri, telah menjadikan dirinya sebagai polisi dunia untuk menerapkan peraturan internasional. Ini berlangsung bahkan sampai terbentuknya LBB. Kemudian setelah terbentuknya PBB, negara-negara kapitalis ini tetap menjadikan dirinya sebagai polisi dunia untuk menerapkan peraturan dan Undang-Undang Internasional. Itulah yang menyebabkan AS dan Inggris masuk ke Timur Tengah tahun 1958 dengan menurunkan pasukan-pasukan AS di Libanon dan pasukan-pasukan Inggris di Yordania. Demikin pula halnya ketika AS dan Inggris memerangi Irak di tahun 2003

Itu tiada lain adalah salah satu contoh bahwa negara-negara kapitalis telah menjadikan dirinya sebagai polisi dunia untuk menerapkan Undang-Undang Internasional, atau apa yang mereka sebut sebagai Tata Dunia. Jelas ini merupakan aktivitas yang sangat mengerikan dan salah satu penyebab penderitaan dunia. Yaitu adanya Komunitas Internasional menurut konsep Eropa dan adanya apa yang mereka sebut sebagai Undang-Undang Internasional.

Karena itu, masalah ini harus diselesaikan untuk membebaskan dunia dan menyelamatkannya dari penderitaan.

Adapun untuk mengatasi masalah ini, jika memang harus dibentuk sebuah komunitas internasional pada masyarakat dunia, kita tidak boleh menganalogikan masyarakat dunia itu dengan masyarakat biasa. Sebuah masyarakat biasa haruslah diatur oleh sebuah organisasi yang mampu menghilangkan kezaliman dan persengketaan dan mampu menyelesaikan pertikaian di antara manusia. Karena itu, setiap masyarakat harus memiliki negara, pemerintahan, dan undang-undang. Demikian pula harus ada penerapan undang-undang yang bersifat memaksa terhadap warganya.

Adapun masyarakat internasional, ia adalah kumpulan dari komunitas-komunitas manusia –bukan kumpulan individu— yang di dalamnya terjadi interaksi di antara mereka. Setiap komunitas manusia dari komunitas-komunitas manusia ini memiliki kedaulatan dan kehendak secara mutlak tanpa batasan. Maka, pemaksaan pihak luar terhadap komunitas manusia atau negara ini, berarti merampas kedaulatannya, dan ini adalah perbudakan. Ini tampak dalam imperialisme, pemaksaan dominasi, dan pemaksaan dengan menggunakan kekuatan. Setiap larangan kepada sebuah komunitas atau sebuah negara untuk menerapkan apa yang mereka putuskan sendiri, adalah belenggu bagi negara tersebut dan pukulan yang melumpuhkan.

Karena itu, tidak boleh ada sebuah kekuatan di atas komunitas-komunitas manusia yang mempunyai kekuasaan

seperti halnya kekuasaan sebuah masyarakat. Dengan kata lain, tidak boleh sebuah masyarakat internasional yang menjadi sebuah masyarakat yang memiliki kekuasaan, yang berhak melakukan pengaturan urusan-urusan (*ri'ayah al-syu'un*). Maksudnya, tidak boleh ada sebuah negara internasional yang berkuasa atas sejumlah negara. Tidak boleh pula ditolerir adanya sebuah negara internasional yang memiliki kekuasaan atas sejumlah komunitas manusia. Sebaliknya komunitas-komunitas itu haruslah tetap merupakan komunitas-komunitas yang mempunyai institusi, kedaulatan, dan kehendaknya sendiri.

Jika memang harus mewujudkan sebuah komunitas internasional dari komunitas-komunitas manusia, maka ia wajib tidak berupa negara internasional. Komunitas ini pendiriannya wajib berasal dari siapa saja yang menghendakinya secara suka rela untuk menjadi anggotanya, bukan dibuat oleh negara tertentu yang memiliki konsep tertentu, atau oleh negara tertentu yang memiliki kekuatan melebihi negara yang lain.

Sebagaimana tidak boleh mendirikan sebuah negara internasional, sebaliknya pendirian komunitas internasional ini dilakukan oleh semua yang menginginkan berdirinya secara suka rela, tanpa melihat lagi jenis konsepnya, ukuran kekuatannya, dan jangkauan pengaruhnya. Demikian pula kepada semua negara yang tidak ikut mendirikan komunitas internasional ini, diberikan kebebasan untuk bergabung di dalamnya kapan pun mereka mau. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan para pendiri komunitas, dan juga memiliki kebebasan untuk meninggalkan komunitas itu kapan pun mereka kehendaki. Tidak boleh ada pemaksaan penerapan ketetapan-ketetapan komunitas dengan kekuatan militer. Dengan demikian komunitas internasional ini akan menjadi komunitas internasional sejati. Bukan seperti keluarga internasional tertentu yang secara bohong dan dusta disebut Keluarga Internasional, dan bukan pula sebuah negara internasional yang secara bohong dan dusta disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ini dari sisi komunitas. Sedangkan dilihat dari sisi undang-undang, komunitas internasional ini –dan juga negara-negara di dunia— tidak boleh memiliki Undang-Undang Internasional. Yang dimiliki komunitas internasional itu hanyalah undang-undang administratif saja yang mengatur urusan-urusan administratif dan mendeskripsikan tata kerjanya. Undang-undang administratif ini disepakati atau diganti atas dasar pendapat mayoritas. Undang-undang administratif ini juga dapat dikoreksi sesuai fakta atau sesuai tuntutan-tuntutan fakta.

Adapun yang disebut **Undang-Undang Internasional**, maka ia tidak boleh ada dan tidak boleh dibuat. Karena undang-undang adalah perintah penguasa. Padahal tidak mungkin ada sebuah negara atau penguasa internasional. Bahkan tidak boleh ada sebuah negara internasional yang mempunyai kekuasaan atas seluruh negara. Karena di samping ia mustahil adanya, kalau pun ada pasti akan menyulut banyak perang dan konflik berdarah. Karena itu, tidak boleh dibentuk sebuah negara internasional atau kekuasaan internasional.

Jadi, tidak boleh ada atau tidak boleh dibuat Undang-Undang Internasional dengan tiga alasan berikut:

(1) Bahwa undang-undang adalah perintah penguasa. Padahal tidak ada satu penguasa yang berkuasa atas seluruh negara di dunia atau masyarakat internasional. Dengan demikian, tidak boleh ada Undang-Undang Internasional dan memang tidak ada Undang-Undang Internasional ini sejak dari asasnya;

(2) Bahwa undang-undang itu wajib diterapkan, maka harus ada satu kekuasaan untuk menerapkannya. Padahal tidak boleh ada satu kekuasaan internasional yang menerapkan perintah-perintahnya dengan kekuatan militer atas seluruh negara-negara di dunia. Karena yang demikian itu akan mendatangkan banyak perang dan konflik berdarah;

(3) Bahwa undang-undang itu adalah untuk mengatur interaksi-interaksi. Sementara interaksi-interaksi internasional muncul di antara komunitas-komunitas manusia secara suka rela. Dua negara atau lebih, masing-masing mengatur interaksinya sesuai kepentingan keduanya dan kerelaan keduanya. Interaksi ini bukan interaksi yang lain antara dua negara yang lain atau beberapa negara yang lain. Dengan demikian, yang mengatur interaksi ini adalah kesepakatan, bukannya undang-undang. Interaksi-interaksi yang terjadi secara nyata pun tidaklah diatur kecuali dengan kesepakatan. Jadi, tidak ada Undang-Undang Internasional yang mengatur interaksi seluruh negara. Atas dasar ini semua, tidak boleh ada sebuah Undang-Undang Internasional.

Dapat ditambahkan bahwa mayoritas manusia, hingga di Barat sekalipun, mengingkari adanya sebuah undang-undang internasional yang berlaku secara umum. Mereka pun mengingkari keterikatan seluruh negara dengan suatu undang-undang internasional. Dengan kata lain, mereka mengingkari pemaksaan atas seluruh negara untuk menerapkan sebuah undang-undang internasional.

Maka sejak munculnya ide Undang-Undang Internasional telah merebak perbedaan pendapat di antara ahli hukum Barat seputar realitas prinsip-prinsipnya. Kebanyakan mereka ragu dalam hal daya paksanya. Immanuel Kant dan Friedrich Hegel di Jerman, juga Thomas Hobbes dan John Austin serta para pengikutnya di Inggris, mengingkari adanya sebuah undang-undang internasional yang bersifat umum. Pendapat ini diikuti oleh kebanyakan ahli hukum Barat. Bahkan para ahli hukum Barat yang mengatakan adanya undang-undang internasional, mereka tidak mengatakan undang-undang internasional itu sifatnya seperti undang-undang yang wajib diterapkan. Mereka mengatakan bahwa undang-undang internasional itu hanyalah kaidah moral semata-mata yang tidak berimplikasi hukum apa

pun bagi orang-orang yang tidak melaksanakannya. Bahkan orang-orang yang berusaha mencari-cari alasan untuk menafsirkan legalitas Undang-Undang Internasional, menafsiran mereka menunjukkan bahwa Undang-undang Internasional sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah konvensi internasional. Karena itulah hanya segelintir pemikir, bahkan di Barat, yang mengatakan adanya undang-undang internasional yang berlaku secara umum. Yang mungkin mereka buktikan keberadaannya hanyalah konvensi internasional, tidak ada yang lain.

Konvensi yang dikenal di tengah-tengah masyarakat manusia memang ada. Di antaranya berupa kebiasaan umum pada semua masyarakat sejak dulu hingga kini, seperti tidak bolehnya membunuh duta besar, atau apa yang disebut kekebalan diplomatik. Di antaranya ada kebiasaan khusus pada masyarakat tertentu seperti di Arab, seperti tidak bolehnya menghalangi siapapun untuk mengunjungi Baitul Haram. Konvensi ini tidak diragukan lagi memang ada. Tapi itu bukanlah undang-undang melainkan hanyalah kesepakatan-kesepakatan yang berlaku disebabkan berulang kalinya kejadian tertentu pada seluruh masyarakat ataupun masyarakat tertentu. Dengan demikian konvensi internasional itu memang ada sedangkan undang-undang internasional yang berlaku secara umum sama sekali tidak ada.

Tinggal masalah penerapan Undang-Undang Internasional dengan cara kekuatan militer. Penerapan dengan kekuatan militer ini, ataupun pemaksaan atas penerapannya, tidak boleh terjadi. Karena jika penerapan ini dilakukan oleh sebuah kekuasaan internasional atau sebuah negara internasional, itu hal yang mustahil karena negara internasional tidak pernah ada. Jika penerapan ini dilakukan oleh sekumpulan negara adidaya, yaitu dua atau lebih negara, itu adalah sebuah kezaliman, bukan penerapan undang-undang. Sebab, andaikan salah satu dari dua atau beberapa negara yang melaksanakan undang-undang itu menyalahi undang-undang, maka negara yang lain tidak mungkin

menerapkannya atas negara tersebut, karena yang demikian itu berarti perang. Andaikan dua atau beberapa negara yang menerapkannya menyalahi undang-undang tersebut, lalu siapa yang menerapkannya? Jawabannya secara pasti, tidak ada. Dengan demikian penerapan undang-undang oleh negara-negara adidaya terhadap negara-negara kecil atau negara-negara lemah adalah suatu bentuk kezaliman, bukan penerapan undang-undang internasional. Jadi jelaslah bahwa tidak ada penerapan undang-undang internasional secara umum atas seluruh negara. Karena itu, berpikir untuk menerapkan undang-undang internasional dengan kekuatan militer adalah tidak benar, sebab itu tidak lain adalah kezaliman.

Dari semua penjelasan di atas, jelaslah bahwa tidak benar mewujudkan Undang-Undang Internasional, bahkan ia tidak mungkin terwujud secara nyata. Yang ada hanyalah kesepakatan-kesepakatan yang terjadi antar negara dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku berkenaan dengan kesepakatan-kesepakatan tersebut atau dengan interaksi-interaksi yang ada, baik dalam kondisi perang maupun damai di antara komunitas-komunitas manusia.

Karena itu, apabila harus diwujudkan sebuah komunitas internasional, maka yang ada hanyalah undang-undang administratif. Komunitas internasional itu aktivitasnya adalah meneliti konvensi-konvensi internasional, penyimpangan-penyimpangannya, termasuk juga konvensi-konvensi yang berkenaan dengan kesepakatan-kesepakatan internasional, baik pembentukannya, penerapannya, atau pembubarannya, dan yang semisal itu. Tetapi tidak semua konvensi internasional tersebut diambil. Yang diambil hanyalah konvensi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat internasional yang membentuk komunitas internasional.

Kemunculan konvensi ini tidak didasarkan pada keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh beberapa negara, sebab ini salah dan berbahaya. Konvensi ini muncul karena negara-negara itu mengikutinya dalam waktu yang lama sampai menjadi sebuah

ketetapan, dan negara-negara tersebut meyakini dengan kesadaran sendiri bahwa konvensi tersebut harus diikuti.

Adapun mengapa negara-negara tersebut mengikutinya, maka itu terjadi karena berulang-ulangnya suatu prinsip, perkara, atau sebuah konsep yang dianggap sebagai konvensi. Karena perbuatan manusia dan kesepakatan mereka atas suatu hal tidaklah membentuk konvensi hanya karena hal itu dilakukan atau disepakati, tetapi harus adanya pengulangan-pengulangan sehingga menjadi kebiasaan umum. Kebiasaan umum inilah yang akan diteliti oleh komunitas internasional pada saat mereka mengamati persengketaan internasional dan perselisihan-perselisihan yang terjadi antar beberapa negara. Konvensi internasional dalam makna yang sebenarnya ini akan menjadi pertimbangan pada saat ada upaya menyelesaikan suatu persengketaan internasional.

Konvensi internasional ini tidak boleh diterapkan dengan cara kekuatan militer, tetapi berdasarkan pendapat umum dan sanksi moral. Sebab negara-negara yang bersekutu dalam komunitas internasional tidak akan menganggap sebuah prinsip atau perkara tertentu menjadi konvensi internasional, kecuali jika sudah terbukti ia berubah menjadi sebuah konvensi. Pada saat itulah, keyakinan berbagai negara bahwa konvensi tersebut wajib diikuti akan muncul. Jadi tidak dibutuhkan lagi penerapan dengan kekuatan militer.

Lebih dari itu, kekuatan pendapat umum yang menentang negara yang menyalahi konvensi, dengan sendirinya akan memaksa negara tersebut untuk taat atas dasar kesadaran sendiri, yang bahkan lebih kuat daripada paksaan yang datang dari luar. Begitu pula rasa takut suatu masyarakat terhadap kecaman karena telah menyalahi konvensi umum, akan lebih berpengaruh daripada rasa takut akibat penerapan dengan cara fisik. Oleh karena itu, biarlah pendapat umum dan sanksi moral itu nantinya yang akan mengatur penerapan kesepakatan-kesepakatan sebuah komunitas. Inilah metode penerapannya.

Adapun penderitaan dunia akibat negara-negara adidaya, sebenarnya bukan karena negara-negara tersebut adalah negara adidaya, melainkan karena berkoalisinya negara-negara tersebut dan berkumpulnya mereka untuk membagi-bagi kepentingan dan manfaat. Koalisi inilah yang menjadi biang keladi penderitaan. Karena itu, solusi masalah ini harus difokuskan pada koalisi negara-negara adidaya tersebut, bukan difokuskan pada keberadaan negara tersebut sebagai negara adidaya.

Aliansi Suci (*The Holy Alliance*, 1815) adalah koalisi pertama dari negara-negara adidaya yang didirikan untuk membagi-bagi kepentingan dan manfaat di antara negara-negara tersebut. Aliansi itu dimaksudkan untuk mempertahankan tahta raja-raja agar tetap stabil, menumpas gerakan revolusi yang menentang raja-raja tersebut, menentang aktivitas tertentu yang telah mereka sepakati, serta melancarkan intervensi terhadap negara-negara di dunia dengan dalih adanya ancaman terhadap keamanan dan ancaman terhadap sistem yang ada. Koalisi ini telah mendatangkan bencana bagi dunia dan juga bagi benua Eropa sendiri.

Memang benar, bangsa-bangsa Eropa telah mampu memukul pengaruh aliansi ini dan melumpuhkan kekuatannya. Bangsa-bangsa Eropa telah mengobarkan revolusi-revolusi dan membatalkan kesepakatan-kesepakatan aliansi tersebut. Tetapi pemikiran tentang koalisi negara-negara adidaya untuk membagi-bagi kepentingan dan kemanfaatan tetap mencengkeram dunia sampai sekarang. Perancis memang telah memberontak, menghapuskan pemerintahan monarki, dan mendeklarasikan pemerintahan republik. Belgia juga memberontak dan memisahkan diri dari Belanda. Bangsa Jerman pun mampu menghancurkan negara-negara kecil yang sebelumnya terpisah-pisah lalu mendirikan kesatuan Jerman. Semua ini adalah bentuk perlawanan terhadap aliansi tiga kerajaan tersebut (Prusia, Rusia, dan Austria). Tetapi sesudah berubahnya sistem yang ada, negara-negara adidaya sendiri tetap berpegang teguh dengan ide koalisi

internasional. Koalisi inilah yang telah menyulut Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Memang dengan kesepakatan AS dan Rusia (Uni Sovyet), mereka berhasil menghilangkan dua koalisi dunia —yaitu Blok Komunis dan Kapitalis— serta menjauhkan bahaya Perang Dunia III, setelah adanya kesepakatan Kruschev dan Kennedy, tahun 1961 di Wina. Tetapi keduanya menghilangkan dua koalisi itu dengan membentuk koalisi baru. Karena itu, tidak tepat kalau dikatakan bahwa AS dan Soviet telah menyelesaikan masalah koalisi antar negara adidaya. AS dan Soviet hanya mengalihkan koalisi ini untuk kepentingan mereka berdua dengan jalan membentuk koalisi baru di antara keduanya dan memunculkan bahaya baru, yaitu terpolarisasinya dunia menjadi dua negara adidaya. Ini tentu membahayakan konstelasi internasional.

Dengan demikian, AS dan Soviet yang seharusnya menyelesaikan masalah koalisi internasional, kenyataannya malah memperumit masalah tersebut, membuat koalisi baru yang kokoh, dan menjauhkan peluang negara-negara kecil untuk mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan problem-problemnya andaikata dua negara tersebut tidak menjadi satu koalisi. Koalisi dua negara ini telah menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi politik internasional.

Jelaslah, setiap kali koalisi semacam ini ada, niscaya akan menimbulkan bahaya bagi perdamaian. Bahkan koalisi ini akan membahayakan negara-negara lain baik negara kecil maupun negara adidaya, baik koalisi itu dalam bentuk tradisional di mana masing-masing negara berbagi harta rampasannya secara sama rata, maupun dalam bentuk moderen, di mana negara adidaya nomor satu (sekarang AS) mendominasi negara-negara anggota koalisinya untuk mewujudkan kepentingannya sendiri sebagai prioritas utama, menguasai semua atau sebagian besar harta rampasan, dan tidak menyisakan anggota-anggota koalisi lain kecuali sedikit. Ini seperti yang terjadi pada koalisi negara-negara pada Perang Teluk II, ketika Irak menduduki Kuwait, kemudian

AS melancarkan invasinya yang sangat brutal pada permulaan tahun 90-an abad lalu dan berkoalisi dengan sekitar 30 negara. Demikian pula halnya dengan invasi AS terhadap Irak pada permulaan tahun 2003 ketika AS dan sekitar 30 negara sekutunya menduduki Irak atas nama "koalisi multi nasional".

Sesungguhnya semua koalisi antar negara —bagaimana pun juga bentuknya— telah menimbulkan bahaya yang sangat luas jangkauannya dalam kancah internasional. Karena itu, harus ada solusi yang segera terhadap koalisi antar negara ini, baik yang terbentuk dari negara-negara adidaya, maupun dari negara adidaya dan negara kecil.

Apa solusi itu? Menurut kami solusinya tidak mungkin ada kecuali dengan mengubah pemahaman (*mafhum*) dari asasnya. Sebab, perbuatan manusia dalam kehidupan ini akan berjalan sesuai dengan pemahamannya tentang kehidupan. Maka, harus diubah lebih dulu pemahaman pada bangsa-bangsa yang membentuk negara-negara adidaya, yang meyakini ide koalisi internasional. Setelah itu barulah dihilangkan eksistensi koalisi-koalisi internasional ini. Selama pemahaman ini tidak diubah, penderitaan dunia akibat negara-negara adidaya akan tetap ada bahkan bisa bertambah-tambah. Adapun cara mengubah pemahaman adalah dengan mewujudkan opini umum internasional yang menentang koalisi-koalisi. Inilah solusi yang efektif untuk menghilangkan koalisi antar negara adidaya.

Bukti efektifnya solusi ini adalah sebagai berikut. Ide imperialisme atas negara-negara lemah pada abad ke-19 telah menjadi kebanggaan dan kemuliaan bagi semua negara Eropa, baik negara kecil maupun adidaya. Mereka berlomba-lomba untuk menjajah berbagai bangsa dan umat secara gila-gilaan. Tidaklah berbeda antara Inggris dan Belanda, Jerman dan Belgia, antara Perancis dan Spanyol. Seluruh negara-negara Eropa keluar untuk menjajah bangsa-bangsa.

Namun, ketika berdiri negara komunis di Rusia sesudah Perang Dunia I, Rusia mengadopsi ide untuk menyerang dan

menghancurkan imperialisme dengan ganas dan keras. Rusia juga mendorong bangsa-bangsa di dunia untuk melawan imperialisme dan memprovokasi mereka untuk melawan para penjajah.

Pada saat terjadinya Perang Dunia II, telah muncul opini umum yang kuat di dunia untuk menentang imperialisme. Karena itu, dalam Piagam PBB disusun pasal-pasal yang berkaitan dengan penghentian penjajahan di seluruh dunia. Ide untuk membebaskan diri dari penjajahan akhirnya tersebar luas sehingga negara-negara imperialis akhirnya mundur dari jajahannya. Di bawah tekanan opini umum dunia, negara-negara imperialis terpaksa memberikan kebebasan dan kemerdekaan wilayah-wilayah jajahannya, meskipun sebagian negara imperialis menjadikan opini umum itu untuk mengubah gaya penjajahannya.

Tapi bagaimanapun juga, opini umum telah mampu mengubah pandangan tentang imperialisme. Begitu pula opini umum itu telah mengubah kondisi negara-negara adidaya, atau tepatnya kondisi ide koalisi negara-negara adidaya.

Karena itu, tidak ada yang dapat dilakukan oleh negara-negara yang mengalami penderitaan dan kesengsaraan akibat koalisi negara-negara adidaya, kecuali melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk melawan ide koalisi itu dengan perlawanan sekeras-kerasnya sampai ide itu hancur dari muka bumi.

Akan tetapi, menghancurkan ide koalisi negara adidaya secara total membutuhkan sebuah negara yang kuat yang mengadopsi rencana ini. Selagi negara-negara adidaya sekarang ini tetap mendukung ide koalisi itu dengan berbagai macam cara untuk melayani kepentingan mereka sendiri, akan sangat sulit bagi negara-negara yang menderita akibat koalisi untuk melenyapkan ide koalisi. Kecuali jika mereka berhasil menegakkan sebuah negara yang kuat yang mengadopsi ide penghancuran koalisi negara adidaya. Barangkali tegaknya Daulah Islam adalah satu-satunya harapan bagi negara-negara yang tertindas untuk membebaskan diri dari ide koalisi.

Tinggal masalah imperialisme atau perampasan kekayaan bangsa-bangsa dan penghinaan bangsa-bangsa. Meskipun dunia telah cukup lumayan melakukan langkah perlawanan terhadap ide ini, tetapi tak diragukan lagi imperialisme tetap menjadi aktivitas paling berbahaya yang menimbulkan penderitaan bagi bangsa-bangsa yang lemah. Imperialisme juga tetap menjadi aktivitas yang paling banyak menimbulkan bahaya bagi stabilitas regional dan internasional. Krisis Kongo yang berlangsung bertahun-tahun —bahkan Kongo tetap menjadi wilayah jajahan sampai sekarang— begitu pula krisis di Timur Tengah dewasa ini, tiada lain hanyalah contoh yang menunjukkan bahaya imperialisme atas stabilitas. Karena itu, menyelesaikan masalah imperialisme merupakan salah satu perkara yang paling mendesak.

Sesungguhnya imperialisme adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ideologi kapitalisme. Bahkan imperialisme adalah metode bagi penerapan konsep (*fikrah*) ideologi kapitalisme. Karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengatasi imperialisme secara fundamental, kecuali dengan melawan ideologi kapitalisme dan menghilangkannya dari muka bumi. Harus dikerahkan segala daya upaya untuk menghapuskan dan menghancurkan kapitalisme itu.

Komunisme telah melakukan langkah untuk mengatasi imperialisme dan menentang kapitalisme. Tetapi komunisme melangkah dengan pemikiran yang salah dan perlawanan yang cacat. Sebab, komunisme menentang ide pemisahan agama dari kehidupan dengan ide evolusi materialisme (materialisme dialektis dan materialisme historis). Padahal ide evolusi materialisme adalah akidah yang salah, yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ide tersebut tidak pernah diterima di tengah masyarakat kapitalisme. Lebih-lebih lagi, jika ide ini diyakini oleh orang, maka ide ini tidak akan berpengaruh terhadap perilaku orang itu dalam kehidupannya. Sebab, orang yang meyakini ide evolusi materialisme tidak akan mendapat bahaya jika diterapkan kepadanya ide pemisahan agama dari negara. Karena ide

pemisahan agama dari negara dapat dianut baik oleh orang yang mengakui adanya Allah maupun yang mengingkari keberadaan Allah. Ide pemisahan agama dari negara ini bukan berarti atheis ataupun iman, melainkan hanya tidak menggunakan aturan agama dalam urusan negara. Dan ini tidak akan berpengaruh terhadap perilaku orang yang meyakini ide evolusi materialisme. Dari sini, dapat kita simpulkan bahwa akidah komunisme tidak mampu berpengaruh terhadap masyarakat kapitalisme dan tidak mampu memunculkan perubahan apapun.

Perlawanan komunisme terhadap kapitalisme bermula dari pemikiran Karl Marx dan para filosof komunis sesudahnya. Ide ini telah melahirkan orang–orang yang meyakininya baik sebagai individu maupun kelompok. Akan tetapi hanya dengan kajian dan telaah sederhana, ide ini terbukti belum mampu melahirkan sebuah bangsa yang seluruhnya meyakini ide ini. Lebih dari itu metode mereka untuk merealisasikan ide ini melalui sebuah institusi, yakni sebuah negara komunis, adalah metode yang salah dan utopis.

Metode itu salah karena menjadikan pembentukan negara sebagai metode untuk akhirnya mencapai penghapusan negara secara menyeluruh. Metode itu juga utopis karena menginginkan revolusi internasional yang dimulai dari negara-negara industri maju kemudian menyebar ke seluruh dunia. Karena utopis itulah, Lenin terpaksa menyimpang dari metode itu dengan dalih reinterpretasi terhadap metode komunisme. Lenin mendirikan negara komunis di Rusia, padahal waktu itu sektor industri Rusia masih terbelakang dibandingkan Eropa. Lenin pun hanya mendirikan negara komunis di Rusia saja.

Sepertiga abad kemudian, para pengganti Lenin bersekutu dengan negara imperialis terbesar, yakni AS. Dengan kata lain Rusia telah bersekutu dengan imperialisme. Hasil persekutuan ini adalah runtuhnya komunisme secara total, hancurnya negara komunis dari muka bumi, dan gagalnya komunisme mewujudkan target-targetnya.

Karena itu, harus ada solusi lain untuk melawan kapitalisme dan menghancurkan imperialisme. Dan tidak ada yang memiliki kemampuan tersebut selain Islam. Bahkan Islam adalah satu-satunya solusi untuk menghapuskan imperialisme dan menghancurkan kapitalisme.

Solusi Islam ini bertumpu pada upaya menawarkan pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup ke kancah perdebatan dunia, dan memasukkan pemikiran menyeluruh itu ke dalam piagam komunitas internasional yang akan melaksanakan konvensi internasional dengan kerelaan dan bebas pilih. Perdebatan dunia tentang pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup inilah yang akan mengubah berbagai konsep, menghilangkan konsep-konsep yang keliru, dan meluruskan konvensi internasional. Sedang imperialisme adalah suatu konsep hidup tertentu. Imperialisme tidak akan bisa dihancurkan, kecuali dengan mengubah konsep hidupnya.

Memang benar, opini umum internasional di dunia yang menentang imperialisme telah mampu mempengaruhi imperialisme. Akan tetapi ia belum mampu menghancurkan dan melemahkan eksistensi imperialisme. Yang dihasilkan hanyalah mengubah cara penjajahan. Negara-negara terjajah di Afrika, Asia dan Amerika Latin tetap terjajah meskipun telah diberi kemerdekaan. Negara-negara terjajah ini tidak merdeka kecuali dengan revolusi-revolusi serta perang-perang regional dan internasional. Tapi selama negara-negara adidaya yang ada di dunia ini tetap meyakini imperialisme sebagai pemikirannya dan menggunakan kekuatan untuk mewujudkannnya, tidak akan ada jalan untuk menghilangkan penjajahan di muka bumi ini kecuali dengan menghancurkan ide ini –sebagai sebuah konsep kehidupan— dalam jiwa para penganutnya.

Memang benar, imperialisme harus dilawan secara fisik, opini umum yang menentangnya harus dilancarkan terus menerus, dan upaya serius harus terus ditingkatkan untuk

melawan imperialisme. Tapi, ini bukan penyelesaian efektif. Penyelesaian yang efektif hanyalah dengan menawarkan Islam sebagai pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup di medan perdebatan dunia yang dapat dijangkau oleh seluruh umat manusia dan bangsa, serta meletakkan pemikiran menyeluruh itu secara internasional sebagai objek pembahasan dan perdebatan di antara seluruh negara, khususnya komunitas internasional. Inilah satu-satunya solusi yang efektif terhadap imperialisme. Tetapi solusi ini tidak mungkin dapat diterapkan secara praktis kecuali dengan adanya Daulah Islam yang kuat di panggung internasional.

Inilah tiga perkara yang menyebabkan penderitaan dunia. Tiga perkara itu pula yang menghalangi dunia untuk melangkah di atas jalan menuju kebahagiaan. Dan inilah pula cara mengatasi tiga penderitaan tersebut.

Namun mengatasi sebab-sebab penderitaan itu bukan berarti setelahnya tidak terjadi lagi perang, kegelisahan, dan kekacauan. Bukan berarti setelah itu tidak ada lagi perangkap internasional, manuver-manuver politik, serta kebohongan-kebohongan yang busuk. Akan tetapi arti penyelesaian itu adalah menghilangkan mimpi buruk bersama yang sangat sangat berat untuk dihindarkan. Sebab, konflik antara negara adalah hal yang wajar. Begitu juga peperangan yang terjadi antar negara, munculnya manuver, dan kebohongan, merupakan hal yang wajar.

Tetapi itu hanya akan merupakan peristiwa yang kasuistik, atau merupakan peristiwa yang terbatas dan tidak akan sampai menjerumuskan seluruh dunia ke kancah peperangan sebagaimana yang terjadi pada dua perang dunia yang telah lampau. Demikian pula negara-negara adidaya tidak akan berpikir untuk menghisap darah bangsa-bangsa di dunia, sebagaimana yang terjadi sekarang.

Yang akan ada di dunia hanyalah apa yang menjadi tabiat manusia, yakni adanya petunjuk dan kesesatan, adanya kebaikan dan keburukan, adanya yang terpuji dan ada yang tercela, serta

adanya ini dan itu. Tidak seperti sekarang, di mana yang ada di dunia hanyalah keburukan melulu, khususnya sejak bercokolnya ide koalisi negara-negara adidaya, keluarga internasional, dan imperialisme hingga detik ini.

Maka itu, keburukan yang telah mencengkeram dunia selama berabad-abad itu haruslah dibatasi. Harus pula diwujudkan sebuah negara yang mampu membatasi keburukan itu, yaitu negara **Khilafah Islamiyah**.

BAGAIMANA MEMPENGARUHI POLITIK DUNIA

Barangkali ada yang bertanya, bagaimana mungkin individu-individu mampu mempengaruhi politik dunia. Atau lebih jauh lagi, bagaimana mungkin partai-partai akan bisa mempengaruhi orientasi negara-negara di dunia, terlebih lagi orientasi ini telah berurat berakar dan telah berlangsung beberapa abad? Jawabannya adalah, sesungguhnya setiap individu atau partai ketika mengikuti aktivitas politik dan memahami politik internasional, tidak boleh semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan intelektual serta kemewahan berpikir semata. Tidak boleh juga hanya untuk belajar dan menambah informasi semata, tetapi untuk mengatur urusan-urusan dunia serta memikirkan metode yang mampu mempengaruhi dunia.

Dengan kata lain, mengikuti aktivitas politik dan memahami politik internasional adalah untuk menjadi seorang politisi. Seorang politisi harus menjauhkan diri dari tujuan memperoleh kepuasan intelektual semata-mata, meskipun dia termasuk salah satu pemikir besar. Seorang politisi harus pula menjauhkan diri dari kecenderungan mendapatkan kemewahan berpikir semata-mata,

meskipun dia termasuk pemikir yang paling mendalam pemikirannya. Dia mengikuti perkembangan politik, memahami konstelasi internasional serta politik internasional, tiada lain karena dia adalah seorang politisi, bukan karena dia seorang intelektual atau pemikir.

Adapun maksud bahwa dia adalah seorang politisi, adalah dia beraktivitas untuk mengatur urusan-urusan dunia atau untuk mempengaruhi politik internasional. Ini dari satu sisi. Sedang dari sisi lain, maksudnya adalah dia melakukan aktivitas bukan sebagai individu, melainkan sebagai bagian dari umat, atau bagian organisasi, atau bagian negara. Jadi, meskipun dia bukan termasuk orang yang mampu menetapkan atau menerapkan kebijakan, tetapi dia termasuk orang yang berambisi untuk bisa menetapkan maupun menerapkan kebijakan tersebut, atau termasuk orang yang mengawasi orang-orang yang menetapkan atau menerapkan kebijakan.

Dengan cara demikianlah dia akan berpengaruh terhadap dunia, meskipun dia tetap sendirian sebagai individu yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan maupun menerapkan kebijakan. Apabila seseorang telah melakukan hal demikian, berarti dia telah menjadi orang yang berpengaruh, karena negara tempat dia berada akan dipengaruhi oleh orang-orang semisal dia, atau dia akan bergerak bersama orang-orang semisal dia untuk menjadikan negaranya berpengaruh dalam politik internasional dan konstelasi internasional.

Di sinilah seseorang akan mendapatkan apa yang dimaksudkan sebagai buah dari konsepsi politik (*mafahim siyasiyah*), yaitu menjadikan sebuah negara memiliki pengaruh terhadap politik dan konstelasi internasional, dengan jalan membentuk individu-individu yang memiliki kesadaran politik dan dapat memahami aktivitas-aktivitas politik yang terjadi di dunia, terlebih lagi aktivitas-aktivitas politik negara-negara adidaya.

Maka, langkah pertama untuk mempengaruhi politik dan konstelasi internasional adalah mengkristalisasikan konsepsi politik

(*mafahim siyasiyah*). Dan langkah pertamanya adalah mendorong individu-individu untuk mengikuti aktivitas-aktivitas politik serta memahami politik internasional. Dengan kata lain, langkah pertamanya ialah membentuk para politisi yang memahami politik dunia, yang selanjutnya secara alami akan memunculkan pengaruh sebuah negara terhadap politik dan konstelasi internasional. Dengan demikian tampaklah sejauh mana urgensi dan nilai konsep-konsep politik tersebut.

Hanya saja perlu diketahui, sebuah negara tidak akan menjadi negara yang memiliki eksistensi secara internasional kecuali dengan melakukan interaksi-interaksi dengan negara-negara lain. Hal itu karena individu dalam sebuah masyarakat tidak akan memiliki eksistensi di tengah mereka kecuali ia melakukan interaksi dengan individu-individu lain. Kedudukannya di tengah masyarakat dan komunitas manusia akan sesuai dengan interaksi-interaksi tersebut dan sesuai dengan pengaruhnya terhadap interaksi tersebut. Demikian pula halnya sebuah negara, sebab eksistensi negara adalah karena eksistensinya melakukan interaksi dengan negara-negara lain. Begitu pula kedudukannya akan naik dan turun sesuai dengan interaksinya dengan negara lain dan sesuai dengan pengaruhnya terhadap interaksi dengan negara-negara lain itu.

Daulah Islam adalah sebuah negara ideologis yang aktivitas pokoknya —atau tugasnya— adalah mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Maka, menjadi keharusan baginya, bahkan merupakan bagian integral dari pembentukannya, bahwa Daulah Islam harus memiliki kedudukan internasional serta memberikan pengaruh terhadap interaksi-interaksi internasional. Karena itu, tidak ada alternatif lain, hendaknya konsepsi politik para politisinya haruslah konsepsi politik internasional, bukan konsepsi politik lokal atau regional. Maksudnya, tidak ada alternatif lain bagi para politisi itu —dalam kedudukan mereka sebagai politisi muslim— kecuali mereka harus memiliki konsepsi politik dalam perspektif internasional, bukan dalam perspektif lokal atau regional saja.

Dengan demikian tidak ada alternatif lain bagi mereka —mengingat negara mereka adalah Daulah Islam— kecuali mereka harus mempunyai kesadaran politik yang sempurna. Sebab, keislaman mereka, sifat negara mereka sebagai negara Islam, serta tugas dasar dan pokoknya adalah mengemban dakwah Islam ke seluruh alam. Semua ini mengharuskan mereka memiliki kesadaran politik yang sempurna.

KESADARAN POLITIK

Kesadaran politik bukan berarti kesadaran akan situasi-situasi politik, konstelasi internasional, peristiwa-peristiwa politik, mengikuti politik internasional, atau mengikuti aktivitas-aktivitas politik. Itu semua adalah hal-hal yang melengkapi kesempurnaannya saja. Kesadaran politik tidak lain adalah pandangan terhadap dunia dengan sudut pandang khusus. Bagi kita (kaum Muslim) sudut pandang itu adalah Akidah Islam, yaitu sudut pandang ***Laa ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah***. Rasulullah SAW bersabda:

«أُمِرتُ أَنْ أُقَاتَلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا :لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا»

*"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata **Laa ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.** Jika mereka mengucapkannya berarti mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan alasan yang benar."*

Inilah kesadaran politik. Maka, memandang dunia tanpa sudut pandang khusus dianggap pandangan yang dangkal dan bukan kesadaran politik. Memandang dunia hanya pada wilayah lokal atau regional saja adalah sesuatu yang kualitasnya rendah dan bukan kesadaran politik. Kesadaran politik tidak akan sempurna kecuali dengan terpenuhinya dua unsur, yakni adanya pandangan pada dunia secara keseluruhan, dan pandangan ini bertolak dari sudut pandang khusus yang jelas batasannya, apa pun juga sudut pandang tersebut, bisa berupa ideologi tertentu, pemikiran tertentu, kepentingan tertentu, atau yang lainnya.

Inilah pengertian kesadaran politik itu sendiri secara umum. Bagi seorang muslim, sudut pandangnya tentu adalah Akidah Islam. Inilah kesadaran politik. Dan selagi faktanya demikian, maka seorang politisi secara alamiah akan terjun dalam perjuangannya untuk membentuk pemahaman tertentu tentang kehidupan dalam diri manusia lain, siapa pun juga dan di mana pun juga. Membentuk pemahaman yang seperti itu adalah tanggung jawab utama yang dibebankan pada pengemban kesadaran politik, yang tidak akan merasa puas kecuali dengan mencurahkan segenap kesungguhan dalam mengemban dan melaksanakan tanggung jawab ini.

Orang memiliki kesadaran politik akan mewajibkan dirinya untuk terjun dalam perjuangan melawan semua orientasi (arah pandang) yang bertentangan dengan orientasinya, dan melawan semua pemahaman yang bertentangan dengan pemahamannya. Pada waktu yang sama, dia terjun dalam perjuangan tersebut untuk memperkokoh pemahamannya dan menanamkan orientasinya. Dia berjalan dengan dua arah pada saat yang sama, yang tidak terpisah satu dengan lainnya dalam perjuangan, walau seutas rambut pun, karena keduanya adalah satu hal yang sama. Dia meruntuhkan dan juga menegakkan, menghancurkan dan juga membangun, memupuskan kegelapan dan juga menyalakan cahaya. Dia bagaikan "*api yang membakar kerusakan, dan cahaya yang menerangi jalan petunjuk*". Dia juga akan terjun dalam

upaya mengokohkan pemahaman, menanamkan orientasi, menerapkan pemikiran atas fakta, tidak melepaskan suatu peristiwa politik dari konteks situasi dan kondisinya, dan tidak pula menggunakan logika untuk menggeneralisir berbagai peristiwa politik.

Demikian pula dia akan terjun dalam perjuangan melawan semua orientasi yang lain, melawan semua kritikan yang menyerang pemahamannya tentang kehidupan, dan melawan semua pemahaman yang sudah mengakar yang muncul pada masa-masa kemunduran. Dia juga akan melawan pengaruh menyesatkan yang disebarkan oleh para musuhnya baik tentang pemikiran maupun tentang fakta, serta melawan pembatasan tujuan-tujuan yang tinggi dan target-target yang jauh dengan tujuan-tujuan parsial dan target-target kekinian.

Jadi, dia berjuang dalam dua front, yaitu internal dan eksternal; berjuang dengan dua arah, yaitu menghancurkan dan membangun; serta beraktivitas dalam dua bidang, yaitu politik dan pemikiran. Ringkasnya, dia terjun dalam kancah kehidupan pada medan yang paling luhur dan paling tinggi.

Maka dari itu, adalah suatu kepastian bahwa orang yang memiliki kesadaran politik akan berbenturan dengan berbagai problem pada saat dia bersinggungan dengan fakta, manusia, dan juga problem-problem kehidupan. Tidak ada bedanya antara wilayah regional internal dengan wilayah dunia internasional. Dalam benturan ini akan terlihat kekuatan yang akan menjadikan risalah yang diembannya dan sudut pandang khusus yang digunakannya untuk memandang dunia —sesuai pemahaman yang dia adopsi— sebagai asas dan juga pemutus. Inilah tujuan yang hendak dia capai dan target yang hendak dia wujudkan dengan sungguh-sungguh.

Hanya saja, karena dia berpegang teguh dengan sudut pandang yang khusus, juga karena adanya perasaan dan kecenderungan tertentu terhadap sudut pandang itu, baik kecenderungan itu muncul secara alamiah maupun ideologis, maka

dikhawatirkan –jika dia tidak menyadari— dia akan memberi warna atas realitas dengan warna yang dia inginkan, akan menafsirkan pemikiran sesuai dengan yang dia kehendaki, atau akan memahami berita sesuai dengan kesimpulan yang ingin dia peroleh.

Karenanya, dia wajib berhati-hati dari dominasi kecenderungannya terhadap berbagai pendapat dan berita. Sebab, kecintaan dirinya pada sesuatu, atau pada sebuah partai, atau pada sebuah ideologi, mungkin saja mengakibatkan dia menafsirkan suatu pendapat sebagai benar padahal dusta, atau mengkhayalkannya sebagai dusta padahal benar. Karena itu, seseorang yang berkesadaran politik harus mempunyai kejelasan akan perkataan yang dia ucapkan atau aktivitas yang dia lakukan.

Adapun yang berkaitan dengan fakta, baik berupa benda-benda maupun kejadian-kejadian, dia harus memahaminya secara inderawi dan menginderanya secara logis, namun harus tetap objektif sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang dia kehendaki. Adapun yang berkaitan dengan pemikiran, dia harus memahaminya secara objektif lalu memindahkan dari benaknya ke luar benak dan melihat dengan mata hatinya fakta yang dia gambarkan mengenai pemikiran itu, lalu memahami pemikiran itu sesuai dengan pandangannya terhadap fakta yang ditunjukkan pemikiran, secara objektif sesuai dengan apa yang ada, bukan sesuai dengan apa yang dikehendakinya.

Memang benar terkadang suatu ungkapan bisa berupa ungkapan metaforis *(majas)*, alegoris (perumpamaan), atau sindiran *(kinayah)*. Suatu ungkapan kadang berupa sebuah kalimat yang maknanya terdapat dalam kalimat itu, bukan terdapat dalam kata-kata yang menyusunnya. Namun semua itu tidak menghalanginya untuk memindahkan ungkapan itu ke luar benak, dan melihat fakta yang ditunjukkan oleh ungkapan itu sesuai dengan makna bahasa dan apa yang dikatakan oleh ahli bahasa tentang maknanya.

Maka, orang yang berkesadaran politik harus tetap berpegang pada kebenaran (fakta), akan tetapi sesuai dengan

cara pandang yang dia ambil dengan pasti dan yakin. Dia melihat fakta secara objektif, tetapi sesuai dengan pandangannya yang bersifat inderawi maupun pemikiran. Dengan demikian sempurnalah kesadarannya karena telah terpenuhi dalam dirinya sarana-sarana untuk menelaah segala sesuatu. Hanya saja, asas bagi segala sesuatu yang ada pada dirinya baik pandangan, pemahaman, penginderaan, maupun pengertian, harus tetap merupakan pandangan pada dunia dengan sudut pandang khusus.

Di sini bisa muncul pertanyaan, bagaimana mungkin ada kesesuaian antara sikap objektif seseorang yang berkesadaran politik –dari segi keterikatannya pada fakta dan memandang fakta apa adanya— dengan pandangannya terhadap dunia dari sudut pandang khusus? Jika ada pertanyaan semacam ini, maka ini hanya muncul dari pandangan yang dangkal terhadap segala sesuatu. Sebab, jika seseorang telah memiliki pemikiran yang mendalam dalam membahas sesuatu, dia tidak akan mengajukan pertanyaan seperti ini. Karena terdapat perbedaan antara fakta sesuatu, dengan hukum (penilaian) terhadap fakta sesuatu itu. Fakta sesuatu tidaklah ada perbedaan di antara manusia. Jika sesuatu itu berkaitan dengan penglihatan mata, maka setiap orang yang mempunyai penglihatan tentu akan melihatnya secara objektif, kecuali dia tertipu atau salah. Jika sesuatu itu berkaitan dengan indera lainnya, maka setiap orang yang mempunyai indera akan mampu menginderanya, baik dengan indera pengecap seperti rasa pahit atau manis, dengan indera peraba seperti lembut dan kasar, dengan indera pendengaran seperti suara-suara, maupun dengan indera penciuman seperti berbagai bau. Segala sesuatu fakta akan diindera oleh manusia secara objektif, meskipun berbeda-beda tingkat kepekaannya. Tetapi hukum atas segala sesuatu itulah yang berbeda-beda di antara manusia.

Maka, pandangan terhadap dunia dari sudut pandang khusus, berkaitan dengan hukum atas benda maupun perbuatan.

Sementara melihat realitas secara objektif, berkaitan dengan penginderaan dan pencerapan. Karena itu realitas harus dipandang secara objektif dan dipegangi hakikatnya apa adanya. Sementara itu, dunia, peristiwa-peristiwa, ataupun segala sesuatu, harus dipandang dari sudut pandang khusus.

Adapun bagaimana menerapkan kesadaran politik itu pada politik internasional, maka beberapa contoh berikut ini akan menunjukkan bagaimana memandang peristiwa-peristiwa politik dengan sudut pandang khusus. Sebagian contoh bisa dilihat dari politik Rasulullah SAW, politik abad pertengahan, dan politik kontemporer.

Rasulullah SAW memandang dunia dengan sudut pandang khusus, yaitu menyebarkan dakwah. Mengingat Quraisy adalah sebuah negara adidaya di Jazirah Arab dan merupakan pemimpin kaum kafir yang menentang dakwah Islam. Maka, Rasulullah SAW memusatkan perhatiannya untuk membatasi aktivitas politik dan perang terhadap Quraisy saja. Rasulullah SAW mengirim mata-mata untuk mengintai kafir Quraisy, menghadang perdagangannya, lalu terlibat pertempuran dengannya. Sementara itu, terhadap negara-negara (kabilah-kabilah) lain, Rasulullah SAW hanya membiarkan saja tanpa campur tangan, atau bersikap netral. Dengan demikian, aktivitas-aktivitas politik atau militer yang dilakukan Rasulullah SAW muncul dari pandangannya terhadap dunia dengan sudut pandang khusus.

Ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa Yahudi Bani Khaibar telah berunding dengan Quraisy untuk membentuk persekutuan guna menyerang Madinah, menghancurkan Muhammad SAW, dan menghapuskan Islam, maka Rasulullah SAW mengambil sudut pandang khusus, yakni berunding dan berdamai dengan Quraisy serta mencurahkan segala kemampuan untuk menghancurkan Khaibar.

Dari sudut pandang khusus inilah, Rasulullah SAW mengambil politik damai sebagai landasan segala aktivitasnya yang akan datang, selama politik itu tetap mengarah pada tujuannya.

Maka, seluruh aktivitas beliau pada tahapan ini —yaitu melakukan umrah, membiarkan berpalingnya orang-orang Quraisy dari beliau, bersikap lunak pada kekerasan Quraisy, hingga perselisihan beliau dengan sahabat-sahabatnya, dan sebagainya— adalah karena menjalankan politik damai ini. Maka, pandangan beliau terhadap aktivitas-aktivitas politik untuk menghadapi musuhnya, muncul dari cara pandang yang khusus, dan kemudian beliau menyesuaikan diri sesuai dengan tuntutan-tuntutan dari cara pandang yang khusus ini.

Dua contoh di atas adalah dari aktivitas-aktivitas Rasulullah SAW. Yang pertama bersifat umum, yaitu berkonsentrasi pada sebuah negara adidaya (Quraisy) yang merupakan pemimpin bagi musuh-musuhnya, berdasarkan sebuah sudut pandang khusus. Yang kedua bersifat khusus, yaitu berkonsentrasi pada target tertentu dan menjadikan target itu sebagai sudut pandang khusus. Rasulullah SAW kemudian melakukan berbagai aktivitas politik dan militer dari sudut pandang khusus ini. Dengan demikian, dapat dilihat bagaimana pandangan terhadap peristiwa-peristiwa politik dari sudut pandang khusus, akan mampu mendominasi segala aktivitas ataupun kegiatan. Dapat dilihat pula bagaimana andaikata pandangan terhadap peristiwa-peristiwa politik ini tidak bertolak dari sudut pandang yang khusus, tentu segala aktivitas yang dilakukan tidak akan memiliki makna.

Setelah Konferensi Berlin, negara-negara adidaya telah menjadikan perampasan milik Daulah Islam (Daulah Utsmaniyah) —bukan penghancuran Daulah Utsmaniyah— sebagai sudut pandang khusus mereka. Padahal mereka membahas dua hal itu secara bersamaan. Negera-negara adidaya itu menyepakati yang kedua (penghancuran Daulah Utsmaniyah) namun tidak menjadikannya sebagai sudut pandang khusus. Karena itu mereka menyesuaikan aktivitas-aktivitasnya sesuai dengan sudut pandang tersebut dan terjun dalam konflik politik satu sama lain yang berlangsung lebih dari satu abad lamanya. Meski konflik politik itu berakhir dengan runtuhnya Daulah Islam, namun peristiwa

ini tidak menjadi sudut pandang khusus yang digunakan negara-negara adidaya itu untuk memandang berbagai peristiwa dan aktivitas politik. Sebab, sudut pandang khusus yang menjadi titik tolak pandangan adalah sudut pandang yang menentukan politik negara-negara adidaya tersebut dan menentukan pandangannya terhadap aktivitas-aktivitas politik.

Pasca Perang Dunia II, AS mengatakan bahwa dunia ini adalah sebuah perusahaan dan AS memiliki saham terbesar dalam perusahaan ini. Karena itu, pengaturan perusahaan ini harus berada di tangan AS. Perkataan ini menjadi sudut pandang khusus yang digunakan oleh AS untuk memandang dunia. Maka, AS menyesuaikan segala aktivitasnya sesuai dengan sudut pandang khusus tersebut. AS pun memandang aktivitas-aktivitas politik yang terjadi di dunia ini dengan sudut pandang khusus tersebut. Pandangan yang bertolak dari sudut pandang khusus itulah yang menjadikan AS bersepakat bahkan bersekutu dengan Uni Soviet, sehingga dengan demikian menyulitkan Inggris dan Perancis. Setelah runtuhnya Uni Soviet, pandangan AS pun berubah. AS tidak hanya mempersulit Inggris dan Perancis tapi menyulitkan dunia internasional secara umum. Hal ini mencapai puncaknya tatkala AS mempersulit berbagai kesepakatan internasional yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. AS menarik diri dari protokol Kyoto dan menolak masuk ke dalam kesepakatan pencabutan ranjau darat dan pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional, serta kesepakatan-kesepakatan yang lain. Sudut pandang khusus yang digunakan AS untuk memandang dunia bertolak dari asas tidak adanya sekutu bagi AS yang berada dalam posisi setara. Maka, AS cenderung untuk menyendiri, kemudian berinteraksi dengan negara-negara adidaya lain dengan cara hegemoni dan supremasi.

Inilah cara bagaimana memandang peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di dunia dengan sudut pandang khusus. Sudut pandang khusus itu adakalanya bersifat umum, seperti menjadikan penyebaran dakwah sebagai asas bagi politik luar negeri. Atau

dengan kata lain, menjadikan penyebaran dakwah sebagai sudut pandang khusus yang digunakan untuk memandang dunia. Adakalanya sudut pandang khusus itu bersifat khusus, seperti membatasi permusuhan pada negara tertentu untuk mengalahkannya, ataupun lebih khusus dari itu, yaitu melibatkan diri dalam konflik politik tertentu supaya negara-negara lain dapat melihatnya sebagai teladan dari salah satu konflik politik kita.

Jadi, menerapkan pandangan dari sudut pandang khusus terhadap berbagai aktivitas dan peristiwa politik adalah perkara yang mudah. Cukup dengan hanya mempraktikkannya secara praktis; bahkan cukup dengan memahami peristiwa-peristiwa politik secara mendalam.

Dari sini menjadi jelas bahwa mengikuti perkembangan politik dan memahami konsep-konsep politik, harus menghasilkan pembentukan kesadaran politik. Dan kesadaran politik ini adalah suatu keharusan bagi aktivitas politik, bahkan suatu keharusan dalam upaya mempengaruhi peristiwa-peristiwa politik.

Jika kesadaran politik bagi negara-negara adidaya telah menjadi salah satu kebutuhan mendasar, dan mengetahui politik internasional telah menjadi santapan harian bagi para politisinya, maka wajib bagi generasi kaum Muslim –sedang mereka adalah generasi Daulah Islam— untuk menjadikan kesadaran politik sebagai hal pertama yang harus dimiliki di antara konsepsi politik. Wajib pula kesadaran politik itu menjadi asas aktivitas-aktivitas politik mereka. Wajib pula mereka berusaha agar kesadaran politik menjadi tersebar luas di antara manusia, dan menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat, bahkan menjadi santapan harian bagi para politisi.

Sebab, tugas mereka yang agung dan mendasar, adalah mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia serta menyebarkan petunjuk bagi umat manusia. Hal ini tidak akan terwujud, kecuali jika para pengembannya adalah para politisi, yang memandang dunia dengan sudut pandang khusus, serta mempunyai kesadaran politik yang sempurna.

Supaya kesadaran politik ini tidak dianggap berat bagi kaum Muslim dan tidak pula dianggap perkara sulit yang tidak mampu dimiliki kecuali oleh orang-orang cerdas dan terpelajar, mereka harus mengetahui bahwa kesadaran politik itu sangatlah sederhana. Kesadaran politik itu mudah dimiliki oleh seluruh manusia bahkan oleh orang buta huruf ataupun orang awam sekalipun. Sebab, kesadaran politik bukan berarti menguasai Islam secara keseluruhan atau menguasai apa yang harus menjadi sudut pandang khusus bagi dunia. Kesadaran politik tiada lain hanyalah pandangan ke arah dunia internasional –bagaimana pun juga pengetahuannya tentang hal itu, entah sedikit atau banyak— dan hendaknya pandangan itu bertolak dari sudut pandang khusus. Jadi yang penting dalam kesadaran politik adalah pandangan terhadap dunia internasional —meskipun hanya berupa satu aktivitas politik— dan hendaknya pandangan itu bertolak dari sudut pandang khusus yang tertentu. Hanya dengan adanya pandangan terhadap dunia dan sudut pandang yang khusus, sudah cukup menunjukkan adanya kesadaran politik.

Memang benar, kesadaran politik itu berbeda-beda tingkat kekuatan dan kelemahannya sesuai perbedaan pengetahuan tentang dunia dan peristiwa-peristiwa politik. Kesadaran politik itu berbeda-beda pula tingkatnya sesuai pengetahuan tentang sudut pandang khusus tersebut. Akan tetapi semuanya tetap merupakan kesadaran politik, yang akan melahirkan hasil yang sama meski berbeda-beda tingkatnya, yakni terangkatnya seseorang dari kedangkalan dalam politik dan terentaskannya dia dari kedangkalan pandangan dalam berbagai hal.

Atas dasar itu, kesadaran politik bukan hanya milik para politisi dan para pemikir saja secara khusus dan tidak boleh hanya menjadi milik mereka saja. Kesadaran politik itu sebenarnya bersifat umum dan memang harus bersifat umum. Mewujudkannya pada orang-orang buta huruf dan orang-

orang awam adalah mungkin, sebagaimana mungkin mewujudkannya di kalangan ulama dan kaum terpelajar. Bahkan wajib mewujudkan kesadaran politik itu meskipun secara garis besar di kalangan umat Islam secara keseluruhan. Sebab, umat adalah lahan yang dapat melahirkan tokoh-tokoh. Maka, lahan ini harus menjadi lahan bagi kesadaran politik hingga umat dapat melahirkan tokoh-tokoh dan mampu mengawasi penguasa, menghargai tokoh-tokoh, serta menghadapi bahaya-bahaya yang datang dari luar dengan kesadaran yang benar.

Adapun cara mewujudkan kesadaran politik pada individu-individu dan umat, adalah dengan melakukan pembinaan politik dalam pengertian politis, baik berupa aktivitas pembinaan pemikiran dan hukum Islam maupun dengan aktivitas mengikuti peristiwa-peristiwa politik. Pembinaan pemikiran dan hukum Islam ini bukanlah pembinaan teoritis semata-mata, melainkan pembinaan dengan menerapkan pemikiran dan hukum Islam itu pada fakta. Demikian pula mengikuti peristiwa-peristiwa politik. Aktivitas itu bukanlah seperti aktivitas jurnalis yang berusaha mengetahui berita, bukan pula seperti aktivitas pengajar yang mencari informasi, melainkan dengan memandang suatu peristiwa politik dengan sudut pandang khusus untuk kemudian menentukan hukumnya. Atau dengan mengaitkan peristiwa politik tersebut dengan berbagai peristiwa dan pemikiran lain, atau dengan mengaitkan peristiwa politik tersebut dengan aktivitas-aktivitas politik yang sedang dihadapi.

Pembinaan politik ini, yang dilakukan dengan membina ideologi dan politik, adalah jalan untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri umat dan individu-individu. Inilah yang akan menjadikan umat Islam mampu memikul tujuannya yang asasi dan tugasnya yang mendasar, yaitu mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dan menyebarkan petunjuk ke tengah-tengah umat manusia.

Maka dari itu, pembinaan politik di kalangan umat Islam harus dilakukan dalam jangkauan seluas-luasnya. Karena pembinaan politik itulah yang akan membentuk kesadaran politik di kalangan umat Islam dan yang akan dapat terus melahirkan politisi-politisi yang cerdas.

Jumadiy Ats-Tsaani, 1425H
Agustus, 2004 M